

TESIS

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
DENGAN SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan
Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal)**



Disusun Oleh :

**ERLINA BUDIARTI
NIM : 12.914.021**

**KONSENTRASI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

TESIS

**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN KONSTRUKSI
DENGAN SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan
Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal)**



Disusun Oleh :

**ERLINA BUDIARTI
NIM : 12.914.021**

**KONSENTRASI MANAJEMEN KONSTRUKSI
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal)



Diperiksa dan disetujui oleh :

Fitri Nugraheni, ST., MT., Ph.D

Dosen Pembimbing 1

Tanggal

Ir. Faisol AM., MS.

Dosen Pembimbing II

Tanggal

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal)



Disusun Oleh :

ERLINA BUDIARTI

NIM : 12.914.021

Telah diuji didepan Dewan Penguji
Pada tanggal
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Dosen Penguji,

(Fitri Nugraheni, ST., MT., Ph.D)

(Ir. Faisol AM., MS.)

(Setya Winarno, ST., MT., Ph.D.)

Yogyakarta,
Universitas Islam Indonesia
Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil
Ketua Program,

(Prof. Ir. Sarwidi, MSCE., Ph.D., IP-U.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Program “software” komputer yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya, bukan tanggungjawab Universitas Islam Indonesia.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dengan pencabutan gelar yang sudah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Yogyakarta, 2017
Yang membuat pernyataan,

ERLINA BUDIARTI
NIM : 12.914.021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Konstruksi Dengan Sistem Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal), sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

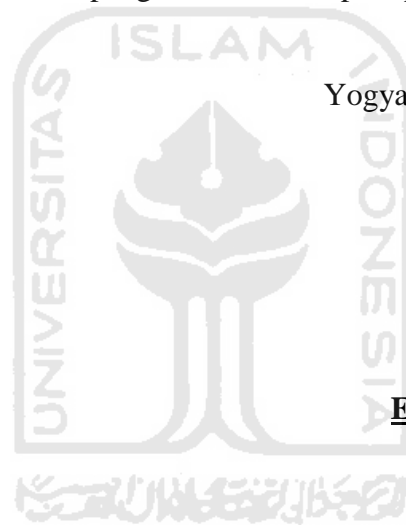
Pemilihan Proyek Pemberdayaan Masyarakat pada tiga macam jenis proyek (Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal) dikarenakan terdapat rincian pelaksanaan dan perbedaan pihak-pihak yang terlibat dalam masing-masing jenis proyek. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis pada masing-masing kegiatan manajemen konstruksi yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelelangan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Ir. Sarwidi, MSCE., Ph.D., IP-U., Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia.
2. Fitri Nugraheni, ST., MT., Ph.D, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tesis ini.
3. Ir. Faisol AM., MS., Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tesis ini.
4. Setya Winarno, ST., MT., Ph.D., Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam menyusun Tesis ini.
5. Seluruh Dosen beserta Staf Program Pasca Sarjana Magister Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia.
6. Teman-teman Program Pasca Sarjana Magister Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia Angkatan 2012.

7. Seluruh anggota keluarga (Ibu, Bapak, Randi, Bambang dan Ayu) yang sudah memberikan dukungan serta doa agar Tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
8. Rekan-rekan kerja di Kantor Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman.
9. Semua Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya Tesis ini.

Penulis sadar bahwa Tesis ini jauh dari kesempurnaan, Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang membuat Tesis ini menjadi lebih baik. Semoga Tesis ini bermanfaat dan menjadi bahan pengetahuan untuk para pembaca.



Yogyakarta,

2017

ERLINA BUDIARTI
NIM : 12.914.021

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxxiv
ABSTRAK.....	xxxv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Batasan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pendahuluan.....	7
2.2. Penelitian Terdahulu	7
2.2.1. Deskripsi/Paparan masing-masing Penelitian.....	7
2.2.2. Komparasi antar Penelitian.....	12
2.2.3. Kesimpulan Penelitian Terdahulu & Keaslian Penelitian.....	13
2.2.4. Tabel.....	14
2.3. Penelitian yang akan dilakukan.....	18
BAB III LANDASAN TEORI	
3.1. Pendahuluan.....	19
3.2. Manajemen.....	19

3.3.	Fungsi Manajemen.....	20
3.4.	Konstruksi.....	21
3.5.	Pengertian Proyek Konstruksi.....	22
3.6.	Jenis Proyek Konstruksi.....	22
3.7.	Ciri Umum Proyek Konstruksi.....	23
3.8.	Tahap-tahap Pelaksanaan Proyek Konstruksi.....	23
3.9.	Sumber Daya.....	29
3.10.	Definisi Manajemen Proyek	30
3.11.	Sasaran Manajemen Proyek Konstruksi.....	30
3.12.	Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	31
3.13.	Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.....	32
3.14.	Tahap-tahap Pelaksanaan Pemberdayaan.....	33
3.15.	Pedoman Teknis Metode Pembangunan Jalan Berbasis Tenaga Kerja.....	35
3.16.	Tahap Pelaksanaan Pembangunan Permukiman REKOMPAK di tingkat Kelurahan/Desa.....	38
3.17.	Pengaruh Kualitas, Waktu dan Biaya dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	40
3.18.	Analisis Standar Nasional Indonesia.....	41
3.19.	Dasar Hukum Pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Masyarakat.....	42

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1.	Subyek Penelitian.....	45
4.2.	Obyek.....	45
4.3.	Data dan Cara Pengumpulan Data.....	45
4.4.	Metode Analisa Data.....	46
4.5.	Tahap Penelitian.....	47
4.6.	Flow Chart.....	48
4.7.	Check List.....	49
4.8.	Matriks.....	50
4.9.	Kuesioner.....	55

BAB V DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1	Proyek-Proyek yang Dijadikan Bahan Penelitian.....	66
a.	Proyek yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar.....	66
b.	Proyek yang menggunakan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat.....	66
5.2	Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Aspal Berbasis Masyarakat.....	67
5.3	Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	73
5.4	Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	77
5.5	Penerapan Fungsi Manajemen Konstruksi dalam Aspek Mutu, Biaya, Waktu.....	82
a.	Penerapan fungsi manajemen konstruksi dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada proyek konstruksi jalan aspal berbasis masyarakat.....	82
b.	Penerapan fungsi manajemen konstruksi dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada proyek konstruksi saluran air limbah berbasis masyarakat.....	84
c.	Penerapan fungsi manajemen konstruksi dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada proyek konstruksi rumah tinggal berbasis masyarakat.....	86
5.6	Data Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Jalan Aspal.....	86
a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan jalan aspal...	87
b.	Perancangan proyek pembangunan jalan aspal.....	88
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan jalan aspal.....	90

	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan jalan aspal.....	91
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan aspal.....	93
5.7		Data Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah.....	94
	a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan saluran air limbah.....	94
	b.	Perancangan proyek pembangunan saluran air limbah.....	95
	c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan saluran air limbah.....	96
	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah.....	97
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah.....	99
5.8		Data Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal.....	100
	a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan rumah tinggal.....	100
	b.	Perancangan proyek pembangunan rumah tinggal.....	101
	c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan rumah tinggal.....	102
	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal.....	104
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal.....	105
5.9		Data Manajemen Konstruksi Terstandar pada Proyek Pembangunan Jalan Aspal.....	106
	a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan jalan aspal...	106
	b.	Perancangan proyek pembangunan jalan aspal.....	107

	c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan jalan aspal.....	109
	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan jalan aspal.....	110
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan aspal.....	111
5.10		Data Manajemen Konstruksi Terstandar pada Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah.....	113
	a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan saluran air limbah.....	113
	b.	Perancangan proyek pembangunan saluran air limbah.....	114
	c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan saluran air limbah.....	115
	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah.....	116
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah.....	118
5.11		Data Manajemen Konstruksi Terstandar pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal.....	119
	a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan rumah tinggal.....	119
	b.	Perancangan proyek pembangunan rumah tinggal.....	120
	c.	Pengadaan pelelangan/procurement proyek pembangunan rumah tinggal.....	122
	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal.....	123
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal.....	124
5.12		Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Jalan.....	126

a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan Jalan.....	126
b.	Perancangan proyek pembangunan jalan.....	132
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan jalan.....	139
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan jalan.....	146
e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan.....	154
5.13	Data Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Saluran Air Limbah.....	160
a.	Perencanaan/persiapan pembangunan saluran air limbah...	160
b.	Perancangan pembangunan saluran air limbah.....	165
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement pembangunan saluran air limbah.....	172
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan saluran air limbah.....	177
e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan pembangunan saluran air limbah.....	185
5.14	Data Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal.....	191
a.	Perencanaan/persiapan pembangunan rumah tinggal.....	191
b.	Perancangan pembangunan rumah tinggal.....	197
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement pembangunan rumah tinggal.....	204
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi pembangunan rumah tinggal.....	210
e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan pembangunan rumah tinggal.....	218

5.15	Analisis Data Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan Jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan.....	225
5.15.1	Tabel Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan Jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan.....	225
a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat.....	225
b.	Perancangan proyek proyek pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat.....	227
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat.....	230
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat.....	232
e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat.....	235
5.15.2	Analisis Data Perbandingan dan Pengambilan Kesimpulan pada Pelaksanaan Proyek dengan Sistem Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat.....	237
a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat.....	237
b.	Perancangan proyek pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat.....	240
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat	243
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat	246

e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat.....	249
5.16	Analisis Data Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Terstandar untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan Jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan.....	253
5.16.1	Tabel Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Terstandar untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan Jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan.....	253
a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan dengan manajemen terstandar.....	253
b.	Perancangan proyek proyek pembangunan dengan manajemen terstandar.....	255
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan dengan manajemen terstandar.....	257
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan dengan manajemen terstandar.....	258
e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan dengan manajemen terstandar.....	261
5.16.2	Analisis Data Perbandingan dan Pengambilan Kesimpulan pada Pelaksanaan Proyek dengan Sistem Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat.....	263
a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat.....	263
b.	Perancangan proyek pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat.....	265
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat	267

	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat	269
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat.....	272
5.17		Tabel perbandingan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal).....	275
	a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat.....	275
	b.	Perancangan proyek pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat.....	278
	c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat.....	282
	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat.....	285
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat.....	290
5.18		Hasil perbandingan antara manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal).....	319
5.19		Pembahasan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Terstandar dengan Landasan Teori (Proyek Pembangunan Jalan).....	322
	a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan jalan terstandar.....	322
	b.	Perancangan proyek pembangunan jalan terstandar.....	322
	c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan jalan terstandar.....	323

	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan jalan terstandar.....	324
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan terstandar.....	324
5.20		Pembahasan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Terstandar dengan Landasan Teori (Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah).....	325
	a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar.....	325
	b.	Perancangan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar.....	326
	c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan saluran air limbah terstandar.....	327
	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah terstandar.....	327
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar.....	328
5.21		Pembahasan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Terstandar dengan Landasan Teori (Proyek Pembangunan Rumah tinggal).....	329
	a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar.....	329
	b.	Perancangan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar.....	329
	c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan rumah tinggal terstandar.....	330
	d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal terstandar.....	331
	e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar.....	331

5.22	Pembahasan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat dengan Landasan Teori (Proyek Pembangunan Jalan Aspal).....	332
a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat.....	332
b.	Perancangan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat.....	333
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat.....	334
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat.....	335
e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat.....	335
5.23	Pembahasan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat dengan Landasan Teori (Proyek Pembangunan Saluran air limbah).....	336
a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.....	336
b.	Perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.....	337
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.....	337
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.....	338
e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.....	338
5.24	Pembahasan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat dengan Landasan Teori (Proyek Pembangunan Rumah Tinggal).....	339
a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat.....	339

b.	Perancangan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat.....	340
c.	Pengadaan /pelelangan/procurement proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat.....	341
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat.....	342
e.	Pengoperasian/hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat.....	342
5.25	Pembahasan Pelaksanaan Seluruh Proyek Manajemen Konstruksi Terstandar (Proyek Pembangunan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah dan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal) dengan Landasan Teori....	343
a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal terstandar.....	343
b.	Perancangan proyek pembangunan jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal terstandar.....	343
c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal terstandar.....	343
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal terstandar.....	344
e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal terstandar.....	344
5.26	Pembahasan Pelaksanaan Seluruh Proyek Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat (Proyek Pembangunan Jalan, Proyek Pembangunan Air Limbah dan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal) dengan Landasan Teori....	344
a.	Perencanaan/persiapan proyek pembangunan jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal berbasis masyarakat	344
b.	Perancangan proyek pembangunanj, saluran air limbah dan rumah tinggal berbasis masyarakat.....	344

c.	Pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal berbasis masyarakat.....	345
d.	Pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal berbasis masyarakat.....	354
e.	Pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal berbasis masyarakat.....	345
5.27	Pembahasan Pelaksanaan Seluruh Proyek Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat (Proyek Pembangunan Jalan, Proyek Pembangunan Air Limbah dan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal) dengan Tinjauan Pustaka	345
5.27.1	Hasil Penelitian yang dijadikan Tinjauan Pustaka.....	345
5.28	Pembahasan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Manajemen Konstruksi Terstandar dan Berbasis Masyarakat.....	347
a.	Pihak-pihak yang Terlibat dalam Manajemen Konstruksi Terstandar.....	347
b.	Pihak-pihak yang Terlibat dalam Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat.....	347
c.	Penilaian dari pihak-pihak terlibat dalam ke dua sistem manajemen.....	348
5.29	Pembahasan Penerapan Fungsi Manajemen Konstruksi Terstandar dan Berbasis Masyarakat dalam Aspek Mutu, Biaya dan Waktu.....	348
a.	Aspek mutu dalam proyek pembangunan jalan aspal.....	348
b.	Aspek mutu dalam proyek pembangunan saluran air limbah.....	349
c.	Aspek mutu dalam proyek pembangunan rumah tinggal...	350
d.	Aspek biaya dalam proyek pembangunan jalan aspal.....	351

e.	Aspek biaya dalam proyek pembangunan saluran air limbah.....	352
f.	Aspek biaya dalam proyek pembangunan rumah tinggal...	354
g.	Aspek waktu dalam proyek pembangunan jalan aspal.....	355
h.	Aspek waktu dalam proyek pembangunan saluran air limbah.....	356
i.	Aspek waktu dalam proyek pembangunan rumah tinggal..	357
5.30	Pembahasan Perbandingan antara Penerapan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat.....	358
a.	Pada tahap persiapan.....	358
b.	Pada tahap perancangan.....	359
c.	Pada tahap pengadaan/pelelangan/procurement.....	361
d.	Pada tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi.....	361
e.	Pada tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan.....	362
f.	Kendala.....	363
g.	Kelebihan.....	363
5.31	Pembahasan Rangkaian Kegiatan pada Pelaksanaan Proyek dengan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat.....	364
5.31.1	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Konstruksi Berbasis Masyarakat Pada Proyek Pembangunan Jalan Aspal.....	365
a.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap persiapan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat	365
b.	Matrik kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap perancangan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat.....	365
c.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat.....	366

d.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat.....	366
e.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat.....	367
5.31.2	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Konstruksi Berbasis Masyarakat Pada Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah.....	
a.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap persiapan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.....	367
b.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.....	367
c.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.....	368
d.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap kegiatan konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.....	368
e.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.....	368
5.31.3	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Konstruksi Berbasis Masyarakat Pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal.....	369
a.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap Persiapan proyek pembangunan rumah tinggal.....	369
b.	Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal.....	369

c. Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan rumah tinggal.....	370
d. Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal.....	370
e. Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal.....	370

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN.....	371
6.2 Saran.....	373

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	14
Tabel 5.1 Pihak Terlibat dalam Proyek Jalan Aspal Berbasis Masyarakat.....	67
Tabel 5.2 Pihak Terlibat dalam Proyek Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	73
Tabel 5.3 Pihak Terlibat dalam Proyek Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	77
Tabel 5.4 Penerapan fungsi Manajemen Konstruksi Proyek Jalan Berbasis Masyarakat.....	82
Tabel 5.5 Penerapan fungsi Manajemen Konstruksi Proyek Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	84
Tabel 5.6 Penerapan fungsi Manajemen Konstruksi Proyek Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	86
Tabel 5.7 Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan Aspal Berbasis Masyarakat.....	87
Tabel 5.8 Perancangan Proyek Pembangunan Jalan Aspal berbasis masyarakat.....	88
Tabel 5.9 Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan Aspal Berbasis masyarakat.....	90
Tabel 5.10 Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan Aspal Berbasis masyarakat.....	91
Tabel 5.11 Pengoperasian /Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Aspal Berbasis Masyarakat.....	93
Tabel 5.12 Perencanaan /Persiapan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	94
Tabel 5.13 Perancangan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	95
Tabel 5.14 Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	96

Tabel 5.15	Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	97
Tabel 5.16	Pengoperasian Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	99
Tabel 5.17	Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	100
Tabel 5.18	Perancangan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	101
Tabel 5.19	Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	102
Tabel 5.20	Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	104
Tabel 5.21	Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	105
Tabel 5.22	Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan Aspal Terstandar.....	106
Tabel 5.23	Perancangan Proyek Pembangunan Jalan Aspal Terstandar.....	107
Tabel 5.24	Pengadaan /Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan Aspal Terstandar.....	109
Tabel 5.25	Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan Aspal Terstandar.....	110
Tabel 5.26	Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Aspal Terstandar.....	111
Tabel 5.27	Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Terstandar.....	113
Tabel 5.28	Perancangan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Terstandar.....	114
Tabel 5.29	Pengadaan/Pelelangan /Procurement Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Terstandar.....	115
Tabel 5.30	Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Terstandar.....	116

Tabel 5.31	Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Terstandar.....	118
Tabel 5.32	Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Terstandar.....	119
Tabel 5.33	Perancangan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Terstandar....	120
Tabel 5.34	Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Terstandar.....	122
Tabel 5.35	Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Terstandar.....	123
Tabel 5.36	Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Terstandar.....	124
Tabel 5.37	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Jalan pada Tahap Perencanaan/Persiapan.....	126
Tabel 5.38	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Jalan pada Tahap Perancangan.....	132
Tabel 5.39	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Jalan pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement.....	139
Tabel 5.40	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Jalan pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.....	146
Tabel 5.41	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Jalan pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan.....	154
Tabel 5.42	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Saluran Air Limbah pada tahap Perencanaan/Persiapan.....	160
Tabel 5.43	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan	

	Saluran Air Limbah pada Tahap Perancangan.....	165
Tabel 5.44	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/ Procurement.....	173
Tabel 5.45	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.....	177
Tabel 5.46	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan.....	185
Tabel 5.47	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada Tahap Perencanaan/Persiapan.....	191
Tabel 5.48	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada Tahap Perancangan.....	197
Tabel 5.49	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada Tahap Pengadaan/ Pelelangan/Procurement	204
Tabel 5.50	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.....	210
Tabel 5.51	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan.....	218
Tabel 5.52	Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan jalan	

	Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan pada Tahap Perencanaan/Persiapan.....	225
Tabel 5.53	Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan pada Tahap Perancangan.....	227
Tabel 5.54	Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/ Procurement.....	230
Tabel 5.55	Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.....	232
Tabel 5.56	Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan.....	235
Tabel 5.57	Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Terstandar untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan pada Tahap Perencanaan/Persiapan.....	253
Tabel 5.58	Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Terstandar untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan pada Tahap Perancangan.....	255
Tabel 5.59	Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Terstandar	

	untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement.....	257
Tabel 5.60	Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Terstandar untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.....	258
Tabel 5.61	Perbandingan Pelaksanaan Manajemen Konstruksi Terstandar untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) dan Pengambilan Kesimpulan pada Tahap Pengoperasian/ Penyerahan Hasil Pekerjaan.....	261
Tabel 5.62	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan Jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) pada Tahap Perencanaan/Persiapan.....	275
Tabel 5.63	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan Jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) pada Tahap Perancangan.....	278
Tabel 5.64	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan Jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/ Procurement.....	282
Tabel 5.65	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan Jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.....	285
Tabel 5.66	Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat untuk Semua Jenis Proyek (Pembangunan Jalan Aspal, Saluran Air Limbah dan Rumah Tinggal) pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan	290

Tabel 5.67	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Persiapan Proyek Pembangunan Jalan Berbasis Masyarakat.....	365
Tabel 5.68	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Perancangan Proyek Pembangunan Jalan Berbasis Masyarakat....	365
Tabel 5.69	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan Berbasis Masyarakat.....	366
Tabel 5.70	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan Berbasis Masyarakat.....	366
Tabel 5.71	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Berbasis Masyarakat.....	367
Tabel 5.72	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Persiapan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat	367
Tabel 5.73	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Perancangan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	367
Tabel 5.74	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Pengadaan / Pelelangan / Procurement Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	368
Tabel 5.75	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat.....	368
Tabel 5.76	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat masyarakat.....	368
Tabel 5.77	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Persiapan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	369
Tabel 5.78	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Perancangan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis	

	Masyarakat.....	369
Tabel 5.79	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	370
Tabel 5.80	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	370
Tabel 5.81	Matrik Kegiatan dan Pihak yang Terlibat pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan hasil pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat.....	370



DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	:	Anggaran Dasar dan Rumah Tangga
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	:	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
BDL	:	Bantuan Dana Lingkungan
BDR	:	Bantuan Dana Rumah
BKM	:	Badan Keswadayaan Masyarakat
BLH	:	Badan Lingkungan Hidup
BOP	:	Biaya Operasional Pekerjaan
CCO	:	<i>Contract Change Order</i>
DAK SLBM	:	Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
DDR	:	<i>Disaster Risk Reduction</i>
DED	:	<i>Detail Engineering Design</i>
DMC	:	<i>District Management Consultant</i>
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPUP	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
DPTL	:	Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
IPAL	:	Instalasi Pengelolaan Air Limbah
JRF	:	Java Reconstruction Fund
KP	:	Kelompok Pemukiman
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
K3	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPSE	:	Layanan Pengadaan Secara Elektronik
MAD	:	Musyawarah Antar Desa
MCK	:	Mandi, Cuci, Kakus
MK	:	Manajemen Konstruksi

MUSDES	:	Musyawarah Desa
NMC	:	<i>National Management Consultant</i>
PA	:	Pengguna Anggaran
PEMDES	:	Pemerintah Desa
PEMKAB	:	Pemerintah Kabupaten
PEM PROV	:	Pemerintah Provinsi
PHO	:	<i>Provisional Hand Over</i>
PJM	:	Prrogram Jangka Menengah
PLPP	:	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
PM	:	Pemberdayaan Masyarakat
PMU	:	<i>Project Management Unit</i>
PPHP	:	Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
PPIP	:	Pedoman Pelaksanaan Program Pelaksanaan Infrastruktur Pedesaan
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
P2KP	:	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
P3K	:	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
PS	:	Pemetaan Swadaya
RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
REKOMPAK	:	Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas
RKM	:	Rencana Kerja Masyarakat
RKS	:	Rencana Kerja dan Syarat
RPA	:	<i>Rapid Paricipatory Assesment</i>
RPP	:	Rencana Penataan Pemukiman
Satker PLPP	:	Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
SBU	:	Sertifikat Badan Usaha
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SNI	:	Standar Nasional Indonesia

SPK	:	Surat Perintah Kerja
SPPB	:	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
SSKK	:	Syarat-syarat Khusus Kontrak
SSUK	:	Syarat-syarat Umum Kontrak
SR	:	Saluran Rumah
TFL	:	Tenaga Fasilitator Lapangan
TIP	:	Tim Inti Perencana
TOR	:	<i>Term of Reference</i>
ULP	:	Unit Layanan Pengadaan
TPK	:	Tim Pelaksana Kegiatan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2. Matrik Penelitian
- Lampiran 3. Panduan Pengisian Kuesioner
- Lampiran 4. Rekap hasil kuesioner



ABSTRAK

Pada saat ini Pemerintah mulai mengembangkan pelaksanaan proyek konstruksi dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama pelibatan masyarakat pada semua tahap pelaksanaan proyek adalah agar proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil pembangunan bersifat berkelanjutan. Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat, penerapan fungsi manajemen konstruksi berbasis masyarakat dalam aspek mutu, biaya dan waktu serta perbandingan antara penerapan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

Data primer yang digunakan adalah data pelaksanaan proyek yang telah dilakukan berupa dokumen perencanaan, pelaksanaan & laporan akhir diperoleh Dinas PU Kabupaten Sleman, keterangan langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam Proyek Pengaspalan Jalan, Saluran Air Limbah & Rumah Tinggal di kabupaten sleman, data lapangan proyek yang telah terbangun diperoleh dengan observasi langsung untuk melihat kualitas hasil pekerjaan dan data-data pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dengan studi literatur.

Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek berbasis masyarakat ada 4 (empat) pihak. Penerapan fungsi manajemen konstruksi pada proyek konstruksi berbasis masyarakat dalam aspek mutu lebih baik dari proyek terstandar. Dalam aspek biaya, proyek jalan aspal lebih mahal 25%, proyek saluran air limbah lebih murah 66,58% dan proyek rumah tinggal lebih murah 72,75%. Dalam aspek waktu, waktu yang dibutuhkan untuk proyek jalan aspal lebih lama 7,96%, proyek saluran air limbah lebih cepat 20% dan proyek rumah tinggal lebih lama 7,14%. Perbandingan yang diperoleh dalam penerapan manajemen proyek terstandar dan berbasis masyarakat adalah rangkaian kegiatan dan pihak yang terlibat, terdapatnya beberapa kendala serta kelebihan yang mendukung pelaksanaan proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat. Rangkaian kegiatan pada pengelolaan pelaksanaan proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat mempunyai kekhasan tersendiri.

ABSTRACT

At this time the Government started to develop the implementation of construction projects with community empowerment systems. The main goal of community involvement in all phases of the project is that the project development in accordance with the needs of society and development results are sustainable. Purpose of this study was to determine the parties involved in the construction of community-based management, application management functions of community-based construction in the aspect of quality, costs and time as well as the comparison between the implementation of standardized construction management and construction management based society.

The primary data used is data of the project has been done in the form of documents the planning, implementation and the final report obtained by the Dinas PU Kabupaten Sleman, direct information from the parties involved in the Project Paving Roads, Sewerage & Household Living in district Sleman, field data project has awakened obtained by direct observation to see the quality of the work and supporting data relating to research obtained by the study of literature.

The conclusion of this study were obtained parties involved in community-based projects there are four (4) sides. Implementation of construction management function in community-based construction project in better quality aspects of the project standardized. In the aspect of costs, more expensive asphalt road projects 25%, sewerage projects 66.58% cheaper and cheaper residential project 72.75%. In the aspect of time, the time required for the project asphalt road longer 7.96%, sewerage projects 20% faster and longer residential project 7.14%. Comparison gained in the implementation of standardized project management and community-based a series of activities and the parties involved, the presence of some of the obstacles and advantages that support the implementation of the project with community-based construction management. The series of activities on the management of project implementation with community-based construction management has its own peculiarities.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana bidang infrastruktur dengan tujuan mendorong percepatan pembangunan. Prinsip manajemen konstruksi terstandar digunakan sebagai landasan utama dalam rangkaian pelaksanaan proyek konstruksi dengan tujuan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan dan pembangunan infrastruktur dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Tanpa mempertimbangkan prioritas kebutuhan utama masyarakat mengakibatkan hasil proyek tidak tepat guna dan kurang efisien. Untuk menghasilkan proyek yang tepat guna dan efisien, maka pemerintah mengubah paradigma pembangunan ke arah pola pelaksanaan pembangunan yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasil pembangunan bersifat berkelanjutan.

Program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pencairan dana, proses konstruksi dan pengoperasian/ penyerahan hasil pekerjaan. program pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat mengacu pada standar pedoman dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten hingga desa.

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat perlu didukung dengan kebijakan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi dan penyerahan hasil pekerjaan;

- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan menumbuhkembangkan keswadayaan masyarakat secara berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kualitas perencanaan partisipatif dan mendorong terciptanya kemitraan berbagai pihak dalam mendorong tersedianya sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan;
- d. Optimalisasi peningkatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mengembangkan pembangunan secara berkelanjutan;
- e. Mendorong terbukanya aksesibilitas kawasan potensial untuk pertumbuhan ekonomi;
- f. Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintahan daerah dalam penguatan kelembagaan masyarakat untuk mewujudkan kelembagaan masyarakat dan berkelanjutan program.

Saat ini telah banyak dilakukan penelitian mengenai penerapan manajemen konstruksi berbasis masyarakat diantaranya :

Penelitian ini dilakukan oleh Ummi Chasanah dengan judul Komparasi Proyek Konstruksi Kontraktual dengan Proyek Konstruksi Berbasis Masyarakat. Tujuan mengevaluasi proyek konstruksi berbasis kontraktual dan proyek konstruksi berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan oleh Gusni Vitri dengan judul Studi Evaluasi Implementasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Kontrak Masyarakat (Studi Kasus Paket P2KP Kabupaten Lima Puluh Kota). Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi tata kelola pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan oleh Lukman Karyadi dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pengelolaan IPAL komunal. Penelitian ini dilakukan oleh Riani Musrifah dengan judul Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Penanggulangan

Kemiskinan (P2KP) di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kemanfaatan P2KP dalam memberdayakan masyarakat dan untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dan menghambat upaya membangkitkan partisipasi masyarakat.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penelitian tersebut hanya mengambil proyek pemberdayaan masyarakat saja dan tidak mengambil pembandingan proyek kontraktual secara nyata. Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan perbandingan secara riil dengan menggunakan proyek riil yang dilaksanakan dengan menggunakan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

Kabupaten Sleman merupakan daerah yang menerapkan pola pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dalam pembangunan berbagai jenis infrastruktur seperti : jalan, jembatan, drainase, MCK, air bersih dan rumah layak huni. Contoh proyek yang dikerjakan dengan sistem pemberdayaan masyarakat antara lain : Pembangunan saluran air limbah (IPAL komunal), Pengaspalan jalan paska erupsi merapi di kecamatan Cangkringan dan pembangunan rumah layak huni pasca erupsi merapi.

Pedoman Pelaksanaan konstruksi berbasis masyarakat telah disusun sebagai panduan dalam rangkaian proses pelaksanaan proyek. Dengan adanya perbedaan masyarakat penerima proyek baik dari segi kemampuan ekonomi, pendidikan dan tatanan sosial, berakibat munculnya kendala-kendala yang dihadapi pada proses pelaksanaan proyek. Antara perencanaan dan kualitas hasil proyek sering tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perbedaan kepentingan dari stakeholder yang terlibat dalam proses pelaksanaan proyek sering menjadi faktor penyebabnya. Disamping kendala yang muncul juga terdapat berbagai macam kelebihan dari penerapan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, terutama dukungan dan kontribusi masyarakat dalam hal mendukung keberhasilan proyek.

Analisis penerapan manajemen konstruksi berbasis masyarakat diperlukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembangunan terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan

proyek mulai dari perencanaan hingga proses pemeliharaan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan program di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan minimalisir masalah agar tujuan dari proyek dengan sistem pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan sesuai dengan standar pemerintah. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada selama pelaksanaan diperlukan penelitian mengenai penerapan manajemen konstruksi dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya dalam pelaksanaan proyek pembangunan dengan system pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berjudul “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” (Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan:

- a. Apakah ada perbedaan pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat bila dibandingkan dengan manajemen konstruksi terstandar?
- b. Apakah ada perbedaan penerapan fungsi manajemen (mekanisme/urutan) dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada manajemen konstruksi berbasis masyarakat?
- c. Bagaimanakah perbandingan penerapan sistem manajemen konstruksi terstandar dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat?
- d. Bagaimanakah kegiatan pelaksanaan proyek konstruksi dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat;
- b. Mengetahui penerapan fungsi manajemen konstruksi berbasis masyarakat secara detail dalam aspek mutu, biaya dan waktu;
- c. Mendapatkan perbandingan antara penerapan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat;
- d. Mengetahui rangkaian kegiatan pada pelaksanaan proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

1.4 Batasan Penelitian

Beberapa hal yang menjadi batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian dilakukan pada Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal;
- b. Penelitian dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pengoperasian / penyerahan hasil pekerjaan;
- c. Bagian yang akan diukur sebagai bahan evaluasi adalah pada kualitas perencanaan dan kualitas hasil;
- d. Penelitian dilakukan sampai pada tingkatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
- e. Penelitian dimaksudkan untuk memberikan solusi guna meminimalisir kelemahan yang ada dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal di Kabupaten Sleman yang menerapkan sistem pemberdayaan masyarakat pada tahun berikutnya;

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya;
- c. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, bahwa aspek manajemen konstruksi dalam proyek konstruksi dengan system pemberdayaan masyarakat memiliki perbedaan prinsip dalam tahap-tahap konstruksi yang dilakukan. Perbandingan antara prinsip manajemen tersetandar dengan manajemen konstruksi di masyarakat memiliki perbedaan dalam proses pelaksanaan pembangunannya, sehingga dengan analisa penerapan manajemen konstruksi dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pelaksanaan manajemen konstruksi tersetandar dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat. Bab ini akan memaparkan mengenai pustaka dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan erat dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa laporan dan hasil penelitian yang berkaitan komparasi manajemen konstruksi dengan manajemen konstruksi di masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung untuk penelitian yang akan dilakukan, diperlukan beberapa referensi penelitian sebelumnya. Dengan maksud untuk mengetahui perbedaan antara pengarang, judul, lokasi penelitian, metoda penelitian yang digunakan serta hasil dari penelitian yang dilakukan. Cara ini sangat efisien untuk meminimalisir terjadinya kesamaan topik dan hasil penelitian. Berikut ini adalah perbandingan penelitian-penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk table.

2.2.1 Deskripsi / Paparan masing-masing penelitian

a. Komparasi Proyek Konstruksi Kontraktual dengan Proyek Konstruksi Berbasis Masyarakat.

Penelitian ini dilakukan Ummi Chasanah mahasiswa Program Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang Konsentrasi Manajemen

Konstruksi tahun 2013. Maksud dari penelitian ini adalah mengevaluasi proyek konstruksi berbasis kontraktual dan proyek konstruksi berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk menguji validasi hasil analisis.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang dilakukan oleh Ummi Chasanah maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kriteria yang digunakan pada pelaksanaan proyek konstruksi pemberdayaan masyarakat dan kontraktual yang didasarkan pada survey, interview dan dikombinasikan dengan *Project Management KPIs (Key Performance Indicators)* adalah kriteria waktu, kriteria biaya, kriteria mutu, kriteria partisipasi masyarakat, dan kriteria administrasi;
- 2) Hasil analisis responden dengan menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), menyebutkan bahwa hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi dengan urutan ke-1 adalah biaya dengan bobot 0,262 kemudian urutan ke-2 adalah mutu dengan bobot 0,253 selanjutnya urutan ke-3 adalah waktu dengan bobot 0,231 dan urutan ke-4 adalah partisipasi masyarakat dengan bobot 0,142 serta urutan ke-5 adalah administrasi dengan bobot 0,112;
- 3) Hasil analisis pelaksanaan proyek konstruksi pemberdayaan masyarakat dan kontraktual dari 9 responden berpendapat bahwa pelaksanaan proyek konstruksi lebih baik dilaksanakan secara kontraktual. Hal ini didasarkan hasil analisis yang di peroleh dari responden yang memilih pelaksanaan proyek konstruksi tersebut secara kontraktual;
- 4) Berdasarkan hasil dari validasi, analisis kriteria dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam memilih pelaksanaan proyek konstruksi yang dirasa lebih optimal adalah kontraktual. Responden berpendapat bahwa pelaksanaan proyek konstruksi secara kontraktual lebih optimal bila dibandingkan dengan pelaksanaan konstruksi secara pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa secara pemberdayaan masyarakat *schedule* yang direncanakan cenderung tidak bisa direalisasikan karena adanya kultur budaya masyarakat setempat, antara lain kepercayaan

masyarakat tentang adanya hari baik dan adanya doa bersama sebelum dimulainya pekerjaan. Walaupun antara kontraktual dan pemberdayaan masyarakat sama – sama melakukan kontrak, namun kontraktual lebih adanya tanggung jawab yang jelas dan berbadan hukum.

b. Studi Evaluasi Implementasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Kontrak Masyarakat (Studi Kasus Paket P2KP Kabupaten Lima Puluh Kota)

Penelitian dilakukan oleh Gusni Vitri dan dipublikasikan dalam sebuah jurnal Teknik Sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi tata kelola pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif, dengan mendiskripsikan suatu gejala, fakta, peristiwa atau kejadian yang sedang atau sudah terjadi.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan :

- 1) Untuk program pemerintah yang bersifat *multi years*, diharapkan organisasi pengelola pun di bentuk untuk *multi years*;
- 2) Setiap program pemerintah yang berasal dari pusat, diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan-kebijakan daerah;
- 3) Siklus pelaksanaan program/proyek dapat di mulai pada awal tahun dan selesai pada akhir tahun anggaran, sehingga bisa meminimalisir permasalahan;
- 4) Pada penelitian ini tidak dikaji kaitan program dengan masalah hukum, peraturan-peraturan pemerintah, keputusan presiden dan aturan-aturan lainnya. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar masalah ini dapat di teliti pada penelitian selanjutnya;
- 5) Pada saat ini penelitian pada Program Pemberdayaan Masyarakat terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur masih sedikit. Oleh karena itu, dianjurkan untuk melakukan penelitian lanjutan baik yang berhubungan dengan pembiayaan, waktu dan metode proyek maupun konsep-konsep pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat.

c. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Penelitian dilakukan oleh Lukman Karyadi, mahasiswa program studi pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomu Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pengelolaan IPAL komunal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan :

- 1) Dalam tahap perencanaan diperoleh data persentase partisipasi masyarakat sebagai berikut : 61,90% warga berpartisipasi rendah, 28,57% warga berpartisipasi sedang dan 9,5% warga berpartisipasi tinggi. Sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat tergolong rendah;
- 2) Dalam tahap pelaksanaan diperoleh data persentase partisipasi masyarakat sebagai berikut : 19,05% warga berpartisipasi rendah, 47,63% warga berpartisipasi sedang dan 33,33% warga berpartisipasi tinggi. Sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat tergolong sedang;
- 3) Dalam tahap pemanfaatan dan pengelolaan IPAL komunal diperoleh data prosentase partisipasi masyarakat sebagai berikut : 66,67% warga berpartisipasi dalam memanfaatkan, menjaga dan merawat, 28,57% warga berpartisipasi dalam memanfaatkan dan menjaga sedang dan 4,76% warga hanya memanfaatkan saja. Sehingga dapat dikatakan partisipasi masyarakat tergolong tinggi.

d. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)

Penelitian dilakukan oleh Riani Musrifah, mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kemanfaatan P2KP dalam memberdayakan masyarakat di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang, untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dan menghambat upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang. untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan lapangan studinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, pada Bab keempat ini dapat disimpulkan secara garis besar bahwa Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan di Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dapat dinyatakan berhasil dan berjalan sesuai rencana. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam proyek P2KP tersebut dapat dinyatakan cukup baik. Strategi pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) mengindikasikan munculnya paradigma pembangunan yang bersifat partisipatoris. Indikasi tersebut ada dua perspektif yaitu, yang pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pelestarian program atau proyek yang akan mewarnai hidup

mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi masyarakat setempat, pola sikap dan pola berfikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Yang kedua adalah membuat umpan balik (*feedback*) yang pada hakekatnya merupakan bagian yang tak terlepas dari kegiatan pembangunan. Mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang berbasis pada pemberdayaan, yang dilaksanakan di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.

2.2.2 Komparasi antar penelitian

a. Perbedaan penelitian yang dilakukan dalam penelitian 1 (Umami Chassanah) dan 2 (Gusni Fitri) :

1) Menurut Umami Chassanah Hasil analisis responden dengan menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), menyebutkan bahwa hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi dengan urutan ke-1 adalah biaya dengan bobot 0,262 kemudian urutan ke-2 adalah mutu dengan bobot 0,253 selanjutnya urutan ke-3 adalah waktu dengan bobot 0,231 dan urutan ke-4 adalah partisipasi masyarakat dengan bobot 0,142 serta urutan ke-5 adalah administrasi dengan bobot 0,112. *proyek konstruksi secara kontraktual lebih optimal bila dibandingkan dengan pelaksanaan konstruksi secara pemberdayaan masyarakat;*

2) Menurut Gusni Fitri hasil analisis Untuk program pemerintah yang bersifat *multi years*, di harapkan organisasi pengelola pun di bentuk untuk *multi years*. Setiap program pemerintah yang berasal dari pusat, di harapkan dapat bersinergi dengan kebijakan-kebijakan daerah. Siklus pelaksanaan program/proyek dapat di mulai pada awal tahun dan selesai pada akhir tahun anggaran, sehingga bisa meminimalisir permasalahan.

b. Perbedaan penelitian yang dilakukan dalam penelitian 3 (Lukman Karyadi) dan 4 (Riani Musrifah) :

- 1) Menurut Lukman Karyadi Partisipas masyarakat dalam proses perencanaan rendah, pada proses pelaksanaan tergolong sedang dan pada proses pemanfaatandan pemeliharaan tergolong tinggi;
- 2) Menurut Riani Musrifah secara garis besar bahwa Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan di Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dapat dinyatakan berhasil dan berjalan sesuai rencana. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam proyek P2KP tersebut dapat dinyatakan cukup baik.

2.2.3 Kesimpulan Penelitian Terdahulu & Keaslian Penelitian

Adanya tinjauan pustaka pada Bab 2 untuk dapat diketahui referensi-referensi dari jurnal, makalah, tesis yang berkaitan erat dengan penelitian yang akan dilaksanakan dengan judul “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” (*Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal*). Dari referensi yang ada dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai proses pelaksanaan proyek dengan metode Pemberdayaan Masyarakat telah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dalam beberapa penelitian sudah ada yang dibahas tentang Penerapan Manajemen Konstruksi dengan Sistem Pemberdayaan Masyarakat. Karena belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya di *Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal* maka penelitian ini dapat dikatakan asli.

2.2.4 Tabel

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

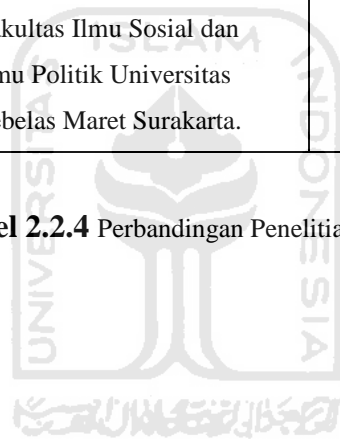
No	Nama	Judul	Lokasi	Tujuan	Metode	Kesimpulan
1	Umami Chassanah (2013)	Komparasi Proyek Konstruksi Kontraktual dengan Proyek Konstruksi Berbasis Masyarakat	Lokasi penelitian di Kabupaten Pati	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan faktor-faktor penting dalam memilih pelaksanaan proyek konstruksi. • Menentukan bobot kriteria dan sub kriteria di antara sejumlah alternatif dengan metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP). • Memilih pelaksanaan proyek konstruksi dengan cara kontraktual atau cara pemberdayaan masyarakat dengan metode AHP 	Analisa komparasi menggunakan analisa AHP (<i>Analytical Hierarchy Process</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis responden dengan menggunakan Metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP), menyebutkan bahwa hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi dengan : <ul style="list-style-type: none"> ➢ urutan ke-1 adalah biaya dengan bobot 0,262 kemudian ➢ urutan ke-2 adalah mutu dengan bobot 0,253 selanjutnya ➢ urutan ke-3 adalah waktu dengan bobot 0,231 dan ➢ urutan ke-4 adalah partisipasi masyarakat dengan bobot 0,142 serta ➢ urutan ke-5 adalah administrasi dengan bobot 0,112 • proyek konstruksi secara kontraktual lebih optimal bila dibandingkan dengan pelaksanaan konstruksi secara pemberdayaan masyarakat

No	Nama	Judul	Lokasi	Tujuan	Metode	Kesimpulan
2	Gusni Fitri	Studi Evaluasi Implementasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Kontrak Masyarakat (Studi Kasus Paket P2KP Kabupaten Lima Puluh Kota	Lokasi penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota	Mengevaluasi tata kelola pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada pembangunan infrastruktur perdesaan dan mengidentifikasi efektivitas kontrak masyarakat	Menggunakan metode deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk program pemerintah yang bersifat <i>multi years</i>, di harapkan organisasi pengelola pun di bentuk untuk <i>multi years</i>. • Setiap program pemerintah yang berasal dari pusat, di harapkan dapat bersinergi dengan kebijakan-kebijakan daerah. • Siklus pelaksanaan program/proyek dapat di mulai pada awal tahun dan selesai pada akhir tahun anggaran, sehingga bisa meminimalisir permasalahan.
3	Lukman Karyadi	Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Lokasi penelitian di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan IPAL Komunal di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto • Untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan IPAL Komunal di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto. 	Menggunakan Metode deskriptif kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rendah, pada proses pelaksanaan tergolong sedang dan pada proses pemanfaatan dan pemeliharaan tergolong tinggi

No	Nama	Judul	Lokasi	Tujuan	Metode	Kesimpulan
				<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan IPAL Komunal di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto. 		
4	Riani Musrifah (2014)	Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif Tentang Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) di Desa Doplang	Lokasi penelitian di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kemanfaatan P2KP dalam memberdayakan masyarakat di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. • Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui P2KP di Desa Doplang. • Untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dan menghambat upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 		Secara garis besar bahwa Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan di Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dapat dinyatakan berhasil dan berjalan sesuai rencana. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam proyek P2KP tersebut dapat dinyatakan cukup baik.

No	Nama	Judul	Lokasi	Tujuan	Metode	Kesimpulan
		Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali		<ul style="list-style-type: none"> melalui P2KP di Desa Doplang. <p>Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.</p>		

Tabel 2.2.4 Perbandingan Penelitian



2.3 Penelitian yang akan dilakukan

Penelitian yang akan dilaksanakan dengan judul “*ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DENGAN SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*” (*Studi Kasus Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal*)”. Diharapkan mampu memberikan analisis yang tepat mengenai aspek manajemen konstruksi terstandar dengan aspek manajemen konstruksi berbasis masyarakat. Penelitian akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pengoperasian / penyerahan hasil pekerjaan. Dari hasil analisis yang didapatkan dari penelitian diharapkan mampu memberikan solusi perbaikan untuk proyek-proyek berbasis pemberdayaan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.



BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pendahuluan

Bab ini merupakan penjelasan dari teori-teori yang digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah penelitian. Beberapa teori yang akan dijelaskan diantaranya : pengertian manajemen, fungsi manajemen, pengertian konstruksi, pengertian proyek konstruksi, jenis proyek konstruksi, ciri umum proyek konstruksi, tahapan – tahapan pelaksanaan proyek konstruksi, sumber daya, pengertian manajemen proyek, sasaran manajemen proyek konstruksi, pengertian pemberdayaan masyarakat, pendekatan pemberdayaan masyarakat, tahapan – tahapan pelaksanaan pemberdayaan, Pengaruh antara Kualitas, Waktu, dan Biaya, dalam Pelaksanaan Pembangunan, Analisa Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dasar hukum pelaksanaan proyek pemberdayaan masyarakat.

3.2 Manajemen

Definisi manajemen menurut Horold Koontz dan Cyril O'donnel adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Definisi manajemen menurut R. Terry adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

Definisi manajemen menurut James A.F. Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan menggunakan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Definisi manajemen menurut Lawrence A. Appley adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain.

Definisi manajemen menurut Drs. Oey Liang Lee adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi manajemen secara umum adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

3.3 Fungsi Manajemen

a. Planning

1) Penetapan tujuan (Goal setting)

Menggunakan pendekatan bottom up dan top down dengan tujuan yang baik dan harus mempunyai sifat spesifik, realistik, terukur dan terbatas waktu.

2) Perencanaan/planning

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

b. Organizing

Dimaksudkan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur organisasi atau institusi.

c. Actuating

1) Staffing

Adalah proses manajemen yang berkenaan dengan pengerahan (recruitment), penempatan, penilaian kerja, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi.

2) Directing

Adalah usaha untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

d. Controlling

1) Supervisi

Adalah interaksi langsung antara individu-individu dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja kerja serta tujuan orang tersebut.

2) Controlling

Merupakan usaha membandingkan antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sudah terjadi dengan tujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan bangunan sesuai dengan persyaratan/spesifikasi yang telah ditetapkan.

3) Coordinating

Dengan pihak eksternal (owner, konsultan dan lain sebagainya) dengan tujuan untuk mencapai sasaran perusahaan dan nilai positif bagi hubungan bisnis terutama dalam rangka penyelesaian pekerjaan/proyek.

3.4 Konstruksi

Pengertian "konstruksi" adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*Civil Engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrik Trianto (2011).

Menurut Undang-undang tentang Jasa konstruksi, "Jasa Konstruksi" adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultan pengawasan pekerjaan konstruksi.

Sehingga Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan maupun sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya

& untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain Trianto (2011).

Menurut Gould (2002) proyek konstruksi dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendirikan adanya suatu bangunan, yang mencakup kebutuhan sumber daya biaya, tenaga kerja, material dan peralatan yang digunakan untuk konstruksi secara detail dan jelas. Dalam konstruksi ada 3 tahapan pengelompokan konstruksi meliputi : perencanaan konstruksi,

pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. Suatu kegiatan bisa dikategorikan sebagai proyek konstruksi jika memenuhi beberapa ciri sebagai berikut J. Weiss (1992) : Memiliki awal dan akhir kegiatan dari suatu rangkaian kegiatan, Jangka waktu kegiatan terbatas, Rangkaian kegiatan yang terjadi tidak berulang sehingga menghasilkan produk yang unik, memiliki tujuan yang spesifik, produk akhir atau hasil kerja akhir.

3.5 Pengertian Proyek Konstruksi

Menurut Cleland dan Wr. King (1987) definisi proyek dapat diartikan bahwa proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang ada dan dihimpun dalam suatu organisasi sementara untuk mendapatkan suatu tujuan tertentu.

Menurut Dipohusodo (1996) bahwa proyek merupakan suatu proses sumber daya dan adanya dana tertentu secara terorganisasi untuk menjadi hasil pembangunan yang mantap sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan awal dengan menggunakan anggaran dana serta dari proyek tersebut, sehingga menjadi sumber daya yang tersedia

Karakteristik dalam proyek konstruksi antara lain Proyek konstruksi bersifat unik, membutuhkan adanya sumber daya (*resources*) dan membutuhkan organisasi. Sedangkan ciri – ciri proyek pada umumnya adalah sebagai berikut adanya batasan proyek yang diawali dengan awal proyek dan di akhiri dengan akhir proyek, proyek konstruksi tersebut mempunyai jangka waktu yang terbatas, rangkaian kegiatan proyek hanya bersifat satu kali dan tidak terdapat adanya produk yang bersifat unik, sasaran dalam proyek konstruksi tersebut jelas dan biasanya diarahkan untuk suatu perubahan maupun pembaharuan, penentuan tanggung jawab dibatasi untuk merealisasikan proyek dengan adanya batasan anggaran yang digunakan terhadap batasan biaya – biaya dan proyek tersebut bersifat disiplin dengan adanya batasan pekerja yang tersedia.

3.6 Jenis Proyek Konstruksi

Pada dasarnya proyek konstruksi dibedakan menjadi 2, yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil.

- a. Bangunan gedung dengan ciri sebagai berikut : menghasilkan tempat orang bekerja maupun tempat tinggal, pekerjaan dilakukan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi pondasi tersebut umumnya sudah diketahui, manajemen dibutuhkan biasanya untuk *progressing*. Contoh pekerjaan konstruksi bangunan gedung adalah perkantoran, perumahan dan pabrik;
- b. Bangunan sipil dengan ciri – ciri sebagai berikut : proyek konstruksi tersebut dilaksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan umum maupun kepentingan manusia, pekerjaan konstruksi dilakukan pada lokasi maupun lahan yang luas dan dengan kondisi pondasi yang berbeda satu sama lain dalam suatu proyek dan manajemen dibutuhkan guna pemecahan permasalahan. Contoh bangunan sipil adalah jembatan, jalan, bendungan, dan infrastruktur lainnya.

3.7 Ciri umum Proyek Konstruksi

- a. Kejelasan tujuan, sasaran, harapan-harapan dan strategi sehingga dapat dipakai sebagai kesepakatan tim;
- b. Kejelasan rencana kerja, jadwal dan anggaran biaya;
- c. Kejelasan peran dan tanggung jawab semua pihak dan personil yang terlibat;
- d. Kejelasan mekanisme monitoring, koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas;
- e. Kejelasan mekanisme sistem evaluasi kerja yang dapat digunakan sebagai feed back bagi manajemen;
- f. Sistem kerja yang bersifat dinamis, tidak terikat pada kerangka “organisasi rutin”;
- g. Kejelasan pemahaman mengenai tata cara dan dan dasar-dasar peraturan birokrasi dan pengetahuan tentang cara-cara pengatasan kendala birokrasi.

3.8 Tahap-tahap Pelaksanaan Proyek Konstruksi

Tahap pelaksanaan proyek konstruksi saling berkaitan dan berurutan. Adapun tahap-tahap pelaksanaan dalam proyek konstruksi antara lain :

a. Tahap Perencanaan

Perancangan dilakukan karena adanya kebutuhan, pada tahap ini akan dilakukan studi kelayakan untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan dalam studi kelayakan adalah : menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan konstruksi proyek tersebut, memperkirakan manfaat yang akan di peroleh jika proyek tersebut dilaksanakan baik manfaat secara ekonomis maupun manfaat secara fungsi sosial, menyusun analisis kelayakan proyek, baik secara ekonomis maupun finansial, menganalisa dampak lingkungan yang mungkin terjadi bila proyek tersebut dilaksanakan.

Aspek yang ditinjau dalam studi kelayakan adalah teknis, ekonomi dan lingkungan. Pihak yang terlibat dalam proses perencanaan adalah pemilik dan dapat dibantu oleh konsultan studi kelayakan atau konsultan manajemen konstruksi (MK).

Output dari tahap perencanaan antara lain :

- 1) Pengembangan sasaran proyek baik dilihat dari aspek biaya dan waktu;
- 2) Identifikasikan batasan utama;
- 3) TOR dan organizing;
- 4) Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana;
- 5) Tahapan pekerjaan;
- 6) Master, coordinating schedule;
- 7) Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana;
- 8) Cash flow (Proyeksi Arus Dana).

b. Tahap Perancangan

Bertujuan untuk melengkapi penjelasan proyek konstruksi dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi dan taksiran biaya agar mendapat persetujuan pemilik proyek dan pihak – pihak yang terkait dalam proyek tersebut. Dalam tahap ini mencakup beberapa hal, seperti : adanya kriteria desain, skematik desain, estimasi biaya konseptual, adanya tahap pengembangan rancangan, yang merupakan rancangan estimasi biaya secara

rinci, Adanya desain akhir yang merupakan hasil gambar detail, spesifikasi, daftar volume, RAB, syarat – syarat administrasi, bahkan peraturan -peraturan umum yang berlaku.

Pihak yang terlibat dalam proses perancangan adalah konsultan perencana, konsultan MK, konsultan rekayasa nilai dan atau konsultan quantity surveyor.

Out put yang dihasilkan dari proses perancangan sebagai berikut :

- 1) Kontrak untuk staf proyek, konsultan, kontraktor dan supplier;
 - 2) Spesifikasi – masukan, proses dan keluaran;
 - 3) Desain, perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas;
 - 4) Gambar bestek dan shopdrawing;
 - 5) Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya;
 - 6) Pedoman administrasi dan keuangan;
 - 7) Prosedur operasional Standar.
- c. Tahap Pengadaan / pelelangan (procurement)
- Tahap ini bertujuan untuk menunjuk kontraktor atau sejumlah kontraktor sebagai pelaksana yang akan melaksanakan proyek konstruksi, pengadaan material dan peralatan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah : Prakualifikasi dan Dokumen kontrak

Pihak yang terlibat adalah pemilik, pelaksana jasa konstruksi (kontraktor) dan konsultan MK. Menurut Perpres RI nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- 2) Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I;
- 3) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 4) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD;
- 6) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 7) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 8) Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
- 9) Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *E-Purchasing*;
- 10) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 11) Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
- 12) Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.

Jenis proses pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Perpres RI nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat;
- 2) Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
- 3) Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 4) Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 5) Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat;
- 6) Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 7) Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;
- 8) Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;
- 9) Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;

10) Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.

Yang harus dilakukan pada tahap pelelangan antara lain :

- 1) Mengadakan pra kualifikasi kontraktor;
- 2) Free tender meeting;
- 3) Menyusun daftar calon rekanan;
- 4) Bill of quality (jenis pekerjaan + volume);
- 5) Aanwijzing (penjelasan);
- 6) Menyiapkan dokumen lelang;
- 7) Menyusun RAB pasti untuk evaluasi penawaran;
- 8) Mengevaluasi setiap paket penawaran untuk direkomendasikan kepada Pimro (PPK);
- 9) Menyiapkan dokumen kontrak antara Pimpro (PPK) dengan Kontraktor.

d. Tahap Pelaksanaan

Merupakan tahap untuk mewujudkan bangunan yang telah direncanakan sesuai dengan perancangan, SPK dan kontrak. Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas, konsultasi MK, kontraktor, sub kontraktor, supplier, dan instansi terkait.

Tahap-tahap yang ada dalam proses pelaksanaan antara lain :

- 1) Membuat rencana induk pelaksanaan;
- 2) Menyusun prosedur di lapangan;
- 3) Free construction meeting;
- 4) Mengkoordinasi membuat prasarana kerja;
- 5) Mengarahkan rencana kerja masing-masing kontraktor;
- 6) Mengkoordinir, mengarahkan, mengendalikan pekerjaan kontraktor dilihat dari aspek waktu, mutu dan kesempatan kerja;
- 7) Memproses ijin yang diperlukan;
- 8) Mengkoordinir asuransi masing-masing pekerjaan;
- 9) Memeriksa gambar detail dan contoh material;
- 10) Memimpin rapat koordinasi proyek;

- 11) Laporan kemajuan pekerjaan dan laporan keuangan;
- 12) Change order : biaya, mutu, waktu;
- 13) Menghitung pekerjaan tambah kurang;
- 14) Mengevaluasi RAB secara periodic;
- 15) Memeriksa dan menyiapkan dokumen pembayaran;
- 16) Evaluasi terhadap klaim kontrak;
- 17) Dokumen pembangunan proyek berupa gambar dan foto-foto;
- 18) Pemeriksaan akhir sebelum serah terima pertama;
- 19) Memeriksa berita acara serah terima pertama.

e. Tahap Tes Operasional

Tahap ini dilakukan untuk menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan. Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas, pemilik, konsultan MK, kontraktor dan suplier sub kontraktor.

f. Tahap Operasional dan Pemeliharaan

Pada tahap ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian bangunan proyek konstruksi yang telah diselesaikan dengan dokumen kontrak dan kinerja fasilitas sebagaimana mestinya, dengan rincian sebagai berikut. Tahap operasional setelah dilakukan pembayaran total 95% dari nilai kontrak. Pemeliharaan dilakukan selama tiga bulan dengan uang jaminan pemeliharaan yang ditahan oleh pemilik. Pihak yang terlibat adalah Konsultan pengawas (MK), pemakai dan pemilik.

Yang harus dilakukan pada proses operasional dan pemeliharaan adalah :

- 1) Mengkoordinir, mengarahkan, mengontrol;
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan operasional;
- 3) Mengarahkan dan memeriksa as build drawing;
- 4) Mengarahkan dan memeriksa secara manual;
- 5) Memproses : garansi, jaminan, sertifikat, peralatan, dan training operator.

3.9 Sumber Daya

Sumber daya proyek yang harus dimiliki agar proyek konstruksi dapat berjalan dengan baik antara lain :

- a. Men / tenaga kerja;
- b. Money / dana (financial);
- c. Materials;
- d. Machines / peralatan;
- e. Method , Space, Time.

3.10 Definisi Manajemen Proyek

Manajemen proyek menurut Oberlander (2000) "The art and science of coordinating people, equipment, materials, money, and schedules to complete a specified project on time and within approved cost".

Manajemen proyek adalah suatu sistem atau tata laksana untuk menjalankan suatu organisasi suatu tugas yang spesifik, dibatasi oleh waktu, sasaran dan biaya.

3.11 Sasaran Manajemen Proyek Konstruksi

- a. Biaya
 - 1) Perencanaan alokasi sumber daya (kualifikasi dan kuantitas) sama dengan jumlah jam kerja, tenaga kerja, material dan peralatan;
 - 2) Estimasi biaya (RAB, analisa biaya dan penjelasannya);
 - 3) Pengendalian anggaran (supervisi dan controlling).
- b. Mutu
 - 1) Program pengelolaan mutu (dokumen policy kualitas, organisasi pelaksanaan dan rencana kerja);
 - 2) Quality control (kegiatan pengendalian dan acceptance/bila sesuai dengan spesifikasi);
 - 3) Quality Assurance (jaminan/confidence standar mutu-prosedur)
- c. Waktu
 - 1) Identifikasi item pekerjaan (daftar kegiatan proyek / break down structure);
 - 2) Penyusunan urutan kegiatan (Net work);
 - 3) Estimasi waktu (jumlah hari kerja/durasi);
 - 4) Penjadwalan dan pengendalian (time scedule).

3.12 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Payne (1997) mengatakan bahwa “Pemberdayaan dipandang untuk menolong klien dengan membangkitkan tenaga dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan sepanjang hidup, termasuk mengurangi efek atau akibat dari gejala-gejala pada masyarakat atau individu untuk melatih agar kekuatan itu tumbuh dengan meningkatkan kapasitas percaya diri, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya. (Sumber : <http://F: Pemberdayaan.Pemberdayaan.htm>).

Pemberdayaan masyarakat menurut Giarci (2001) menyatakan bahwa dengan memandang *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian untuk mewujudkan masyarakat dalam berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungan *collective action* dan *networking* yang dikembangkan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menurut Subejo dan Supriyanto (2004) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang di sengaja dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam proses merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki masyarakat tersebut melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

Menurut Deliveri (2004), pemberdayaan masyarakat merupakan proses pemberdayaan masyarakat yang seharusnya didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Untuk itu tim pendamping ataupun fasilitator yang merupakan salah satu external faktor dalam pemberdayaan masyarakat serta tim pendamping berperan pada awal proses secara aktif namun peran tersebut akan mulai berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat merasa sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri serta pengoperasionalnya secara inisiatif tim Pemberdayaan Masyarakat (PM) akan pelan-pelan dikurangi dan pada akhirnya berhenti. Peran tim Pemberdayaan

Masyarakat (PM) sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

3.13 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Program Pelaksanaan Infrastruktur Pedesaan / PPIP tahun 2011, pendekatan antara lain adalah : PPIP adalah program pembangunan melalui pendekatan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Masyarakat, dengan maksud seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) dengan melibatkan peran aktif masyarakat setempat;
- b. Keberpihakan kepada yang miskin, dengan maksud bahwa orientasi kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemanfaatan kegiatan, dimana hasil diupayakan dapat berdampak langsung bagi penduduk terutama kaum miskin;
- c. Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah dan masyarakat akan bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan program kegiatan dan keberlanjutan dari infrastruktur terbangun;
- d. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan setiap tahapan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, serta dapat memberikan kesempatan secara luas dalam partisipasi aktif dari kelompok miskin dan kaum perempuan, serta kaum minoritas dari masyarakat tersebut;
- e. Keswadayaan, artinya bahwa masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan di desanya, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan dan pemeliharaan kegiatan dari infrastruktur yang terbangun;
- f. Keterpaduan program pembangunan, merupakan program yang dilaksanakan dengan memiliki sinergi yang ada dalam program pembangunan perdesaan lainnya.

3.14 Tahap-tahap Pelaksanaan Pemberdayaan

Menurut buku pedoman Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat / DAK SLBM (2014), berikut ini merupakan tahapan – tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya, antara lain:

a. Tahap Persiapan :

- 1) Sosialisasi
- 2) Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Seleksi TFL
Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
Tugas dan Tanggung Jawab TFL
- 3) Pemilihan Lokasi
- 4) Pemicuan Masyarakat
- 5) Penetapan Lokasi
- 6) Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
Ketua
Sekretaris
Bendahara
Seksi Perencanaan
Seksi Pelaksanaan
Seksi Pengawasan
Panitia/Pejabat Pengadaan
Seksi Operasi dan Pemeliharaan

b. Tahap Perencanaan :

- 1) Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
- 2) Pihak-pihak yang menyusun RKM
- 3) Waktu dan tempat pertemuan penyusunan RKM
- 4) Dokumen RKM
Profil lokasi
Organisasi KSM, Struktur KSM serta tim pendukung

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) KSM

Surat ketersediaan lahan dan atau persetujuan warga misal : Surat hibah, surat hak guna dari dinas/lembaga yang ada di daerah

Dokumen dan berita acara seleksi kampung, disertai dengan dokumen pendukung dan tabel konsolidasi skor Rapid Participatory Assesment (RPA) / survei cepat penilaian peserta masyarakat

Penentuan calon pengguna

Pemilihan teknologi sanitasi

DED dan RAB lengkap disertai dengan kurva S

Rekening Bank bersama ditandatangani oleh ketua KSM, bendahara KSM dan satu orang penerima manfaat yang ditunjuk melalui rembuk warga

Sumber pendanaan serta mekanisme pencairan dana dari pemerintah

Pengelolaan keuangan DAK proyek (Administrasi pembukuan dana DAK proyek, mekanisme pembelanjaan dan laporan keuangan

Rencana Kerja : Rencana pembangunan infrastruktur, Rencana Pendampingan, Rencana pelatihan mandor, tukang, operator dan pengguna, Rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat pengguna
Jaminan dari masyarakat pengguna terhadap kesediaan dalam mengoperasikan, memelihara sarana dan prasarana DAK proyek

c. Sumber Pendanaan dan Tahap Pencairan Dana :

1) Sumber Pendanaan :

Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Dana masyarakat

Dana Swasta atau donor (bila ada)

2) Mekanisme pencairan dana

3) Verifikasi RKM

4) Perjanjian kerja KSM dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)

Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Dokumen RKM (Rencana Kerja Masyarakat)

Rencana pembayaran

Rencana penyerahan hasil pekerjaan

- d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi :
 - 1) Pengadaan material
 - 2) Pengadaan barang dan jasa
 - 3) Pelaksanaan konstruksi
- e. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan :
 - 1) Serah terima aset infrastruktur
 - 2) Tujuan operasi dan pemeliharaan
 - 3) Organisasi pengelolaan operasional dan pemeliharaan
- f. Monitoring dan Evaluasi :
 - 1) Monitoring kemajuan pelaksanaan sesuai tahapan prose kegiatan
 - 2) Monitoring Pencapaian sasaran dan hasil kegiatan yang dilaksanakan
 - 3) Monitoring menjamin keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun
 - 4) Evaluasi penilaian kinerja daerah dalam melaksanakan kegiatan
 - 5) Evaluasi kepatuhan dan ketertiban pelaporan
- g. Pelaporan :
 - 1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
 - 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota
 - 3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (Cipta Karya/PU)

3.15 Pedoman Teknis Metode Pembangunan Jalan Berbasis Tenaga Kerja

Menurut buku Pedoman Teknis Metoda Pembangunan Jalan Berbasis Tenaga Kerja, berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan jalan berbasis tenaga kerja, antara lain :

- a. Rencana Teknis
 - 1) Pemilihan Jalan
Terdiri atas berbagai kegiatan antara lain : Proses, pengidentifikasian Awal, penyaringan, evaluasi, pengurutan (Ranking) dan persetujuan.

2) Kriteria Pemilhan / Penyeleksian

Adapun pemilihan dilaksanakan berdasarkan : kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan kelayakan sosial.

3) Standar Perencanaan

Standar perencanaan jalan berbasis tenaga kerja terdiri dari standar umum, jalan perdesaan di Kamboja dan struktur drainase.

4) Perkiraan Pekerjaan

Perkiraan pekerjaan meliputi hal-hal sebagai berikut : inventarisasi pembentukan jalan, perkiraan kuantitas, target konstruksi dan perencanaan manajemen waktu.

b. Pengukuran dan Setting

1) Metode papan perpil

Metode papan perpil terdiri atas prinsip dasar, peralatan (Traveling perpil, Waterpas, papan perpil dan tongkat ukur, peralatan lainya dan tongkat traveling sementara), penggunaan papan perpil, drainasi sisi jalan, lengkung vertikal, potongan melintang, kemiringan dan panjang saluran pembuangan.

2) Garis as jalan

Terdiri atas : Alinyemen jalan, menyeting garis lurus, menyeting lengkungan, metode interaksi, mengatur kembali posisi kurve, menyeting kurve dengan mata, menggeser patok, menyeting ketinggian vertikal jalan dan kemiringan jalan.

3) Saluran air, kemiringan dan bentuk jalan

c. Prosedur Pelaksanaan

1) Pekerjaan pembersihan

Pekerjaan pembersihan terdiri atas : pembersihan semak belukar, pemindahan bongkahan batu, pembuangan permukaan tanah atas dan pelaporan.

2) Pekerjaan tanah

Pekerjaan tanah terdiri atas : pemotongan tanah untuk perataan, penimbunan sisi tanah yang rendah, konstruksi badan jalan dan saluran samping jalan, peninggian elevansi pada lengkungan dan pelaporan.

3) Peninggian badan jalan

Terdiri atas perhitungan volume pekerjaan tanah dan pengaturan pekerjaan.

4) Drainase

Terdiri atas pendahuluan (drainase permukaan jalan, drainase samping jalan, pengontrolan erosi), saluran pembuangan (mitre drain), sudut saluran buang, tanggul penahan aliran air (scourcheck) dan pemotongan saluran (cut off drain).

5) Gorong-gorong

Terdiri atas penempatan gorong-gorong dan penjelasan.

6) Cekungan penyebrangan (drift)

Terdiri atas papan peringatan penyebrangan pada cekungan, lokasi penyebrangan, ukuran cekungan penyebrangan dan material untuk lapis permukaan.

7) Perkerasan badan jalan (graveling)

Terdiri atas standar, sumber gravel, kualitas gravel, metode tes lapangan, air, rencana kerja, prosedur kerja, kontrol pekerjaan, penimbunan dan pelaporan.

8) Pematatan

Terdiri atas kadar air optimum, metode pematatan, standar kualitas dan prosedur pematatan.

9) Perlindungan terhadap erosi

Terdiri atas rumput lapangan dan turfing (gebalan rumput pendek).

d. Administrasi Proyek

1) Membangun kamp

Terdiri atas lokasi dan perpindahan buruh.

- 2) Perkakas
Terdiri atas persediaan perkakas, pemeliharaan dan gudang.
 - 3) Peralatan
 - 4) Material
Terdiri atas bahan bakar, oli, pelumas, cincin gorong-gorong, semen dan patok.
 - 5) Kegiatan pendukung di lapangan
Terdiri atas air minum dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
 - 6) Keselamatan
- e. Organisasi Kerja
- 1) Organisasi lapangan
 - 2) Program kerja
Terdiri atas urutan pekerjaan, rencana kerja harian dan keseimbangan kelompok.
 - 3) Penerimaan dan mempekerjakan buruh
Terdiri atas penerimaan, rencana pembayaran (pembayaran kerja harian, tugas kerja, kelompok kerja, bagian pekerjaan dan jenis pembayaran) dan ukuran pekerjaan.
 - 4) Pengawasan dan pemeriksaan
Merupakan kegiatan kontrol kerja.

3.16 Tahap pelaksanaan pembangunan permukiman REKOMPAK di tingkat kelurahan/desa

Menurut buku Pedoman Operasional Umum Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) pascaerupsi Gunung Merapi 2010, berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pembangunan perumahan, antara lain :

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Rapat koordinasi di tingkat kelurahan/desa untuk sosialisasi pelaksanaan proyek REKOMPAK serta penjaringan relawan permukiman.

- 2) Pelatihan relawan permukiman untuk pemetaan swadaya (PS) dan pembentukan panitia PS serta FGD.
 - 3) Focus Group Discussion (FGD) refleksi dampak dan rencana pembangunan kota/kabupaten (termasuk REKOMPAK).
- b. Tahap Pemetaan Swadaya
- 1) Pemetaan swadaya terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman.
 - 2) Rembug warga (kelurahan/desa) menyepakati penetapan calon penerima bantuan perumahan dan tingkat kerusakan rumah.
 - 3) Uji publik
- c. Tahap Perencanaan Penataan Pemukiman
- 1) Pembentukan Tim inti perencana (TIP)
 - 2) Penyusunan draft rencana penataan permukiman
 - 3) Pertemuan kelompok perempuan dan kelompok rentan dalam penyusunan RPP
 - 4) Musyawarah desa draft RPP
 - 5) Musyawarah Antar Desa (MAD)
 - 6) Konsultasi draft RPP dengan pemerintah kota/kabupaten
 - 7) Finalisasi RPP
 - 8) Lokakarya RPP tingkat Kota/Kabupaten
- d. Tahap Pembangunan Perumahan dan Lingkungan Permukiman
- 1) Penyusunan rencana detail teknis rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman
 - 2) Pencairan dana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman
 - 3) Penyiapan Kelompok Pemukiman (KP) dan tahap penyusunan rencana detail teknis pembangunan rumah
 - 4) Pencairan dana dan pelaksanaan pembangunan rumah
- e. Tahap Evaluasi
- 1) Penyusunan laporan pertanggungjawaban
 - 2) Evaluasi partisipatif

3.17 Pengaruh Kualitas, Waktu dan Biaya dalam Pelaksanaan

Pembangunan

Menurut Dipohusodo (1996), pada umumnya layaknya pelayanan jasa, ketentuan mengenai mutu, waktu, dan biaya pelaksanaan penyelesaian proyek konstruksi sudah ada dan terikat dalam kontrak dan telah ditetapkan sebelum pelaksanaan proyek konstruksi di mulai/dilaksanakan. Keberhasilan suatu proyek secara umum dapat diukur melalui enam sasaran (*common project constraints*) antara lain : *scope, quality, schedule, budget, resources, dan risk* (sumber : *PMBOX_4th_edition_changes*).

Kriteria yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dan kontraktual antara lain:

a. Waktu

Batas waktu pekerjaan mulai dari awal sampai batas akhir sudah ditentukan.

b. Biaya

Setiap proyek yang ada selalu direncanakan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek tersebut sampai selesai. Sedangkan biaya yang digunakan dalam setiap pekerjaan akan mempertimbangkan berbagai hal antara lain : kesesuaian dana yang digunakan, transparan dalam pengelolaan dana, adanya struktur yang mengurus dana, dan dana yang ada dapat dipertanggungjawabkan di akhir pekerjaan.

c. Mutu/kualitas

Mutu/kualitas dalam proyek ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

d. Partisipasi masyarakat

Dalam tahapan kegiatan partisipasi masyarakat sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan pekerjaan, partisipasi tersebut antara lain: keterlibatan masyarakat dalam perencanaan/usulan kegiatan, peranan aktif masyarakat di setiap tahapan kegiatan, kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat.

e. Administrasi

Administrasi/pelaporan pekerjaan antara lain : rincian administrasi, data pendukung administrasi, tertib administrasi.

3.18 Analisis Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (PP 102/2000), SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:

- a. Openess (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
- b. Transparency (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- c. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- d. Effectiveness and relevance: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Coherence: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
- f. Development dimension (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

SNI bidang konstruksi dan bangunan dikelompokkan oleh Departemen Pekerjaan Umum ke dalam bidang-bidang terkait yang lebih

spesifik, antara lain : struktur bangunan, konstruksi, keselamatan bangunan, gedung, perumahan, jembatan, jalan, bahan dan material, dan lainnya. Saat ini SNI bidang konstruksi yang telah mencapai kurang lebih 769 SNI, yang dikelompokkan atas metoda, spesifikasi dan tata cara.

3.19 Dasar Hukum Pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Masyarakat

- a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- c. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- d. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan perubahannya Perpres No.70 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2010, tanggal 1 November 2010, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
- k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
- q. SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negri; Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK/07/2008 dan 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan, Pemantauan, Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus.
- r. Peraturan Presiden RI nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- s. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- t. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- u. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 tahun 2010 tentang Bantuan Stimulan Bagi Masyarakat untuk Kegiatan Pembangunan Fisik;

- v. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial;
- w. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 17 Seri E);
- x. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bantuan Stimulan Bagi Masyarakat Untuk Kegiatan Pembangunan Fisik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);



BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Subyek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah perbandingan penerapan prinsip manajemen konstruksi terstandar dengan manajemen konstruksi di masyarakat. Untuk mencari sisi kelebihan dan kekurangan dari penerapan Manajemen konstruksi di masyarakat. Sistem analisa dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengelompokan faktor-faktor yang berpengaruh untuk mendapatkan solusi perbaikan bagi proyek yang menerapkan manajemen konstruksi di masyarakat (pemberdayaan masyarakat).

4.2 Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal di Kabupaten Sleman. Proyek ini dipilih sebagai obyek penelitian karena di dalam proyek ini menerapkan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat. Dari proyek ini dapat dilakukan analisis perbandingan mulai dari tahap-tahap pelaksanaan manajemen proyek. Adanya perbedaan antara prinsip manajemen konstruksi terstandar dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat mempunyai kompleksitas permasalahan tersendiri. Keterlibatan masyarakat secara langsung menimbulkan permasalahan tersendiri, karena antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain mempunyai kapasitas yang berbeda dalam memahami dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi.

4.3 Data dan Cara Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini beserta cara mendapatkannya antara lain :

- a. Data pelaksanaan proyek yang telah dilakukan berupa dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan & dokumen laporan akhir diperoleh Dinas Pekerjaan

- Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman;
- b. Keterangan langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal di kabupaten sleman. Data ini diperoleh dengan cara wawancara terstruktur dalam rangka pendalaman dilengkapi dengan kuesioner untuk memperkuat penarikan kesimpulan;
 - c. Pihak-pihak yang akan diwawancarai antara lain : Penyedia Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Pelaksana Pekerjaan, Pemerintah Desa (Lurah & Kaur Pembangunan), Tenaga Fasilitator, Masyarakat (Badan Swadaya Masyarakat/Kelompok Swadaya Masyarakat/Tim Pelaksana Kegiatan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Pengguna);
 - d. Data lapangan proyek yang telah terbangun diperoleh dengan observasi langsung untuk melihat kualitas hasil pekerjaan;
 - e. Materi wawancara, panduan pengisian kuesioner dan kuesioner sesuai dengan lampiran;
 - f. Data-data pendukung yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dengan studi literatur.

4.4 Metoda Analisa Data

Data-data yang telah didapatkan kemudian dianalisa satu persatu dalam bentuk komparasi, hasil komparasi akan dianalisis lebih lanjut menggunakan data hasil kuesioner dengan mengambil nilai modus/hasil terbanyak yang sering muncul. Hasil dari analisis yang dilakukan akan menjelaskan tepat atau tidaknya sebuah proyek dilaksanakan dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Hasil dari analisa berupa diskriptif kualitatif. Metoda analisa data yang digunakan adalah :

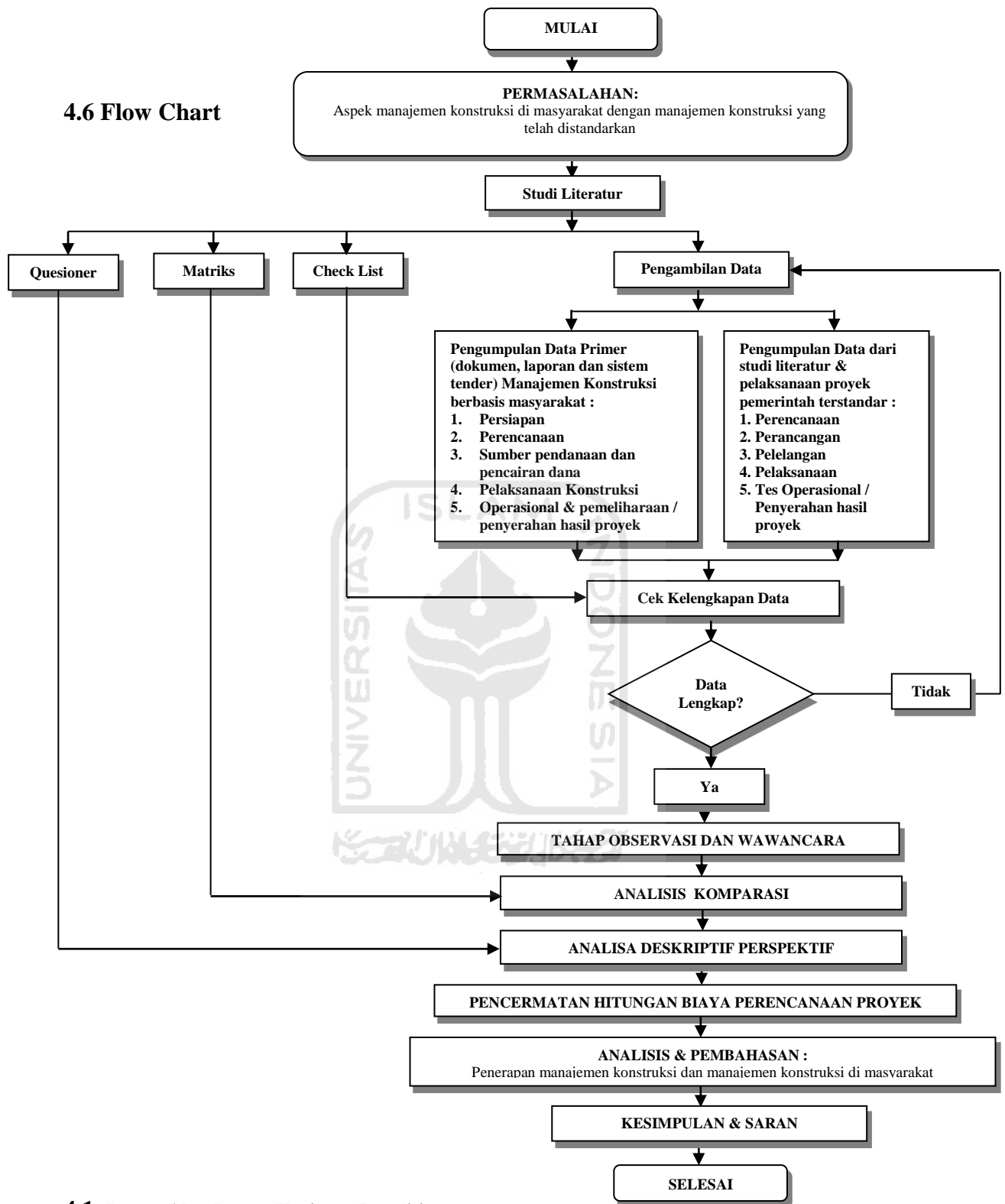
- a. Analisis Komparasi;
- b. Analisis diskriptif perspektif (menggunakan hasil kuesioner);

4.5 Tahap Penelitian

Pada tahap ini akan dilakukan analisis lebih lanjut guna mewujudkan hasil penelitian yang maksimal. Rangkaian tahap penelitian yang akan dilakukan antara lain :

- a. Pengumpulan data dan dokumen mulai dari tahap perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan kegiatan konstruksi dan pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan dengan sistem manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman.
- b. Memperinci tahapan-tahapan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah/terstandar;
- c. Memperinci tahapan-tahapan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek dengan sistem pemberdayaan masyarakat;
- d. Melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan proyek dengan sistem manajemen terstandar dan proyek dengan sistem pemberdayaan masyarakat mulai dari proses perencanaan, perancangan, pengadaan/pelelangan, pelaksanaan kegiatan konstruksi dan pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan;
- e. Analisis komparasi tahapan-tahapan proyek terstandar dengan proyek pemberdayaan masyarakat;
- f. Analisis diskriptif perspektif (menggunakan prosentase) untuk tata kelola proyek mulai dari proses, pengelolaan dan pengontrolan proyek dengan tujuan mengetahui efektifitas pelaksanaan proyek;
- g. Analisis data dan pembahasannya;
- h. Penarikan kesimpulan

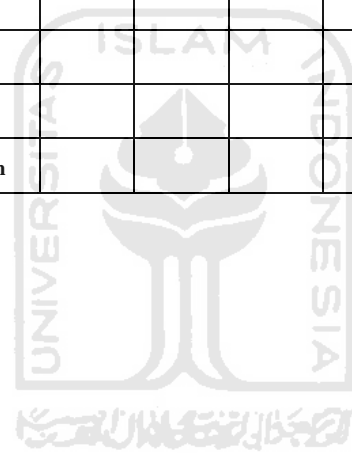
4.6 Flow Chart



4.1. Bagan Alur Proses Kegiatan Penelitian

4.7 Check List

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Terstandar			Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat			Keterangan
		Proyek			Proyek			
		A	B	C	A	B	C	
1	Dokumen Perencanaan / Persiapan							A = Proyek Pengaspalan Jalan B = Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah C = Proyek Pembangunan Rumah Tinggal
2	Dokumen Perancangan							
3	Dokumen Pengadaan / Pelelangan							
4	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi							
5	Dokumen Pengoperasian / Penyerahan hasil pekerjaan							



4.8 Matriks

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Terstandar			Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat			Keterangan
		Proyek			Proyek			
		A	B	C	A	B	C	
1	Perencanaan / Persiapan							A = Proyek Pengaspalan Jalan
	a Waktu							B = Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah
	b Biaya							C = Proyek Pembangunan Rumah Tinggal
	c Mutu							
	d Mekanisme perencanaan							
	e Dasar usulan proyek							
	f Pihak terlibat & ketugasanya							
	g Uraian kegiatan							
	h Hasil							
	i Partisipasi masyarakat							
	j Administrasi							
	k Keselamatan							
	l Kendala							
	m kelebihan							

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Terstandar			Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat			Keterangan
		Proyek			Proyek			
		A	B	C	A	B	C	
2	Perancangan							
	a Waktu							
	b Biaya							
	c Mutu							
	d Mekanisme perancangan							
	e Pihak terlibat & ketugasanya							
	f Uraian kegiatan							
	g Hasil							
	h Partisipasi masyarakat							
	i Administrasi							
	j Tempat							
	k Sumber Pendanaan							
	l Cara pencairan							
	m Keselamatan							
	n Kendala							
	o Kelebihan							

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Terstandar			Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat			Keterangan
		Proyek			Proyek			
		A	B	C	A	B	C	
3	Pengadaan / Pelelangan / Procurement							
a	Waktu							
b	Biaya							
c	Mutu							
d	Mekanisme pengadaan							
e	Pihak terlibat & ketugasanya							
f	Uraian kegiatan							
g	Hasil							
h	Partisipasi masyarakat							
i	Administrasi							
j	Tempat							
k	Sumber Pendanaan							
l	Keselamatan							
m	Kendala							
n	Kelebihan							

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Terstandar			Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat			Keterangan
		Proyek			Proyek			
		A	B	C	A	B	C	
4	Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi							
a	Waktu							
b	Biaya							
c	Mutu							
d	Mekanisme pelaksanaan konstruksi							
e	Pihak terlibat & ketugasanya							
f	Uraian kegiatan							
g	Hasil							
h	Partisipasi masyarakat							
i	Administrasi							
j	Tempat							
k	Pengadaan material							
l	Pengadaan jasa							
m	Pekerjaan tambah kurang							
n	Keselamatan							
o	Kendala							
p	Kelebihan							

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Terstandar			Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat			Keterangan
		Proyek			Proyek			
		A	B	C	A	B	C	
5	Pengoperasian / Penyerahan hasil pekerjaan							
a	Waktu							
b	Biaya							
c	Mutu							
d	Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan							
e	Pihak terlibat & tugasnya							
f	Uraian kegiatan							
g	Hasil							
h	Partisipasi masyarakat							
i	Administrasi							
j	Tempat							
k	Keselamatan							
l	Kendala							
m	Kelebihan							

4.9 Kuesioner

a. Perencanaan / Persiapan Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah, Rumah tinggal

1) Waktu

No	Identifikasi Tahap Perencanaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada tahap perencanaan proyek</i>										
Keterangan : 1 = Kurang dari 1 bulan 2 = antara 1 s/d 2 bulan 3 = antara 2 s/d 3 bulan 4 = antara 3 s/d 4 bulan 5 = lebih dari 4 bulan											

2) Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan

No	Identifikasi Tahap Perencanaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah pelaksanaan perencanaan proyek</i>										
Keterangan : 1 = Selesai sebelum batas waktu 2 = Selesai sesuai jadwal 3 = Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu) 4 = Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu) 5 = Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)											

3) Biaya

No	Identifikasi Tahap Perencanaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah alokasi biaya perencanaan</i>										
Keterangan : 1 = ada anggaran khusus perencanaan 2 = Menggunakan biaya umum perencanaan 3 = Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat) 4 = Menggunakan biaya dari masyarakat 5 = Tidak ada biaya perencanaan											

4) Mutu

No	Identifikasi Tahap Perencanaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah mutu hasil perencanaan</i>										
Keterangan : 1 = Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah 2 = Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah 3 = Mutu sesuai dengan standar pemerintah 4 = Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah 5 = tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah											

5) Mekanisme Perencanaan

No	Identifikasi Tahap Perencanaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah mekanisme perencanaan</i>										
Keterangan : 1 = Sangat Mudah 2 = Mudah 3 = Sederhana 4 = Rumit 5 = Sangat rumit											

6) Pihak Terlibat

No	Identifikasi Tahap Perencanaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan</i>										
Keterangan : 1 = Pemerintah (satu Dinas) 2 = Pemerintah (lebih dari satu Dinas) 3 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan) 4 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) 5 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program											

7) Partisipasi masyarakat

No	Identifikasi Tahap Perencanaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan</i>										
Keterangan : 1 = Berpartisipasi penuh 2 = Berpartisipasi dengan prosentase sedang 3 = Berpartisipasi dengan prosentase rendah 4 = Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah 5 = Tidak berpartisipasi											

8) Administrasi

No	Identifikasi Tahap Perencanaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah administrasi dalam proses perencanaan</i>										
Keterangan : 1 = Sangat mudah 2 = Mudah 3 = Sederhana 4 = Rumit 5 = Sangat rumit											

9) Keselamatan Kerja

No	Identifikasi Tahap Perencanaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah penerapan keselamatan kerja dalam proses perencanaan</i>										
Keterangan : 1 = Harus menggunakan 2 = Ada alokasi dana dan menggunakan 3 = Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan 4 = Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan 5 = Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana											

10) Kendala

No	Identifikasi Tahap Perencanaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Kendala apakah yang sering terjadi dalam proses perencanaan</i>										
Keterangan : 1= Terjadi konflik antar pemangku kepentingan 2= SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek 3= Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan 4= Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan 5 = Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan											

b. Perancangan Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah, Rumah tinggal

1) Waktu

No	Identifikasi Tahap Perancangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada tahap perancangan proyek</i>										
Keterangan : 1 = Kurang dari 1 bulan 2 = antara 1 s/d 2 bulan 3 = antara 2 s/d 3 bulan 4 = antara 3 s/d 4 bulan 4 = lebih dari 4 bulan											

2) Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan

No	Identifikasi Tahap Perancangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah pelaksanaan perancangan proyek</i>										
Keterangan : 1 = Selesai sebelum batas waktu perencanaan selesai 2 = Selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan 3 = Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu) 4 = Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu) 5 = Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)											

3) Biaya

No	Identifikasi Tahap Perancangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah alokasi biaya perancangan</i>										
Keterangan : 1 = ada anggaran khusus perancangan 2 = Menggunakan biaya umum perencanaan 3 = Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat) 4 = Menggunakan biaya dari masyarakat 5 = Tidak ada biaya perencanaan											

4) Mutu

No	Identifikasi Tahap Perancangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah mutu hasil perancangan</i>										
Keterangan : 1 = Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah 2 = Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah 3 = Mutu sesuai dengan standar pemerintah 4 = Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah 5 = tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah											

5) Mekanisme Perancangan

No	Identifikasi Tahap Perancangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah mekanisme perancangan</i>										
Keterangan : 1 = Sangat Mudah 2 = Mudah 3 = Sederhana 4 = Rumit 5 = Sangat rumit											

6) Pihak terlibat

No	Identifikasi Tahap Perancangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Siapa saja yang terlibat dalam proses perancangan</i>												
Keterangan : 1 = Pemerintah (satu Dinas) 2 = Pemerintah (lebih dari satu Dinas) 3 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan) 4 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) 5 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program													

7) Partisipasi masyarakat

No	Identifikasi Tahap Perancangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses perancangan</i>												
Keterangan : 1 = Berpartisipasi penuh 2 = Berpartisipasi dengan prosentase sedang 3 = Berpartisipasi dengan prosentase rendah 4 = Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah 5 = Tidak berpartisipasi													

8) Administrasi

No	Identifikasi Tahap Perancangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah administrasi dalam proses perancangan</i>												
Keterangan : 1 = Sangat mudah 2 = Mudah 3 = Sederhana 4 = Rumit 5 = Sangat rumit													

9) Keselamatan Kerja

No	Identifikasi Tahap Perancangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah penerapan keselamatan kerja dalam proses perancangan</i>												
Keterangan : 1 = Harus menggunakan 2 = Ada alokasi dana dan menggunakan 3 = Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan 4 = Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan 5 = Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana													

10) Kendala

No	Identifikasi Tahap Perancangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Kendala apakah yang sering terjadi dalam proses perancangan</i>												
Keterangan : 1 = Terjadi konflik antar pemangku kepentingan 2 = SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek 3 = Tim perancangan tidak ahli dalam perancangan 4 = Tim perancangan tidak berpengalaman dalam perancangan 5 = Tim perancangan kurang ahli dalam perancangan													

c. Pengadaan / Pelelangan / Procurement Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah, Rumah tinggal

1) Waktu

No	Identifikasi Tahap Pengadaan/ Pelelangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada tahap pengadaan/ pelelangan</i>										
Keterangan : 1 = Kurang dari 1 bulan 2 = antara 1 s/d 2 bulan 3 = antara 2 s/d 3 bulan 4 = antara 3 s/d 4 bulan 5 = lebih dari 4 bulan											

2) Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan

No	Identifikasi Tahap Tahap Pengadaan/ Pelelangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah pelaksanaan tahap pengadaan/ pelelangan proyek</i>										
Keterangan : 1 = Selesai sebelum batas waktu perencanaan selesai 2 = Selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan 3 = Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu) 4 = Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu) 5 = Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)											

3) Biaya

No	Identifikasi Tahap Pengadaan/ Pelelangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah alokasi biaya Pengadaan/ Pelelangan</i>										
Keterangan : 1 = ada anggaran khusus pelelangan 2 = Menggunakan biaya umum perencanaan 3 = Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat) 4 = Menggunakan biaya dari masyarakat 5 = Tidak ada biaya perencanaan											

4) Mutu

No	Identifikasi Tahap Pengadaan/ Pelelangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah mutu hasil Pengadaan/ Pelelangan</i>										
Keterangan : 1 = Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah 2 = Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah 3 = Mutu sesuai dengan standar pemerintah 4 = Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah 5 = tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah											

5) Mekanisme Pengadaan

No	Identifikasi Tahap Pengadaan/ Pelelangan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	<i>Bagaimanakah mekanisme Pengadaan/ Pelelangan</i>										
Keterangan : 1 = Sangat Mudah 2 = Mudah 3 = Sederhana 4 = Rumit 5 = Sangat rumit											

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah, Rumah tinggal

1) Waktu

No	Identifikasi Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada tahap Konstruksi</i>												
Keterangan : 1 = Kurang dari 1 bulan 2 = antara 1 s/d 2 bulan 3 = antara 2 s/d 3 bulan 4 = antara 3 s/d 4 bulan 5 = lebih dari 4 bulan													

2) Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan

No	Identifikasi Tahap Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah pelaksanaan tahap Konstruksi proyek</i>												
Keterangan : 1 = Selesai sebelum batas waktu perencanaan selesai 2 = Selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan 3 = Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu) 4 = Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu) 5 = Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)													

3) Biaya

No	Identifikasi Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Berapa biaya per m2 untuk proyek pengaspalan jalan</i>												
Keterangan : 1 = ada anggaran khusus konstruksi 2 = Menggunakan biaya umum perencanaan 3 = Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat) 4 = Menggunakan biaya dari masyarakat 5 = Tidak ada biaya perencanaan													

4) Mutu

No	Identifikasi Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah mutu hasil Konstruksi</i>												
Keterangan : 1 = Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah 2 = Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah 3 = Mutu sesuai dengan standar pemerintah 4 = Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah 5 = tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah													

5) Mekanisme Konstruksi

No	Identifikasi Tahap konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah mekanisme konstruksi</i>												
Keterangan : 1 = Sangat Mudah 2 = Mudah 3 = Sederhana 4 = Rumit 5 = Sangat rumit													

6) Pihak terlibat

No	Identifikasi Tahap Konstruksi	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Siapa saja yang terlibat dalam proses Konstruksi</i>												
Keterangan : 1 = Pemerintah (satu Dinas) 2 = Pemerintah (lebih dari satu Dinas) 3 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan) 4 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) 5 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program													

7) Partisipasi masyarakat

No	Identifikasi Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses Konstruksi</i>												
Keterangan : 1 = Tidak berpartisipasi 2 = Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah 3 = Berpartisipasi dengan prosentase rendah 4 = Berpartisipasi dengan prosentase sedang 5 = Berpartisipasi penuh													

8) Administrasi

No	Identifikasi Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah administrasi dalam proses Konstruksi</i>												
Keterangan : 1 = Sangat mudah 2 = Mudah 3 = Sederhana 4 = Rumit 5 = Sangat rumit													

9) Pengadaan Material

No	Identifikasi Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah kualitas material yang digunakan pada proses konstruksi</i>												
Keterangan : 1 = Lebih baik dari spesifikasi teknis 2 = Sesuai dengan spesifikasi teknis 3 = Tidak sesuai spesifikasi teknis/hampir sama 4 = Tidak sesuai spesifikasi teknis/agak buruk 5 = Tidak sesuai spesifikasi teknis/buruk													

10) Pengadaan Jasa

No	Identifikasi Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah kualitas penyedia jasa proyek konstruksi</i>												
Keterangan : 1 = Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi sangat baik 2 = Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik 3 = Sesuai dengan spesifikasi penyedia jasa yang dibutuhkan tapi tidak biasa mengerjakan konstruksi dengan baik 4 = Hampir sesuai dengan penyedia jasa yang dibutuhkan/agak buruk tetapi bisa mengerjakan konstruksi dengan													

baik 5 = Tidak sesuai dengan penyedia jasa yang dibutuhkan dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik

11) Pekerjaan Tambah kurang

No	Identifikasi Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah dengan pekerjaan tambah kurang/CCO</i>												
Keterangan : 1 = Tidak ada 2 = Sedikit 3 = Sedang 4 = Banyak 5 = Banyak sekali													

12) Keselamatan Kerja

No	Identifikasi Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Bagaimanakah penerapan keselamatan kerja dalam proses Konstruksi</i>												
Keterangan : 1 = Harus menggunakan 2 = Ada alokasi dana dan menggunakan 3 = Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan 4 = Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan 5 = Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana													

13) Kendala

No	Identifikasi Tahap Konstruksi proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Kendala apakah yang sering terjadi dalam proses Konstruksi</i>												
Keterangan : 1 = Terjadi kesalahan dan kegagalan konstruksi 2 = Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis 3 = Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis 4 = Tanggung jawab yang kurang terhadap hasil konstruksi 5 = Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi													

e. Pengoperasian / Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah, Rumah tinggal

1) Waktu

No	Identifikasi Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat						
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	<i>Berapa lama waktu yang dibutuhkan pada tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan</i>												
Keterangan : 1 = Kurang dari 1 bulan 2 = antara 1 s/d 2 bulan 3 = antara 2 s/d 3 bulan 4 = antara 3 s/d 4 bulan 5 = lebih dari 4 bulan													

2) Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan

No	Identifikasi Tahap Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Bagaimanakah pelaksanaan tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan proyek										

Keterangan :
 1 = pengadaan/pelelangan selesai sebelum batas waktu perencanaan selesai
 2 = pengadaan/pelelangan selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan
 3 = pengadaan/pelelangan melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)
 4 = pengadaan/pelelangan melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)
 5 = pengadaan/pelelangan melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)

3) Biaya

No	Identifikasi Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Bagaimanakah alokasi biaya Penyerahan Hasil Pekerjaan										

Keterangan :
 1 = ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan
 2 = Menggunakan biaya umum perencanaan
 3 = Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
 4 = Menggunakan biaya dari masyarakat
 5 = Tidak ada biaya perencanaan

4) Mutu

No	Identifikasi Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Bagaimanakah mutu hasil Penyerahan Hasil Pekerjaan										

Keterangan :
 1 = Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah
 2 = Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah
 3 = Mutu sesuai dengan standar pemerintah
 4 = Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah
 5 = tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah

5) Mekanisme Penyerahan Hasil Pekerjaan

No	Identifikasi Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan proyek	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Bagaimanakah mekanisme Penyerahan Hasil Pekerjaan										

Keterangan :
 1 = Sangat Mudah 2 = Mudah 3 = Sederhana 4 = Rumit 5 = Sangat rumit

6) Pihak terlibat

No	Identifikasi Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Siapa saja yang terlibat dalam proses Penyerahan Hasil Pekerjaan										

Keterangan :
 1 = Pemerintah (satu Dinas) 2 = Pemerintah (lebih dari satu Dinas)

3 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan) 4 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)
 5 = Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program

7) Partisipasi masyarakat

No	Identifikasi Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	<i>Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses Penyerahan Hasil Pekerjaan</i>											
Keterangan : 1 = Tidak berpartisipasi 2 = Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah 3 = Berpartisipasi dengan prosentase rendah 4 = Berpartisipasi dengan prosentase sedang 5 = Berpartisipasi penuh												

8) Administrasi

No	Identifikasi Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	<i>Bagaimanakah administrasi dalam proses Penyerahan Hasil Pekerjaan</i>											
Keterangan : 1 = Sangat mudah 2 = Mudah 3 = Sederhana 4 = Rumit 5 = Sangat rumit												

9) Keselamatan Kerja

No	Identifikasi Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	<i>Bagaimanakah penerapan keselamatan kerja dalam proses Penyerahan Hasil Pekerjaan</i>											
Keterangan : 1 = Harus menggunakan 2 = Ada alokasi dana dan menggunakan 3 = Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan 4 = Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan 5 = Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana												

10) Kendala

No	Identifikasi Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan	Proyek Terstandar					Proyek berbasis masyarakat					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	<i>Kendala apakah yang sering terjadi dalam proses Penyerahan Hasil Pekerjaan</i>											
Keterangan : 1 = Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi belum selesai 2 = Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai 3 = Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi sudah selesai 4 = Pekerjaan fisik selesai dan laporan administrasi sudah selesai 5 = Pekerjaan fisik selesai dan laporan administrasi sudah selesai dan hasilnya memuaskan												

BAB V

DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Proyek-proyek yang dijadikan bahan penelitian

Proyek-proyek yang digunakan sebagai bahan penelitian antara lain :

a. Proyek yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar

- 1) Proyek pembangunan jalan poros/evakuasi akses huntap kepuharjo (mandiri)
Dengan nilai kontrak Rp.148.002.000,-, di laksanakan oleh CV. Wirasada Karya, mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan metode pengadaan langsung, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi adalah 45 hari kalender dan proyek dilaksanakan pada tahun 2012.
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Pembangunan Jaringan Servis dan SR Air limbah di Sinduadi)
Dengan nilai kontrak Rp.608.443.000,-, di laksanakan oleh CV. Dua Putra Mandiri, mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan metode Pemilihan Langsung melalui ULP, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi adalah 120 hari kalender dan proyek dilaksanakan pada tahun 2013.
- 3) Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Ngaglik (Type 70)
Dengan nilai kontrak Rp.214.091.000,-, di laksanakan oleh CV. Aryuka Builder, mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan metode Pemilihan Langsung melalui ULP, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi adalah 120 hari kalender dan proyek dilaksanakan pada tahun 2015.

b. Proyek yang menggunakan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

- 1) Jalan Akses Huntap Batur (Sisi Selatan), Kepuharjo
Dengan nilai kontrak Rp.112.987.000,- + Swadaya Rp.500.000,-, di laksanakan oleh masyarakat, mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan metode Penunjukan langsung, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi adalah 90 hari kalender dan proyek dilaksanakan pada tahun 2014.
- 2) Saluran Air limbah Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM-SLBM "Danikerto" Wonorejo RT 01/RW07 (Danikerto), Sariharjo, Ngaglik.

Dengan nilai kontrak Rp.446.026.670,- + Swadaya Rp.14.281.000,-, di laksanakan oleh masyarakat, mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan metode Penunjukan langsung, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi adalah 120 hari kalender dan proyek dilaksanakan pada tahun 2014.

3) Rumah tinggal, Kelompok Pemukiman Pangukrejo Bangkit I (Type 36)

Dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000,- + Swadaya sesuai kemampuan warga, di laksanakan oleh masyarakat, mekanisme pemilihan penyedia jasa dengan metode penunjukan langsung, waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi adalah 90 hari kalender dan proyek dilaksanakan pada tahun 2013.

5.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat

Tabel 5.1 Pihak terlibat dalam proyek jalan aspal berbasis masyarakat

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Perencanaan/ Persiapan	1. Pemerintah (Pemprov, Pemkab) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMC)
b.	Perancangan	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Konsultan (NMC, DMC) 3. Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).
c.	Pengadaan/ Pelelangan/ Procurement	1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM, Masyarakat penerima program) 3. Penyedia Barang/Supplier
d.	Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi	1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Konsultan NMC, DMC 3. Masyarakat (BKM/TPK, PP/KP dan Masyarakat penerima program) 4. Supplier material dan Supplier tenaga kerja
e.	Pengoperasian/ Penyerahan Hasil Pekerjaan	1. Masyarakat (TPK, BKM, PP/KP) 2. Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator)

Tugas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat :

a. Project Management Unit (PMU)

PMU adalah penanggung jawab umum pelaksanaan REKOMPAK-JRF yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tugas pokok PMU adalah : menjamin kelancaran pelaksanaan teknis dan administrasi proyek REKOMPAK-JRF, menetapkan jumlah dan nama kelurahan sasaran, menyiapkan pedoman-pedoman pelaksanaan REKOMPAK-JRF, mengarahkan, memantau dan menilai kinerja konsultan pelaksana, melakukan proses pengadaan dan pembayaran konsultan pelaksana. Tugas khusus PMU adalah : memfasilitasi peningkatan kapasitas pemprov/kota/kabupaten dan pengendalian konsultan yang bertanggung jawab mengawal pelaksanaan Replikasi REKOMPAKJRF, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan mengalokasikan stimulan dana BDL.

b. National Management Consultant (NMC)

NMC adalah konsultan di tingkat nasional yang berfungsi membantu PMU Rekompak dalam memantau dan mengendalikan keseluruhan pelaksanaan proyek. Tugas dan tanggung jawab NMC : menyusun dan menyiapkan seluruh pedoman-pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF, melakukan diseminasi/pelatihan/coaching kepada (koordinator provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan konsultan replikasi) yang terkait dengan pedoman-pedoman Replikasi REKOMPAK-JRF, mengendalikan DMC (konsultan yang bertanggungjawab mengawal replikasi), melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus Replikasi REKOMPAK-JRF di tingkat masyarakat maupun di tingkat Kota/Kabupaten terhadap kualitas substansi dan membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas konsultan kepada kepala PMU secara berkala.

c. Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi berperan memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF di wilayah kerjanya.

d. District Management Consultant (DMC)

DMC adalah konsultan di tingkat provinsi yang bertugas membantu PMU Rekompak dan bertanggung jawab kepada NMC dalam pengendalian pelaksanaan proyek di wilayah kerjanya. DMC berperan dalam melaksanakan pendampingan/bantuan teknis di tingkat provinsi, tugas DMC antara lain : membentuk dan mengendalikan koordinator lapangan (korlap), yang bertindak sebagai konsultan pelaksana replikasi di tingkat kabupaten, dan membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan fasilitasi Replikasi REKOMPAK-JRF, melakukan fasilitasi dan bantuan teknis kepada Korlap dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana Replikasi REKOMPAK-JRF, melakukan penguatan kapasitas korlap dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendampingan pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF di wilayahnya, melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus replikasi di tingkat masyarakat maupun di tingkat kabupaten/kota untuk menjamin kualitas pelaksanaan program dan kinerja korlap dan membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas DMC kepada NMC secara berkala.

e. Pemerintah Kabupaten/Kota

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF di tingkat kota/kabupaten. Tugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain : memverifikasi data calon lokasi yang akan diusulkan ke Pemerintah Pusat, Mengangkat PJOK di tingkat kecamatan untuk membantu administrasi pencairan dana BDL, mendukung koordinasi dan kerjasama antar para pelaksana Replikasi REKOMPAK-JRF, mengalokasikan dana penyusunan RPP, mengalokasikan BOP secara tepat waktu dan tepat kebutuhan, mensosialisasikan Replikasi REKOMPAK-JRF kepada instansi pemerintah di tingkat kota/kabupaten termasuk kecamatan, kelurahan/desa dinas di wilayahnya, memadukan kebutuhan, rencana, dan program RPP melalui penetapan kebijakan program pemerintah kota/kabupaten, memfasilitasi pelatihan/lokakarya untuk Pelaksanaan Replikasi REKOMPAKJRF, mendorong partisipasi masyarakat dan bersinergi dengan kelompok peduli dalam melakukan penataan permukiman/pembangunan mengacu pada RPP,

melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan, bekerjasama dengan BPBD Kabupaten/kota dan mengawal Dokumen RPP.

f. Pemerintah Kecamatan/PJOK tingkat kecamatan

Sebagai pelaksana Replikasi REKOMPAK-JRF di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab atas aspek administrasi dan substansi pelaksanaan proyek di dalam wilayah kerjanya. Tugas dari PJOK tingkat kecamatan antara lain : memantau proses pelaksanaan Replikasi Penataan lingkungan permukiman yang berorientasi pada PRB di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan, menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (berdasarkan SPPB yang telah ditandatangani) kepada SNVT Provinsi untuk ditindaklanjuti dengan pencairan dana BDL Replikasi sesuai alokasi yang ditetapkan, melaksanakan pengadministrasian proyek yang meliputi : menandatangani SPPB, memproses SPP ke KPPN, membuat laporan bulanan, membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada bupati/walikota paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RPP dengan konsultan replikasi dan atau Tim Fasilitator, melakukan pemeriksaan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada BKM/TPK/TPP maupun Panitia Pembangunan (PP) dan masyarakat agar sesuai dengan usulan yang diajukan, mengawal Dokumen RPP.

g. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagai sasaran lokasi pembangunan, akan memanfaatkan kelembagaan kepemimpinan masyarakat yang ada (BKM/TPK) dalam pengambilan kebijakan dan pengendalian program pembangunan di desa.

h. BKM/TPK

Tugas BKM/TPK memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Secara rinci tugas dan tanggung jawab BKM/TPK antara lain : membantu sosialisasi awal Replikasi REKOMPAK-JRF ke seluruh masyarakat desa

sasaran, memfasilitasi pendaftaran dan pengusulan relawan-relawan masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel, memfasilitasi rebug pembentukan Tim Inti Perencana (TIP) dan Panitia Pelaksana (PP) dan relawan-relawan permukiman dari warga setempat, Memfasilitasi penyelenggaraan FGD, memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya, memfasilitasi review dokumen pembangunan, memfasilitasi penyusunan dokumen RPP (5 tahun) dan program tahunan oleh masyarakat, mendorong tumbuh-berkembangnya proses pembangunan partisipatif di wilayah, memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan RPP peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan, memfasilitasi TIP, PP dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja mandiri, memfasilitasi upaya-upaya untuk menggalang kepedulian, dukungan serta kontribusi potensi sumber daya yang ada (baik keahlian, pengetahuan, dana, maupun informasi, dan lain-lain) di wilayah, Berkoordinasi dengan fasilitator, relawan masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF, memfasilitasi keberlanjutan Replikasi REKOMPAK-JRF, mendorong tumbuhnya lembaga lokal Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat desa, Bersama-sama dengan pemerintah desa, mengawal Dokumen RPP.

i. PP/KP

Panitia Pelaksana/PP merupakan panitia pelaksana pembangunan yang bertugas melaksanakan pembangunan dan mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada BKM/TPK. Kelompok Pemukim/KP adalah pelaksana langsung kegiatan pembangunan huntap pasca bencana. Tugas pokok dari PP sebagai berikut : merencanakan kegiatan pembangunan BDL huntap atau desa, berkomitment menjalankan amanah untuk mengelola BDL dengan menerapkan prinsip transparansi, dan akuntabel sesuai kegiatan, menjamin implementasi pembangunan infrastruktur sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, memfasilitasi pertemuan dengan warga di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, membuat pelaporan pemanfaatan dana BDL, baik

LPD maupun LPJ kepada BKM/TPK, berkoordinasi dengan para pelaku lainnya.

j. TIP

Tim Inti Perencana adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan antara 8 s/d 15 orang relawan yang berada di wilayah desa. Peran dan tugas TIP adalah melakukan fasilitasi terjadinya rebug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga khususnya dalam rangka proses improvement, pengkajian dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) atau penyusunan dokumen RPP bagi desa-desa yang belum memiliki dokumen RPP.

k. Fasilitator

Tugas fasilitator adalah melaksanakan pendampingan di tingkat masyarakat, sebagai pelaksana proyek dan sebagai pemberdaya masyarakat. Tugas fasilitator sebagai pelaksana proyek antara lain : melaksanakan Replikasi REKOMPAK-JRF sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, menjaga proyek agar tidak terjadi salah sasaran dan salah penanganan, mencatat dan mendokumentasikan semua kemajuan proyek dan Melaporkan kemajuan proyek kepada DMC melalui koordinator lapangan. Tugas fasilitator sebagai pemberdaya proyek antara lain : melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi penyadaran masyarakat, melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

l. Masyarakat penerima program

Merupakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan proyek dan berada di wilayah pelaksanaan proyek.

m. Suplier bahan bangunan

Suplier bertugas menyuplai material bahan.

n. Suplier tenaga

Suplier tenagabertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki sesuai dengan kontrak perjanjian.

5.3 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan saluran air limbah berbasis masyarakat

Tabel 5.2 Pihak terlibat dalam proyek saluran air limbah berbasis masyarakat

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Perencanaan/ Persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Kabupaten/SKPD terkait, Camat, Lurah, Fasilitator, Tenaga Sanitari/Puskesmas /Satker PLPP) 2. Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak) 3. Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM
b.	Perancangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Pemda/DPUP, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Masyarakat (KSM, Tokoh masyarakat dan Masyarakat pengguna)
c.	Pengadaan/ Pelelangan/ Procurement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. Masyarakat (KSM, Masyarakat) 3. Suplier bahan bangunan
d.	Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. KSM 3. Masyarakat penerima proyek 4. Suplier material 5. Suplier tenaga kerja
e.	Pengoperasian/ Penyerahan Hasil Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas/DPUP, Kecamatan, Desa dan TFL) 2. Masyarakat (KSM, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat penerima program)

Tugas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat :

a. Pemerintah Pusat : Direktorat PPLP, Ditjen Cipta Karya Kementerian PU

Merupakan Tim Koordinasi Kementerian penyelenggaran DAK SLBM yang dibentuk oleh Menteri. Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusakan sosial. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi : penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan fasilitasi penyediaan tanah, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

- b. Pemerintah Provinsi : Satker PPLP Provinsi, Dinas terkait
Merupakan Tim Koordinasi Provinsi penyelenggara DAK SLBM yang dibentuk oleh Gubernur.
- c. Pemerintah Kabupaten : SKPD Teknis
Merupakan Tim Koordinasi DAK Infrastruktur Kabupaten/Kota dan pelaksana DAK SLBM. Tugas dan tanggung jawab SKPD Teknis antara lain : mengusulkan anggaran proyek SLBM ke Dirjen Cipta Karya, mengadakan sosialisasi DAK SLBM ke Camat/Lurah daerah rawan sanitasi, menyiapkan, menyeleksi dan melatih Tenaga Fasilitator Lapangan, menetapkan calon lokasi SLBM, mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan proyek.
- d. Pemerintah Kecamatan
Tim Koordinasi DAK Infrastruktur Kabupaten/Kota yang melaksanakan sosialisasi kegiatan DAK SLBM kepada warga masyarakat khususnya Pemerintah Desa.
- e. Pemerintah Desa
Berperan sebagai pelaksana kegiatan DAK SLBM di tingkat Desa yang melaksanakan sosialisasi kegiatan DAK SLBM kepada warga masyarakat rawan sanitasi.
- f. Masyarakat : KSM
Berperan sebagai wakil masyarakat di daerah pelaksanaan yang bertugas untuk mensosialisasikan, merencanakan, melaksanakan, mengawasi/memonitor, supervisi, mengelola kegiatan pembangunan, serta mengelola sarana SLBM yang telah dibangun.
- g. Fasilitator
Bertugas melakukan pendampingan di lokasi kegiatan DAK SLBM. Tugas pokok Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL antara lain : pada tahap seleksi masyarakat (mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan daftar kampung dari dinas-dinas bersangkutan, membantu

menyiapkan daftar longlist kampung padat/kumuh/miskin sesuai form dan membuat laporan kepada Kepala Dinas, melakukan pengecekan lapangan sesuai persyaratan teknis minimal bersama TFL Pemberdayaan, mengisi form shortlist kampung berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan minta pengesahan dari Kepala Dinas, mengundang stakeholder masyarakat dalam shortlist untuk menyelenggarakan pertemuan/sosialisasi Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat SLBM, mendampingi masyarakat dalam melakukan RPA (Rapid Participatory Appraisal atau penilaian cepat secara partisipatif di kampung yang mengirim undangan dan memfasilitasi community self-selection stakeholders meeting atau pertemuan masyarakat untuk seleksi sendiri bersama dengan tim TFL pendamping, membuat Berita Acara seleksi kampung serta menyusun laporan berkala ke dinas penanggung jawab kabupaten/kota).

Pada saat penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (memfasilitasi pertemuan awal masyarakat, mengkomunikasikan kepada Pimpinan Kegiatan/Dinas terkait tentang jadwal dan agenda pertemuan untuk penyusunan RKM, memfasilitasi pertemuan masyarakat bersama dengan TFL-Pemberdayaan untuk penentuan calon penerima manfaat program, pemilihan sarana teknologi sanitasi, membantu KSM dalam menyusun perencanaan teknis bangunan DED, pembentukan dan pengesahan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), penyusunan rencana kontribusi, dan kegiatan lain sampai tersusunnya RKM, membantu masyarakat melakukan survey harga-harga material yang dibutuhkan, harga satuan upah, RAB/Rencana Anggaran Biaya, RP/Rencana Pendanaan, rencana pengadaan, finalisasi pengadaan lahan sesuai jadwal pelaksanaan, memfasilitasi Pembuatan dokumen RKM dan meminta pengesahan/legalisasi RKM kepada semua stakeholder, memfasilitasi pertemuan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk melaporkan, perkembangan kegiatan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat, memfasilitasi Pembuatan Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan dan menyusun laporan secara berkala ke dinas penanggung jawab di Kabupaten/Kota.

Pada pelaksanaan konstruksi (Melakukan persiapan survey dan pengukuran dengan masyarakat untuk pembangunan sarana, menyelenggarakan pelatihan KSM, Mandor/pengawas dan Tukang sesuai perencanaan, membantu KSM dalam melakukan supervise dan pengarahan pada saat konstruksi, meyakinkan bahwa semua rencana berjalan sesuai RKM, termasuk kontribusi dari berbagai pihak, tenaga kerja, tukang, material dan gudang, alat-alat pengawasan material, dan lainnya, memfasilitasi pertemuan rutin masyarakat, memberikan persetujuan terhadap semua pengeluaran dana KSM dan administrasi keuangannya untuk pelaporan, ikut memberikan persetujuan keluar-masuknya material sesuai kualitas yang dipersyaratkan, membantu penyusunan laporan keuangan dan ajuan pencairan dana sesuai perkembangan fisik, melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja, membuat Berita Acara pengecekan final teknis, kelembagaan, dan keuangan, melaporkan seluruh perkembangan kegiatan dan kemajuan pekerjaan kepada Dinas penanggung jawab di kabupaten/kota).

Pada saat penyerahan hasil kegiatan (membantu SKPD dalam menyelenggarakan pelatihan bagi operator dan pengguna, menyelenggarakan evaluasi kegiatan bersama dengan dinas-dinas terkait, menyelenggarakan kegiatan evaluasi partisipatif bersama masyarakat, membantu persiapan peresmian sarana, melakukan pengawasan pekerjaan fisik dan tenaga kerja, serta pendampingan pada saat ujicoba pengoperasian prasarana, membantu KSM dalam membuat Berita Acara kegiatan sesuai kebutuhan).

h. Suplier bahan bangunan

Suplier bahan bangunan bertugas menyuplai material bahan bangunan sesuai dengan kontrak perjanjian.

i. Suplier tenaga kerja

Suplier tenaga kerjabertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki sesuai dengan kontrak perjanjian.

5.4 Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

Tabel 5.3 Pihak terlibat dalam proyek rumah tinggal berbasis masyarakat

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Perencanaan/ Persiapan	1. Pemerintah (Pemprov, Pemkab) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMC)
b.	Perancangan	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Konsultan (NMC, DMC) 3. Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).
c.	Pengadaan/ Pelelangan/ Procurement	1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM) 3. Penyedia Barang/Supplier
d.	Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi	1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Konsultan NMC, DMC 3. Masyarakat (BKM, TIP, PP dan Masyarakat) 4. Supplier bahan bangunan dan Supplier tenaga kerja
e.	Pengoperasian/ Penyerahan Hasil Pekerjaan	1. Masyarakat (KP/Kelompok Pemukiman, BKM) 2. Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator)

Tugas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat :

a. Project Management Unit (PMU)

PMU adalah penanggung jawab umum pelaksanaan REKOMPAK-JRF yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tugas pokok PMU adalah : menjamin kelancaran pelaksanaan teknis dan administrasi proyek REKOMPAK-JRF, menetapkan jumlah dan nama kelurahan sasaran, menyiapkan Pedoman-pedoman pelaksanaan REKOMPAK-JRF, mengarahkan, memantau dan menilai kinerja konsultan pelaksana, melakukan proses pengadaan dan pembayaran konsultan pelaksana. Tugas khusus PMU adalah : memfasilitasi peningkatan kapasitas pemprov/kota/kabupaten dan pengendalian konsultan yang bertanggung jawab mengawal pelaksanaan Replikasi REKOMPAKJRF, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan mengalokasikan stimulan dana BDL.

b. National Management Consultant (NMC)

NMC adalah konsultan di tingkat nasional yang berfungsi membantu PMU Rekompak dalam memantau dan mengendalikan keseluruhan pelaksanaan proyek. Tugas dan tanggung jawab NMC : menyusun dan menyiapkan seluruh pedoman-pedoman yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF, melakukan diseminasi/pelatihan/coaching kepada (koordinator provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan konsultan replikasi) yang terkait dengan pedoman-pedoman Replikasi REKOMPAK-JRF, mengendalikan DMC (konsultan yang bertanggungjawab mengawal replikasi), melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus Replikasi REKOMPAK-JRF di tingkat masyarakat maupun di tingkat Kota/Kabupaten terhadap kualitas substansi dan membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas konsultan kepada kepala PMU secara berkala.

c. Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi berperan memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF di wilayah kerjanya.

d. District Management Consultant (DMC)

DMC adalah konsultan di tingkat provinsi yang bertugas membantu PMU Rekompak dan bertanggung jawab kepada NMC dalam pengendalian pelaksanaan proyek di wilayah kerjanya. DMC berperan dalam melaksanakan pendampingan/bantuan teknis di tingkat provinsi, tugas DMC antara lain : membentuk dan mengendalikan koordinator lapangan (korlap), yang bertindak sebagai konsultan pelaksana replikasi di tingkat kabupaten, dan membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan fasilitasi Replikasi REKOMPAK-JRF, melakukan fasilitasi dan bantuan teknis kepada Korlap dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana Replikasi REKOMPAK-JRF, melakukan penguatan kapasitas korlap dan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendampingan pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF di wilayahnya, melakukan monitoring dan supervisi pada pelaksanaan siklus replikasi di tingkat masyarakat maupun di tingkat kabupaten/kota untuk menjamin

kualitas pelaksanaan program dan kinerja korlap dan membuat laporan perkembangan hasil tugas-tugas DMC kepada NMC secara berkala.

e. Pemerintah Kabupaten/Kota

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF di tingkat kota/kabupaten. Tugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain : memverifikasi data calon lokasi yang akan diusulkan ke Pemerintah Pusat, Mengangkat PJOK di tingkat kecamatan untuk membantu administrasi pencairan dana BDL, mendukung koordinasi dan kerjasama antar para pelaksana Replikasi REKOMPAK-JRF, mengalokasikan dana penyusunan RPP, mengalokasikan BOP secara tepat waktu dan tepat kebutuhan, mensosialisasikan Replikasi REKOMPAK-JRF kepada instansi pemerintah di tingkat kota/kabupaten termasuk kecamatan, kelurahan/desa dinas di wilayahnya, memadukan kebutuhan, rencana, dan program RPP melalui penetapan kebijakan program pemerintah kota/kabupaten, memfasilitasi pelatihan/lokakarya untuk Pelaksanaan Replikasi REKOMPAKJRF, mendorong partisipasi masyarakat dan bersinergi dengan kelompok peduli dalam melakukan penataan permukiman/pembangunan mengacu pada RPP, melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi kegiatan, bekerjasama dengan BPBD Kabupaten/kota dan mengawal Dokumen RPP.

f. Pemerintah Kecamatan/PJOK tingkat kecamatan

Sebagai pelaksana Replikasi REKOMPAK-JRF di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab atas aspek administrasi dan substansi pelaksanaan proyek di dalam wilayah kerjanya. Tugas dari PJOK tingkat kecamatan antara lain : memantau proses pelaksanaan Replikasi Penataan lingkungan permukiman yang berorientasi pada PRB di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan, menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (berdasarkan SPPB yang telah ditandatangani) kepada SNVT Provinsi untuk ditindaklanjuti dengan pencairan dana BDL Replikasi sesuai alokasi yang ditetapkan, melaksanakan pengadministrasian proyek yang meliputi: menandatangani SPPB, memproses SPP ke KPPN, membuat laporan bulanan, membuat laporan

pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada bupati/walikota paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan RPP dengan konsultan replikasi dan atau Tim Fasilitator, melakukan pemeriksaan penggunaan dana yang telah disalurkan kepada BKM/TPK/TPP maupun Panitia Pembangunan (PP) dan masyarakat agar sesuai dengan usulan yang diajukan, mengawal Dokumen RPP.

g. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagai sasaran lokasi pembangunan, akan memanfaatkan kelembagaan kepemimpinan masyarakat yang ada (BKM/TPK) dalam pengambilan kebijakan dan pengendalian program pembangunan di desa.

h. BKM/TPK

Tugas BKM/TPK memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Secara rinci tugas dan tanggung jawab BKM/TPK antara lain : membantu sosialisasi awal Replikasi REKOMPAK-JRF ke seluruh masyarakat desa sasaran, memfasilitasi pendaftaran dan pengusulan relawan-relawan masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel, memfasilitasi rebug pembentukan Tim Inti Perencana (TIP) dan Panitia Pelaksana (PP) dan relawan-relawan permukiman dari warga setempat, Memfasilitasi penyelenggaraan FGD, memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya, memfasilitasi review dokumen pembangunan, memfasilitasi penyusunan dokumen RPP (5 tahun) dan program tahunan oleh masyarakat, mendorong tumbuh-berkembangnya proses pembangunan partisipatif di wilayah, memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan RPP peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan, memfasilitasi TIP, PP dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja mandiri, memfasilitasi upaya-upaya untuk menggalang kepedulian, dukungan serta kontribusi potensi sumber daya yang ada (baik keahlian, pengetahuan, dana, maupun informasi, dan lain-lain) di wilayah, Berkoordinasi dengan fasilitator, relawan masyarakat

untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan Replikasi REKOMPAK-JRF, memfasilitasi keberlanjutan Replikasi REKOMPAK-JRF, mendorong tumbuhnya lembaga lokal Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat desa, Bersama-sama dengan pemerintah desa, mengawal Dokumen RPP.

i. PP/KP

Panitia Pelaksana/PP merupakan panitia pelaksana pembangunan yang bertugas melaksanakan pembangunan dan mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada BKM/TPK. Kelompok Pemukim/KP adalah pelaksana langsung kegiatan pembangunan huntap pasca bencana. Tugas pokok dari PP sebagai berikut : merencanakan kegiatan pembangunan BDL huntap atau desa, berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola BDL dengan menerapkan prinsip transparansi, dan akuntabel sesuai kegiatan, menjamin implementasi pembangunan infrastruktur sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, memfasilitasi pertemuan dengan warga di sekitar lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, membuat pelaporan pemanfaatan dana BDL, baik LPD maupun LPJ kepada BKM/TPK, berkoordinasi dengan para pelaku lainnya.

i. TIP

Tim Inti Perencana adalah kelompok masyarakat yang beranggotakan antara 8 s/d 15 orang relawan yang berada di wilayah desa. Peran dan tugas TIP adalah melakukan fasilitasi terjadinya rebug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga khususnya dalam rangka proses improvement, pengkajian dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) atau penyusunan dokumen RPP bagi desa-desa yang belum memiliki dokumen RPP.

j. Fasilitator

Tugas fasilitator adalah melaksanakan pendampingan di tingkat masyarakat, sebagai pelaksana proyek dan sebagai pemberdaya masyarakat. Tugas fasilitator sebagai pelaksana proyek antara lain : melaksanakan Replikasi REKOMPAK-JRF sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, menjaga proyek agar tidak terjadi salah sasaran dan salah penanganan, mencatat dan

mendokumentasikan semua kemajuan proyek dan Melaporkan kemajuan proyek kepada DMC melalui koordinator lapangan. Tugas fasilitator sebagai pemberdaya proyek antara lain : melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi penyadaran masyarakat, melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

k. Masyarakat penerima program

Merupakan masyarakat yang terkena dampak pembangunan proyek dan berada di wilayah proyek.

l. Suplier bahan bangunan

Suplier bahan bangunan bertugas menyuplai material bahan bangunan sesuai dengan kontrak perjanjian.

m. Suplier tenaga kerja

Suplier tenaga kerja bertugas melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki sesuai dengan kontrak perjanjian.

5.5 Penerapan Fungsi manajemen konstruksi dalam aspek mutu, biaya, waktu

a. Penerapan Fungsi Manajemen konstruksi dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada proyek konstruksi jalan aspal berbasis masyarakat

Tabel 5.4 Penerapan fungsi manajemen konstruksi proyek jalan berbasis masyarakat

No	Fungsi Manajemen Konstruksi	Aspek		
		Mutu	Biaya	Waktu
a	Perencanaan/ Persiapan	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	2 s/d 3 Bulan
b	Perancangan	Sesuai dengan standar Pemerintah (aturan pengaspalan jalan)	Ada anggaran khusus perancangan	2 s/d 3 bulan
c	Pengadaan/ Pelelangan/ Procurement	Memperoleh penyedia/suplier barang dan jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Menggunakan dana BOP pada proyek BDL/ada anggaran khusus pengadaan	1 s/d 2 bulan

d	Pelaksanaan dan pengendalian Kegiatan Konstruksi	Sesuai dengan spesifikasi teknis, Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Rekompak BDL : Rp. 112.987.000,- Swadaya : Rp. 500.000,- Panjang jalan 280,5m1, lebar 4m Luas = 1122m ² Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	2s/d 3 bulan
e	Pengoperasian/ Penyerahan Hasil Pekerjaan	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Menggunakan biaya dari masyarakat	1 s/d 2 bulan

Berdasarkan tabel penerapan fungsi manajemen dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada proyek konstruksi jalan aspal berbasis masyarakat, dapat diketahui bahwa :

- Mutu pekerjaan proyek konstruksi jalan aspal mulai dari tahap perencanaan hingga pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan standar Pemerintah.
- Biaya pekerjaan proyek konstruksi jalan aspal mulai dari tahap perencanaan hingga pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan menggunakan biaya dari Pemerintah/Anggaran khusus Pembangunan dan swadaya masyarakat.

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya per m}^2 &= \frac{(\text{Biaya BDL} + \text{Biaya Swadaya})}{(\text{panjang jalan} \times \text{lebar jalan})} \\
 &= \frac{(\text{Rp. } 112.987.000,- + \text{Rp. } 500.000,-)}{(280,5\text{m} \times 4\text{m})} \\
 &= \frac{\text{Rp. } 113.487.000,-}{1122\text{m}^2} \\
 &= \text{Rp. } 101.147,10
 \end{aligned}$$

- Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat adalah tahap perencanaan/persiapan 2 s/d 3 bulan, tahap perancangan 2 s/d 3 bulan, tahap pengadaan 1 s/d 2 bulan, tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi 2 s/d 3 bulan dan tahap penyerahan hasil 1 s/d 2 bulan.

b. Penerapan Fungsi Manajemen konstruksi dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada proyek konstruksi saluran air limbah berbasis masyarakat

Tabel 5.5 Penerapan fungsi manajemen konstruksi proyek saluran air limbah berbasis masyarakat

No	Fungsi Manajemen Konstruksi	Aspek		
		Mutu	Biaya	Waktu
a	Perencanaan/ Persiapan	Sesuai dengan standar Pemerintah/sesuai DAK SLBM	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	2 s/d 3 bulan
b	Perancangan	Sesuai dengan standar Pemerintah	Menggunakan biaya perencanaan dan biaya swadaya masyarakat	1 s/d 2 bulan
c	Pengadaan/ Pelelangan/ Procurement	Mutu lebih buruk dari standar Pemerintah	Tidak ada biaya pengadaan	Kurang dari 1 bulan
d	Pelaksanaan dan pengendalian Kegiatan Konstruksi	Sesuai dengan standar Pemerintah	Pemda = Rp. 446.026.670 Luas lahan 200m ² , kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 6' = 414m ¹ , Pipa PVC D 4' = 1071m ¹ , pipa PVC D 2' = 58m' Swadaya masyarakat = Rp. 14.281.000 (menggunakan biaya konstruksi dari pemerintah dan biaya swadaya masyarakat)	Kurang dari 1 bulan
e	Pengoperasian/ Penyerahan Hasil Pekerjaan	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Tidak ada biaya dan biasanya menggunakan dana swadaya masyarakat	Kurang dari 1 bulan

Berdasarkan tabel penerapan fungsi manajemen dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada proyek konstruksi saluran air limbah berbasis masyarakat, dapat diketahui bahwa :

- a. Mutu pekerjaan proyek konstruksi saluran air limbah mulai dari tahap perencanaan hingga pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan standar Pemerintah.

- b. Biaya pekerjaan proyek konstruksi saluran air limbah berbasis masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan menggunakan biaya dari Pemerintah/Anggaran khusus Pembangunan dan swadaya masyarakat.

Total anggaran yang tersedia :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Pemerintah (IPAL + Pemipaan + pajak material 10\%)} + \text{swadaya masyarakat} \\
 &= (\text{Rp}217.862.600,- + \text{Rp}213.464.700,- + \text{Rp}28.980.320,-) + \text{Rp}14.281.000,- \\
 &= \text{Rp}446.026.670,- + \text{Rp}14.281.000,- \\
 &= \text{Rp}460.307.670,-
 \end{aligned}$$

Dengan rincian volume pekerjaan luas lahan 200m², kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 6' = 414m¹, Pipa PVC D 4' = 1071m¹, pipa PVC D 2' = 58m' + bangunan IPAL.

$$\text{Panjang jaringan IPAL} = 414\text{m}^1 + 1071\text{m}^1 + 58\text{m}' = 1543\text{m}^1$$

Biaya pemipaan per m ¹	(biaya pemipaan)
=	—————
	(panjang pipa pemipaan)
	(Rp. 213.464.700,-)
	—————
	(414m + 1.071m + 58m)
	Rp. 213.464.700,-)
=	—————
	1543m ¹
=	Rp138.343,94

- c. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek saluran air limbah berbasis masyarakat adalah tahap perencanaan/persiapan 2 s/d 3 bulan, tahap perancangan 1 s/d 2 bulan, tahap pengadaan kurang dari 1 bulan, tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi kurang dari 1 bulan dan tahap penyerahan hasil kurang dari 1 bulan.

c. Penerapan Fungsi Manajemen konstruksi dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada proyek konstruksi rumah tinggal berbasis masyarakat

Tabel 5.6 Penerapan fungsi manajemen konstruksi proyek rumah tinggal berbasis masyarakat

No	Fungsi Manajemen Konstruksi	Aspek		
		Mutu	Biaya	Waktu
a	Perencanaan/ Persiapan	Sesuai dengan standar Pemerintah/Sesuai Pedoman Teknis Pembangunan BDR & BDL	Menggunakan biaya umum perencanaan	2 s/d 3 bulan
b	Perancangan	Mutu sesuai dengan standar pemerintah rumah tahan gempa dalam aturan teknis BDR/ Pedoman Teknis pembangunan rumah tahan gempa dan rumah sehat PU Cipta Karya.	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	2 s/d 3 bulan
c	Pengadaan/ Pelelangan/ Procurement	Memperoleh penyedia bahan bangunan dan penyedia tenaga terampil sesuai dengan yang dibutuhkan (Mutu sesuai dengan standar pemerintah)	Tidak ada anggaran pengadaan	1 s/d 2 bulan
d	Pelaksanaan dan pengendalian Kegiatan Konstruksi	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Ada anggaran khusus konstruksi Rekompak = Rp. 30.000.000 + swadaya masyarakat sesuai kemampuan Type 36	3 s/d 4 bulan
e	Pengoperasian/ Penyerahan Hasil Pekerjaan	diharapkan sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Menggunakan dana Kelompok Pemukiman (KP)/ ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Antara 1 s/d 2 bulan

Berdasarkan tabel penerapan fungsi manajemen dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada proyek konstruksi pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat,

dapat diketahui bahwa :

- a. Mutu pekerjaan proyek konstruksi pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan standar Pemerintah.
- b. Biaya pekerjaan proyek konstruksi pembangunan rumah tinggal mulai dari tahap perencanaan hingga pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan menggunakan biaya dari Pemerintah/Anggaran khusus Pembangunan dan swadaya masyarakat. Total anggaran (Dana Pemerintah + Dana swadaya masyarakat) adalah = (Rp.30.000.000,- + swadaya masyarakat sesuai kemampuan) dengan luas rumah sekitar 36m². Jadi besar biaya per m² untuk rumah sekitar Rp833.333,33 + swadaya masyarakat sesuai kemampuan.
- c. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah tahap perencanaan/persiapan 2 s/d 3 bulan, tahap perancangan 2 s/d 3 bulan, tahap pengadaan 1 s/d 2 bulan, tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi 3 s/d 4 bulan dan tahap penyerahan hasil 1 s/d 2 bulan.

5.6 Data manajemen konstruksi berbasis masyarakat pada proyek pembangunan jalan aspal

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan aspal

Tabel 5.7 Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan aspal

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 Bulan terakhir (tahun sebelum proyek dibangun)
b.	Biaya	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
c.	Mutu	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah
d.	Mekanisme perencanaan	Sosialisasi REKOMPAK (dinilai sederhana)
e.	Dasar usulan proyek	Upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi
f.	Pihak terlibat dan ketugasanya	1. Pemerintah (Pemprov, Pemkab) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMC)
g.	Uraian kegiatan	1. Loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten 3. Penetapan lokasi 4. Pengadaan dan pelatihan praturgus Konsultan Kabupaten/kota 5. Pengadaan dan Pelatihan Praturgus Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF
h.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek. Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut. 2. Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut. 3. Daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan. 4. Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.
i.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase penuh
j.	Administrasi	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (dinilai sederhana)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	SDM yang kurang memahami pentingnya pelaksanaan proyek
m.	Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan publik yang diambil lebih efektif, memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat. 2. Proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan.

b. Perancangan Proyek Pembangunan Jalan aspal

Tabel 5.8 Perancangan Proyek Pembangunan Jalan aspal

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perancangan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah (aturan pengaspalan jalan)
d.	Mekanisme perancangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RPP 2. Sinkronisasi RPP (dinilai sederhana)

e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Konsultan (NMC, DMC) 3. Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).
f.	Uraian kegiatan	<p>Penyusunan RPP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi Sosial dan Wilayah 2. Sosialisasi tingkat desa 3. Sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW) 4. Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) 5. Pembentukan Tim Inti Perencana (TIP) 6. Pelatihan BKM-TPK-TIP 7. Pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus 8. Penyiapan Peta Dasar 9. Tinjauan/Review Dokumen Pembangunan 10. Pemetaan Swadaya 11. Rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya 12. Rembug Perumusan Visi dan Misi Desa 13. Rembug pemecahan masalah 14. Rembug penyusunan rencana tata ruang desa 15. Rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana 16. Sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah) 17. Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1 18. Konsultasi publik 19. Verifikasi program 20. Rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman
g.	Hasil	Tersusunnya Dokumen RPP
h.	Partisipasi masyarakat	<p>Berpartisipasi dengan prosentase sedang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan dalam proses perancangan 2. Memberikan gambaran terhadap faktor-faktor pendukung dan penghalang proyek konstruksi yang akan dijalankan
i.	Administrasi	Pelaporan Dokumen RPP dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Pemerintah Desa
k.	Sumber Pendanaan	World Bank
l.	Cara Pencairan	Biaya perancangan dicairkan bila proses perancangan telah selesai

m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Masyarakat berperan aktif dalam proses perancangan.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan aspal

Tabel 5.9 Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan aspal

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Menggunakan dana BOP pada proyek BDL/ada anggaran khusus pengadaan
c.	Mutu	Memperoleh penyedia/supplier barang dan jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pengadaan	Pengadaan Barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat (dinilai mudah)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM, Masyarakat penerima program) 3. Penyedia Barang/Supplier bahan bangunan
f.	Uraian kegiatan	1. Pembentukan Tim Pengadaan 2. Persiapan Tim Pengadaan 3. Pelelangan 3.1. Pelelangan Umum a. Menyusun dokumen lelang/pengadaan b. Melaksanakan pengumuman secara terbuka c. Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang d. Menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta e. Penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan f. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang g. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang. 3.2. Penunjukan langsung a. Survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan. b. Menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rembug warga. c. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya. d. Penandatanganan kerjasama antara KP dan

		penyedia jasa pemborongan.
g.	Hasil	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase sedang : Ikut menyediakan bahan baku bangunan dengan rekomendasi suplier pemenang.
i.	Administrasi	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh TPK (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor TPK
k.	Sumber Pendanaan	World Bank
l.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
m.	Kendala	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan 1. Bahan yang disediakan suplier tidak sesuai dengan sampel yang diberikan 2. Kurang tersedianya tenaga ahli pelaksana pekerjaan karena waktu proyek hampir bersamaan.
n.	Kelebihan	Masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena jalan dibangun untuk kepentingan bersama warga kampung.

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan aspal

Tabel 5.10 Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan aspal

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	90 hari kalender, 2s/d 3 bulan
b.	Biaya	Rekompak BDL : Rp. 112.987.000,- Swadaya : Rp. 500.000,- Panjang jalan 280,5m1, lebar 4m Luas = 1122m ² Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis, Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan konstruksi	1. Pembentukan Panitia Pembangunan 2. Pelatihan penyusunan DPTL & DED, manajemen konstruksi, administrasi keuangan. 3. Pencairan dana 4. Kontrak masyarakat 5. Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR (dinilai sederhana)

e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Konsultan NMC, DMC 3. Masyarakat (BKM/TPK, PP/KP dan Masyarakat penerima program) 4. Suplier dan Jasa Pemborong/tenaga
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Panitia Pembangunan 2. Survei Teknis dan Harga Satuan 3. Pelatihan/coaching penyusunan DTPL dan DED 4. Penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL), termasuk di dalamnya penyiapan dokumen kajian dampak Sosial dan Lingkungan 5. Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi 6. Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan 7. Proses Pencairan BDL 8. Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing titik kegiatan 9. Pelaksanaan kegiatan fisik 10. Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR
g.	Hasil	Konstruksi bangunan jalan
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi penuh Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan konstruksi jalan dengan cara gotong royong
i.	Administrasi	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencairan Tahap I (40%) 2. Pencairan Tahap II (60%) (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis (lebih mengutamakan kearifan lokal)
l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	Sedang
n.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
o.	Kendala	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
p.	Kelebihan	Kerukunan warga masyarakat terlihat jelas pada proses konstruksi, dalam bentuk gotong royong

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan aspal

Tabel 5.11 Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan aspal

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya dari masyarakat
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan	1. Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES 2. Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	1. Masyarakat (TPK, BKM, PP/KP) 2. Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator)
f.	Uraian kegiatan	1. Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES 2. Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) 3. Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan
g.	Hasil	Bangunan jalan yang siap digunakan
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi penuh/Masyarakat menerima hasil dari pembangunan atau pengaspalan jalan
i.	Administrasi	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh TPK dengan bantuan fasilitator (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Lokasi proyek konstruksi dan kantor operasional TPK
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan

5.7 Data manajemen konstruksi berbasis masyarakat pada proyek pembangunan saluran air limbah

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan saluran air limbah

Tabel 5.12 Perencanaan /Persiapan Proyek Pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah/sesuai DAK SLBM
d.	Mekanisme perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan TFL 2. Sosialisasi program 3. Seleksi lokasi oleh TFL 4. Pembentukan KSM 5. Pengisian data teknis oleh masyarakat (dinilai sederhana)
e.	Dasar usulan proyek	Surat minat/Permohonan bantuan penanganan air limbah dari masyarakat
f.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Kabupaten /SKPD terkait, Camat, Lurah, Fasilitator, Tenaga Sanitari/Puskesmas /Satker PLPP) 2. Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak) 3. Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM
g.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL (penyiapan, seleksi dan pelatihan) 3. Pemilihan Lokasi dengan dua tahap seleksi (daftar panjang/longlist dan daftar pendek/shortlist) 4. Pemicuan Masyarakat sosialisasi tentang perubahan perilaku pola hidup bersih dan sehat 5. Penetapan Lokasi 6. Pembentukan dan Penetapan KSM
h.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Fasilitator telah siap 2. Lokasi proyek telah ditetapkan 3. Masyarakat telah siap dengan rencana program yang akan dilakukan 4. Terbentuknya KSM
i.	Partisipasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu menentukan pengguna 2. Swadaya masyarakat untuk tahap persiapan (berpartisipasi penuh)
j.	Administrasi	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh TFL (dinilai sederhana)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan

m.	Kelebihannya	Warga masyarakat lebih tahu tentang keadaan lapangan yang akan dibangun
----	--------------	---

b. Perancangan Proyek Pembangunan saluran air limbah

Tabel 5.13 Perancangan Proyek Pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya perencanaan dan biaya swadaya masyarakat
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perancangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pelaksanaan Penyusunan RKM 2. Pendanaan dan tahap pencairan dana 3. Verifikasi RKM 4. Perjanjian kerja KSM dengan SKPD (dinilai rumit)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Pemda/DPUP, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Masyarakat (KSM, Tokoh masyarakat dan Masyarakat pengguna)
f.	Uraian kegiatan	Pendampingan TFL Teknis <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan teknologi 2. Pengukuran 3. Gambar/DED 4. RAB 5. Spesifikasi Teknis Pendampingan TFL Sosial <ol style="list-style-type: none"> 1. Klasifikasi kesejahteraan 2. Persiapan tenaga kerja 3. Pembukaan rekening bersama Verifikasi RKM
g.	Hasil	Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang berisi : <ul style="list-style-type: none"> Profil lokasi <ol style="list-style-type: none"> a. Organisasi dan struktur KSM b. Anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART) KSM c. Surat ketersediaan Lahan dan atau persetujuan warga d. Dokumen dan berita acara seleksi kampung e. Penentuan Calon Pengguna f. Pemilihan Teknologi Sanitasi g. DED dan RAB lengkap disertai dengan kurva S h. Rekening bank bersama i. Sumber Pendanaan serta Mekanisme Pencairan Dana dari pemerintah

		j. Pengelolaan Keuangan DAK SLBM k. Rencana Kerja l. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara SATKER/PPK Sanitasi kabupaten/Kota dengan KSM, tentang pemanfaatan DAK SLBM m. Jaminan dari masyarakat pengguna terhadap kesediaan dalam mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana DAK SLBM
h.	Partisipasi masyarakat	Seluruh warga ikut serta mengukur rencana jaringan SR (berpartisipasi penuh)
i.	Administrasi	Pelaporan hasil pekerjaan dilakukan oleh TFL dan KSM (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor PEMDA/DPUP dan Kantor KSM
k.	Sumber Pendanaan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
l.	Cara Pencairan	Setelah RKM jadi baru proses pencairan dana
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL menghasilkan desain yang benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan saluran air limbah

Tabel 5.14 Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	Kurang dari 1 bulan
b.	Biaya	Tidak ada biaya pengadaan
c.	Mutu	Mutu lebih buruk dari standar Pemerintah
d.	Mekanisme pengadaan	Pengadaan Barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat (dinilai sederhana oleh masyarakat)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. Masyarakat (KSM, Masyarakat) 3. Suplier bahan bangunan
f.	Uraian kegiatan	1. Perjanjian kerja KSM dengan SKPD 2. Kontrak perjanjian antara KSM dengan Penyedia bahan bangunan /suplier bahan bangunan dan tenaga ahli
g.	Hasil	Terpilihnya penyedia bahan bangunan/suplier bahan bangunan

h.	Partisipasi masyarakat	Masyarakat/KSM melaksanakan survei harga, ikut mengevaluasi dan mengendalikan mutu bahan bangunan yang digunakan (berpartisipasi penuh)
i.	Administrasi	Pelaporan tahap pelelangan dilakukan oleh KSM dibantu TFL (dinilai sederhana oleh responden)
J.	Tempat	Kantor Pemda/DPUP dan Kantor KSM
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek.
o.	Kelebihan	Suplier yang ditunjuk oleh masyarakat memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar karena berada tidak jauh dari lokasi proyek.

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan saluran air limbah

Tabel 5.15 Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	3 s/d 4 bulan
b.	Biaya	Pemda = Rp. 446.026.670,- Luas lahan 200m ² , kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 6' = 414m ¹ , Pipa PVC D 4' = 1071m ¹ , pipa PVC D 2' = 58m' Pemerintah+swadaya masyarakat = (IPAL + Pemipaan + pajak material 10%) + swadaya masyarakat = (Rp217.862.600,-+Rp213.464.700,-+Rp28.980.320,-) + Rp14.281.000,- = Rp460.307.620,- Swadaya masyarakat = Rp. 14.281.000,- (menggunakan biaya konstruksi dari pemerintah dan biaya swadaya masyarakat)
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme kegiatan konstruksi	1. Pengadaan material 2. Pengadaan tukang/tenaga ahli 3. Pelaksanaan konstruksi (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. KSM 3. Masyarakat penerima proyek 4. Suplier bahan bangunan 5. Tukang/tenaga ahli
f.	Uraian kegiatan	1. Penjelasan teknis konstruksi 2. Pelaksanaan konstruksi dengan tahap : - Rembug warga - Survei pemetaan ulang

		<ul style="list-style-type: none"> - Pembersihan dan penyiapan lahan IPAL - Penyiapan peralatan K3, sign board, turap pengaman galian - Penyiapan direksi keet, gudang, area kerja - Pengadaan dan pembelian barang oleh panitia pengadaan - Pembagian grup dan area kerja - Pelaksanaan pekerjaan - Monitoring dan evaluasi
g.	Hasil	Konstruksi bangunan IPAL dan SR
h.	Partisipasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gotong royong dalam proses pembangunan 2. Menyediakan konsumsi 3. Antusias masyarakat untuk menyambung SR tinggi (berpartisipasi dengan prosentase sedang)
i.	Administrasi	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencairan dana tahap I sebesar 40% dengan progres konstruksi 0% 2. Pencairan dana tahap II sebesar 30% dengan progres konstruksi 30% 3. Pencairan dana tahap III sebesar 30% dengan progres konstruksi 60% (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis
l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi penyedia jasa yang dibutuhkan tapi tidak biasa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan mayoritas di perpipaan 2. Selisih harga dari perencanaan & pengadaan digunakan untuk penambahan penyambungan SR, bak kontrol 3. Sedikit karena dikerjakan sendiri oleh masyarakat (pekerjaan tambah kurang prosentasenya sedikit)
n.	Jaminan Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
o.	Kendala	Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi
p.	Kelebihan	Dana yang tersedia biasanya tersisa dan bisa digunakan untuk pembangunan jaringan SR tambahan.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan saluran air limbah

Tabel 5.16 Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	Kurang dari 1 bulan
b.	Biaya	Tidak ada biaya dan biasanya menggunakan dana swadaya masyarakat
c.	Mutu	Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pengoperasian pelaksanaan Penyerahan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan PHO dengan tujuan mengecek kesesuaian bangunan dan kelayakan operasional bangunan 2. Pelaksanaan comisioning Test bangunan ipal 3. Pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas/DPUP, Kecamatan, Desa dan TFL) 2. Masyarakat (KSM, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat penerima program)
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan (comissioning uji kebocoran IPAL) 2. Rembug Warga 3. Serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan hasil proyek kepada KSM untuk difungsikan. 4. Pengumpulan dan penyusunan dokumen pelaksanaan 5. Penyerahan operasi dan pemeliharaan kepada masyarakat 6. Pengoperasian organisasi pengelolaan dan jaringan SR dan IPAL 7. Penyerahan laporan akhir kegiatan (Laporan teknik, laporan keuangan dan laporan logistik)
g.	Hasil	Bangunan IPAL dan SR yang siap dioperasikan
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi penuh
i.	Administrasi	Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan oleh KSM dan TFL (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Dinas terkait dan lokasi proyek
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Masyarakat bertanggung jawab terhadap hasil proyek

5.8 Data manajemen konstruksi berbasis masyarakat pada proyek pembangunan rumah tinggal

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.17 Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya umum perencanaan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah/Sesuai Pedoman Teknis Pembangunan BDR & BDL
d.	Mekanisme perencanaan	1. Sosialisasi REKOMPAK (dinilai sederhana)
e.	Dasar usulan proyek	Upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi
f.	Pihak terlibat dan ketugasannya	1. Pemerintah (Pemprov, Pemkab) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMC)
g.	Uraian kegiatan	1. Lobby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten 2. Lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten 3. Penetapan lokasi 4. Pengadaan dan pelatihan pratugas Konsultan Kabupaten/kota 5. Pengadaan dan Pelatihan Pratugas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF
h.	Hasil	1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek. Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut. 2. Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepatutnya dengan rencana tindak lanjut. 3. Daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan. 4. Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.
i.	Partisipasi masyarakat	Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan (Berpartisipasi penuh)
j.	Administrasi	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (dinilai mudah)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana

l.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
m.	Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan publik lebih efektif, memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat Proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan

b. Perancangan Proyek Pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.18 Perancangan Proyek Pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
c.	Mutu	Mutu sesuai dengan standar pemerintah rumah tahan gempa dalam aturan teknis BDR/ Pedoman Teknis pembangunan rumah tahan gempa dan rumah sehat PU Cipta Karya.
d.	Mekanisme perancangan	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan RPP Sinkronisasi RPP (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) Konsultan (NMC, DMC) Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).
f.	Uraian kegiatan	Penyusunan RPP : <ol style="list-style-type: none"> Orientasi Sosial dan Wilayah Sosialisasi tingkat desa Sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW) Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) Pembentukan Tim Inti Perencana (TIP) Pelatihan BKM-TPK-TIP Pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus Penyiapan Peta Dasar Tinjauan/Review Dokumen Pembangunan Pemetaan Swadaya Rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya Rembug Perumusan Visi dan Misi Desa Rembug pemecahan masalah Rembug penyusunan rencana tata ruang desa

		15. Rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana 16. Sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah) 17. Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1 18. Konsultasi publik 19. Verifikasi program 20. Rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman 21. Penyusunan dokumen RPP
g.	Hasil	Tersusunya Dokumen RPP
h.	Partisipasi masyarakat	Memberikan masukan terhadap desain perancangan (Berpartisipasi penuh)
i.	Administrasi	Pelaporan Dokumen RPP dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai mudah)
J.	Tempat	Kantor Pemerintah Desa
k.	Sumber Pendanaan	World Bank
l.	Cara Pencairan	Setelah dokumen perancangan selesai
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL memberikan kepuasan tersendiri bagi KP/Kelompok Pemukiman.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.19 Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Tidak ada anggaran pengadaan
c.	Mutu	Memperoleh penyedia bahan bangunan dan penyedia tenaga terampil sesuai dengan yang dibutuhkan (Mutu sesuai dengan standar pemerintah)
d.	Mekanisme pengadaan	1. Pengadaan material/bahan dan alat dengan cara pelelangan umum 2. Pengadaan tenaga terampil dengan sistem harian dan borongan, dengan cara lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung. (dinilai sederhana)

e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM) 3. Penyedia Barang/Suplier
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pengadaan 2. Persiapan Tim Pengadaan 3. Pelelangan <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Pelelangan Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dokumen lelang/pengadaan b. Melaksanakan pengumuman secara terbuka c. Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang d. Menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta e. Penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan f. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang g. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang. 3.2. Lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung <ol style="list-style-type: none"> a. Survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan. b. Menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rebug warga. c. Membuat surat undangan untuk memasukkan penawaran. d. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya. e. Penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborongan.
g.	Hasil	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.
h.	Partisipasi masyarakat	Aktif/berpartisipasi penuh : Memberikan masukan dalam menentukan penyedia bahan bangunan/alat dan jasa pemborong.
i.	Administrasi	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh PP (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Operasional PP
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan
o.	Kelebihan	Masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena rumah tinggal dibangun untuk kebutuhan dan kepentingan diri sendiri.

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.20 Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	3 s/d 4 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus konstruksi Rekompak = Rp. 30.000.000 + swadaya masyarakat sesuai kemampuan Type 36
c.	Mutu	Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan SDM 2. Pengadaan barang dan Jasa 3. Metode pelaksanaan konstruksi 4. Pengendalian waktu, biaya & kualitas/mutu 5. Perubahan kontrak (CCO) 6. Supervisi, monitoring & evaluasi 7. Penyiapan tenaga kerja 8. Menyiapkan dana financial 9. Menyiapkan material 10. Menyiapkan peralatan / machine 11. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Konsultan NMC, DMC 3. Masyarakat (BKM, TIP, PP dan Masyarakat) 4. Suplier dan Jasa Pemborong/tenaga
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan KP/Kelompok Pemukiman 2. Penyusunan Rencana Tapak 3. Menentukan Desain Bangunan Huntap 4. Survei Teknis dan Harga 5. Pelatihan/coaching penyusunan DTPP dan DED 6. Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP) 7. Pengajuan, pencairan dan penyaluran BDR 8. Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi 9. Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan 10. Proses Pencairan BDR 11. Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing KP 12. Pelaksanaan kegiatan fisik
g.	Hasil	Konstruksi bangunan rumah
h.	Partisipasi masyarakat	Masyarakat mengadakan gotong royong dalam pembangunan rumah/berpartisipasi penuh

i.	Administrasi	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : 1. Pencairan tahap I (50%) 2. Pencairan tahap II (50%) (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis (lebih mengutamakan kearifan lokal)
l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	Sedikit
n.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
o.	Kendala	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
p.	Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat faham kerjasama dalam kegiatan berkelompok 2. Masyarakat faham membangun rumah dengan struktur tahan gempa 3. Masyarakat sedikit banyak mengerti tata cara pengadaan barang dan membukukan belanja kelompok. 4. Masyarakat faham akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat pembangunan rumah dari segi lingkungan maupun sosial 5. Masyarakat faham tentang tata cara merawat dan mengembangkan rumah kedepan. 6. Hasil bangunan lebih baik yang dilakukan langsung oleh masyarakat daripada yang dibangun oleh pemborong 7. Volume yang dibangun lebih dari volume perencanaan.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.21 Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	Antara 1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Menggunakan dana Kelompok Pemukiman (KP)/ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan
c.	Mutu	diharapkan sesuai dengan spesifikasi teknis/Mutu sesuai dengan standar pemerintah

d.	Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan	1. Pelaksanaan PHO 2. Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat 3. Pemeliharaan bangunan dilakukan oleh masyarakat (dinilai mudah)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	1. Masyarakat (KP/Kelompok Pemukiman, BKM) 2. Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator)
f.	Uraian kegiatan	1. Bersifat berupa peresmian dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan dari KP ke Desa dilanjutkan Desa menyerahkan kembali hasil pembangunan untuk difungsikan oleh KP. 2. Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan
g.	Hasil	Bangunan Rumah tinggal yang siap digunakan
h.	Partisipasi masyarakat	Masyarakat menerima hasil dari pembangunan rumah/berpartisipasi penuh
i.	Administrasi	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh KP, BKM dan Desa dengan bantuan fasilitator (dinilai mudah)
J.	Tempat	Kantor Desa diteruskan ke Kantor Pemerintah Daerah
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan

5.9 Data manajemen konstruksi terstandar pada proyek pembangunan jalan aspal

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan aspal

Tabel 5.22 Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan aspal terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan sebelum proyek dimulai dilakukan oleh Tim Perencana interen Bidang Bina Marga
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perencanaan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perencanaan	1. Survei awal lokasi 2. Rancangan Kasar dari proyek yang direncanakan (dinilai sederhana)
e.	Dasar usulan proyek	Investasi
f.	Pihak terlibat	Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas

	dan ketugasanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
g.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gagasan proyek 2. Pengembangan gagasan 3. Evaluasi kelayakan konsep 4. Penentuan konsep alternatif 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menyusun perkiraan biaya 7. Menyusun organisasi pelaksanaan
h.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organizing 4. Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana 5. Tahapan pekerjaan 6. Master, coordinating scedule 7. Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana 8. Cash flow (Proyeksi Arus Dana)
i.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase sedang
j.	Administrasi	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai mudah)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan.
m.	Kelebihan	Perencanaan dilaksanakan oleh tim yang sudah ahli di bidang perencanaan jalan aspal.

b. Perancangan Proyek Pembangunan Jalan aspal

Tabel 5.23 Perancangan Proyek Pembangunan Jalan aspal terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perancangan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perancangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diadakan survei harga 2. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) (dinilai mudah)

e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) <p>Tim Perencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator perencana 2. Perencana 3. Tenaga survei 4. Penggambar 5. Penghitung RAB (Pemerintah satu Dinas)
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 3. Membuat estimasi biaya secara rinci 4. Membuat desain detail 5. Membuat spesifikasi teknis 6. Membuat daftar volume 7. Membuat Rencana Anggaran Biaya 8. Membuat syarat-syarat administrasi 9. Membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku
g.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, masukan proses dan keluaran 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar bestek dan shop drawing 5. Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya 6. Pedoman administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase rendah
i.	Administrasi	Pelaporan pada proses perancangan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai rumit)
J.	Tempat	Kantor Pemerintah
k.	Sumber Pendanaan	APBD
l.	Cara Pencairan	Biaya perancangan dicairkan bila proses perancangan telah selesai
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan
o.	Kelebihan	Perancangan dilakukan oleh tim teknis yang sudah berpengalaman dalam perancangan jalan aspal.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan aspal

Tabel 5.24 Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan aspal terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Melekat pada biaya umum DPA/ada anggaran khusus pengadaan
c.	Mutu	Memperoleh penyedia jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pengadaan	Pengadaan Langsung (dinilai mudah)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	Dinas PUP/Pemerintah satu Dinas : 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa
f.	Uraian kegiatan	1. Mengadakan prakualifikasi kontrak 2. Free tender meeting 3. Menyusun daftar calon rekanan 4. Bill of quality (Jenis pekerjaan + volume) 5. Aanwijzing (penjelasan) 6. Menyiapkan dokumen lelang 7. Menyusun RAB pasti untuk evaluasi penawaran 8. Mengevaluasi setiap paket penawaran untuk direkomendasikan kepada Pimpro (PPK) 9. Menyiapkan dokumen kontrak antara Pimpro (PPK) dengan Kontraktor
g.	Hasil	Terpilihnya Penyedia Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan Konstruksi
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Pelaporan hasil pengadaan dilakukan oleh Tim Pengadaan (dinilai mudah)
J.	Tempat	Dinas PUP Kabupaten Sleman
k.	Sumber Pendanaan	APBD
l.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
m.	Kendala	Gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana
n.	Kelebihan	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan.

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan aspal

Tabel 5.25 Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan aspal terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	45 hari kalender, 2s/d 3 bulan
b.	Biaya	Rp. 148.002.000,- Luas : (650mX3m) = 1.950m ² (ada anggaran khusus konstruksi)
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis, Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan tenaga kerja 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material / pengadaan bahan 4. Menyiapkan peralatan / machine / pengadaan alat 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembersihan lahan b. Perataan tanah c. Penghamparan material bawah pondasi d. Penghamparan lapis aspal e. Pemasangan jalan f. Finishing pematatan dan perataan jalan raya (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa 8. Koordinator Pengawas 9. Pengawas Lapangan
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan startup
g.	Hasil	Konstruksi bangunan jalan
h.	Partisipasi masyarakat	Dinilai tidak berpartisipasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Merelakan tanaman milik pribadi yang harus

		ditebang tanpa kompensasi 2. Merelakan tanah pribadi untuk pelebaran jalan tanpa kompensasi
i.	Administrasi	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : 1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak 2. Pembayaran termyn I = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) 3. Pembayaran termyn II = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) (dinilai mudah)
J.	Tempat	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis
l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	Sedikit
n.	Keselamatan	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang/harus menggunakan
o.	Kendala	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
p.	Kelebihan	Karena pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, maka pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan aspal

Tabel 5.26 Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan aspal terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	Kurang dari 1 bulan
b.	Biaya	Biaya sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan	1. penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan 2. PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan 3. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP. 4. Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan

		<p>Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 6. penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan 7. PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 8. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List). 9. Penyedia menyerahkan final report (dinilai mudah)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah 1 Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa 8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan 2. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol 3. Mengkoordinir pelaksanaan operasional 4. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing 5. Mengarahkan dan memeriksa secara manual 6. Memproses : garasi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator
g.	Hasil	Bangunan jalan yang siap digunakan
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase rendah
i.	Administrasi	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Dinas Terkait & lokasi proyek
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU

5.10 Data manajemen konstruksi terstandar pada proyek pembangunan saluran air limbah

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan saluran air limbah

Tabel 5.27 Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan saluran air limbah terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Ada Anggaran Khusus dari Pemerintah/sesuai DPA
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan skema dasar 2. Survei lokasi 3. Prediksi jumlah penduduk, perkembangan kota dan timbulnya air limbah domestik. 4. Perencanaan fasilitas 5. Evaluasi 6. Penentuan rancangan induk Master plan 7. Studi kelayakan 8. Perencanaan Sistem perpipaan (dinilai rumit)
e.	Dasar usulan proyek	Investasi
f.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. Warga Masyarakat 3. Konsultan perencana
g.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gagasan proyek dan analisis pendahuluan Pengembangan gagasan 2. Pengembangan gagasan menjadi konsep-konsep alternatif 3. Evaluasi kelayakan konsep alternatif dari semua konsep 4. Penentuan konsep alternatif yang baik 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menyusun perkiraan biaya 7. Menyusun organisasi pelaksana
h.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sasaran proyek (biaya & waktu) 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organizing 4. Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana 5. Tahapan pekerjaan 6. Master, coordinating scedule 7. Perkiraan biaya

		8. Cash flow (Proyeksi Arus Dana)
i.	Partisipasi masyarakat	Membantu menentukan pengguna (berpartisipasi sedang)
j.	Administrasi	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai rumit)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan
m.	Kelebihannya	Proses perencanaan dilakukan oleh tenaga yang ahli dalam bidang perencanaan saluran air limbah

b. Perancangan Proyek Pembangunan saluran air limbah

Tabel 5.28 Perancangan Proyek Pembangunan saluran air limbah terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	3 s/d 4 bulan di tahun sebelumnya
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perencanaan/jasa konsultasi
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perancangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program perencanaan kepada warga masyarakat penerima program 2. Diadakan survei harga 3. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (pemerintah satu Dinas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staf) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staf) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) <p>Tim Perencana (Konsultan Perencana)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator perencana 2. Perencana 3. Tenaga survei 4. Penggambar 5. Penghitung RAB
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 3. Review estimasi biaya secara rinci 4. Review desain akhir berupa hasil gambar detail 5. Review desain akhir berupa hasil spesifikasi teknis 6. Review desain akhir berupa daftar volume 7. Review desain akhir berupa RAB 8. Review desain akhir berupa syarat-syarat administrasi

		9. Review desain akhir berupa peraturan-peraturan umum yang berlaku
g.	Hasil	1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, masukan proses dan keluaran 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar bestek dan shop drawing 5. Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya 6. Pedoman administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar
h.	Partisipasi masyarakat	Memberikan data penduduk untuk proyek yang akan dilaksanakan (berpartisipasi sedang)
i.	Administrasi	Pelaporan hasil pekerjaan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai rumit)
J.	Tempat	Kantor konsultan perencana
k.	Sumber Pendanaan	Ada Anggaran Khusus dari Pemerintah/sesuai DPA
l.	Cara Pencairan	Setelah proses perancangan diselesaikan
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Desain dari konsultan perencana sudah siap dilaksanakan

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan saluran air limbah

Tabel 5.29 Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan saluran air limbah terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus pengadaan yang melekat pada DPA di ULP/Unit Layanan Pengadaan
c.	Mutu	Mutu sesuai standar pemerintah
d.	Mekanisme pengadaan	Lelang pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai sederhana oleh responden)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	1. Unit Layanan Pengadaan 2. Tim Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) - Ketua (Kepala Bidang) - Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) - Pelaksana Teknis (Staff) - Pembantu Pelaksana Teknis (Staff)

		- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 3. Penyedia jasa
f.	Uraian kegiatan	1. Mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE) 2. Pengumuman Pascakualifikasi 3. Download dokumen Pengadaan 4. Pemberian penjelasan 5. Upload dokumen Penawaran 6. Evaluasi penawaran 7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 8. Pembuktian kualifikasi 9. Upload berita acara Hasil Pelelangan 10. Penetapan pemenang 11. Pengumuman pemenang 12. Masa Sanggah hasil lelang 13. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa 14. Penandatanganan Kontrak
g.	Hasil	Terpilihnya Penyedia Jasa sesuai dengan kriteria SBU yang dibutuhkan
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Pelaporan tahap pelelangan disampaikan oleh ULP kepada SKPD terkait (dinilai rumit oleh responden)
j.	Tempat	Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	Gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana/mengalami kemunduran
o.	Kelebihan	Mendapatkan penyedia jasa yang berkompeten dalam pekerjaan konstruksi sejenis

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan saluran air limbah

Tabel 5.30 Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan saluran air limbah terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	3 s/d 4 bulan
b.	Biaya	Pemda = Rp.608.443.000 Pipa servis 1470m dengan rincian 147 SR, Realisasi penyambungan 140 bh (menggunakan biaya khusus konstruksi)
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme	1. Penyiapan tenaga kerja

	kegiatan konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material 4. Menyiapkan peralatan / machine 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan 6. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi (dinilai rumit)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa 8. Koordinator Pengawas 9. Pengawas Lapangan <p>Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa) Masyarakat penerima program</p>
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan startup
g.	Hasil	Konstruksi bangunan SR
h.	Partisipasi masyarakat	Merelakan pembongkaran dibagian rumah untuk pembangunan SR (berpartisipasi dengan prosentase rendah)
i.	Administrasi	<p>Pencairan dana proyek dengan sistem termyn :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak 2. Pembayaran termyn I = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) 3. Pembayaran termyn II = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) <p>(dinilai rumit)</p>
J.	Tempat	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis
l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada beberapa rencana jaringan yang tidak bisa dikerjakan sehingga butuh titik baru (pekerjaan tambah kurang prosentasenya sedang)

n.	Jaminan Keselamatan	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang
o.	Kendala	Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis
p.	Kelebihan	Pelaksanaan konstruksi cepat terselesaikan karena terikat oleh waktu penyelesaian proyek

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan saluran air limbah

Tabel 5.31 Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan saluran air limbah terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	Kurang dari 1 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan
c.	Mutu	Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pengoperasian pelaksanaan Penyerahan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan 2. PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan 3. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP. 4. Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 6. penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan 7. PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 8. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List). 9. Penyedia menyerahkan final report (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas) <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa 8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
f.	Uraian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan

	kegiatan	fungsi yang siap dioperasikan 2. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol 3. Mengkoordinir pelaksanaan operasional 4. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing 5. Mengarahkan dan memeriksa secara manual 6. Memproses : garansi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator
g.	Hasil	Bangunan SR yang siap dioperasikan
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan oleh Penyedia Jasa (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Dinas Terkait dan lokasi proyek
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu rekanan dan SKPD terkait/Dinas PU

5.11 Data manajemen konstruksi terstandar pada proyek pembangunan rumah tinggal

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.32 Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan rumah tinggal terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan (pada tahun anggaran sebelum tahun pelaksanaan proyek)
b.	Biaya	Menggunakan biaya umum perencanaan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perencanaan	1. Survei awal lokasi proyek 2. Rancangan kasar dari proyek yang direncanakan (dinilai sederhana)
e.	Dasar usulan proyek	Investasi
f.	Pihak terlibat dan ketugasannya	Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas) 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Konsultan perencana

g.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gagasan proyek dan analisis pendahuluan 2. Pengembangan gagasan menjadi konsep-konsep alternatif 3. Evaluasi kelayakan konsep alternatif dari semua konsep 4. Penentuan konsep alternatif yang baik 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menyusun perkiraan biaya 7. Menyusun organisasi pelaksanaan
h.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sasaran proyek baik dilihat dari aspek biaya dan waktu 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organizing 4. Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana 5. Tahapan pekerjaan 6. Master, coordinating scedule 7. Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana 8. Cash flow (Proyeksi Arus Dana)
i.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase sedang
j.	Administrasi	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh tim perencana (dinilai mudah)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
m.	Kelebihan	Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh tim yang sudah berkompeten di bidangnya

b. Perancangan Proyek Pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.33 Perancangan Proyek Pembangunan rumah tinggal terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perancangan
c.	Mutu	Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme perancangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei harga oleh konsultan perencana 2. Perencanaan oleh tim Konsultan perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) 3. Review hasil perancangan konsultan oleh tim

		<p>perencana dari SKPD terkait</p> <p>4. Diadakan evaluasi harga untuk produk konsultan Perencanaan oleh tim perencana dari SKPD terkait (dinilai mudah)</p>
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas)</p> <p>1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas)</p> <p>2. Ketua (Kepala Bidang)</p> <p>3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi)</p> <p>4. Pelaksana Teknis (Staff)</p> <p>5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff)</p> <p>6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)</p> <p>Tim Perencana</p> <p>1. Konsultan perencana</p>
f.	Uraian kegiatan	<p>1. Membuat kriteria desain</p> <p>2. Membuat skematik desain</p> <p>3. Membuat estimasi biaya secara rinci</p> <p>4. Membuat desain detail</p> <p>5. Membuat spesifikasi teknis</p> <p>6. Membuat daftar volume</p> <p>7. Membuat Rencana Anggaran Biaya</p> <p>8. Membuat syarat-syarat administrasi</p> <p>9. Membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku</p>
g.	Hasil	<p>1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor</p> <p>2. Spesifikasi, masukan proses dan keluaran</p> <p>3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas</p> <p>4. Gambar bestek dan shop drawing</p> <p>5. Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya</p> <p>6. Pedoman administrasi dan keuangan</p> <p>7. Proses operasional dan standar</p>
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Pelaporan hasil perancangan dilakukan oleh Konsultan Perencana (dinilai mudah)
J.	Tempat	Kantor Konsultan
k.	Sumber Pendanaan	APBD
l.	Cara Pencairan	Setelah dokumen perancangan selesai
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Desain dari konsultan perencana sudah siap dilaksanakan

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.34 Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan rumah tinggal terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus pengadaan
c.	Mutu	Memperoleh penyedia jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan (Mutu sesuai dengan standar pemerintah)
d.	Mekanisme pengadaan	Pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai mudah)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	Unit Layanan Pengadaan (Pemerintah satu Dinas) Tim Pelaksana Kegiatan 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Penyedia jasa
f.	Uraian kegiatan	Mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE) 1. Pengumuman Pascakualifikasi 2. Download dokumen Pengadaan 3. Pemberian penjelasan 4. Upload dokumen Penawaran 5. Evaluasi penawaran 6. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 7. Pembuktian kualifikasi 8. Upload berita acara Hasil Pelelangan 9. Penetapan pemenang 10. Pengumuman pemenang 11. Masa Sanggah hasil lelang 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa 13. Penandatanganan Kontrak
g.	Hasil	Terpilihnya Penyedia Jasa sesuai dengan kriteria SBU yang dibutuhkan
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Kontrak perjanjian antara penyedia jasa dan PPK dilakukan oleh panitia pengadaan di ULP (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana

n.	Kendala	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan
o.	Kelebihan	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan.

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.35 Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan rumah tinggal terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	3 s/d 4 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus konstruksi Pemda = Rp.214.091.000 Tipe 70m ²
c.	Mutu	Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan konstruksi	1. Penyiapan tenaga kerja 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material 4. Menyiapkan peralatan / machine 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas) Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 1. Ketua (Kepala Bidang) 2. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 3. Pelaksana Teknis (Staff) 4. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 5. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 6. Penyedia jasa 7. Koordinator Pengawas 8. Pengawas Lapangan
f.	Uraian kegiatan	1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan startup
g.	Hasil	Konstruksi bangunan Rumah
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn :

		1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak 2. Pembayaran termyn I = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$ 3. Pembayaran termyn II = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$ (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis
l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	Sedikit
n.	Keselamatan	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang/ Harus menggunakan
o.	Kendala	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
p.	Kelebihan	Karena pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, maka pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.36 Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan rumah tinggal terstandar

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan Manajemen konstruksi Terstandar
a.	Waktu	Kurang dari 1 bulan
b.	Biaya	Biaya sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan	1. Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan 2. PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan 3. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP. 4. Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 6. penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa

		<p>pemeliharaan</p> <p>7. PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.</p> <p>8. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List).</p> <p>9. Penyedia menyerahkan final report (dinilai mudah)</p>
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas</p> <p>1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas)</p> <p>2. Ketua (Kepala Bidang)</p> <p>3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi)</p> <p>4. Pelaksana Teknis (Staff)</p> <p>5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff)</p> <p>6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)</p> <p>7. Penyedia jasa</p> <p>8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan</p>
f.	Uraian kegiatan	<p>1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan</p> <p>2. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol</p> <p>3. Mengkoordinir pelaksanaan operasional</p> <p>4. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing</p> <p>5. Mengarahkan dan memeriksa secara manual</p> <p>6. Memproses : garansi dan jaminan</p>
g.	Hasil	Bangunan Rumah tinggal yang siap digunakan
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai mudah)
J.	Tempat	Kantor Dinas Terkait
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU

5.12 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Jalan

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan

Tabel 5.37 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Jalan pada tahap Perencanaan/Persiapan

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan sebelum proyek dimulai dilakukan oleh Tim Perencana interen Bidang Bina Marga	2 s/d 3 Bulan terakhir (tahun sebelum proyek dibangun)
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perencanaan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah
d.	Mekanisme perencanaan	1. Survei awal lokasi 2. Rancangan Kasar dari proyek yang direncanakan (dinilai sederhana)	Sosialisasi REKOMPAK (dinilai sederhana)
e.	Dasar usulan proyek	Investasi	Upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi
f.	Pihak terlibat dan ketugasannya	Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	1. Pemerintah (Pemprov, Pemkab) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMC)

g.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gagasan proyek 2. Pengembangan gagasan 3. Evaluasi kelayakan konsep 4. Penentuan konsep alternatif 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menyusun perkiraan biaya 7. Menyusun organisasi pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten 2. Lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten 3. Penetapan lokasi 4. Pengadaan dan pelatihan praturgas Konsultan Kabupaten/kota 5. Pengadaan dan Pelatihan Praturgas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF
h.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organizing 4. Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana 5. Tahapan pekerjaan 6. Master, coordinating scedule 7. Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana 8. Cash flow (Proyeksi Arus Dana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek. Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut. 2. Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut. 3. Daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan. 4. Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.

i.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase penuh
j.	Administrasi	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai mudah)	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (dinilai sederhana)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan.	SDM yang kurang memahami pentingnya pelaksanaan proyek
m.	Kelebihan	Perencanaan dilaksanakan oleh tim yang sudah ahli di bidang perencanaan jalan aspal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan publik yang diambil lebih efektif, memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat. 2. Proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan.

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap perencanaan/persiapan proyek pembangunan jalan aspal baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan dalam proses perencanaan rata-rata sama, yaitu sekitar 2 sampai dengan 3 bulan.

2) Biaya

Biaya yang digunakan pada proses perencanaan sama berasal dari anggaran khusus perencanaan yang melekat pada SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

3) Mutu

Mutu perencanaan untuk kedua sistem pembangunan jalan sesuai dengan Standar Pemerintah.

4) Mekanisme Perencanaan

Mekanisme perencanaan untuk proyek pembangunan jalan terstandar dimulai dari survei awal lokasi yang dilanjutkan dengan pembuatan rancangan kasar dari proyek yang akan direncanakan. Pada proses perencanaan pembangunan jalan berbasis masyarakat, mekanisme perencanaan berupa sosialisasi proyek REKOMPAK. Mekanisme perencanaan untuk kedua jenis proyek dinilai sederhana oleh responden.

5) Dasar usulan Proyek

Dasar usulan pada proyek pembangunan jalan terstandar adalah investasi pemerintah sedangkan dasar usulan pada proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat adalah upaya pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi.

6) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam perencanaan proyek pembangunan jalan terstandar adalah tim pelaksana kegiatan dari Dinas PUP kabupaten Sleman yang terdiri atas : Penanggung jawab kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), Koordinator pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staff), Pembantu Pelaksana Teknis (staff) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Pihak yang terlibat dalam perencanaan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat adalah Pemerintah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Fasilitator) dan Konsultan (PMU, NMC dan DMC). Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagai penanggungjawab kegiatan. Fasilitator sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan. PMU/ Project Management Unit/Dirjen Cipta Karya PU sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk manajemen dan pelaksanaan proyek. NMC/National Management Consultant adalah konsultan di tingkat Nasional yang berfungsi membantu PMU Rekompak dalam pengendalian pelaksanaan proyek di wilayah kerjanya. DMC/District Management Consultant adalah konsultan di tingkat Provinsi yang bertugas membantu PMU Rekompak

dan bertanggung jawab kepada NMC dalam pengendalian pelaksanaan proyek di wilayah kerjanya.

Berdasarkan pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan proyek pembangunan jalan aspal, dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat dalam perencanaan proyek pembangunan jalan aspal terstandar lebih sedikit dan berada dalam satu Dinas. Sedangkan pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat, pihak yang terlibat lebih banyak, kompleks dan terdiri lebih dari satu Dinas.

7) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses perencanaan berbeda antara proyek pembangunan berbasis masyarakat dan proyek pembangunan terstandar. Dalam proyek pembangunan jalan aspal terstandar kegiatan yang dilakukan antara lain : identifikasi gagasan proyek, pengembangan gagasan, evaluasi kelayakan konsep, penentuan konsep alternatif, identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan, menyusun perkiraan biaya dan menyusun organisasi pelaksanaan.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat antara lain : loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten, lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten, penetapan lokasi, pengadaan dan pelatihan praturgus Konsultan Kabupaten/kota, pengadaan dan Pelatihan Praturgus Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF.

Dari uraian kegiatan di atas, kegiatan perencanaan pada proyek konstruksi pengaspalan jalan terstandar sudah mengarah kedalam inti pokok proses perencanaan proyek. Dalam kegiatan perencanaan proyek konstruksi pengaspalan jalan berbasis masyarakat banyak hal yang dilakukan dan belum mengarah ke inti pokok perencanaan proyek, bersifat sosialisasi dan pelatihan.

8) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek pembangunan jalan aspal terstandar adalah Pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu, Identifikasi batasan utama, TOR dan organizing, saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana, tahapan pekerjaan, Master coordinating scedule, Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana dan Cash flow (proyeksi arus dana). Produk yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek, Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut, Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut, daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan serta Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi. Produk yang dihasilkan dalam tahap perencanaan proyek pengaspalan jalan berbasis masyarakat lebih komplek dari pada produk yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek pengaspalan jalan terstandar.

9) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan jalan aspal terstandar dinilai sedang. Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan jalan berbasis masyarakat dinilai penuh. Hal ini terjadi karena, masyarakat tidak terlibat dalam perencanaan proyek.

10) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perencanaan pembangunan jalan aspal terstandar dilakukan oleh tim perencana dinilai mudah oleh responden karena pelaporan administrasi membutuhkan birokrasi serta waktu yang pendek. Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perencanaan pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan dinilai sederhana oleh responden karena pelaporan administrasi

membutuhkan birokrasi dan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan serta tidak melebihi waktu yang tersedia.

11) Keselamatan

Pada tahap perencanaan, kedua sistem manajemen konstruksi tidak menggunakan jaminan keselamatan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang terjadi pada proses perencanaan proyek pengaspalan jalan terstandar adalah terjadi konflik antar pemangku kepentingan. Kendala yang terjadi pada proses perencanaan proyek pengaspalan jalan berbasis masyarakat adalah SDM yang kurang memahami pentingnya pelaksanaan proyek.

13) Kelebihan

Kelebihan yang ada pada proyek perencanaan jalan aspal terstandar adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh tim ahli sehingga hasil perencanaan sesuai dengan standar teknis yang ada. Kelebihan pada tahap perencanaan kegiatan pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat antara lain : keputusan publik yang diambil lebih efektif , memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat. Serta proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan.

b. Perancangan Proyek Pembangunan Jalan

Tabel 5.38 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Jalan pada tahap Perancangan

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perancangan	Ada anggaran khusus perancangan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah (aturan pengaspalan jalan)
d.	Mekanisme perancangan	1. Diadakan survei harga 2. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan	1. Penyusunan RPP 2. Sinkronisasi RPP (dinilai sederhana)

		syarat-syarat kontrak) (dinilai mudah)	
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) <p>Tim Perencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator perencana 2. Perencana 3. Tenaga survei 4. Penggambar 5. Penghitung RAB (Pemerintah satu Dinas) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Konsultan (NMC, DMC) 3. Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 3. Membuat estimasi biaya secara rinci 4. Membuat desain detail 5. Membuat spesifikasi teknis 6. Membuat daftar volume 7. Membuat Rencana Anggaran Biaya 8. Membuat syarat-syarat administrasi 9. Membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku 	<p>Penyusunan RPP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi Sosial dan Wilayah 2. Sosialisasi tingkat desa 3. Sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW) 4. Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) 5. Pembentukan Tim Inti Perencana (TIP) 6. Pelatihan BKM-TPK-TIP 7. Pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus 8. Penyiapan Peta Dasar 9. Tinjauan/Review Dokumen Pembangunan 10. Pemetaan Swadaya 11. Rembug analisis hasil identifikasi potensi

			<p>dan masalah melalui Pemetaan Swadaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Rembug Perumusan Visi dan Misi Desa 13. Rembug pemecahan masalah 14. Rembug penyusunan rencana tata ruang desa 15. Rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana 16. Sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah) 17. Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1 18. Konsultasi publik 19. Verifikasi program 20. Rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman
g.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, masukan proses dan keluaran 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar bestek dan shop drawing 5. Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya 6. Pedoman administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar 	Tersusunnya Dokumen RPP
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sedang <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan

			dalam proses perancangan 2. Memberikan gambaran terhadap faktor-faktor pendukung dan penghalang proyek konstruksi yang akan dijalankan
i.	Administrasi	Pelaporan pada proses perancangan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai rumit)	Pelaporan Dokumen RPP dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Pemerintah	Kantor Pemerintah Desa
k.	Sumber Pendanaan	APBD	World Bank
l.	Cara Pencairan	Biaya perancangan dicairkan bila proses perancangan telah selesai	Biaya perancangan dicairkan bila proses perancangan telah selesai
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Perancangan dilakukan oleh tim teknis yang sudah berpengalaman dalam perancangan jalan aspal.	Masyarakat berperan aktif dalam proses perancangan.

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap perancangan proyek pembangunan jalan aspal baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Pada tahap perancangan proyek pembangunan jalan aspal waktu yang dibutuhkan untuk proyek terstandar dan proyek berbasis masyarakat sama yaitu 2 sampai dengan 3 bulan.

2) Biaya

Pada tahap perancangan untuk kedua proyek pembangunan jalan baik yang terstandar maupun yang berbasis masyarakat menggunakan anggaran khusus perencanaan.

3) Mutu

Mutu perancangan untuk kedua sistem pembangunan jalan bertumpu pada standar pemerintah, hasil dari perancangan juga sesuai dengan standar Pemerintah.

4) Mekanisme Perancangan

Mekanisme perancangan untuk proyek pembangunan jalan aspal terstandar dimulai dengan survei harga dan perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak), kegiatan ini dinilai mudah oleh responden karena membutuhkan birokrasi dan waktu yang pendek. Pada proses perancangan pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat, mekanisme perencanaan adalah penyusunan RPP/Rencana Penataan Permukiman dan sinkronisasi RPP/Rencana Penataan Permukiman, kegiatan ini dinilai sederhana oleh responden karena membutuhkan birokrasi dan waktu sesuai dengan yang disediakan.

5) Pihak yang terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam perancangan proyek pembangunan jalan aspal terstandar adalah tim pelaksana kegiatan dari satu Dinas/Dinas PUP kabupaten Sleman yang terdiri atas : Penanggung jawab kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), Koordinator pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staff), Pembantu Pelaksana Teknis (staff) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Tim Perencana yang terdiri dari : koordinator perencana, Perencana, Tenaga Survei, Penggambar dan Penghitung RAB.

Pihak yang terlibat pada tahap perancangan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator), Konsultan (NMC, DMC) dan Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program) sebagai pelaku utama dalam proses perancangan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat pada tahap perancangan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat lebih kompleks dan lebih banyak.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses perancangan berbeda antara proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat dan proyek pembangunan jalan aspal terstandar. Dalam proyek terstandar kegiatan yang dilakukan antara lain : membuat kriteria desain, membuat skematik desain, membuat estimasi biaya secara rinci, membuat desain detail, membuat spesifikasi teknis, membuat daftar volume, membuat Rencana Anggaran Biaya, membuat syarat-syarat administrasi dan membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku.

Pada perancangan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan RPP yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : orientasi sosial dan wilayah, sosialisasi tingkat desa, sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW), Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), pembentukan Tim Inti Perencana (TIP), pelatihan BKM-TPK-TIP, pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus, penyiapan Peta Dasar, tinjauan/review Dokumen Pembangunan, pemetaan Swadaya, rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya, rembug Perumusan Visi dan Misi Desa, rembug pemecahan masalah, rembug penyusunan rencana tata ruang desa, rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana, sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah), Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1, konsultasi publik, verifikasi program dan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman serta penyusunan RPP.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perancangan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat lebih kompleks dibandingkan dengan yang menggunakan metode terstandar.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan jalan aspal terstandar adalah kontrak untuk staf proyek dan kontraktor, spesifikasi, masukan proses dan keluaran, desain perhitungan bangunan,

struktur, utilitas dan fasilitas, gambar bestek dan shopdrawing, jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya, pedoman administrasi dan keuangan serta proses operasional dan standar.

Produk yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat adalah tersusunya dokumen RPP/Rencana Penataan Permukiman.

8) Partisipasi masyarakat

Pada tahap perancangan proyek jalan terstandar, masyarakat berpartisipasi dengan prosentase rendah/hampir tidak berpartisipasi. Pada tahap perancangan proyek jalan berbasis masyarakat, masyarakat berpartisipasi dengan prosentase sedang. Adapun bentuk partisipasinya antara lain : memberikan masukan dalam proses perancangan, memberikan gambaran terhadap faktor-faktor pendukung dan penghalang proyek konstruksi yang akan dijalankan.

9) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perancangan pembangunan jalan aspal terstandar dilakukan oleh tim perencana (dinilai rumit oleh responden). Pelaporan hasil kegiatan pada proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai rumit oleh responden). Dengan alasan yang sama untuk kedua bentuk manajemen karena membutuhkan birokrasi yang panjang, waktu yang lama serta melibatkan banyak pihak baik dari Dinas maupun masyarakat

10) Tempat

Tempat perancangan proyek pembangunan jalan aspal terstandar berada di kantor pemerintah/Dinas PUP, sedangkan proses perancangan pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat dilakukan di kantor Pemerintah Desa.

11) Sumber pendanaan

Sumber pendanaan untuk proyek pembangunan jalan aspal terstandar berasal dari APBD/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sumber

pendanaan untuk proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat berasal dari World Bank.

12) Cara pencairan

Cara pencairan dana operasional perancangan untuk kedua proyek dilakukan setelah proses perancangan selesai.

13) Keselamatan

Pada tahap perancangan untuk kedua jenis proyek pembangunan jalan aspal, baik yang menggunakan sistem terstandar maupun yang menggunakan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat sama-sama tidak menggunakan jaminan keselamatan tidak ada alokasi dana.

14) Kendala

Pada proyek pembangunan jalan aspal terstandar kendala yang ada adalah adanya terjadi konflik antar pemangku kepentingan. Pada proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat, kendala yang dihadapi adalah SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek.

15) Kelebihan

Pada proyek pembangunan jalan aspal terstandar proses perancangan dilakukan oleh tim teknis yang sudah berpengalaman. Pada proses perancangan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat, masyarakat berperan aktif dalam proses perancangan.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan

Tabel 5.39 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Jalan pada tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Melekat pada biaya umum DPA/ada anggaran khusus pengadaan	Menggunakan dana BOP pada proyek BDL/ada anggaran khusus pengadaan
c.	Mutu	Memperoleh penyedia jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Memperoleh penyedia/supplier barang dan jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Mutu sesuai

			dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pengadaan	Pengadaan Langsung (dinilai mudah)	Pengadaan Barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat (dinilai mudah)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	Dinas PUP/Pemerintah satu Dinas : 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa	1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM, Masyarakat penerima program) 3. Penyedia Barang/Suplier
f.	Uraian kegiatan	1. Mengadakan prakualifikasi kontrak 2. Free tender meeting 3. Menyusun daftar calon rekanan 4. Bill of quality (Jenis pekerjaan + volume) 5. Aanwijzing (penjelasan) 6. Menyiapkan dokumen lelang 7. Menyusun RAB pasti untuk evaluasi penawaran 8. Mengevaluasi setiap paket penawaran untuk direkomendasikan kepada Pimpro (PPK) 9. Menyiapkan dokumen kontrak antara Pimpro (PPK) dengan Kontraktor	1. Pembentukan Tim Pengadaan 2. Persiapan Tim Pengadaan 3. Pelelangan Umum a. Menyusun dokumen lelang/pengadaan b. Melaksanakan pengumuman secara terbuka c. Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang d. Menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta e. Penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan f. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan

			<p>pemenang lelang</p> <p>g. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang.</p> <p>4. Lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung</p> <p>a. Survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan.</p> <p>b. Menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rebug warga.</p> <p>c. Membuat surat undangan untuk memasukkan penawaran.</p> <p>d. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya.</p> <p>e. Penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborongan.</p>
g.	Hasil	Terpilihnya Penyedia Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan Konstruksi	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi dengan prosentase sedang : Ikut menyediakan bahan baku bangunan dengan rekomendasi suplier pemenang.
i.	Administrasi	Pelaporan hasil pengadaan dilakukan oleh Tim Pengadaan (dinilai mudah)	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan

			langsung oleh TPK (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Dinas PUP Kabupaten Sleman	Kantor TPK
k.	Sumber Pendanaan	APBD	World Bank
l.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
m.	Kendala	Gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana/Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan 1. Bahan yang disediakan supplier tidak sesuai dengan sampel yang diberikan 2. Kurang tersedianya tenaga ahli pelaksana pekerjaan karena waktu proyek hampir bersamaan.
n.	Kelebihan	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan.	Masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena jalan dibangun untuk kepentingan bersama warga kampung.

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan jalan aspal baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk kedua jenis proyek sama yaitu antara 1 sampai dengan 2 bulan.

2) Biaya

Biaya yang digunakan untuk proses pengadaan pada proyek pembangunan jalan aspal terstandar melekat pada biaya umum Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA). Biaya yang digunakan pada proses pengadaan pada

proyek berbasis masyarakat menggunakan dana Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) pada proyek BDL. Jadi ada anggaran khusus pengadaan untuk kedua sistem proyek

3) Mutu

Mutu pengadaan pada proyek pembangunan jalan dengan metode konstruksi terstandar sesuai dengan rencana yaitu memperoleh penyedia jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Mutu pengadaan pada proyek pembangunan jalan dengan metode konstruksi berbasis masyarakat sesuai dengan rencana yaitu memperoleh penyedia barang dan jasa. Kedua jenis proyek ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemerintah.

4) Mekanisme Pengadaan

Mekanisme pengadaan untuk proyek pembangunan jalan aspal terstandar menggunakan cara Pengadaan langsung oleh tim pengadaan dari dinas terkait (Dinas PU Kabupaten Sleman), dinilai mudah oleh responden. Pada proses pengadaan pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat, mekanisme pengadaan dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat kepada suplier dan pemborong (kedua sistem dinilai mudah oleh responden). Kedua sistem dinilai mudah oleh responden karena membutuhkan birokrasi dan waktu yang pendek.

5) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek pembangunan jalan aspal terstandar adalah Dinas PUP Kabupaten Sleman dengan anggota sebagai berikut : Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), pelaksana Teknis (Staff), pembantu Pelaksana Teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan penyedia jasa sebagai pelaksana kegiatan.

Dalam proses pengadaan proyek konstruksi pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat, pihak yang terlibat adalah Pemerintah (Desa, Fasilitator), masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM, Masyarakat penerima program), penyedia Barang/Suplier. Pemerintah Desa, BKM dan Masyarakat penerima program sebagai penggerak/pendukung kegiatan.

KP/PP, Suplier dan Tenaga Ahli sebagai pelaku utama/pelaksana pengadaan. Fasilitator sebagai pemandu kegiatan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pengadaan pada proyek pengaspalan jalan berbasis masyarakat, pihak-pihak yang terlibat lebih kompleks.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses pengadaan berbeda antara proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat dan proyek pembangunan jalan aspal terstandar. Dalam proyek pembangunan jalan aspal terstandar kegiatan yang dilakukan antara lain : mengadakan prakualifikasi kontrak, free tender meeting, menyusun daftar calon rekanan, bill of quality (Jenis pekerjaan + volume), aanwijzing (penjelasan), menyiapkan dokumen lelang, menyusun RAB pasti untuk evaluasi penawaran, mengevaluasi setiap paket penawaran untuk direkomendasikan kepada Pimpro (PPK) dan menyiapkan dokumen kontrak antara Pimpro (PPK) dengan Kontraktor. Uraian kegiatan pada tahap pengadaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat antara lain : pembentukan Tim Pengadaan, Persiapan Tim Pengadaan (HPS, RKS, Persyaratan Administrasi dan kualifikasi teknis, dokumen lelang & form evaluasi) dan pelaksanaan pelelangan. Proses pelelangan dibagi menjadi dua jenis yaitu pelelangan umum untuk memperoleh penyedia barang/suplier dan penunjukan langsung untuk memperoleh jasa pemborong/tenaga ahli. Kegiatan yang dilakukan pada proses pelelangan umum antara lain : menyusun dokumen lelang/pengadaan, melaksanakan pengumuman secara terbuka, pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang, menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta, penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan, pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang. Kegiatan yang dilakukan pada proses penunjukan langsung antara lain : survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan, menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rembug warga,

membuat surat undangan untuk memasukkan penawaran, pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya dan penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborongan/tenaga ahli.

7) Hasil

Hasil dari proses pengadaan proyek pembangunan jalan aspal terstandar adalah terpilihnya penyedia jasa yang akan melaksanakan pekerjaan konstruksi. Hasil dari proses pengadaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat adalah Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.

8) Partisipasi masyarakat

Pada proses pengadaan proyek pembangunan jalan aspal terstandar masyarakat tidak berpartisipasi. Pada proses pengadaan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat, masyarakat berpartisipasi sedang dalam proses pengadaanya. Masyarakat penerima program berperan sebagai penggerak/pendukung pelaksanaan pengadaan.

9) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap pengadaan konstruksi bangunan jalan terstandar dilakukan oleh tim pengadaan (dinilai mudah oleh responden). Pada proses pengadaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat, kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh TPK (dinilai sederhana oleh responden).

10) Tempat

Tempat pengadaan proyek pembangunan jalan aspal terstandar berada di kantor pemerintah / Dinas PUP Kabupaten Sleman, sedangkan tahap pengadaan untuk proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat dilakukan di kantor TPK.

11) Keselamatan

Pada tahap pengadaan barang dan jasa, Jaminan keselamatan belum dipakai untuk kedua jenis pekerjaan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang ada dalam tahap pengadaan proyek konstruksi pembangunan jalan aspal terstandar adalah gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana. Kendala pada proyek konstruksi bangunan jalan aspal berbasis masyarakat adalah Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan.

13) Kelebihan

Kelebihan yang ada dalam tahap pengadaan proyek konstruksi pembangunan jalan aspal adalah diperolehnya Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan. kelebihan pada tahap pengadaan proyek konstruksi bangunan jalan aspal berbasis masyarakat adalah masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena jalan dibangun untuk kepentingan bersama warga kampung.

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Jalan

Tabel 5.40 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Jalan pada tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	45 hari kalender, 2s/d 3 bulan	90 hari kalender, 2s/d 3 bulan
b.	Biaya	Rp. 148.002.000,- Luas : (650mX3m) = 1.950m ² (ada anggaran khusus konstruksi)	Rekompak BDL : Rp. 112.987.000,- Swadaya : Rp. 500.000,- Panjang jalan 280,5m1, lebar 4m Luas = 1122m ² Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis, Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis, Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan konstruksi	1. Penyiapan tenaga kerja 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material / pengadaan bahan	1. Pembentukan Panitia Pembangunan 2. Pelatihan penyusunan DPTL & DED, manajemen konstruksi,

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menyiapkan peralatan / machine / pengadaan alat 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembersihan lahan b. Perataan tanah c. Penghamparan material bawah pondasi d. Penghamparan lapis aspal e. Pemadatan jalan f. Finishing pemadatan dan perataan jalan raya (dinilai sederhana) 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pencairan dana 4. Kontrak masyarakat 5. Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa 8. Koordinator Pengawas 9. Pengawas Lapangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Konsultan NMC, DMC 3. Masyarakat (BKM/TPK, PP/KP dan Masyarakat penerima program) 4. Suplier dan Jasa Pemborong/tenaga
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Panitia Pembangunan 2. Survei Teknis dan Harga Satuan 3. Pelatihan/coaching penyusunan DTPL dan DED 4. Penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL),

		<p>peralatan termasuk fabrikasi</p> <p>5. Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan start up</p>	<p>termasuk di dalamnya penyiapan dokumen kajian dampak Sosial dan Lingkungan</p> <p>5. Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi</p> <p>6. Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan</p> <p>7. Proses Pencairan BDL</p> <p>8. Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing titik kegiatan</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan fisik</p> <p>10. Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR</p>
g.	Hasil	Konstruksi bangunan jalan	Konstruksi bangunan jalan
h.	Partisipasi masyarakat	<p>Dinilai tidak berpartisipasi</p> <p>1. Merelakan tanaman milik pribadi yang harus ditebang tanpa kompensasi</p> <p>2. Merelakan tanah pribadi untuk pelebaran jalan tanpa kompensasi</p>	<p>Berpartisipasi penuh Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan konstruksi jalan dengan cara gotong royong</p>
i.	Administrasi	<p>Pencairan dana proyek dengan sistem termyn :</p> <p>1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak</p> <p>2. Pembayaran termyn I = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$</p> <p>3. Pembayaran termyn II = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$ (dinilai mudah)</p>	<p>Pencairan dana proyek dengan sistem termyn :</p> <p>1. Pencairan Tahap I (40%)</p> <p>2. Pencairan Tahap II (60%) (dinilai sederhana)</p>
J.	Tempat	Lokasi proyek	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis (lebih mengutamakan kearifan lokal)

l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	Sedikit	Sedang
n.	Keselamatan	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang/harus menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
o.	Kendala	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
p.	Kelebihan	Karena pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, maka pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis.	Kerukunan warga masyarakat terlihat jelas pada proses konstruksi, dalam bentuk gotong royong

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan jalan aspal baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk tahap konstruksi proyek pembangunan jalan aspal terstandar kurang lebih 45 hari kalender. Waktu yang dibutuhkan untuk tahap konstruksi proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat kurang lebih 90 hari kalender. Kisaran waktu yang dibutuhkan pada tahap konstruksi untuk kedua jenis proyek antara 2 sampai dengan 3 bulan.

2) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan aspal dengan manajemen konstruksi terstandar adalah Rp. 148.002.000,- dengan luas 1.950m² (harga

pekerjaan Rp.75.899/m²). Biaya pembangunan menggunakan anggaran khusus konstruksi dari Pemerintah.

Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan aspal dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah Rp. 112.987.000,- ditambah dengan dana swadaya masyarakat sebesar Rp. 500.000,- dengan panjang jalan 280,5m, lebar jalan 4m dan luas jalan yang dikerjakan 1122m². dari perhitungan biaya konstruksi dibagi dengan luas lahan didapatkan biaya per meter persagi pengaspalan sekitar Rp. 101.147,10. Dari hasil perhitungan perolehan biaya pokok yang ada dapat diketahui bahwa biaya proyek terstandar lebih murah bila dibandingkan dengan biaya proyek pengaspalan dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

Masyarakat mau berkontribusi dalam pembiayaan proyek walaupun dengan jumlah sedikit dalam pelaksanaan konstruksi proyek pengaspalan jalan.

3) Mutu

Mutu hasil pekerjaan konstruksi untuk kedua jenis pekerjaan sesuai dengan standar pemerintah.

4) Mekanisme Pelaksanaan konstruksi

Mekanisme pelaksanaan konstruksi untuk proyek pembangunan jalan aspal terstandar dinilai sederhana oleh responden, dengan mekanisme sebagai berikut : penyiapan tenaga kerja, menyiapkan dana financial, menyiapkan material / pengadaan bahan, menyiapkan peralatan / machine / pengadaan alat, menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (pembersihan lahan, perataan tanah, penghamparan material bawah pondasi, penghamparan lapis aspal, pemadatan jalan, finishing pemadatan dan perataan jalan raya).

Mekanisme pelaksanaan konstruksi untuk proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat dinilai sederhana oleh responden, dengan mekanisme sebagai berikut : pembentukan Panitia Pembangunan, pelatihan penyusunan DPTL & DED, manajemen konstruksi, administrasi keuangan, pencairan

dana, kontrak masyarakat dan pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR.

5) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam tahap konstruksi proyek pembangunan jalan aspal terstandar adalah Tim pelaksana kegiatan dari Dinas PUP yang terdiri dari : penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), pelaksana Teknis (Staff), pembantu Pelaksana Teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penyedia jasa, koordinator Pengawas dan pengawas Lapangan.

Dalam proses pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat, pihak yang terlibat adalah Pemerintah Desa bertugas sebagai pelaku utama pembentukan KP, Fasilitator bertugas sebagai pemandu dalam pelaksanaan proyek konstruksi, Konsultan NMC & DMC bertugas sebagai pemandu dan memonitoring pelaksanaan konstruksi, Masyarakat (BKM, TIP dan Masyarakat penerima program) bertugas sebagai pelaku/pelaksana utama, Suplier dan Jasa Pendorong/tenaga bertugas sebagai penyuplai material bahan bangunan dan penyedia tenaga ahli untuk kepentingan pembangunan.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan aspal terstandar antara lain : menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi, menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek, pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja, pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi, penyelesaian konstruksi, pra operasional dan start up.

Kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat antara lain : pembentukan Panitia Pembangunan, survei Teknis dan Harga Satuan, pelatihan/coaching penyusunan DTPL dan DED, penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL), termasuk di dalamnya penyiapan dokumen kajian dampak Sosial dan Lingkungan, pelatihan dan bimbingan manajemen

konstruksi, pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan, proses Pencairan BDL, sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing titik kegiatan, pelaksanaan kegiatan fisik, pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan dari proses konstruksi pembangunan jalan aspal untuk kedua jenis manajemen (terstandar dan berbasis masyarakat) adalah sama yaitu konstruksi bangunan jalan.

8) Partisipasi masyarakat

Tidak ada partisipasi masyarakat pada proses konstruksi proyek pembangunan jalan terstandar. Masyarakat berpartisipasi penuh dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi berbasis masyarakat, mulai dari masyarakat yang termasuk dalam TPK/BKM, PP/KP dan masyarakat penerima program. Salah satu hal nyata yang dilakukan masyarakat dalam proses konstruksi yang dapat dilihat secara nyata adalah keikutsertaan masyarakat dalam hal gotong royong.

9) Administrasi

Pencairan dana untuk kedua sistem manajemen adalah dengan cara termyn. Pada pembangunan jalan aspal dengan manajemen terstandar proses pencairan dana sebagai berikut : pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak, pembayaran termyn I = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$ dan pembayaran termyn II = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$.

Pencairan dana pada proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat adalah dengan cara termyn, proses pencairan dana sebagai berikut : pembayaran termyn I = 40% dengan kemajuan fisik 0% dan pembayaran termyn II = Kemajuan fisik 30% atau kemajuan dana 90% dari dana TahapI.

10) Tempat

Tempat pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan aspal untuk kedua jenis manajemen (terstandar dan berbasis masyarakat) adalah di lokasi proyek.

11) Pengadaan material

Dalam proses pengadaan material untuk kedua jenis proyek sama, yaitu sesuai dengan spesifikasi teknis dan lebih mengutamakan kearifan lokal untuk pengadaan material proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat.

12) Pengadaan jasa

Dalam proses pengadaan jasa untuk kedua jenis proyek sama, yaitu Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik.

13) Pekerjaan tambah kurang

Sedikit pekerjaan tambah kurang pada tahap konstruksi proyek pembangunan jalan terstandar. Sedangkan pada proyek konstruksi berbasis masyarakat, pekerjaan tambah kurang dengan prosentase sedang.

14) Keselamatan

Jaminan keselamatan kerja harus menggunakan dan diwajibkan sebagai syarat penawaran pekerjaan untuk pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan jalan terstandar. Jaminan keselamatan tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana pada proyek konstruksi pembangunan jalan berbasis masyarakat.

15) Kendala

Kendala yang sering terjadi dalam proses konstruksi untuk kedua jenis proyek sama, yaitu material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

16) Kelebihan

Pada proses konstruksi pembangunan jalan antara kedua jenis proyek memiliki kelebihan yang berbeda. Kelebihan pada proses konstruksi pembangunan jalan terstandar adalah pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, sehingga pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis. Kelebihan dan keuntungan proses konstruksi pada proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat adalah kerukunan warga masyarakat terlihat jelas pada proses konstruksi, dalam bentuk gotong royong dan pemanfaatan sisa dana untuk menambah volume pekerjaan.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan

Tabel 5.41 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Jalan pada tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	Kurang dari 1 bulan	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Biaya sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Menggunakan biaya dari masyarakat
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan 2. PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan 3. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP. 4. Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 6. penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan 7. PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 8. Penyedia yang tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES 2. Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) (dinilai sederhana)

		<p>menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List).</p> <p>9. Penyedia menyerahkan final report (dinilai mudah)</p>	
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah 1 Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa 8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Masyarakat (TPK, BKM, PP/KP) 5. Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator)
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan 2. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol 3. Mengkoordinir pelaksanaan operasional 4. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing 5. Mengarahkan dan memeriksa secara manual 6. Memproses : garasi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES 2. Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) 3. Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan

g.	Hasil	Bangunan jalan yang siap digunakan	Bangunan jalan yang siap digunakan
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi penuh/Masyarakat menerima hasil dari pembangunan atau pengaspalan jalan
i.	Administrasi	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai sederhana)	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh TPK dengan bantuan fasilitator (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Dinas Terkait & lokasi proyek	Lokasi proyek konstruksi dan kantor operasional TPK
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU	Masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan aspal baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan terstandar kurang dari satu bulan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat antara satu sampai dengan dua bulan.

2) Biaya

Biaya yang dibutuhkan dalam proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan aspal dengan manajemen konstruksi terstandar adalah sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan. Biaya yang dibutuhkan dalam penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan aspal dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah menggunakan biaya dari masyarakat.

3) Mutu

Mutu dari penyerahan hasil pekerjaan untuk kedua jenis manajemen proyek pembangunan jalan aspal adalah sama yaitu sesuai dengan spesifikasi teknis/ mutu sesuai dengan standar Pemerintah.

4) Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan

Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan untuk proyek pembangunan jalan aspal terstandar dinilai mudah oleh responden, adapun mekanismenya sebagai berikut : penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan, PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan, PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP, Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan, penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan, penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List), penyedia menyerahkan final report.

Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan untuk proyek pembangunan jalan aspal terstandar dinilai sederhana oleh responden, adapun mekanismenya sebagai berikut : penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES dan penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian).

5) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan terstandar adalah Tim pelaksana kegiatan dari Dinas PUP yang terdiri dari : penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), pelaksana Teknis (Staff), pembantu Pelaksana Teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penyedia jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Dalam proses pelaksanaan Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat, pihak yang terlibat adalah masyarakat (TPK, BKM, PP/KP), Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator). Masyarakat (TPK, BKM, PP/KP) sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dan sebagai pengelola hasil konstruksi. Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa sebagai penggerak kegiatan penyerahan hasil. Fasilitator sebagai pemandu proses penyerahan hasil.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses penyerahan hasil pekerjaan proyek konstruksi pembangunan jalan aspal terstandar adalah : menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan, mengkoordinir, mengarahkan mengontrol, mengkoordinir pelaksanaan operasional, mengarahkan dan memeriksa as built drawing, mengarahkan dan memeriksa secara manual, memproses : garasi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator.

Uraian kegiatan yang dilakukan pada tahap penyerahan hasil pekerjaan pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat adalah penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES, penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian), pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan dari proses penyerahan hasil pekerjaan pengaspalan jalan untuk kedua jenis manajemen adalah konstruksi bangunan jalan yang siap digunakan.

8) Partisipasi masyarakat

Tidak ada partisipasi masyarakat dalam tahap penyerahan hasil pekerjaan pembangunan jalan aspal dengan manajemen konstruksi terstandar. Masyarakat berpartisipasi penuh, menerima hasil dari pembangunan dan siap mengelola hasil proyek.

9) Administrasi

Administrasi pada pembangunan jalan aspal dengan metoda konstruksi terstandar dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai mudah oleh responden), sedangkan administrasi pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh TPK dengan bantuan fasilitator (dinilai sederhana oleh responden).

10) Tempat

Tempat penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan aspal dengan metoda konstruksi terstandar di Kantor Dinas Terkait & lokasi proyek, sedangkan untuk pembangunan jalan berbasis masyarakat di lokasi proyek konstruksi dan kantor operasional TPK.

11) Keselamatan

Pada proses penyerahan hasil pekerjaan jaminan keselamatan tidak digunakan dalam kedua jenis manajemen konstruksi karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang ada dalam tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek konstruksi pembangunan jalan untuk kedua jenis manajemen sama, yaitu pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai.

13) Kelebihan

Terdapat keuntungan/kelebihan yang berbeda pada kedua jenis manajemen pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan pembangunan jalan. Pada proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan terstandar

penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU. Pada proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat adalah adanya sikap masyarakat yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil pelaksanaan proyek.

5.13 Data Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

a. Perencanaan/Persiapan Pembangunan Saluran Air Limbah

Tabel 5.42 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Saluran Air Limbah pada tahap Perencanaan/Persiapan

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Ada Anggaran Khusus dari Pemerintah/sesuai DPA	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah/sesuai DAK SLBM
d.	Mekanisme perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan skema dasar 2. Survei lokasi 3. Prediksi jumlah penduduk, perkembangan kota dan timbulnya air limbah domestik. 4. Perencanaan fasilitas 5. Evaluasi 6. Penentuan rancangan induk Master plan 7. Studi kelayakan 8. Perencanaan Sistem perpipaan (dinilai rumit) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan TFL 2. Sosialisasi program 3. Seleksi lokasi oleh TFL 4. Pembentukan KSM 5. Pengisian data teknis oleh masyarakat (dinilai sederhana)
e.	Dasar usulan proyek	Investasi	Surat minat/Permohonan bantuan penanganan air

			limbah dari masyarakat
f.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. Warga Masyarakat 3. Konsultan perencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Kabupaten /SKPD terkait, Camat, Lurah, Fasilitator, Tenaga Sanitari/Puskesmas /Satker PLPP) 2. Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak) 3. Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM
g.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gagasan proyek dan analisis pendahuluan Pengembangan gagasan 2. Pengembangan gagasan menjadi konsep-konsep alternatif 3. Evaluasi kelayakan konsep alternatif dari semua konsep 4. Penentuan konsep alternatif yang baik 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menyusun perkiraan biaya 7. Menyusun organisasi pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL (penyiapan, seleksi dan pelatihan) 3. Pemilihan Lokasi dengan dua tahap seleksi (daftar panjang/longlist dan daftar pendek/shortlist) 4. Pemicuan Masyarakat sosialisasi tentang perubahan perilaku pola hidup bersih dan sehat 5. Penetapan Lokasi 6. Pembentukan dan Penetapan KSM
h.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sasaran proyek (biaya & waktu) 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organizing 4. Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana 5. Tahapan pekerjaan 6. Master, coordinating 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Fasilitator telah siap 2. Lokasi proyek telah ditetapkan 3. Masyarakat telah siap dengan rencana program yang akan dilakukan 4. Terbentuknya KSM

		scedule 7. Perkiraan biaya 8. Cash flow (Proyeksi Arus Dana)	
i.	Partisipasi masyarakat	Membantu menentukan pengguna (berpartisipasi sedang)	1. Membantu menentukan pengguna 2. Swadaya masyarakat untuk tahap persiapan (berpartisipasi penuh)
j.	Administrasi	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai rumit)	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh TFL (dinilai sederhana)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan
m.	Kelebihannya	Proses perencanaan dilakukan oleh tenaga yang ahli dalam bidang perencanaan saluran air limbah	Warga masyarakat lebih tahu tentang keadaan lapangan yang akan dibangun

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap perencanaan proyek pembangunan saluran air limbah baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan pada tahap persiapan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar dan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah sama, sekitar 2 sampai dengan 3 bulan.

2) Biaya

Biaya yang digunakan pada tahap persiapan untuk proyek pembangunan saluran air limbah terstandar menggunakan anggaran khusus perencanaan. Untuk perencanaan pada proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat menggunakan biaya dari pemerintah dan masyarakat.

3) Mutu

Mutu perencanaan pada tahap persiapan untuk kedua sistem manajemen berdasarkan standar pemerintah, dijabarkan lebih detail pada pedoman petunjuk pelaksanaan DAK SLBM untuk proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.

4) Mekanisme Perencanaan

Mekanisme perencanaan untuk proyek pembangunan Saluran air limbah terstandar dinilai rumit, dimulai dengan penentuan skema dasar, survei lokasi, prediksi jumlah penduduk, perkembangan kota dan timbulnya air limbah domestik, perencanaan fasilitas, evaluasi, penentuan rancangan induk Master plan, studi kelayakan dan perencanaan Sistem perpipaan. Proses perencanaan pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat dinilai sederhana, dimulai dari penyiapan TFL, sosialisasi program, seleksi lokasi oleh TFL, pembentukan KSM dan pengisian data teknis oleh masyarakat.

5) Dasar usulan Proyek

Dasar usulan pada proyek pembangunan Saluran air limbah terstandar adalah investasi pemerintah sedangkan dasar usulan pada proyek pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat adalah Surat minat/Permohonan bantuan penanganan air limbah dari masyarakat.

6) Pihak terlibat dan ketugasanya

Pihak yang terlibat adalah Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) sebagai penyelenggara dan tim pelaksanan proses perencanaan proyek, warga masyarakat sebagai obyek dari perencanaan proyek, konsultan perencana sebagai penyedia jasa perancangan saluran air limbah.

Untuk pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat, pihak yang terlibat antara lain Pemerintah (Kabupaten /SKPD terkait, Camat, Lurah, Fasilitator, Tenaga Sanitari/Puskesmas /Satker PLPP) sebagai penyelenggara dan pembina pengembangan sanitasi lingkungan. Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak)

sebagai pendukung kegiatan perencanaan. KSM sebagai pelaksana perencanaan.

7) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses perencanaan berbeda antara proyek pembangunan berbasis masyarakat dan proyek pembangunan terstandar. Dalam proyek terstandar kegiatan yang dilakukan antara lain : identifikasi gagasan proyek dan analisis pendahuluan Pengembangan gagasan, pengembangan gagasan menjadi konsep-konsep alternatif, evaluasi kelayakan konsep alternatif dari semua konsep, penentuan konsep alternatif yang baik, identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan, menyusun perkiraan biaya dan menyusun organisasi pelaksana.

Pada tahap perencanaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat kegiatan yang dilakukan antara lain : sosialisasi kepada Camat dan Lurah pada daerah rawan sanitasi, Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL (penyiapan, seleksi dan pelatihan), pemilihan lokasi, pemicuan Masyarakat, penetapan Lokasi, pembentukan dan penetapan KSM/ Kelompok Swadaya Masyarakat.

8) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek pembangunan Saluran air limbah terstandar adalah pengembangan sasaran proyek (biaya & waktu), identifikasi batasan utama, TOR dan organizing, saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana, tahapan pekerjaan, master, coordinating scedule, perkiraan biaya dan cash flow (Proyeksi Arus Dana).

Produk yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat adalah tenaga fasilitator telah siap, lokasi proyek telah ditetapkan, masyarakat telah siap dengan rencana program yang akan dilakukan dan terbentuknya KSM.

9) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan proyek pembangunan Saluran air limbah terstandar adalah membantu menentukan

pengguna (berpartisipasi sedang). Dalam proses perencanaan pembangunan proyek pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat adalah membantu menentukan pengguna, swadaya masyarakat untuk tahap persiapan (berpartisipasi penuh).

10) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perencanaan pembangunan Saluran air limbah terstandar dilakukan oleh Tim Perencana, sedangkan pada proyek berbasis masyarakat dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

11) Keselamatan

Pada tahap perencanaan, kedua sistem manajemen konstruksi Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang terjadi dalam perencanaan saluran dengan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat sama, yaitu terjadi konflik antar pemangku kepentingan.

13) Kelebihan

Kelebihan dari perencanaan saluran air limbah terstandar adalah Proses perencanaan dilakukan oleh tenaga yang ahli dalam bidang perencanaan saluran air limbah. Kelebihan dari perencanaan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah warga masyarakat lebih tahu tentang keadaan lapangan yang akan dibangun.

b. Perancangan Pembangunan Saluran Air Limbah

Tabel 5.43 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Saluran Air Limbah pada tahap Perancangan

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	3 s/d 4 bulan di tahun sebelumnya	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perencanaan/jasa konsultasi	Menggunakan biaya perencanaan dan biaya swadaya masyarakat
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah

d.	Mekanisme perancangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program perencanaan kepada warga masyarakat penerima program 2. Diadakan survei harga 3. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) (dinilai sederhana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pelaksanaan Penyusunan RKM 2. Pendanaan dan tahap pencairan dana 3. Verifikasi RKM 4. Perjanjian kerja KSM dengan SKPD (dinilai rumit)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (pemerintah satu Dinas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staf) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staf) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) <p>Tim Perencana (Konsultan Perencana)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator perencana 2. Perencana 3. Tenaga survei 4. Penggambar 5. Penghitung RAB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Pemda/DPUP, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Masyarakat (KSM, Tokoh masyarakat dan Masyarakat pengguna)
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 3. Review estimasi biaya secara rinci 4. Review desain akhir berupa hasil gambar detail 5. Review desain akhir berupa hasil spesifikasi teknis 6. Review desain akhir berupa daftar volume 7. Review desain akhir berupa RAB 	<p>Pendampingan TFL Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan teknologi 2. Pengukuran 3. Gambar/DED 4. RAB 5. Spesifikasi Teknis <p>Pendampingan TFL Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klasifikasi kesejahteraan 2. Persiapan tenaga kerja 3. Pembukaan rekening bersama <p>Verifikasi RKM</p>

		8. Review desain akhir berupa syarat-syarat administrasi 9. Review desain akhir berupa peraturan-peraturan umum yang berlaku	
g.	Hasil	1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, masukan proses dan keluaran 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar bestek dan shop drawing 5. Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya 6. Pedoman administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar	Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Profil lokasi b. Organisasi dan struktur KSM c. Anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART) KSM d. Surat ketersediaan Lahan dan atau persetujuan warga e. Dokumen dan berita acara seleksi kampung f. Penentuan Calon Pengguna g. Pemilihan Teknologi Sanitasi h. DED dan RAB lengkap disertai dengan kurva S i. Rekening bank bersama j. Sumber Pendanaan serta Mekanisme Pencairan Dana dari pemerintah k. Pengelolaan Keuangan DAK SLBM l. Rencana Kerja m. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara SATKER/PPK Sanitasi kabupaten/Kota dengan KSM, tentang pemanfaatan DAK SLBM n. Jaminan dari masyarakat pengguna terhadap kesediaan

			dalam mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana DAK SLBM
h.	Partisipasi masyarakat	Memberikan data penduduk untuk proyek yang akan dilaksanakan (berpartisipasi sedang)	Seluruh warga ikut serta mengukur rencana jaringan SR (berpartisipasi penuh)
i.	Administrasi	Pelaporan hasil pekerjaan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai rumit)	Pelaporan hasil pekerjaan dilakukan oleh TFL dan KSM (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor konsultan perencana	Kantor PEMDA/DPUP dan Kantor KSM
k.	Sumber Pendanaan	Ada Anggaran Khusus dari Pemerintah/sesuai DPA	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
l.	Cara Pencairan	Setelah proses perancangan diselesaikan	Setelah RKM jadi baru proses pencairan dana
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Desain dari konsultan perencana sudah siap dilaksanakan	Perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL menghasilkan desain yang benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar selama 3 sampai dengan 4 bulan. Waktu yang dibutuhkan pada tahap perancangan proyek saluran air limbah berbasis masyarakat selama 1 sampai dengan 2 bulan.

2) Biaya

Ada anggaran khusus perencanaan/jasa konsultasi pada tahap perancangan saluran air limbah terstandar. Pada tahap perancangan saluran air limbah berbasis masyarakat menggunakan biaya perencanaan dan biaya swadaya masyarakat.

3) Mutu

Mutu perancangan untuk kedua sistem pembangunan saluran air limbah bertumpu pada standar pemerintah, dijabarkan secara rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan DAK SLBM untuk kegiatan perancangan proyek saluran air limbah berbasis masyarakat.

4) Mekanisme Perancangan

Mekanisme perancangan untuk proyek pembangunan saluran air limbah terstandar dimulai dari sosialisasi program perencanaan kepada warga masyarakat penerima program, diadakan survei harga dan perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) kegiatan ini dinilai mudah oleh responden, review hasil perancangan dan evaluasi harga untuk produk konsultan perencanaan oleh tim perencana dari SKPD terkait, kegiatan ini dinilai mudah oleh responden.

Pada proses perancangan pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat, mekanisme perencanaan antara lain : persiapan pelaksanaan penyusunan RKM, pendanaan dan tahap pencairan dana, verifikasi RKM dan perjanjian kerja KSM dengan SKPD (dinilai rumit oleh responden).

5) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam perancangan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar adalah Tim Pelaksana Kegiatan (pemerintah satu Dinas) : penanggung jawab kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), koordinator pelaksana (Kepala Seksi), pelaksana teknis (Staf) pembantu pelaksana teknis (Staf), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Tim Perencana (Konsultan Perencana) yang terdiri dari : koordinator perencana, perencana, tenaga survei, penggambar, penghitung RAB.

Pihak yang terlibat dalam proses perancangan pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah Pemerintah (Pemda/DPUP, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) dan masyarakat (KSM, Tokoh masyarakat dan Masyarakat pengguna).

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam proyek perancangan saluran air limbah terstandar kegiatan yang dilakukan antara lain : membuat kriteria desain, membuat skematik desain, review estimasi biaya secara rinci, review desain akhir berupa hasil gambar detail, membuat desain akhir berupa hasil spesifikasi teknis, review desain akhir berupa daftar volume, review desain akhir berupa RAB, review desain akhir berupa syarat-syarat administrasi dan review desain akhir berupa peraturan-peraturan umum yang berlaku.

Kegiatan yang dilakukan dalam proyek perancangan saluran air limbah berbasis masyarakat kegiatan yang dilakukan antara lain : pendampingan TFL Teknis (pemilihan teknologi, pengukuran, gambar/DED, RAB dan spesifikasi Teknis), pendampingan TFL Sosial (klasifikasi kesejahteraan, persiapan tenaga kerja, pembukaan rekening bersama) dan verifikasi RKM.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar adalah kontrak untuk staf proyek dan kontraktor, spesifikasi, masukan proses dan keluaran, desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas, gambar bestek dan shop drawing, jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya, pedoman administrasi dan keuangan dan proses operasional dan standar.

Produk yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang berisi : profil lokasi, organisasi dan struktur KSM, anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART) KSM, surat ketersediaan Lahan dan atau persetujuan warga, dokumen dan berita acara seleksi kampung, penentuan calon pengguna, pemilihan teknologi sanitasi, DED dan RAB lengkap disertai dengan kurva S, rekening bank bersama,

sumber pendanaan serta mekanisme pencairan dana dari pemerintah, pengelolaan keuangan DAK SLBM, rencana kerja, surat perjanjian kerja sama antara SATKER/PPK sanitasi kabupaten/Kota dengan KSM, tentang pemanfaatan DAK SLBM dan jaminan dari masyarakat pengguna terhadap kesediaan dalam mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana DAK SLBM.

8) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat pada proses perancangan pembangunan saluran air limbah terstandar adalah memberikan data penduduk untuk proyek yang akan dilaksanakan (berpartisipasi sedang) . Partisipasi masyarakat pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah Seluruh warga ikut serta mengukur rencana jaringan SR (berpartisipasi penuh).

9) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perancangan pembangunan saluran air limbah terstandar dilakukan oleh tim perencana (dinilai rumit), sedangkan pada proyek berbasis masyarakat dilakukan TFL dan KSM (dinilai sederhana).

10) Tempat

Tempat perancangan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar berada di Kantor konsultan perencana, sedangkan untuk proyek berbasis masyarakat dilakukan di kantor PEMDA/DPU dan kantor KSM.

11) Sumber pendanaan

Sumber pendanaan pada tahap perancangan saluran air limbah terstandar berasal dari APBD/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sumber pendanaan pada tahap perancangan saluran air limbah berbasis masyarakat berasal dari anggaran khusus dari Pemerintah dan dana dari masyarakat.

12) Cara pencairan

Biaya perancangan pada tahap perancangan proyek saluran air limbah terstandar dilakukan setelah proses perancangan diselesaikan. Biaya

perancangan pada proyek saluran air limbah berbasis masyarakat setelah dokumen Rencana Kerja Masyarakat/RKM telah selesai.

13) Jaminan Keselamatan

Jaminan keselamatan pada tahap perancangan pembangunan saluran air limbah untuk kedua manajemen tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana.

14) Kendala

Kendala yang terjadi pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah untuk kedua jenis manajemen sama yaitu SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek.

15) Kelebihan

Terdapat nilai positif pada tahap perancangan bangunan saluran air limbah terstandar yaitu proses perancangan dilakukan oleh tim teknis yang sudah berpengalaman. Sedangkan nilai positif pada proses perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL menghasilkan desain yang benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Pembangunan Saluran Air Limbah

Tabel 5.44 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Saluran Air Limbah pada tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan	Kurang dari 1 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus pengadaan yang melekat pada DPA di ULP/Unit Layanan Pengadaan	Tidak ada biaya pengadaan
c.	Mutu	Mutu sesuai standar pemerintah	Mutu lebih buruk dari standar Pemerintah
d.	Mekanisme pengadaan	Lelang pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai sederhana oleh responden)	Pengadaan Barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat (dinilai sederhana oleh masyarakat)

e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Layanan Pengadaan 2. Tim Pelaksana Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) - Ketua (Kepala Bidang) - Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) - Pelaksana Teknis (Staff) - Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 3. Penyedia jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. Masyarakat (KSM, Masyarakat) 3. Suplier bahan bangunan
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE) 2. Pengumuman Pascakualifikasi 3. Download dokumen Pengadaan 4. Pemberian penjelasan 5. Upload dokumen Penawaran 6. Evaluasi penawaran 7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 8. Pembuktian kualifikasi 9. Upload berita acara Hasil Pelelangan 10. Penetapan pemenang 11. Pengumuman pemenang 12. Masa Sanggah hasil lelang 13. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa 14. Penandatanganan Kontrak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian kerja KSM dengan SKPD 2. Kontrak perjanjian antara KSM dengan Penyedia bahan bangunan /suplier bahan bangunan dan tenaga ahli
g.	Hasil	Terpilihnya Penyedia Jasa sesuai dengan kriteria	Terpilihnya penyedia bahan bangunan/suplier

		SBU yang dibutuhkan	bahan bangunan
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi	Masyarakat/KSM melaksanakan survei harga, ikut mengevaluasi dan mengendalikan mutu bahan bangunan yang digunakan (berpartisipasi penuh)
i.	Administrasi	Pelaporan tahap pelelangan disampaikan oleh ULP kepada SKPD terkait (dinilai rumit oleh responden)	Pelaporan tahap pelelangan dilakukan oleh KSM dibantu TFL (dinilai sederhana oleh responden)
J.	Tempat	Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Kantor Pemda/DPUP dan Kantor KSM
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	Gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana/mengalami kemunduran	Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek.
o.	Kelebihan	Mendapatkan penyedia jasa yang berkompeten dalam pekerjaan konstruksi sejenis	SuPLIER yang ditunjuk oleh masyarakat memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar karena berada tidak jauh dari lokasi proyek.

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan saluran air limbah baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan pada tahap pengadaan proyek saluran air limbah terstandar antara 1 s/d 2 bulan, sedangkan untuk pengadaan saluran air limbah berbasis masyarakat membutuhkan waktu kurang dari satu bulan.

2) Biaya

Biaya yang digunakan untuk proses pengadaan pada proyek pembangunan saluran air limbah terstandar melekat pada biaya umum Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA)/ ada anggaran khusus pengadaan . Tidak ada anggaran untuk pelaksanaan pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.

3) Mutu

Mutu pengadaan pada proyek pembangunan saluran air limbah dengan metode konstruksi terstandar sesuai standar pemerintah. Mutu pengadaan pada proyek pembangunan saluran air limbah dengan metode konstruksi berbasis masyarakat lebih buruk dari standar Pemerintah.

4) Mekanisme Pengadaan

Mekanisme pengadaan untuk proyek pembangunan saluran air limbah terstandar menggunakan cara Lelang pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai sederhana oleh responden). Pada proses pengadaan pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat, mekanisme pengadaan dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat (dinilai sederhana oleh responden).

5) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar adalah Unit Layanan Pengadaan/ULP , Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari : Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staff), Pembantu Pelaksana Teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Penyedia jasa.

Dalam proses pengadaan proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat, pihak yang terlibat adalah pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL), masyarakat (KSM, Masyarakat) dan suplier bahan bangunan.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pengadaan untuk kedua jenis manajemen pembangunan saluran air limbah berbeda. Dalam proyek terstandar kegiatan yang dilakukan antara lain : mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE), pengumuman Pascakualifikasi, download dokumen Pengadaan, pemberian penjelasan, upload dokumen Penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi Dokumen Kualifikasi, pembuktian kualifikasi, upload berita acara Hasil Pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa Sanggah hasil lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan Kontrak. Pada tahap pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat kegiatan yang dilakukan adalah perjanjian kerja KSM dengan SKPD, kontrak perjanjian antara KSM dengan Penyedia bahan bangunan /suplier bahan bangunan dan tenaga ahli.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar adalah terpilihnya Penyedia Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan Konstruksi sesuai dengan kriteria SBU yang dibutuhkan. Produk yang dihasilkan pada tahap pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah terpilihnya penyedia bahan bangunan/suplier bahan bangunan.

8) Partisipasi masyarakat

Tidak ada partisipasi masyarakat pada tahap pengadaan proyek konstruksi saluran air limbah terstandar. Masyarakat berpartisipasi penuh dalam tahap pengadaan proyek konstruksi saluran air limbah berbasis masyarakat dengan : melaksanakan survei harga oleh KSM, ikut mengevaluasi dan mengendalikan mutu bahan bangunan yang digunakan.

9) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap pengadaan konstruksi bangunan saluran air limbah terstandar dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada SKPD terkait (dinilai rumit oleh responden). Pada proyek

pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat dilakukan oleh KSM dibantu oleh TFL (dinilai sederhana oleh responden).

10) Tempat

Tempat pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar berada di kantor pemerintah / ULP, sedangkan proses pengadaan untuk proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat dilakukan di kantor PEMDA/Dinas PUP dan kantor KSM.

11) Jaminan Keselamatan

Tidak menggunakan jaminan keselamatan pada tahap pengadaan untuk kedua jenis manajemen karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam tahap pengadaan proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah terstandar adalah gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana/mengalami kemunduran. Kendala yang dihadapi pada tahap pengadaan proyek konstruksi bangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek.

13) Kelebihan

Kelebihan dari proses pengadaan pada proyek konstruksi terstandar adalah mendapatkan penyedia jasa yang berkompeten dalam pekerjaan konstruksi sejenis. Kelebihan pada tahap pengadaan suplier bahan bangunan yang menggunakan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah Suplier yang ditunjuk oleh masyarakat memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar karena berada tidak jauh dari lokasi proyek.

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pembangunan Saluran Air Limbah

Tabel 5.45 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Saluran Air Limbah pada tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	3 s/d 4 bulan	3 s/d 4 bulan

b.	Biaya	Pemda = Rp.608.443.000 Pipa servis 1470m dengan rincian 147 SR, Realisasi penyambungan 140 bh (menggunakan biaya khusus konstruksi)	Pemda = Rp. 446.026.670 Dengan rincian : IPAL = Rp217.862.600,- Pemipaan = Rp213.464.700,- Pajak material 10% = Rp28.980.320,- Swadaya masyarakat = Rp. 14.281.000 Luas lahan 200m ² , kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 6' = 414m ¹ , Pipa PVC D 4' = 1071m ¹ , pipa PVC D 2' = 58m' (menggunakan biaya konstrksi dari pemerintah dan biaya swadaya masyarakat)
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme kegiatan konstruksi	1. Penyiapan tenaga kerja 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material 4. Menyiapkan peralatan / machine 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan 6. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi (dinilai rumit)	1. Pengadaan material 2. Pengadaan tukang/tenaga ahli 3. Pelaksanaan konstruksi (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	Tim Pelaksana Kegiatan 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. KSM 3. Masyarakat penerima proyek 4. Suplier bahan bangunan 5. Tukang/tenaga ahli

		<p>7. Penyedia jasa 8. Koordinator Pengawas 9. Pengawas Lapangan Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa) Masyarakat penerima program</p>	
f.	Uraian kegiatan	<p>1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan startup</p>	<p>1. Penjelasan teknis konstruksi 2. Pelaksanaan konstruksi dengan tahap : - Rembug warga - Survei pemetaan ulang - Pembersihan dan penyiapan lahan IPAL - Penyiapan peralatan K3, sign board, turap pengaman galian - Penyiapan direksi keet, gudang, area kerja - Pengadaan dan pembelian barang oleh panitia pengadaan - Pembagian grup dan area kerja - Pelaksanaan pekerjaan - Monitoring dan evaluasi</p>
g.	Hasil	Konstruksi bangunan SR	Konstruksi bangunan IPAL dan SR
h.	Partisipasi masyarakat	Merelakan pembongkaran dibagian rumah untuk pembangunan SR (berpartisipasi dengan prosentase rendah)	<p>1. Gotong royong dalam proses pembangunan 2. Menyediakan konsumsi 3. Antusias masyarakat untuk menyambung SR tinggi (berpartisipasi dengan prosentase sedang)</p>
i.	Administrasi	<p>Pencairan dana proyek dengan sistem termyn :</p> <p>1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak 2. Pembayaran termyn I = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$ 3. Pembayaran termyn II</p>	<p>Pencairan dana proyek dengan sistem termyn</p> <p>1. Pencairan dana tahap I sebesar 40% dengan progres konstruksi 0% 2. Pencairan dana tahap II sebesar 30% dengan progres konstruksi 30%</p>

		= (50% x kontrak)- (50% x uang muka) (dinilai rumit)	3. Pencairan dana tahap III sebesar 30% dengan progres konstruksi 60% (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Lokasi proyek	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis
l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi penyedia jasa yang dibutuhkan tapi tidak biasa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	1. Ada beberapa rencana jaringan yang tidak bisa dikerjakan sehingga butuh titik baru (pekerjaan tambah kurang prosentasenya sedang)	1. Perubahan mayoritas di perpipaan 2. Selisih harga dari perencanaan & pengadaan digunakan untuk penambahan penyambungan SR, bak kontrol 3. Sedikit karena dikerjakan sendiri oleh masyarakat (pekerjaan tambah kurang prosentasenya sedikit)
n.	Jaminan Keselamatan	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
o.	Kendala	Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis	Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi
p.	Kelebihan	Pelaksanaan konstruksi cepat terselesaikan karena terikat oleh waktu penyelesaian proyek	Dana yang tersedia biasanya tersisa dan bisa digunakan untuk pembangunan jaringan SR tambahan.

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui

hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu pelaksanaan proyek untuk kedua jenis pekerjaan sama yaitu antara 3 sampai dengan 4 bulan.

2) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan saluran air limbah dengan manajemen konstruksi terstandar adalah Pemda/ada anggaran khusus konstruksi dari pemerintah = Rp.608.443.000, Pipa servis 1470m dengan rincian 147 SR, Realisasi penyambungan 140 bh.

Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan saluran air limbah dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat berasal dari biaya khusus konstruksi dari Pemerintah dan swadaya masyarakat, dengan rincian sebagai berikut Pemda = Rp. 446.026.670, Luas lahan 200m², kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 6' = 414m¹, Pipa PVC D 4' = 1071m¹, pipa PVC D 2' = 58m¹ dan Swadaya masyarakat = Rp. 14.281.000. dari kebutuhan biaya yang ada dapat dilihat pada proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat, terdapat keikutsertaan masyarakat dalam berkontribusi. Kontribusi tergantung dari kesadaran masyarakat pada tiap-tiap lokasi kegiatan, yang menentukan banyaknya jumlah titik sambungan.

3) Mutu

Mutu hasil konstruksi untuk kedua manajemen pembangunan saluran air limbah sama yaitu sesuai dengan standar Pemerintah.

4) Mekanisme Pelaksanaan konstruksi

Mekanisme pelaksanaan konstruksi untuk proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yaitu : penyiapan tenaga kerja, menyiapkan dana financial, menyiapkan material, menyiapkan peralatan / machine, menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (dinilai rumit oleh responden).

Mekanisme pelaksanaan konstruksi untuk proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat yaitu : pengadaan material, pengadaan

tukang/tenaga ahli dan pelaksanaan konstruksi (dinilai sederhana oleh responden).

5) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah terstandar adalah Tim pelaksana kegiatan dari Dinas PUP yang terdiri dari : penanggung jawab kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), koordinator pelaksana (Kepala Seksi), pelaksana teknis (Staff), pembantu pelaksana teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penyedia jasa, koordinator pengawas, pengawas lapangan, pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa) dan masyarakat penerima program.

Dalam proses pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat, pihak yang terlibat adalah pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL), KSM, masyarakat penerima proyek, suplier bahan bangunan dan tukang/tenaga ahli.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi dalam pelaksanaan proyek konstruksi terstandar adalah menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi, menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek, pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja, pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi, penyelesaian konstruksi, pra operasional dan startup.

Kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi pada proyek konstruksi berbasis masyarakat adalah penjelasan teknis konstruksi, pelaksanaan konstruksi dengan tahap rebug warga, survei pemetaan ulang, pembersihan dan penyiapan lahan IPAL, penyiapan peralatan K3, sign board, turap pengaman galian, penyiapan direksi keet, gudang, area kerja, pengadaan dan pembelian barang oleh panitia pengadaan, pembagian grup dan area kerja, pelaksanaan pekerjaan, monitoring dan evaluasi.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan dari proses konstruksi pembangunan saluran air limbah dengan manajemen konstruksi terstandar adalah bangunan Saluran

Rumah/SR yang disambungkan kedalam saluran induk pembuangan limbah yang mengarah ke Sewon Bantul. Produk yang dihasilkan dalam proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah konstruksi bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL dan Saluran Rumah/SR dari tiap-tiap rumah.

8) Partisipasi masyarakat

Masyarakat berpartisipasi rendah pada proses pelaksanaan konstruksi pembangunan saluran air limbah terstandar dengan cara merelakan pembongkaran dibagian rumah untuk pembangunan SR. Masyarakat berpartisipasi sedang pada tahap konstruksi di proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat dengan cara gotong royong dalam proses pembangunan, menyediakan konsumsi dan antusias masyarakat untuk menyambung SR tinggi.

9) Administrasi

Pencairan dana untuk kedua sistem manajemen adalah dengan cara termyn. Pada pembangunan saluran air limbah dengan manajemen terstandar proses pencairan dana sebagai berikut : pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak, pembayaran termyn I = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$ dan pembayaran termyn II = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$, tahap ini dinilai rumit oleh responden.

Pada proses pencairan dana pada proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah sebagai berikut : pencairan dana tahap I sebesar 40% dengan progres konstruksi 0%, pencairan dana tahap II sebesar 30% dengan progres konstruksi 30%, pencairan dana tahap III sebesar 30% dengan progres konstruksi 60%), tahap ini dinilai sederhana oleh responden.

10) Tempat

Tempat pelaksanaan konstruksi untuk kedua jenis manajemen konstruksi pembangunan saluran air limbah adalah di lokasi proyek.

11) Pengadaan material

Pengadaan material bahan bangunan untuk kedua jenis manajemen konstruksi pembangunan saluran air limbah sesuai dengan standar pemerintah.

12) Pengadaan Jasa

Pengadaan jasa dalam proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah terstandar sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik. Pengadaan jasa dalam proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat Sesuai dengan spesifikasi penyedia jasa yang dibutuhkan tapi tidak biasa mengerjakan konstruksi dengan baik.

13) Pekerjaan Tambah Kurang

Ada beberapa item pekerjaan tambah kurang pada tahap konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah terstandar, antara lain : ada beberapa rencana jaringan yang tidak bisa dikerjakan sehingga butuh titik baru (pekerjaan tambah kurang prosentasenya sedang). Beberapa item pekerjaan tambah kurang pada tahap konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat antara lain : perubahan mayoritas di perpipaan, selisih harga dari perencanaan & pengadaan digunakan untuk penambahan penyambungan SR, bak kontrol, sedikit karena dikerjakan sendiri oleh masyarakat (pekerjaan tambah kurang prosentasenya sedikit).

14) Jaminan Keselamatan

Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang untuk proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah terstandar. Pada proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat tidak menggunakan jaminan keselamatan karena tidak ada alokasi dana.

15) Kendala

Kendala yang ada dalam tahap pelaksanaan konstruksi pembangunan saluran air limbah terstandar yaitu kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis. Kendala yang ada dalam tahap pelaksanaan konstruksi pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat yaitu pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi.

16) Kelebihan

Dalam tahap konstruksi pembangunan saluran air limbah terstandar, pelaksanaan konstruksi cepat terselesaikan karena terikat oleh waktu penyelesaian proyek dan menyangkut nama baik perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut. Kelebihan dari pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah dana yang tersedia biasanya tersisa dan bisa digunakan untuk pembangunan jaringan SR tambahan atau fasilitas lain yang berhubungan dengan proyek.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Pembangunan Saluran Air Limbah

Tabel 5.46 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Saluran Air Limbah pada tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	Kurang dari 1 bulan	Kurang dari 1 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Tidak ada biaya dan biasanya menggunakan dana swadaya masyarakat
c.	Mutu	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pengoperasian pelaksanaan Penyerahan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan 2. PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan 3. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP. 4. Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan PHO dengan tujuan mengecek kesesuaian bangunan dan kelayakan operasional bangunan 2. Pelaksanaan comisioning Test bangunan ipal 3. Pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat (dinilai sederhana)

		<p>Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 6. penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan 7. PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 8. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List). 9. Penyedia menyerahkan final report (dinilai sederhana) 	
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa 8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas/DPUP, Kecamatan, Desa dan TFL) 2. Masyarakat (KSM, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat penerima program)
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan 2. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol 3. Mengkoordinir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan (comissioning uji kebocoran IPAL) 2. Rembug Warga 3. Serah terima pekerjaan

		<p>pelaksanaan operasional</p> <p>4. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing</p> <p>5. Mengarahkan dan memeriksa secara manual</p> <p>6. Memproses : garansi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator</p>	<p>dari KSM kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan hasil proyek kepada KSM untuk difungsikan.</p> <p>4. Pengumpulan dan penyusunan dokumen pelaksanaan</p> <p>5. Penyerahan operasi dan pemeliharaan kepada masyarakat</p> <p>6. Pengoperasian organisasi pengelolaan dan jaringan SR dan IPAL</p> <p>7. Penyerahan laporan akhir kegiatan (Laporan teknik, laporan keuangan dan laporan logistik)</p>
g.	Hasil	Bangunan SR yang siap dioperasikan	Bangunan IPAL dan SR yang siap dioperasikan
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi penuh
i.	Administrasi	Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan oleh Penyedia Jasa (dinilai sederhana)	Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan oleh KSM dan TFL (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Dinas Terkait dan lokasi proyek	Kantor Dinas terkait dan lokasi proyek
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu rekanan dan SKPD terkait/Dinas PU	Masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air

limbah baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah kedua jenis manajemen sama, yaitu kurang dari satu bulan.

2) Biaya

Ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah terstandar. Proses penyerahan pekerjaan pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat tidak ada anggaran biaya, biasanya menggunakan biaya swadaya masyarakat.

3) Mutu

Mutu dari penyerahan hasil pekerjaan pada proyek pembangunan saluran air limbah untuk kedua manajemen sesuai dengan standar pemerintah.

4) Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan

Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan untuk proyek pembangunan saluran air limbah terstandar adalah penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan, PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan, PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP, pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak, penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan, penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan, penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) dan penyedia menyerahkan final report (dinilai sederhana oleh responden). Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah dilaksanakan PHO dengan tujuan mengecek kesesuaian bangunan dan kelayakan operasional bangunan, pelaksanaan comisioning Test bangunan ipal dan

pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat (dinilai sederhana oleh responden).

5) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar adalah Tim pelaksana kegiatan dari Dinas PUP yang terdiri dari : penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), pelaksana Teknis (Staff), pembantu Pelaksana Teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penyedia jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Dalam proses pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat, pihak yang terlibat adalah pemerintah (Dinas/DPUP, Kecamatan, Desa dan TFL), masyarakat (KSM, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat penerima program).

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses penyerahan hasil pekerjaan pada proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah terstandar antara lain : menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan, mengkoordinir, mengarahkan mengontrol, mengkoordinir pelaksanaan operasional, mengarahkan dan memeriksa as built drawing, mengarahkan dan memeriksa secara manual serta memproses : garansi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator.

Untuk proses penyerahan hasil pekerjaan pembangunan saluran air limbah dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, kegiatan yang dilakukan antara lain : menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan (comissioning uji kebocoran IPAL), rebug warga, serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan hasil proyek kepada KSM untuk difungsikan, pengumpulan dan penyusunan dokumen pelaksanaan, penyerahan operasi dan pemeliharaan kepada masyarakat, pengoperasian organisasi pengelolaan dan jaringan SR dan IPAL dan penyerahan laporan akhir kegiatan (Laporan teknik, laporan keuangan dan laporan logistik).

7) Hasil

Produk yang dihasilkan dari proses penyerahan hasil pekerjaan pembangunan saluran air limbah terstandar adalah SR yang siap dioperasikan. Produk yang dihasilkan dari proses penyerahan hasil pekerjaan pembangunan saluran air limbah dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah bangunan IPAL dan SR yang siap dioperasikan.

8) Partisipasi masyarakat

Masyarakat tidak berpartisipasi pada proses penyerahan hasil pekerjaan pembangunan saluran air limbah terstandar. Masyarakat berpartisipasi penuh dalam proses penyerahan hasil pekerjaan proyek saluran air limbah berbasis masyarakat dan siap mengelola hasil pembangunan.

9) Administrasi

Pelaporan akhir pekerjaan dan administrasi pelaporan pada proyek pembangunan saluran air limbah terstandar dilakukan oleh penyedia jasa. Pelaporan akhir pekerjaan dan administrasi pelaporan pada proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat dilakukan oleh KSM dan TFL. Administrasi pada tahap penyerahan hasil dinilai sederhana oleh responden.

10) Tempat

Tempat penyerahan hasil pekerjaan untuk kedua jenis manajemen proyek pembangunan saluran air limbah berada di Kantor Dinas Terkait & lokasi proyek.

11) Keselamatan

Dalam tahap penyerahan hasil pekerjaan pembangunan saluran air limbah dengan sistem manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat menggunakan jaminan keselamatan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala pada tahap penyerahan hasil pekerjaan untuk proyek pembangunan saluran air limbah terstandar adalah pekerjaan fisik belum

selesai dan laporan administrasi belum selesai. Kendala pada tahap penyerahan hasil pekerjaan untuk proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai.

13) Kelebihan

Kelebihan dalam tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah terstandar adalah penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu rekanan dan SKPD terkait/Dinas PU. Kelebihan pada proyek konstruksi bangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan.

5.14 Data Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Rumah Tinggal

a. Perencanaan/Persiapan Pembangunan Rumah Tinggal

Tabel 5.47 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada tahap Perencanaan/Persiapan

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan (pada tahun anggaran sebelum tahun pelaksanaan proyek)	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya umum perencanaan	Menggunakan biaya umum perencanaan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah/Sesuai Pedoman Teknis Pembangunan BDR & BDL
d.	Mekanisme perencanaan	1. Survei awal lokasi proyek 2. Rancangan kasar dari proyek yang direncanakan (dinilai sederhana)	1. Sosialisasi REKOMPAK (dinilai sederhana)

e.	Dasar usulan proyek	Investasi	Upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi
f.	Pihak terlibat dan ketugasannya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Konsultan perencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Pemprov, Pemkab) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMC)
g.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gagasan proyek dan analisis pendahuluan 2. Pengembangan gagasan menjadi konsep-konsep alternatif 3. Evaluasi kelayakan konsep alternatif dari semua konsep 4. Penentuan konsep alternatif yang baik 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menyusun perkiraan biaya 7. Menyusun organisasi pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten 2. Lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten 3. Penetapan lokasi 4. Pengadaan dan pelatihan praturgas Konsultan Kabupaten/kota 5. Pengadaan dan Pelatihan Praturgas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF
h.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sasaran proyek baik dilihat dari aspek biaya dan waktu 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organizing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana 5. Tahapan pekerjaan 6. Master, coordinating scedule 7. Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana 8. Cash flow (Proyeksi Arus Dana) 	<p>persepsi tentang proyek. Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut. 3. Daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan. 4. Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.
i.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan (Berpartisipasi penuh)
j.	Administrasi	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh tim perencana (dinilai mudah)	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (dinilai mudah)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
m.	Kelebihan	Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh tim yang sudah berkompeten di bidangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan publik lebih efektif, memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat 2. Proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap perencanaan/persiapan proyek pembangunan rumah tinggal baik yang menggunakan sistem

manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan dalam proses perencanaan rata-rata sama, yaitu sekitar 2 sampai dengan 3 bulan.

2) Biaya

Biaya yang digunakan pada proses perencanaan sama berasal dari anggaran khusus perencanaan yang melekat pada SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

3) Mutu

Mutu perencanaan untuk kedua sistem pembangunan jalan sesuai dengan Standar Pemerintah, dijabarkan secara rinci pada Pedoman Teknis Pembangunan Biaya Dana Rumah/BDR dan Biaya Dana Lingkungan/BDL untuk proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat.

4) Mekanisme Perencanaan

Mekanisme perencanaan untuk proyek pembangunan rumah tinggal terstandar dimulai dari survei awal lokasi yang dilanjutkan dengan pembuatan rancangan kasar dari proyek yang akan direncanakan. Pada proses perencanaan pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat, mekanisme perencanaan berupa sosialisasi proyek REKOMPAK. Mekanisme perencanaan untuk kedua jenis proyek dinilai sederhana oleh responden.

5) Dasar usulan Proyek

Dasar usulan perencanaan pada proyek pembangunan rumah tinggal terstandar adalah investasi pemerintah sedangkan dasar usulan pada proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah upaya pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi.

6) Pihak terlibat dan ketugasanya

Pihak yang terlibat dalam perencanaan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar adalah tim pelaksana kegiatan dari Dinas PUP kabupaten Sleman yang terdiri atas : Penanggung jawab kegiatan (Kepala Dinas), ketua

(Kepala Bidang), Koordinator pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staff), Pembantu Pelaksana Teknis (staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Konsultan Perencana yang bertugas merencanakan proyek rumah tinggal.

Pihak yang terlibat dalam perencanaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah Pemerintah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Fasilitator) dan Konsultan (PMU, NMC dan DMC). Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagai penanggungjawab kegiatan. Fasilitator sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan. PMU/ Project Management Unit/Dirjen Cipta Karya PU sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk manajemen dan pelaksanaan proyek. NMC/National Management Consultant adalah konsultan di tingkat Nasional yang berfungsi membantu PMU Rekompak dalam pengendalian pelaksanaan proyek di wilayah kerjanya. DMC/District Management Consultant adalah konsultan di tingkat Provinsi yang bertugas membantu PMU Rekompak dan bertanggung jawab kepada NMC dalam pengendalian pelaksanaan proyek di wilayah kerjanya.

7) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses perencanaan berbeda antara proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat dan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal terstandar kegiatan yang dilakukan antara lain : Identifikasi gagasan proyek, Pengembangan gagasan, Evaluasi kelayakan konsep, Penentuan konsep alternatif, Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan, menyusun perkiraan biaya dan menyusun organisasi pelaksanaan.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat antara lain : loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten, lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten, penetapan lokasi, pengadaan dan pelatihan

pratugas Konsultan Kabupaten/kota, pengadaan dan Pelatihan Pratugas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF.

8) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar adalah Pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu, Identifikasi batasan utama, TOR dan organizing, saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana, tahapan pekerjaan, Master coordinating scedule, Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana dan Cash flow (proyeksi arus dana). Produk yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek rumah tinggal berbasis masyarakat adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek, Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut, Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut, daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan serta Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.

9) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan rumah tinggal terstandar dinilai sedang. Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat dinilai penuh.

10) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perencanaan pembangunan rumah tinggal terstandar dilakukan oleh tim perencana dinilai mudah oleh responden. Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perencanaan pada proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan dinilai sederhana oleh responden.

11) Keselamatan

Pada tahap perencanaan, kedua sistem manajemen konstruksi tidak menggunakan jaminan keselamatan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang ada dalam tahap perencanaan untuk kedua jenis manajemen adalah sama yaitu SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek.

13) Kelebihan

Kelebihan yang ada pada proyek perencanaan rumah tinggal terstandar adalah proses perencanaan yang dilakukan oleh tim ahli sehingga hasil perencanaan sesuai dengan standar teknis yang ada. Kelebihan pada tahap perencanaan kegiatan pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat antara lain : keputusan publik yang diambil lebih efektif , memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat. Serta proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan.

b. Perancangan Pembangunan Rumah Tinggal

Tabel 5.48 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada tahap Perancangan

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perancangan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
c.	Mutu	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah rumah tahan gempa dalam aturan teknis BDR/ Pedoman Teknis pembangunan rumah tahan gempa dan rumah sehat PU Cipta Karya.
d.	Mekanisme perancangan	1. Survei harga oleh konsultan perencana 2. Perencanaan oleh tim Konsultan perencana	1. Penyusunan RPP 2. Sinkronisasi RPP (dinilai sederhana)

		<p>(gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Review hasil perancangan konsultan oleh tim perencana dari SKPD terkait 4. Diadakan evaluasi harga untuk produk konsultan Perencanaan oleh tim perencana dari SKPD terkait <p>(dinilai mudah)</p>	
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) <p>Tim Perencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan perencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Konsultan (NMC, DMC) 3. Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 3. Membuat estimasi biaya secara rinci 4. Membuat desain detail 5. Membuat spesifikasi teknis 6. Membuat daftar volume 7. Membuat Rencana Anggaran Biaya 8. Membuat syarat-syarat administrasi 9. Membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku 	<p>Penyusunan RPP :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi Sosial dan Wilayah 2. Sosialisasi tingkat desa 3. Sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW) 4. Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) 5. Pembentukan Tim Inti Perencana (TIP) 6. Pelatihan BKM-TPK-TIP 7. Pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan

			<p>Tahapan Siklus</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Penyiapan Peta Dasar 9. Tinjauan/Review Dokumen Pembangunan 10. Pemetaan Swadaya 11. Rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya 12. Rembug Perumusan Visi dan Misi Desa 13. Rembug pemecahan masalah 14. Rembug penyusunan rencana tata ruang desa 15. Rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana 16. Sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah) 17. Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1 18. Konsultasi publik 19. Verifikasi program 20. Rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman 21. Penyusunan dokumen RPP
g.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, masukan proses dan keluaran 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar bestek dan shop drawing 	Tersusunnya Dokumen RPP

		5. Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya 6. Pedoman administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar	
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi	Memberikan masukan terhadap desain perancangan (Berpartisipasi penuh)
i.	Administrasi	Pelaporan hasil perancangan dilakukan oleh Konsultan Perencana (dinilai mudah)	Pelaporan Dokumen RPP dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai mudah)
J.	Tempat	Kantor Konsultan	Kantor Pemerintah Desa
k.	Sumber Pendanaan	APBD	World Bank
l.	Cara Pencairan	Setelah dokumen perancangan selesai	Setelah dokumen perancangan selesai
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Desain dari konsultan perencana sudah siap dilaksanakan	Perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL memberikan kepuasan tersendiri bagi KP/Kelompok Pemukiman.

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Pada tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal waktu yang dibutuhkan untuk proyek terstandar dan proyek berbasis masyarakat sama yaitu 2 sampai dengan 3 bulan.

2) Biaya

Pada tahap perancangan untuk kedua proyek pembangunan rumah tinggal baik yang terstandar maupun yang berbasis masyarakat menggunakan anggaran khusus perencanaan.

3) Mutu

Mutu perancangan untuk kedua sistem pembangunan rumah tinggal bertumpu pada standar pemerintah, hasil dari perancangan juga sesuai dengan standar Pemerintah.

4) Mekanisme Perancangan

Mekanisme perancangan untuk proyek pembangunan rumah tinggal terstandar dimulai dengan survei harga dan perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak), review hasil perancangan dan evaluasi harga untuk produk konsultan perencanaan oleh tim perencana dari SKPD terkait, kegiatan ini dinilai mudah oleh responden. Pada proses perancangan pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat, mekanisme perencanaan adalah penyusunan RPP/Rencana Penataan Permukiman dan sinkronisasi RPP/Rencana Penataan Permukiman, kegiatan ini dinilai sederhana oleh responden.

5) Pihak terlibat dan tugasnya

Pihak yang terlibat dalam perancangan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar adalah tim pelaksana kegiatan dari Dinas PUP kabupaten Sleman yang terdiri atas : Penanggung jawab kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), Koordinator pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staff), Pembantu Pelaksana Teknis (staff) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan tim perencana yang terdiri dari : Konsultan Perencana. Untuk proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat Pihak yang terlibat pada tahap perancangan antara lain : Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator), Konsultan (NMC, DMC) dan Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program) sebagai pelaku utama dalam proses perancangan.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada kedua manajemen perancangan proyek pembangunan rumah tinggal berbeda. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal terstandar, kegiatan yang dilakukan antara lain : membuat kriteria desain, membuat skematik desain, membuat estimasi biaya secara rinci, membuat desain detail, membuat spesifikasi teknis, membuat daftar volume, membuat Rencana Anggaran Biaya, membuat syarat-syarat administrasi dan membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku.

Pada tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan RPP yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : orientasi sosial dan wilayah, sosialisasi tingkat desa, sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW), Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), pembentukan Tim Inti Perencana (TIP), pelatihan BKM-TPK-TIP, pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus, penyiapan Peta Dasar, tinjauan/review Dokumen Pembangunan, pemetaan Swadaya, rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya, rembug Perumusan Visi dan Misi Desa, rembug pemecahan masalah, rembug penyusunan rencana tata ruang desa, rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana, sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah), Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1, konsultasi publik, verifikasi program dan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman serta penyusunan RPP.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar adalah kontrak untuk staf proyek dan kontraktor, spesifikasi, masukan proses dan keluaran, desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas, gambar bestek dan shopdrawing, jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya, pedoman administrasi dan keuangan serta proses operasional dan standar.

Produk yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah tersusunya dokumen RPP/Rencana Penataan Permukiman.

8) Partisipasi masyarakat

Tidak ada partisipasi masyarakat pada tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar. Masyarakat berpartisipasi penuh dalam tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat.

9) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar dilakukan oleh Konsultan Perencana (dinilai mudah oleh responden). Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat berupa dokumen RPP dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai mudah oleh responden).

10) Tempat

Tempat perancangan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar berada di Kantor konsultan perencana, sedangkan untuk proyek berbasis masyarakat dilakukan di kantor Pemerintah Desa.

11) Sumber pendanaan

Sumber dana perancangan dari proyek pembangunan rumah tinggal dengan manajemen konstruksi terstandar berasal dari APBD. Sumber dana perancangan dari proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat berasal dari World Bank.

12) Cara pencairan

Biaya perancangan untuk proyek pembangunan rumah tinggal terstandar dan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat dilakukan setelah pekerjaan perancangan selesai.

13) Keselamatan

Pada tahap perancangan untuk kedua jenis manajemen pembangunan rumah tinggal tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana.

14) Kendala

Pada tahap perancangan untuk kedua jenis manajemen pembangunan rumah tinggal terdapat kendala yang sama yaitu SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek.

15) Kelebihan

Terdapat nilai positif pada tahap perancangan bangunan rumah tinggal terstandar yaitu proses perancangan dilakukan oleh tim teknis yang sudah berpengalaman. Sedangkan nilai positif pada proses perancangan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL memberikan kepuasan tersendiri bagi KP/Kelompok Pemukiman.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Pembangunan Rumah Tinggal

Tabel 5.49 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus pengadaan	Tidak ada anggaran pengadaan
c.	Mutu	Memperoleh penyedia jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan (Mutu sesuai dengan standar pemerintah)	Memperoleh penyedia bahan bangunan dan penyedia tenaga terampil sesuai dengan yang dibutuhkan (Mutu sesuai dengan standar pemerintah)
d.	Mekanisme pengadaan	Pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai mudah)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan material/bahan dan alat dengan cara pelelangan umum2. Pengadaan tenaga terampil dengan sistem harian dan borongan, dengan cara lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung.

			(dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasannya	Unit Layanan Pengadaan (Pemerintah satu Dinas) Tim Pelaksana Kegiatan 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Penyedia jasa	3. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 4. Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM) 5. Penyedia Barang/Supplier
f.	Uraian kegiatan	Mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE) 1. Pengumuman Pascakualifikasi 2. Download dokumen Pengadaan 3. Pemberian penjelasan 4. Upload dokumen Penawaran 5. Evaluasi penawaran 6. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 7. Pembuktian kualifikasi 8. Upload berita acara Hasil Pelelangan 9. Penetapan pemenang 10. Pengumuman pemenang 11. Masa Sanggah hasil lelang 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa 13. Penandatanganan Kontrak	1. Pembentukan Tim Pengadaan 2. Persiapan Tim Pengadaan 3. Pelelangan Umum a. Menyusun dokumen lelang/pengadaan b. Melaksanakan pengumuman secara terbuka c. Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang d. Menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta e. Penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan f. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang g. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang.

			<p>4. Lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan. b. Menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rebug warga. c. Membuat surat undangan untuk memasukkan penawaran. d. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya. e. Penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborongan.
g.	Hasil	Terpilihnya Penyedia Jasa sesuai dengan kriteria SBU yang dibutuhkan	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi	Aktif/berpartisipasi penuh: Memberikan masukan dalam menentukan penyedia bahan bangunan/alat dan jasa pemborong.
i.	Administrasi	Kontrak perjanjian antara penyedia jasa dan PPK dilakukan oleh panitia pengadaan di ULP (dinilai sederhana)	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh PP (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Kantor Operasional PP
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi

		dana	dana
n.	Kendala	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan
o.	Kelebihan	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan.	Masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena rumah tinggal dibangun untuk kebutuhan dan kepentingan diri sendiri.

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap pengadaan/pelelangan/procurement proyek pembangunan rumah tinggal baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan pada tahap pelelangan untuk kedua jenis manajemen membutuhkan waktu antara satu sampai dengan dua bulan.

2) Biaya

Biaya yang digunakan untuk proses pengadaan pada proyek pembangunan rumah tinggal terstandar melekat pada biaya umum Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA)/ Ada anggaran khusus pengadaan. Tidak ada anggaran untuk pelaksanaan pengadaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat.

3) Mutu

Mutu pengadaan pada proyek pembangunan rumah tinggal dengan metode konstruksi terstandar sesuai dengan rencana yaitu memperoleh penyedia jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Mutu pengadaan pada proyek pembangunan rumah tinggal dengan metode konstruksi berbasis masyarakat yaitu memperoleh penyedia bahan bangunan dan penyedia tenaga terampil sesuai dengan yang dibutuhkan. Mutu untuk kedua jenis manajemen sesuai dengan standar pemerintah.

4) Mekanisme Pengadaan

Mekanisme pengadaan untuk proyek pembangunan rumah tinggal terstandar menggunakan cara Pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai mudah oleh responden). Pada proses pengadaan pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat, mekanisme pengadaan material/bahan dan alat dengan cara pelelangan umum dan pengadaan tenaga terampil dengan sistem harian dan borongan, dengan cara lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung (dinilai sederhana oleh responden).

5) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar adalah Unit Layanan Pengadaan dan Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri atas : penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang, Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staff), Pembantu Pelaksana Teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Penyedia jasa.

Dalam proses pengadaan proyek konstruksi pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat, pihak yang terlibat adalah Pemerintah (Desa, Fasilitator), masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM) penyedia barang/supplier.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses pengadaan berbeda antara proyek pembangunan berbasis masyarakat dan proyek pembangunan terstandar. Dalam proyek terstandar kegiatan yang dilakukan antara lain : Mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa dengan urutan (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE) : pengumuman pascakualifikasi, download dokumen pengadaan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan penandatanganan kontrak.

Pada tahap pengadaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat kegiatan yang dilakukan adalah pembentukan tim pengadaan, persiapan tim pengadaan, pelelangan umum (menyusun dokumen lelang/pengadaan, melaksanakan pengumuman secara terbuka, pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang, menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta, penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan, emasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang, penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan penyedia barang), lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung (survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan, menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rebug warga, membuat surat undangan untuk memasukkan penawaran, pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya, penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborongan).

7) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap pengadaan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar adalah terpilihnya penyedia jasa sesuai dengan kriteria SBU yang dibutuhkan. Produk yang dihasilkan pada tahap pengadaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.

8) Partisipasi masyarakat

Tidak ada partisipasi warga masyarakat pada proses pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan rumah tinggal terstandar. Masyarakat berpartisipasi penuh dalam proses pengadaan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat antara lain dengan memberikan masukan dalam menentukan penyedia bahan bangunan/alat dan jasa pemborong.

9) Administrasi

Kontrak perjanjian antara penyedia jasa dan PPK dilakukan oleh panitia pengadaan di ULP (dinilai sederhana oleh responden) pada tahap

pengadaan proyek rumah tinggal terstandar. Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh PP (dinilai sederhana oleh responden) pada tahap pengadaan proyek tinggal berbasis masyarakat.

10) Tempat

Tempat pelaksanaan pelelangan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar berada di Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP), Tempat pelaksanaan pelelangan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat berada di Kantor Pemda/DPUP dan Kantor KSM.

11) Keselamatan

Pada tahap pengadaan untuk kedua manajemen proyek pembangunan rumah tinggal, tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Pada tahap pengadaan untuk kedua jenis manajemen proyek pembangunan rumah tinggal mempunyai kendala yang sama yaitu penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan.

13) Kelebihan

Kelebihan yang ada dalam tahap pengadaan proyek konstruksi pembangunan rumah tinggal terstandar adalah diperoleh penyedia jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan. Kelebihan pada tahap pengadaan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena rumah tinggal dibangun untuk kebutuhan dan kepentingan diri sendiri.

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pembangunan Rumah Tinggal

Tabel 5.50 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	3 s/d 4 bulan	3 s/d 4 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus	Ada anggaran khusus

		konstruksi Pemda = Rp.214.091.000 Tipe 70m2	konstruksi Rekompak = Rp. 30.000.000 + swadaya masyarakat sesuai kemampuan Type 36
c.	Mutu	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan tenaga kerja 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material 4. Menyiapkan peralatan / machine 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (dinilai sederhana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan SDM 2. Pengadaan barang dan Jasa 3. Metode pelaksanaan konstruksi 4. Pengendalian waktu, biaya & kualitas/mutu 5. Perubahan kontrak (CCO) 6. Supervisi, monitoring & evaluasi 7. Penyiapan tenaga kerja 8. Menyiapkan dana financial 9. Menyiapkan material 10. Menyiapkan peralatan / machine 11. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (dinilai sederhana)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas) Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua (Kepala Bidang) 2. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 3. Pelaksana Teknis (Staff) 4. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 5. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 6. Penyedia jasa 7. Koordinator Pengawas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Konsultan NMC, DMC 3. Masyarakat (BKM, TIP, PP dan Masyarakat) 4. Suplier dan Jasa Pemborong/tenaga

		8. Pengawas Lapangan	
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan start up 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan KP/Kelompok Pemukiman 2. Penyusunan Rencana Tapak 3. Menentukan Desain Bangunan Huntap 4. Survei Teknis dan Harga 5. Pelatihan/coaching penyusunan DTPP dan DED 6. Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP) 7. Pengajuan, pencairan dan penyaluran BDR 8. Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi 9. Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan 10. Proses Pencairan BDR 11. Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing KP 12. Pelaksanaan kegiatan fisik
g.	Hasil	Konstruksi bangunan Rumah	Konstruksi bangunan rumah
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi	Masyarakat mengadakan gotong royong dalam pembangunan rumah/berpartisipasi penuh
i.	Administrasi	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak 	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencairan tahap I (50%)

		<p>2. Pembayaran termyn I = (50% x kontrak)-(50% x uang muka)</p> <p>3. Pembayaran termyn II = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) (dinilai sederhana)</p>	<p>2. Pencairan tahap II (50%) (dinilai sederhana)</p>
J.	Tempat	Lokasi proyek	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis (lebih mengutamakan kearifan lokal)
l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	Sedikit	Sedikit
n.	Keselamatan	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang/ Harus menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
o.	Kendala	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
p.	Kelebihan	Karena pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, maka pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat faham kerjasama dalam kegiatan berkelompok 2. Masyarakat faham membangun rumah dengan struktur tahan gempa 3. Masyarakat sedikit banyak mengerti tata cara pengadaan barang dan membukukan belanja kelompok. 4. Masyarakat faham akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat pembangunan rumah

			<p>dari segi lingkungan maupun sosial</p> <p>5. Masyarakat faham tentang tata cara merawat dan mengembangkan rumah kedepan.</p> <p>6. Hasil bangunan lebih baik yang dilakukan langsung oleh masyarakat daripada yang dibangun oleh pemborong</p> <p>7. Volume yang dibangun lebih dari volume perencanaan.</p>
--	--	--	---

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu pelaksanaan kegiatan konstruksi pada proyek pembangunan rumah tinggal baik dengan manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat sama yaitu 2 sampai dengan 3 bulan.

2) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah tinggal dengan manajemen konstruksi terstandar adalah Pemda = Rp.214.091.000 dengan Tipe bangunan 70m². Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan rumah tinggal dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah Rekompak = Rp. 30.000.000 + swadaya sesuai kemampuan, dengan type bangunan 36m². Dengan kata lain ada anggaran khusus konstruksi untuk kedua manajemen proyek.

3) Mutu

Mutu pekerjaan konstruksi untuk kedua jenis manajemen proyek pembangunan rumah tinggal adalah sama yaitu mutu sesuai dengan standar pemerintah.

4) Mekanisme Pelaksanaan konstruksi

Mekanisme pelaksanaan proyek konstruksi untuk proyek pembangunan rumah tinggal dengan metode konstruksi terstandar, rincian kegiatan yang dilaksanakan adalah penyiapan tenaga kerja, menyiapkan dana financial, menyiapkan material, menyiapkan peralatan / machine dan menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (dinilai sederhana oleh responden).

Mekanisme pelaksanaan konstruksi untuk proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah penyiapan SDM, pengadaan barang dan jasa, metode pelaksanaan konstruksi, pengendalian waktu, biaya & kualitas/mutu, perubahan kontrak (CCO), supervisi, monitoring & evaluasi, penyiapan tenaga kerja, menyiapkan dana financial, menyiapkan material, menyiapkan peralatan / machine, menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (dinilai sederhana oleh responden).

5) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal terstandar adalah Tim pelaksana kegiatan dari Dinas PUP yang terdiri dari : penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), pelaksana Teknis (Staff), pembantu Pelaksana Teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penyedia jasa, koordinator Pengawas dan pengawas Lapangan. Dalam proses pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat, pihak yang terlibat adalah pemerintah (Desa, Fasilitator), konsultan (NMC dan DMC), masyarakat (BKM, TIP, PP dan Masyarakat) dan suplier dan Jasa Pemborong/tenaga.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal terstandar antara lain : menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi, menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek, pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja, pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi dan penyelesaian konstruksi, pra operasional dan start up.

Kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat antara lain : pembentukan KP/Kelompok Pemukiman, penyusunan rencana tapak, menentukan desain bangunan huntap, survei teknis dan harga, pelatihan/coaching penyusunan DTPP dan DED, penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP), pengajuan, pencairan dan penyaluran BDR, pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi, pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan, proses pencairan BDR, sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing KP dan pelaksanaan kegiatan fisik.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan dari proses konstruksi untuk kedua jenis manajemen adalah konstruksi bangunan rumah tinggal yang siap digunakan.

8) Partisipasi masyarakat

Tidak ada partisipasi masyarakat dalam tahap konstruksi pembangunan rumah tinggal terstandar. Masyarakat berpartisipasi penuh pada tahap pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat, salah satu wujud partisipasi masyarakat adalah mengadakan gotong royong dalam pembangunan rumah.

9) Administrasi

Pencairan dana untuk kedua sistem manajemen adalah dengan cara termyn. Pada pembangunan rumah tinggal dengan manajemen terstandar proses pencairan dana sebagai berikut : pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak, pembayaran termyn I = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$ dan pembayaran termyn II = $(50\% \times \text{kontrak}) - (50\% \times \text{uang muka})$. Pada proses

pencairan dana pada proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah sebagai berikut : pencairan dana pembayaran tahap I = 50% dilampiri DTPP, SPPB, Kuitansi dan file soft copy pokmas/KP. Pembayaran tahap II = 50% setelah fisik mencapai 40% atau 90% dari dana Tahap I.

10) Tempat

Tempat pelaksanaan konstruksi adalah lokasi proyek.

11) Pengadaan material

Untuk kedua jenis manajemen menggunakan material sesuai dengan spesifikasi teknis, ditekankan untuk manajemen konstruksi berbasis masyarakat menggunakan bahan bangunan lokal/berdasarkan kearifan lokal.

12) Pengadaan Jasa

Pengadaan jasa pada kedua jenis manajemen pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik.

13) Pekerjaan Tambah Kurang

Karena sudah direncanakan dengan matang, maka hanya terdapat sedikit pekerjaan tambah kurang dalam kedua tahap konstruksi manajemen pembangunan rumah tinggal.

14) Keselamatan

Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang pada tahap konstruksi pembangunan rumah tinggal dengan manajemen konstruksi terstandar. Masyarakat tidak menggunakan jaminan keselamatan dalam proses konstruksi pembangunan rumah tinggal dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat karena tidak ada alokasi dana.

15) Kendala

Kendala yang ada pada tahap konstruksi untuk kedua manajemen pembangunan rumah tinggal adalah material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

16) Kelebihan

Karena pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, maka pelaksanaan konstruksi pembangunan rumah tinggal terstandar bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis.

Kelebihan yang ada pada tahap pelaksanaan konstruksi pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat antara lain : Masyarakat faham kerjasama dalam kegiatan berkelompok, Masyarakat faham membangun rumah dengan struktur tahan gempa, masyarakat sedikit banyak mengerti tata cara pengadaan barang dan membukukan belanja kelompok, masyarakat faham akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat pembangunan rumah dari segi lingkungan maupun sosial, masyarakat faham tentang tata cara merawat dan mengembangkan rumah kedepan, hasil bangunan lebih baik yang dilakukan langsung oleh masyarakat daripada yang dibangun oleh pemborong dan volume yang dibangun lebih dari volume perencanaan.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal

Tabel 5.51 Perbandingan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat pada proyek Pembangunan Rumah Tinggal pada tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan

No	Faktor yang berpengaruh	Keterangan	
		Manajemen konstruksi Terstandar	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat
a.	Waktu	Kurang dari 1 bulan	Antara 1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Biaya sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Menggunakan dana Kelompok Pemukiman (KP)/ ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah	diharapkan sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah

d.	Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan 2. PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan 3. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP. 4. Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 6. penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan 7. PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 8. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List). 9. Penyedia menyerahkan final report (dinilai mudah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan PHO 2. Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat 3. Pemeliharaan bangunan dilakukan oleh masyarakat (dinilai mudah)
e.	Pihak terlibat dan ketugasanya	<p>Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat (KP/Kelompok Pemukiman, BKM) 2. Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa 8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 	
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan 2. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol 3. Mengkoordinir pelaksanaan operasional 4. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing 5. Mengarahkan dan memeriksa secara manual 6. Memproses : garansi dan jaminan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat berupa peresmian dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan dari KP ke Desa dilanjutkan Desa menyerahkan kembali hasil pembangunan untuk difungsikan oleh KP. 2. Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan
g.	Hasil	Bangunan Rumah tinggal yang siap digunakan	Bangunan Rumah tinggal yang siap digunakan
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi	Masyarakat menerima hasil dari pembangunan rumah/berpartisipasi penuh
i.	Administrasi	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai mudah)	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh KP, BKM dan Desa dengan bantuan fasilitator (dinilai mudah)
J.	Tempat	Kantor Dinas Terkait	Kantor Desa diteruskan ke Kantor Pemerintah Daerah
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana

l.	Kendala	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU	Masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan

Dari tabel perbandingan aspek-aspek yang berpengaruh dalam tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar maupun yang menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar kurang dari satu bulan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat antara satu sampai dengan dua bulan.

2) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal dengan manajemen konstruksi terstandar adalah sesuai dengan DPA. Biaya yang dibutuhkan dalam penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah menggunakan dana Kelompok Pemukiman (KP)/ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan.

3) Mutu

Mutu dari penyerahan hasil pembangunan proyek rumah tinggal sesuai dengan spesifikasi teknis untuk kedua jenis manajemen konstruksi.

4) Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan

Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan untuk proyek pembangunan rumah tinggal terstandar adalah penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada

PPK untuk penyerahan pekerjaan, PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan, PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP, pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak, penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan, penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan, penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) dan penyedia menyerahkan final report (dinilai mudah oleh responden). Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan pembangunan rumah tinggal dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah pelaksanaan PHO, penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat dan pemeliharaan bangunan dilakukan oleh masyarakat (dinilai mudah oleh responden).

5) Pihak terlibat dan ketugasannya

Pihak yang terlibat dalam Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar adalah Tim pelaksana kegiatan dari Dinas PUP yang terdiri dari : penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), pelaksana Teknis (Staff), pembantu Pelaksana Teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penyedia jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Dalam proses pelaksanaan Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat, pihak yang terlibat adalah masyarakat (KP/Kelompok Pemukiman, BKM), pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator).

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses penyerahan hasil pekerjaan proyek konstruksi pembangunan rumah tinggal terstandar antara lain : menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan, mengkoordinir, mengarahkan mengontrol, mengkoordinir pelaksanaan

operasional, mengarahkan dan memeriksa as built drawing, mengarahkan dan memeriksa secara manual dan memproses : ganansi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator.

Untuk proses penyerahan hasil pekerjaan konstruksi pembangunan rumah tinggal dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat berupa peresmian dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan dari KP ke Desa dilanjutkan Desa menyerahkan kembali hasil pembangunan untuk difungsikan oleh KP serta pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan dari proses penyerahan hasil pekerjaan untuk kedua jenis manajemen adalah konstruksi bangunan rumah tinggal yang siap digunakan.

8) Partisipasi masyarakat

Masyarakat tidak berpartisipasi dalam tahap penyerahan pembangunan rumah tinggal terstandar. Masyarakat menerima hasil dari pembangunan rumah/berpartisipasi penuh pada tahap penyerahan rumah tinggal berbasis masyarakat.

9) Administrasi

Administrasi pada pembangunan rumah tinggal dengan metoda konstruksi terstandar adalah pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai mudah oleh responden). Untuk pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh KP, BKM dan Desa dengan bantuan fasilitator (dinilai mudah oleh responden).

10) Tempat

Tempat penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal dengan metoda konstruksi terstandar di Kantor Dinas Terkait. Untuk penyerahan hasil pekerjaan pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat berada di kantor Desa diteruskan ke Kantor Pemerintah Daerah/Pemkab.

11) Keselamatan

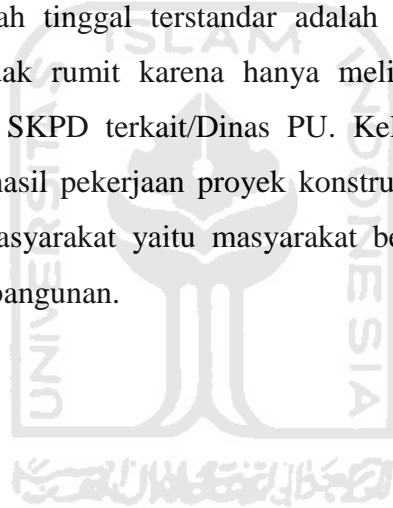
Pada tahap penyerahan hasil pekerjaan pembangunan rumah tinggal terstandar dan pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat, sama-sama tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Pada tahap penyerahan hasil pekerjaan untuk kedua jenis manajemen memiliki kendala yang sama yaitu pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai.

13) Kelebihan

Kelebihan yang ada dalam tahap penyerahan hasil pekerjaan konstruksi pembangunan rumah tinggal terstandar adalah pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU. Kelebihan yang ada dalam tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek konstruksi pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat yaitu masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan.



5.15 Analisis Data Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan

5.15.1 Tabel Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat

Tabel 5.52 Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan pada tahap Perencanaan/Persiapan

No	Tahap Proyek Konstruksi	Jalan Aspal	Saluran air limbah	Rumah tinggal	Pengambilan Kesimpulan Proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 Bulan	2 s/d 3 bulan	2 s/d 3 bulan	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Sesuai dengan standar Pemerintah/Sesuai Pedoman Teknis Pembangunan BDR & BDL	Menggunakan biaya umum perencanaan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
c.	Mutu	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perencanaan	Sosialisasi REKOMPAK (dinilai sederhana)	1. Penyiapan TFL 2. Sosialisasi program 3. Seleksi lokasi oleh TFL 4. Pembentukan KSM 5. Pengisian data teknis oleh masyarakat (dinilai sederhana)	1. Sosialisasi REKOMPAK (dinilai sederhana)	Sosialisasi program, penyiapan TFL, pemilihan dan penetapan lokasi, pembentukan dan penetapan KSM (dinilai sederhana)
e.	Dasar usulan proyek	Upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi	Surat minat/Permohonan bantuan penanganan air limbah dari masyarakat	Upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi	Upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi (jalan & rumah tinggal) dan Surat minat/Permohonan bantuan penanganan air limbah dari masyarakat (saluran air limbah)
f.	Pihak terlibat	1. Pemerintah (Pemprov, Pemkab) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMC)	1. Pemerintah (Kabupaten /SKPD terkait, Camat, Lurah, Fasilitator, Tenaga Sanitari/Puskesmas /Satker PLPP) 2. Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak) 3. Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM	1. Pemerintah (Pemprov, Pemkab) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMC)	1. Pemerintah (Pemprov, Pemkab, Camat, Lurah, Fasilitator, Tenaga Sanitari/Puskesmas /Satker PLPP) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMC) 3. Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak) 4. Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM
g.	Uraian kegiatan	1. Loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten 2. Lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten 3. Penetapan lokasi	1. Sosialisasi DAK SLBM kepada pemerintah kabupaten oleh pemerintah pusat/Kementrian PU 2. Sosialisasi DAK SLBM kepada Camat/Lurah dandaerah rawan sanitasi oleh pemerintah kabupaten 3. Penyiapan Tenaga Fasilitator	1. Loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten 2. Lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten 3. Penetapan lokasi	Jalan & rumah tinggal : 1. Loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten 2. Lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten 3. Penetapan lokasi 4. Pengadaan dan pelatihan praturgas Konsultan Kabupaten/kota

		<p>4. Pengadaan dan pelatihan pratugas Konsultan Kabupaten/kota</p> <p>5. Pengadaan dan Pelatihan Pratugas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF</p>	<p>Lapangan/TFL (penyiapan, seleksi dan pelatihan)</p> <p>4. Pemilihan Lokasi dengan dua tahap seleksi (daftar panjang/longlist dan daftar pendek/shortlist)</p> <p>5. Pemicuan Masyarakat sosialisasi tentang perubahan perilaku pola hidup bersih dan sehat</p> <p>6. Penetapan Lokasi</p> <p>7. Pembentukan dan Penetapan KSM</p>	<p>4. Pengadaan dan pelatihan pratugas Konsultan Kabupaten/kota</p> <p>5. Pengadaan dan Pelatihan Pratugas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF</p>	<p>5. Pengadaan dan Pelatihan Pratugas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF</p> <p>Saluran air limbah :</p> <p>1. Sosialisasi DAK SLBM kepada pemerintah kabupaten oleh pemerintah pusat/Kementrian PU</p> <p>2. Sosialisasi DAK SLBM kepada Camat/Lurah dandaerah rawan sanitasi oleh pemerintah kabupaten</p> <p>3. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL (penyiapan, seleksi dan pelatihan)</p> <p>4. Pemilihan Lokasi dengan dua tahap seleksi (daftar panjang/longlist dan daftar pendek/shortlist)</p> <p>5. Pemicuan Masyarakat sosialisasi tentang perubahan perilaku pola hidup bersih dan sehat</p> <p>6. Penetapan Lokasi</p> <p>7. Pembentukan dan Penetapan KSM</p>
h.	Hasil	<p>1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek. Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut.</p> <p>2. Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut.</p> <p>3. Daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan.</p> <p>4. Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.</p>	<p>1. Tenaga Fasilitator telah siap</p> <p>2. Lokasi proyek telah ditetapkan</p> <p>3. Masyarakat telah siap dengan rencana program yang akan dilakukan</p> <p>4. Terbentuknya KSM</p>	<p>1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek. Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut.</p> <p>2. Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut.</p> <p>3. Daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan.</p> <p>4. Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.</p>	<p>Jalan dan rumah tinggal :</p> <p>1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek. Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut.</p> <p>2. Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut.</p> <p>3. Daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan.</p> <p>4. Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.</p> <p>Saluran air limbah :</p> <p>1. Tenaga Fasilitator telah siap</p> <p>2. Lokasi proyek telah ditetapkan</p> <p>3. Masyarakat telah siap dengan rencana program yang akan dilakukan</p> <p>4. Terbentuknya KSM</p>
i.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase penuh	Membantu menentukan pengguna (berpartisipasi sedang)	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase penuh
j.	Administrasi	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (dinilai sederhana)	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh TFL (dinilai sederhana)	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (dinilai mudah)	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk proyek jalan dan rumah tinggal, Pelaporan kegiatan dilakukan oleh TFL untuk proyek saluran air limbah(dinilai sederhana)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	SDM yang kurang memahami pentingnya pelaksanaan proyek	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	SDM yang kurang memahami pentingnya pelaksanaan proyek dan Terjadi konflik antar pemangku kepentingan
m.	Kelebihan	Keputusan publik yang diambil lebih efektif, memberikan rasa	Proses perencanaan dilakukan oleh tenaga yang ahli dalam bidang	Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh tim yang sudah berkompeten	1. Keputusan publik yang diambil lebih efektif, memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat.

	kepuasan dan dukungan publik yang kuat. Proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan.	perencanaan saluran air limbah	di bidangnya	2. Proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan. 3. Warga masyarakat lebih tahu tentang keadaan lapangan yang akan dibangun
--	--	--------------------------------	--------------	---

b. Perancangan Proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat

Tabel 5.53 Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan pada tahap Perancangan

No	Tahap Proyek Konstruksi	Jalan Aspal	Saluran Air Limbah	Rumah tinggal	Pengambilan Kesimpulan Proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan	1 s/d 2 bulan	2 s/d 3 bulan	1 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perancangan	Menggunakan biaya perencanaan dan biaya swadaya masyarakat	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah (aturan pengaspalan jalan)	Sesuai dengan standar Pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah rumah tahan gempa dalam aturan teknis BDR/ Pedoman Teknis pembangunan rumah tahan gempa dan rumah sehat PU Cipta Karya.	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perancangan	1. Penyusunan RPP 2. Sinkronisasi RPP (dinilai sederhana)	1. Persiapan Pelaksanaan Penyusunan RKM 2. Pendanaan dan tahap pencairan dana 3. Verivikasi RKM 4. Perjanjian kerja KSM dengan SKPD (dinilai rumit)	1. Penyusunan RPP 2. Sinkronisasi RPP (dinilai sederhana)	1. Untuk proyek jalan dan rumah tinggal : Penyusunan RPP, Sinkronisasi RPP(dinilai sederhana) 2. Untuk proyek saluran air limbah : Persiapan Pelaksanaan Penyusunan RKM, Pendanaan dan tahap pencairan dana, Verivikasi RKM, Perjanjian kerja KSM dengan SKPD (dinilai rumit)
e.	Pihak terlibat	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Konsultan (NMC, DMC) 3. Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).	1. Pemerintah (Pemda/DPUP, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Masyarakat (KSM, Tokoh masyarakat dan Masyarakat pengguna)	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Konsultan (NMC, DMC) 3. Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Konsultan (NMC, DMC) 3. Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan/KSM, PP/Panitia Pembangunan, Tokoh masyarakat dan masyarakat penerima program/pengguna).
f.	Uraian kegiatan	Penyusunan RPP : 1. Orientasi Sosial dan Wilayah 2. Sosialisasi tingkat desa 3. Sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW) 4. Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) 5. Pembentukan Tim Inti	Pendampingan TFL Teknis 1. Pemilihan teknologi 2. Pengukuran 3. Gambar/DED 4. RAB 5. Spesifikasi Teknis Pendampingan TFL Sosial 1. Klasifikasi kesejahteraan	Penyusunan RPP : 1. Orientasi Sosial dan Wilayah 2. Sosialisasi tingkat desa 3. Sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW) 4. Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) 5. Pembentukan Tim Inti	1. Pada proyek jalan dan rumah tinggal berupa Penyusunan RPP dengan kegiatan: Orientasi Sosial dan Wilayah, Sosialisasi tingkat desa, Sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW), Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Pembentukan Tim Inti Perencana (TIP), Pelatihan BKM-TPK-TIP, Pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus, Penyiapan Peta Dasar, Tinjauan/Review Dokumen Pembangunan, Pemetaan

		<p>Perencana (TIP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pelatihan BKM-TPK-TIP 7. Pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus 8. Penyiapan Peta Dasar 9. Tinjauan/Review Dokumen Pembangunan 10. Pemetaan Swadaya 11. Rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya 12. Rembug Perumusan Visi dan Misi Desa 13. Rembug pemecahan masalah 14. Rembug penyusunan rencana tata ruang desa 15. Rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana 16. Sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah) 17. Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1 18. Konsultasi publik 19. Verifikasi program 20. Rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Persiapan tenaga kerja 3. Pembukaan rekening bersama Verifikasi RKM 	<p>Perencana (TIP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pelatihan BKM-TPK-TIP 7. Pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus 8. Penyiapan Peta Dasar 9. Tinjauan/Review Dokumen Pembangunan 10. Pemetaan Swadaya 11. Rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya 12. Rembug Perumusan Visi dan Misi Desa 13. Rembug pemecahan masalah 14. Rembug penyusunan rencana tata ruang desa 15. Rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana 16. Sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah) 17. Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1 18. Konsultasi publik 19. Verifikasi program 20. Rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman 21. Penyusunan dokumen RPP 	<p>Swadaya, Rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya, Rembug Perumusan Visi dan Misi Desa, Rembug pemecahan masalah, Rembug penyusunan rencana tata ruang desa, Rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana, Sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah), Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1, Konsultasi publik, Verifikasi program dan Rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pada proyek pembangunan saluran air limbah terdiri atas kegiatan : Pendampingan TFL Teknis (Pemilihan teknologi, Pengukuran , Gambar/DED, RAB dan Spesifikasi Teknis), Pendampingan TFL Sosial (Klasifikasi kesejahteraan, Persiapan tenaga kerja, Pembukaan rekening bersama dan Verifikasi RKM)
g.	Hasil	Tersusunnya Dokumen RPP	<p>Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Profil lokasi b. Organisasi dan struktur KSM c. Anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART) KSM d. Surat ketersediaan Lahan dan atau persetujuan warga e. Dokumen dan berita acara seleksi kampung f. Penentuan Calon Pengguna g. Pemilihan Teknologi Sanitasi h. DED dan RAB lengkap disertai 	Tersusunnya Dokumen RPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya Dokumen RPP untuk proyek jalan dan rumah tinggal 2. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk proyek saluran air limbah

			<p>dengan kurva S</p> <p>i. Rekening bank bersama</p> <p>j. Sumber Pendanaan serta Mekanisme Pencairan Dana dari pemerintah</p> <p>k. Pengelolaan Keuangan DAK SLBM</p> <p>l. Rencana Kerja</p> <p>m. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara SATKER/PPK Sanitasi kabupaten/Kota dengan KSM, tentang pemanfaatan DAK SLBM</p> <p>n. Jaminan dari masyarakat pengguna terhadap kesediaan dalam mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana DAK SLBM</p>		
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase sedang 1. Memberikan masukan dalam proses perancangan 2. Memberikan gambaran terhadap faktor-faktor pendukung dan penghalang proyek konstruksi yang akan dijalankan	Seluruh warga ikut serta mengukur rencana jaringan SR (berpartisipasi penuh)	Memberikan masukan terhadap desain perancangan (Berpartisipasi penuh)	1. Berpartisipasi dengan prosentase sedang pada proyek jalan aspal 2. Berpartisipasi penuh dalam proyek saluran air limbah dan rumah tinggal
i.	Administrasi	Pelaporan Dokumen RPP dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai sederhana)	Pelaporan hasil pekerjaan dilakukan oleh TFL dan KSM (dinilai sederhana)	Pelaporan Dokumen RPP dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai mudah)	Untuk proyek jalan dan rumah tinggal Pelaporan Dokumen RPP dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai sederhana) Untuk proyek saluran air limbah Pelaporan hasil pekerjaan dilakukan oleh TFL dan KSM (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor Pemerintah Desa	Kantor PEMDA/DPUP dan Kantor KSM	Kantor Pemerintah Desa	Kantor Pemerintah Desa (untuk proyek jalan dan saluran air limbah), Kantor PEMDA/DPUP dan Kantor KSM (untuk proyek rumah tinggal)
k.	Sumber Pendanaan	World Bank	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	World Bank	World Bank (jalan dan rumah tinggal), Menggunakan biaya Pemerintah dan Masyarakat (saluran air limbah)
l.	Cara Pencairan	Biaya perancangan dicairkan bila proses perancangan telah selesai	Setelah RKM jadi baru proses pencairan dana	Setelah dokumen perancangan selesai	Setelah dokumen perancangan selesai
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Masyarakat berperan aktif dalam proses perancangan.	Perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL menghasilkan desain yang benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat	Perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL memberikan kepuasan tersendiri bagi KP/Kelompok Pemukiman.	Masyarakat berperan aktif dalam proses perancangan. Perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL memberikan kepuasan tersendiri bagi KP/Kelompok Pemukiman dan menghasilkan desain yang benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat

Tabel 5.54 Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan pada tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement

No	Tahap Proyek Konstruksi	Jalan Aspal	Saluran air limbah	Rumah tinggal	Pengambilan Kesimpulan Proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan	Kurang dari 1 bulan	1 s/d 2 bulan	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Menggunakan dana BOP pada proyek BDL/ada anggaran khusus pengadaan	Tidak ada biaya pengadaan	Tidak ada anggaran pengadaan	Menggunakan dana BOP pada proyek BDL/ada anggaran khusus pengadaan (proyek jalan) Tidak ada biaya pengadaan (proyek saluran air limbah dan rumah tinggal)
c.	Mutu	Memperoleh penyedia/supplier barang dan jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu lebih buruk dari standar Pemerintah	Memperoleh penyedia bahan bangunan dan penyedia tenaga terampil sesuai dengan yang dibutuhkan (Mutu sesuai dengan standar pemerintah)	Memperoleh penyedia/supplier barang dan jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Mutu sesuai dengan standar pemerintah untuk proyek jalan dan rumah tinggal, mutu lebih buruk dari standar pemerintah untuk proyek saluran air limbah
d.	Mekanisme pengadaan	Pengadaan Barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat (dinilai mudah)	Pengadaan Barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat (dinilai sederhana oleh masyarakat)	1. Pengadaan material/bahan dan alat dengan cara pelelangan umum 2. Pengadaan tenaga terampil dengan sistem harian dan borongan, dengan cara lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung. (dinilai sederhana)	Pengadaan Barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat, Pengadaan material/bahan dan alat dengan cara pelelangan umum (dinilai mudah hingga sederhana)
e.	Pihak terlibat	1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM, Masyarakat penerima program) 3. Penyedia Barang/Supplier	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. Masyarakat (KSM, Masyarakat) 3. Suplier bahan bangunan	1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM) 3. Penyedia Barang/Supplier	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, Fasilitator) 2. Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM/KSM, Masyarakat penerima program) 3. Penyedia Barang/Supplier
f.	Uraian kegiatan	1. Pembentukan Tim Pengadaan 2. Persiapan Tim Pengadaan 3. Pelelangan Umum a. Menyusun dokumen lelang/pengadaan b. Melaksanakan pengumuman secara terbuka c. Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang d. Menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta e. Penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan f. Pemasukan, pembukaan,	1. Perjanjian kerja KSM dengan SKPD 2. Kontrak perjanjian antara KSM dengan Penyedia bahan bangunan /supplier bahan bangunan dan tenaga ahli	1. Pembentukan Tim Pengadaan 2. Persiapan Tim Pengadaan 3. Pelelangan Umum a. Menyusun dokumen lelang/pengadaan b. Melaksanakan pengumuman secara terbuka c. Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang d. Menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta e. Penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan	Untuk proyek jalan dan rumah tinggal : 1. Pembentukan Tim Pengadaan 2. Persiapan Tim Pengadaan 3. Pelelangan Umum a. Menyusun dokumen lelang/pengadaan b. Melaksanakan pengumuman secara terbuka c. Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang d. Menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta e. Penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan f. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang g. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang. 4. Lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung a. Survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan.

		<p>evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang</p> <p>g. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang.</p> <p>4. Lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung</p> <p>a. Survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan.</p> <p>b. Menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rebug warga.</p> <p>c. Membuat surat undangan untuk memasukkan penawaran.</p> <p>d. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya.</p> <p>e. Penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborongan.</p>		<p>f. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang</p> <p>g. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang.</p> <p>4. Lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung</p> <p>a. Survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan.</p> <p>b. Menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rebug warga.</p> <p>c. Membuat surat undangan untuk memasukkan penawaran.</p> <p>d. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya.</p> <p>e. Penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborongan.</p>	<p>b. Menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rebug warga.</p> <p>c. Membuat surat undangan untuk memasukkan penawaran.</p> <p>d. Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya.</p> <p>e. Penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborongan.</p> <p>Untuk proyek saluran air limbah :</p> <p>1. Perjanjian kerja KSM dengan SKPD</p> <p>2. Kontrak perjanjian antara KSM dengan Penyedia bahan bangunan /suplier bahan bangunan dan tenaga ahli</p>
g.	Hasil	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.	Terpilihnya penyedia bahan bangunan/suplier bahan bangunan	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase sedang : Ikut menyediakan bahan baku bangunan dengan rekomendasi suplier pemenang.	Masyarakat/KSM melaksanakan survei harga, ikut mengevaluasi dan mengendalikan mutu bahan bangunan yang digunakan (berpartisipasi penuh)	Aktif/berpartisipasi penuh : Memberikan masukan dalam menentukan penyedia bahan bangunan/alat dan jasa pemborong.	Berpartisipasi dengan prosentase sedang hingga penuh
i.	Administrasi	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh TPK (dinilai sederhana)	Pelaporan tahap pelelangan dilakukan oleh KSM dibantu TFL (dinilai sederhana oleh responden)	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh PP (dinilai sederhana)	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh TPK/PP/KSM (dinilai sederhana)
J.	Tempat	Kantor TPK	Kantor Pemda/DPUP dan Kantor KSM	Kantor Operasional PP	Kantor Pemda/DPUP dan Kantor KSM/TPK/PP
k.	Sumber Pendanaan	World Bank			World Bank/APBD
l.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
m.	Kendala	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan	Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan	1. Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan 2. Bahan yang disediakan suplier tidak sesuai dengan sampel

		1. Bahan yang disediakan suplier tidak sesuai dengan sampel yang diberikan 2. Kurang tersedianya tenaga ahli pelaksana pekerjaan karena waktu proyek hampir bersamaan.			yang diberikan 3. Kurang tersedianya tenaga ahli pelaksana pekerjaan karena waktu proyek hampir bersamaan. 4. Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek
n.	Kelebihan	Masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena jalan dibangun untuk kepentingan bersama warga kampung.	Suplier yang ditunjuk oleh masyarakat memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar karena berada tidak jauh dari lokasi proyek	Masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena rumah tinggal dibangun untuk kebutuhan dan kepentingan diri sendiri.	1. Masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena jalan dibangun untuk kepentingan bersama warga kampung. 2. Suplier yang ditunjuk oleh masyarakat memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar karena berada tidak jauh dari lokasi proyek

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat

Tabel 5.55 Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan pada tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

No	Tahap Proyek Konstruksi	Jalan Aspal	Saluran air limbah	Rumah tinggal	Pengambilan Kesimpulan Proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat
a.	Waktu	90 hari kalender, 2s/d 3 bulan	3 s/d 4 bulan	3 s/d 4 bulan	2s/d 4 bulan
b.	Biaya	Rekompak BDL : Rp. 112.987.000,- Swadaya : Rp. 500.000,- Panjang jalan 280,5m1, lebar 4m Luas = 1122m ² Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Pemda = Rp. 446.026.670 Luas lahan 200m2, kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 6' = 414m1, Pipa PVC D 4' = 1071m1, pipa PVC D 2' = 58m' Swadaya masyarakat = Rp. 14.281.000 (menggunakan biaya konstrksi dari pemerintah dan biaya swadaya masyarakat)	Ada anggaran khusus konstruksi Rekompak = Rp. 30.000.000 + swadaya masyarakat sesuai kemampuan Type 36	1. Proyek jalan : Kompak BDL : Rp. 112.987.000,-, Swadaya : Rp. 500.000,-, Panjang jalan 280,5m1, lebar 4m, Luas = 1122m ² , Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat) 2. Proyek saluran air limbah : Pemda = Rp. 446.026.670, Luas lahan 200m2, kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 6' = 414m1, Pipa PVC D 4' = 1071m1, pipa PVC D 2' = 58m' Swadaya masyarakat = Rp. 14.281.000, (menggunakan biaya konstrksi dari pemerintah dan biaya swadaya masyarakat) 3. Proyek rumah tinggal : ada anggaran khusus konstruksi, Kompak = Rp. 30.000.000 + swadaya masyarakat sesuai kemampuan, Type 36
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis, Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan konstruksi	1. Pembentukan Panitia Pembangunan 2. Pelatihan penyusunan DPTL & DED, manajemen konstruksi, administrasi keuangan. 3. Pencairan dana 4. Kontrak masyarakat 5. Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR	1. Pengadaan material 2. Pengadaan tukang/tenaga ahli 3. Pelaksanaan konstruksi (dinilai sederhana)	1. Penyiapan SDM 2. Pengadaan barang dan Jasa 3. Metode pelaksanaan konstruksi 4. Pengendalian waktu, biaya & kualitas/mutu 5. Perubahan kontrak (CCO) 6. Supervisi, monitoring & evaluasi 7. Penyiapan tenaga kerja	Proyek jalan : Pembentukan Panitia Pembangunan, Pelatihan penyusunan DPTL & DED, manajemen konstruksi, administrasi keuangan, Pencairan dana, Kontrak masyarakat, Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR Proyek saluran air limbah : Pengadaan material, Pengadaan tukang/tenaga ahli, Pelaksanaan konstruksi Proyek rumah tinggal :

		(dinilai sederhana)		8. Menyiapkan dana financial 9. Menyiapkan material 10. Menyiapkan peralatan / machine 11. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (dinilai sederhana)	Penyiapan SDM, Pengadaan barang dan Jasa, Metode pelaksanaan konstruksi, Pengendalian waktu, biaya & kualitas/mutu, Perubahan kontrak (CCO), Supervisi, monitoring & evaluasi, Penyiapan tenaga kerja, Menyiapkan dana financial, Menyiapkan material, Menyiapkan peralatan / machine, Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan
e.	Pihak terlibat	1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Konsultan NMC, DMC 3. Masyarakat (BKM/TPK, PP/KP dan Masyarakat penerima program) 4. Suplier dan Jasa Pemborong/tenaga	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. KSM 3. Masyarakat penerima proyek 4. Suplier bahan bangunan Tukang/tenaga ahli	1. Pemerintah (Desa, Fasilitator) 2. Konsultan NMC, DMC 3. Masyarakat (BKM, TIP, PP dan Masyarakat) 4. Suplier dan Jasa Pemborong/tenaga	Pemerintah ((Dinas, Kecamatan , Desa, Fasilitator), Konsultan NMC, DMC, Masyarakat (BKM/TPK, TIP, PP/KP dan Masyarakat penerima program) dan Suplier dan Jasa Pemborong/tenaga
f.	Uraian kegiatan	1. Pembentukan Panitia Pembangunan 2. Survei Teknis dan Harga Satuan 3. Pelatihan/coaching penyusunan DTPL dan DED 4. Penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL), termasuk di dalamnya penyiapan dokumen kajian dampak Sosial dan Lingkungan 5. Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi 6. Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan 7. Proses Pencairan BDL 8. Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing titik kegiatan 9. Pelaksanaan kegiatan fisik 10. Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR	1. Penjelasan teknis konstruksi 2. Pelaksanaan konstruksi dengan tahap : - Rembug warga - Survei pemetaan ulang - Pembersihan dan penyiapan lahan IPAL - Penyiapan peralatan K3, sign board, turap pengaman galian - Penyiapan direksi keet, gudang, area kerja - Pengadaan dan pembelian barang oleh panitia pengadaan - Pembagian grup dan area kerja - Pelaksanaan pekerjaan - Monitoring dan evaluasi	1. Pembentukan KP/Kelompok Pemukiman 2. Penyusunan Rencana Tapak 3. Menentukan Desain Bangunan Huntap 4. Survei Teknis dan Harga 5. Pelatihan/coaching penyusunan DTPP dan DED 6. Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP) 7. Pengajuan, pencairan dan penyaluran BDR 8. Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi 9. Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan 10. Proses Pencairan BDR 11. Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing KP 12. Pelaksanaan kegiatan fisik	1. Jalan aspal : Pembentukan Panitia Pembangunan, Survei Teknis dan Harga Satuan, Pelatihan/coaching penyusunan DTPL dan DED, Penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL), termasuk di dalamnya penyiapan dokumen kajian dampak Sosial dan Lingkungan, Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi, Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan, Proses Pencairan BDL, Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing titik kegiatan, Pelaksanaan kegiatan fisik, Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR 2. Saluran air limbah : Penjelasan teknis konstruksi, Pelaksanaan konstruksi dengan tahap (Rembug warga, Survei pemetaan ulang, Pembersihan dan penyiapan lahan IPAL, Penyiapan peralatan K3, sign board, turap pengaman galian, Penyiapan direksi keet, gudang, area kerja, Pengadaan dan pembelian barang oleh panitia pengadaan, Pembagian grup dan area kerja, Pelaksanaan pekerjaan) , Monitoring dan evaluasi 3. Rumah tinggal : Pembentukan KP/Kelompok Pemukiman, Penyusunan Rencana Tapak, Menentukan Desain Bangunan Huntap, Survei Teknis dan Harga, Pelatihan/coaching penyusunan DTPP dan DED, Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP), Pengajuan, pencairan dan penyaluran BDR, Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi, Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan, Proses Pencairan BDR, Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing KP, Pelaksanaan kegiatan fisik
g.	Hasil	Konstruksi bangunan jalan	Konstruksi bangunan IPAL dan SR	Konstruksi bangunan rumah	Konstruksi bangunan jalan, Konstruksi bangunan IPAL dan SR dan Konstruksi bangunan rumah
h.	Partisipasi	Berpartisipasi penuh	1. Gotong royong dalam proses	Masyarakat mengadakan gotong	Berpartisipasi sedang hingga penuh

	masyarakat	Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan konstruksi jalan dengan cara gotong royong	pembangunan 2. Menyediakan konsumsi 3. Antusias masyarakat untuk menyambung SR tinggi (berpartisipasi dengan prosentase sedang)	royong dalam pembangunan rumah/berpartisipasi penuh	
i.	Administrasi	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : 1. Pencairan Tahap I (40%) 2. Pencairan Tahap II (60%) (dinilai sederhana)	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn 1. Pencairan dana tahap I sebesar 40% dengan progres konstruksi 0% 2. Pencairan dana tahap II sebesar 30% dengan progres konstruksi 30% 3. Pencairan dana tahap III sebesar 30% dengan progres konstruksi 60% (dinilai sederhana)	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : 1. Pencairan tahap I (50%) 2. Pencairan tahap II (50%) (dinilai sederhana)	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn dan dinilai sederhana
J.	Tempat	Lokasi proyek	Lokasi proyek	Lokasi proyek	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis (lebih mengutamakan kearifan lokal)	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis (lebih mengutamakan kearifan lokal)	Sesuai dengan spesifikasi teknis
l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi penyedia jasa yang dibutuhkan tapi tidak biasa mengerjakan konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	Sedang	1. Perubahan mayoritas di perpipaan 2. Selisih harga dari perencanaan & pengadaan digunakan untuk penambahan penyambungan SR, bak kontrol 3. Sedikit karena dikerjakan sendiri oleh masyarakat (pekerjaan tambah kurang prosentasenya sedikit)	Sedikit	Prosentasenya sedikit hingga Sedang
n.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang/ Harus menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
o.	Kendala	Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi	Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi
p.	Kelebihan	Kerukunan warga masyarakat terlihat jelas pada proses konstruksi, dalam bentuk gotong royong	Dana yang tersedia biasanya tersisa dan bisa digunakan untuk pembangunan jaringan SR tambahan.	1. Masyarakat faham kerjasama dalam kegiatan berkelompok 2. Masyarakat faham membangun rumah dengan struktur tahan gempa	1. Kerukunan warga masyarakat terlihat jelas pada proses konstruksi, dalam bentuk gotong royong 2. Dana yang tersedia biasanya tersisa dan bisa digunakan untuk pembangunan jaringan SR tambahan 3. Masyarakat faham kerjasama dalam kegiatan berkelompok

				<ol style="list-style-type: none"> 3. Masyarakat sedikit banyak mengerti tata cara pengadaan barang dan membukukan belanja kelompok. 4. Masyarakat faham akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat pembangunan rumah dari segi lingkungan maupun sosial 5. Masyarakat faham tentang tata cara merawat dan mengembangkan rumah kedepan. 6. Hasil bangunan lebih baik yang dilakukan langsung oleh masyarakat daripada yang dibangun oleh pemborong 7. Volume yang dibangun lebih dari volume perencanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Masyarakat faham membangun rumah dengan struktur tahan gempa 5. Masyarakat sedikit banyak mengerti tata cara pengadaan barang dan membukukan belanja kelompok 6. Masyarakat faham akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat pembangunan rumah dari segi lingkungan maupun sosial 7. Masyarakat faham tentang tata cara merawat dan mengembangkan rumah kedepan 8. Hasil bangunan lebih baik yang dilakukan langsung oleh masyarakat daripada yang dibangun oleh pemborong 9. Volume yang dibangun lebih dari volume perencanaan.
--	--	--	--	--	---

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat

Tabel 5.56 Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan pada tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan

No	Tahap Proyek Konstruksi	Jalan Aspal	Saluran air limbah	Rumah tinggal	Pengambilan Kesimpulan Proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan	Kurang dari 1 bulan	Kurang dari 1 bulan	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya dan biasanya menggunakan dana swadaya masyarakat	Menggunakan dana Kelompok Pemukiman (KP)/ ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Menggunakan biaya dari masyarakat
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES 2. Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) (dinilai sederhana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan PHO dengan tujuan mengecek kesesuaian bangunan dan kelayakan operasional bangunan 2. Pelaksanaan comisioning Test bangunan ipal 3. Pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat (dinilai sederhana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan PHO 2. Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat 3. Pemeliharaan bangunan dilakukan oleh masyarakat (dinilai mudah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. proyek jalan : Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES, Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) dinilai sederhana 2. Proyek saluran air limbah : Dilaksanakan PHO dengan tujuan mengecek kesesuaian bangunan dan kelayakan operasional bangunan, Pelaksanaan comisioning Test bangunan ipal, Pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat dinilai sederhana 3. Proyek rumah tinggal : Pelaksanaan PHO, Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat dan Pemeliharaan bangunan dilakukan oleh masyarakat (dinilai mudah)
e.	Pihak terlibat	1. Masyarakat (TPK, BKM,	2. Pemerintah (Dinas/DPUP,	1. Masyarakat (KP/Kelompok	1. Masyarakat (TPK, BKM/KSM, PP/KP, Tokoh Masyarakat

		PP/KP) 2. Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator)	Kecamatan, Desa dan TFL) 3. Masyarakat (KSM, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat penerima program)	Pemukiman, BKM) 2. Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator)	dan Masyarakat penerima program) 2. Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator)
f.	Uraian kegiatan	1. Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES 2. Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) 3. Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan	1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan (comissioning uji kebocoran IPAL) 2. Rembug Warga 3. Serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan hasil proyek kepada KSM untuk difungsikan. 4. Pengumpulan dan penyusunan dokumen pelaksanaan 5. Penyerahan operasi dan pemeliharaan kepada masyarakat 6. Pengoperasian organisasi pengelolaan dan jaringan SR dan IPAL 7. Penyerahan laporan akhir kegiatan (Laporan teknik, laporan keuangan dan laporan logistik)	1. Bersifat berupa peresmian dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan dari KP ke Desa dilanjutkan Desa menyerahkan kembali hasil pembangunan untuk difungsikan oleh KP. 2. Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan	1. Proyek jalan : Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES, Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) dan Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan 2. Proyek saluran air limbah : Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan (comissioning uji kebocoran IPAL), Rembug Warga, Serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan hasil proyek kepada KSM untuk difungsikan., Pengumpulan dan penyusunan dokumen pelaksanaan, Penyerahan operasi dan pemeliharaan kepada masyarakat, Pengoperasian organisasi pengelolaan dan jaringan SR dan IPAL, Penyerahan laporan akhir kegiatan (Laporan teknik, laporan keuangan dan laporan logistik) 3. Proyek Rumah Tinggal : Bersifat berupa peresmian dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan dari KP ke Desa dilanjutkan Desa menyerahkan kembali hasil, pembangunan untuk difungsikan oleh K, Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan
g.	Hasil	Bangunan digunakan	Bangunan siap digunakan	Bangunan siap digunakan	Bangunan siap digunakan
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi penuh/Masyarakat menerima hasil dari pembangunan atau pengaspalan jalan	Berpartisipasi penuh	Masyarakat menerima hasil dari pembangunan rumah/berpartisipasi penuh	Berpartisipasi penuh
i.	Administrasi	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh TPK dengan bantuan fasilitator (dinilai sederhana)	Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan oleh KSM dan TFL (dinilai sederhana)	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh KP, BKM dan Desa dengan bantuan fasilitator (dinilai mudah)	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh TPK/KSM/BKM/KP dengan bantuan fasilitator (dinilai mudah hingga sederhana)
J.	Tempat	Lokasi proyek konstruksi dan kantor operasional TPK	Kantor Dinas terkait dan lokasi proyek	Kantor Desa diteruskan ke Kantor Pemerintah Daerah	Lokasi proyek konstruks, kantor Dinas, Kantor Desa dan kantor operasional TPK
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu rekanan dan SKPD terkait/Dinas PU	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU	Masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan

5.15.2 Analisis Data Perbandingan dan pengambilan kesimpulan pada pelaksanaan proyek dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan pada tahap persiapan untuk proyek berbasis masyarakat antara 2 s/d 3 bulan.

2) Biaya

Biaya yang digunakan pada proses perencanaan proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat berasal dari pemerintah dan masyarakat.

3) Mutu

Mutu perencanaan proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat sesuai dengan standar Pemerintah. Dalam tahap perencanaan pembangunan jalan berbasis masyarakat, mutu perencanaan disesuaikan dengan Pedoman Teknis Pembangunan Jalan Berbasis Tenaga Kerja. Petunjuk Pelaksanaan DAK SLBM untuk proyek pembangunan saluran air limbah digunakan sebagai pedoman perencanaan proyek Pembangunan Saluran Air Limbah berbasis masyarakat. Dalam pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat, perencanaan berpedoman pada Pedoman Teknis Pembangunan BDR /Biaya Dana Rumah.

4) Mekanisme Perencanaan

Mekanisme perencanaan pada proyek berbasis masyarakat dimulai dengan sosialisasi program, penyiapan TFL, pemilihan dan penetapan lokasi, pembentukan dan penetapan KSM dan pelaksanaan ini dinilai sederhana oleh responden.

5) Dasar usulan proyek

Dasar usulan proyek pembangunan (jalan dan rumah tinggal) berbasis masyarakat adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi. Dasar usulan proyek

pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat adalah Surat minat/permohonan bantuan penanganan air limbah dari masyarakat.

6) Pihak terlibat

Pihak yang terlibat dalam perencanaan proyek berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Pemprov, Pemkab, Camat, Lurah, Fasilitator, Tenaga Sanitari/Puskesmas /Satker PLPP), Konsultan (PMU, NMC, DMC), Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak) dan Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM

7) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan proyek pembangunan (jalan aspal dan rumah tinggal) berbasis masyarakat antara lain : loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten, lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten, penetapan lokasi, pengadaan dan pelatihan praturgas Konsultan Kabupaten/kota, pengadaan dan Pelatihan Praturgas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat antara lain : sosialisasi kepada Camat dan Lurah pada daerah rawan sanitasi, Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL (penyiapan, seleksi dan pelatihan), pemilihan lokasi, pemicuan Masyarakat, penetapan Lokasi, pembentukan dan penetapan KSM/ Kelompok Swadaya Masyarakat.

8) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek pembangunan (jalan aspal dan rumah tinggal) berbasis masyarakat adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek, Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut, Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut, daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan serta

Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.

Produk yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah Tenaga Fasilitator telah siap, lokasi proyek telah ditetapkan, masyarakat telah siap dengan rencana program yang akan dilakukan dan terbentuknya KSM.

9) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan berbasis masyarakat dinilai penuh oleh responden.

10) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perencanaan pembangunan (jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) berbasis masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sedangkan pada proyek Saluran air pada proyek berbasis masyarakat dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), dinilai sederhana oleh responden.

11) Keselamatan

Pada tahap perencanaan proyek pembangunan dengan sistem manajemen berbasis masyarakat tidak menggunakan jaminan keselamatan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang ada dalam pelaksanaan perencanaan berbasis masyarakat adalah SDM yang kurang memahami pentingnya pelaksanaan proyek dan Terjadi konflik antar pemangku kepentingan.

13) Kelebihan

Kelebihan pada tahap perencanaan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat antara lain : keputusan publik yang diambil lebih efektif , memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat. Serta proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan.

Kelebihan dari perencanaan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah warga masyarakat lebih tahu tentang keadaan lapangan yang akan dibangun.

b. Perancangan Proyek Pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan pada tahap perancangan proyek pembangunan berbasis masyarakat sekitar 1 s/d 3 bulan.

2) Biaya

Biaya yang digunakan pada proses perancangan proyek berbasis masyarakat menggunakan biaya Pemerintah dan masyarakat.

3) Mutu

Mutu perancangan untuk proyek berbasis masyarakat sesuai dengan standar pemerintah. Dijabarkan secara rinci dalam Petunjuk Pelaksanaan DAK SLBM untuk kegiatan perancangan proyek saluran air limbah berbasis masyarakat.

4) Mekanisme Perancangan

Pada proses perancangan pembangunan (jalan aspal dan rumah tinggal) berbasis masyarakat, mekanisme perencanaan adalah penyusunan RPP/Rencana Penataan Permukiman dan sinkronisasi RPP/Rencana Penataan Permukiman, kegiatan ini dinilai sederhana oleh responden.

Pada proses perancangan pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat, mekanisme perencanaan antara lain : persiapan pelaksanaan penyusunan RKM, pendanaan dan tahap pencairan dana, verifikasi RKM dan perjanjian kerja KSM dengan SKPD (dinilai rumit oleh responden).

5) Pihak terlibat

Pihak yang terlibat pada tahap perancangan proyek pembangunan berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator), Konsultan (NMC, DMC) dan Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program) sebagai pelaku utama dalam proses perancangan.

6) Uraian kegiatan

Pada perancangan proyek pembangunan (jalan aspal dan rumah tinggal) berbasis masyarakat kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan RPP yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : orientasi sosial dan wilayah, sosialisasi tingkat desa, sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW), Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), pembentukan Tim Inti Perencana (TIP), pelatihan BKM-TPK-TIP, pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus, penyiapan Peta Dasar, tinjauan/review Dokumen Pembangunan, pemetaan Swadaya, rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya, rembug Perumusan Visi dan Misi Desa, rembug pemecahan masalah, rembug penyusunan rencana tata ruang desa, rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana, sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah), Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1, konsultasi publik, verifikasi program dan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman serta penyusunan RPP.

Kegiatan yang dilakukan dalam proyek perancangan saluran air limbah berbasis masyarakat kegiatan yang dilakukan antara lain : pendampingan TFL Teknis (pemilihan teknologi, pengukuran, gambar/DED, RAB dan spesifikasi Teknis), pendampingan TFL Sosial (klasifikasi kesejahteraan, persiapan tenaga kerja, pembukaan rekening bersama) dan verifikasi RKM.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan (jalan aspal dan rumah tinggal) berbasis masyarakat adalah tersusunya dokumen RPP/Rencana Penataan Permukiman.

Produk yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat adalah Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang berisi : profil lokasi, organisasi dan struktur KSM, anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART) KSM, surat ketersediaan Lahan dan atau persetujuan warga, dokumen dan berita acara

seleksi kampung, penentuan calon pengguna, pemilihan teknologi sanitasi, DED dan RAB lengkap disertai dengan kurva S, rekening bank bersama, sumber pendanaan serta mekanisme pencairan dana dari pemerintah, pengelolaan keuangan DAK SLBM, rencana kerja, surat perjanjian kerja sama antara SATKER/PPK sanitasi kabupaten/Kota dengan KSM, tentang pemanfaatan DAK SLBM dan jaminan dari masyarakat pengguna terhadap kesediaan dalam mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana DAK SLBM.

8) Partisipasi masyarakat

Pada tahap perancangan proyek jalan berbasis masyarakat, masyarakat berpartisipasi dengan prosentase sedang. Adapun bentuk partisipasinya antara lain : memberikan masukan dalam proses perancangan, memberikan gambaran terhadap faktor-faktor pendukung dan penghalang proyek konstruksi yang akan dijalankan.

Masyarakat berpartisipasi penuh pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah dan rumah tinggal berbasis masyarakat. Seluruh warga ikut serta mengukur rencana jaringan SR sebagai bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.

9) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan perancangan pada proyek pembangunan (jalan aspal, rumah tinggal) berbasis masyarakat dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai rumit pada jalan aspal dan dinilai mudah pada rumah tinggal oleh responden). Pelaporan hasil kegiatan perancangan pada proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat dilakukan TFL dan KSM (dinilai sederhana).

10) Tempat

Proses perancangan dilakukan di Kantor Pemerintah Desa (untuk proyek jalan dan saluran air limbah), Kantor PEMDA/DPUP dan Kantor KSM (untuk proyek rumah tinggal).

11) Sumber pendanaan

Sumber pendanaan untuk proyek pembangunan (jalan aspal dan rumah tinggal) berbasis masyarakat berasal dari World Bank. Sumber pendanaan pada tahap perancangan saluran air limbah berbasis masyarakat berasal dari anggaran khusus/APBD dari Pemerintah dan dana dari masyarakat.

12) Cara pencairan dana

Biaya perancangan untuk proyek berbasis masyarakat, dicairkan setelah proses perancangan selesai.

13) Keselamatan

Jaminan keselamatan pada tahap perancangan untuk proyek berbasis masyarakat, tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana.

14) Kendala

SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek menjadi kendala dalam proses perancangan proyek pembangunan berbasis masyarakat.

15) Kelebihan

Nilai positif dari perancangan proyek dengan sistem berbasis masyarakat adalah masyarakat berperan aktif dalam proses perancangan sehingga perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL memberikan kepuasan tersendiri bagi KP/Kelompok Pemukiman dan menghasilkan desain yang benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk tahap pelelangan saluran air limbah berbasis masyarakat kurang dari 1 bulan.

2) Biaya

Biaya yang digunakan pada proses pengadaan pada proyek berbasis masyarakat menggunakan dana Biaya Operasional Pekerjaan (BOP) pada proyek BDL.

Tidak ada anggaran untuk pelaksanaan pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah dan rumah tinggal berbasis masyarakat.

3) Mutu

Mutu pengadaan pada proyek pembangunan dengan metode konstruksi berbasis masyarakat sesuai dengan rencana yaitu memperoleh penyedia bahan bangunan dan penyedia tenaga terampil sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada proses pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah dengan metode konstruksi berbasis masyarakat lebih buruk dari standar Pemerintah.

4) Mekanisme Pengadaan

Pada proses pengadaan Barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat, Pengadaan material/bahan dan alat dengan cara pelelangan umum (dinilai mudah hingga sederhana)

5) Pihak terlibat

Pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek pembangunan berbasis masyarakat antara lain Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, Fasilitator), Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM/KSM, Masyarakat penerima program) dan Penyedia Barang/Supplier.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proyek berbasis masyarakat, untuk proyek jalan dan rumah tinggal : Pembentukan Tim Pengadaan, Persiapan Tim Pengadaan dan Pelelangan (Umum atau penunjukan langsung). Untuk proyek saluran air limbah dengan urutan Perjanjian kerja KSM dengan SKPD dan Kontrak perjanjian antara KSM dengan Penyedia bahan bangunan /supplier bahan bangunan dan tenaga ahli.

7) Hasil

Hasil dari proses pengadaan proyek pembangunan berbasis masyarakat adalah Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.

8) Partisipasi masyarakat

Masyarakat berpartisipasi sedang hingga penuh dalam tahap pengadaan proyek konstruksi saluran air limbah dan rumah tinggal berbasis masyarakat dengan : melaksanakan survei harga oleh KSM, ikut mengevaluasi dan mengendalikan mutu bahan bangunan yang digunakan serta memberikan masukan dalam menentukan penyedia bahan bangunan/alat dan jasa pemborong.

9) Administrasi

Pada proyek pembangunan berbasis masyarakat kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh TPK/PP/KSM (dinilai sederhana).

10) Tempat

Tempat pengadaan proyek pembangunan berbasis masyarakat dilakukan di Kantor Pemda/DPUP dan Kantor KSM/TPK/PP.

11) Jaminan Keselamatan

Pada tahap pengadaan proyek pembangunan berbasis masyarakat tidak menggunakan jaminan keselamatan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang ada dalam tahap pengadaan proyek konstruksi pembangunan berbasis masyarakat adalah Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan , bahan yang disediakan suplier tidak sesuai dengan sampel yang diberikan, kurang tersedianya tenaga ahli pelaksana pekerjaan karena waktu proyek hampir bersamaan dan spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek.

13) Kelebihan

Kelebihan pada tahap pengadaan proyek konstruksi bangunan berbasis masyarakat adalah masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena jalan dibangun untuk kepentingan bersama warga kampung, Suplier yang ditunjuk oleh masyarakat memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar karena berada tidak jauh dari lokasi proyek.

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk tahap konstruksi proyek pembangunan berbasis masyarakat antara 2 s/d 4 bulan.

2) Biaya

Biaya konstruksi yang dibutuhkan pada Proyek jalan : Rekompak BDL : Rp. 112.987.000,-, Swadaya : Rp. 500.000,-, Panjang jalan 280,5m1, lebar 4m, Luas = 1122m², Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat), Proyek saluran air limbah : Pemda = Rp. 446.026.670, Luas lahan 200m², kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 6' = 414m1, Pipa PVC D 4' = 1071m1, pipa PVC D 2' = 58m1 Swadaya masyarakat = Rp. 14.281.000, (menggunakan biaya konstruksi dari pemerintah dan biaya swadaya masyarakat) dan Proyek rumah tinggal : ada anggaran khusus konstruksi, Rekompak = Rp. 30.000.000 + swadaya masyarakat sesuai kemampuan, Type 36.

3) Mutu

Mutu pekerjaan konstruksi pada proyek berbasis masyarakat dilaksanakan sesuai dengan standar Pemerintah yang dituangkan dalam spesifikasi teknis.

4) Mekanisme Pelaksanaan Konstruksi

Mekanisme pelaksanaan konstruksi untuk proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat dinilai sederhana oleh responden, dengan mekanisme sebagai berikut : pembentukan Panitia Pembangunan, pelatihan penyusunan DPTL & DED, manajemen konstruksi, administrasi keuangan, pencairan dana, kontrak masyarakat dan pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR.

Mekanisme pelaksanaan konstruksi untuk proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat yaitu : pengadaan material, pengadaan tukang/tenaga ahli dan pelaksanaan konstruksi (dinilai sederhana oleh responden)

Mekanisme pelaksanaan konstruksi untuk proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah penyiapan SDM, pengadaan barang dan jasa, metode pelaksanaan konstruksi, pengendalian waktu, biaya & kualitas/mutu, perubahan kontrak (CCO), supervisi, monitoring & evaluasi, penyiapan tenaga kerja, menyiapkan dana financial, menyiapkan material, menyiapkan peralatan / machine, menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (dinilai sederhana oleh responden).

5) Pihak terlibat

Pihak yang terlibat dalam tahap konstruksi proyek pembangunan berbasis masyarakat adalah Pemerintah ((Dinas, Kecamatan , Desa, Fasilitator), Konsultan NMC, DMC, Masyarakat (BKM/TPK, TIP, PP/KP dan Masyarakat penerima program) dan Suplier dan Jasa Pemborong/tenaga.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat antara lain : Pembentukan Panitia Pembangunan, Survei Teknis dan Harga Satuan, Pelatihan/coaching penyusunan DTPL dan DED, Penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL), termasuk di dalamnya penyiapan dokumen kajian dampak Sosial dan Lingkungan, Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi, Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan, Proses Pencairan BDL, Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing titik kegiatan, Pelaksanaan kegiatan fisik, Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR.

Kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat antara lain : Penjelasan teknis konstruksi, Pelaksanaan konstruksi dengan tahap (Rembug warga, Survei pemetaan ulang, Pembersihan dan penyiapan lahan IPAL, Penyiapan peralatan K3, sign board, turap pengaman galian, Penyiapan direksi keet, gudang, area kerja, Pengadaan dan pembelian barang oleh panitia pengadaan, Pembagian grup dan area kerja, Pelaksanaan pekerjaan) , Monitoring dan evaluasi

Kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat antara lain : Pembentukan KP/Kelompok Pemukiman, Penyusunan Rencana Tapak, Menentukan Desain Bangunan Huntap, Survei Teknis dan Harga, Pelatihan/coaching penyusunan DTPP dan DED, Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP), Pengajuan, pencairan dan penyaluran BDR, Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi, Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan, Proses Pencairan BDR, Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing KP, Pelaksanaan kegiatan fisik.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan dari tahap konstruksi proyek berbasis masyarakat adalah konstruksi bangunan jalan, konstruksi bangunan IPAL dan SR dan konstruksi bangunan rumah.

8) Partisipasi masyarakat

Masyarakat berpartisipasi sedang hingga penuh pada tahap konstruksi di proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

9) Administrasi

Proses pencairan dana pada sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat menggunakan termyn dan dinilai sederhana oleh responden.

10) Tempat

Tempat pelaksanaan konstruksi untuk konstruksi berbasis masyarakat adalah di lokasi proyek.

11) Pengadaan material

Dalam proses pengadaan material untuk proyek berbasis masyarakat yaitu sesuai dengan spesifikasi teknis/standar pemerintah dan menggunakan bahan bangunan lokal/berdasarkan kearifan lokal.

12) Pengadaan jasa

Pengadaan jasa untuk proyek konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik .

13) Pekerjaan tambah kurang

Pekerjaan tambah kurang pada tahap konstruksi proyek berbasis masyarakat prosentasenya sedikit hingga sedang.

14) Keselamatan

Jaminan keselamatan pada pekerjaan konstruksi berbasis masyarakat tidak menggunakan jaminan keselamatan karena tidak ada alokasi dana.

15) Kendala

Kendala yang sering terjadi dalam proses berbasis masyarakat adalah material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi.

16) Kelebihan

Kelebihan yang ada dalam proses berbasis masyarakat antara lain kerukunan warga masyarakat terlihat jelas pada proses konstruksi, dalam bentuk gotong royong, dana yang tersedia biasanya tersisa dan bisa digunakan untuk pembangunan jaringan SR tambahan, masyarakat faham kerjasama dalam kegiatan berkelompok, masyarakat faham membangun rumah dengan struktur tahan gempa, masyarakat sedikit banyak mengerti tata cara pengadaan barang dan membukukan belanja kelompok, masyarakat faham akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat pembangunan rumah dari segi lingkungan maupun sosial, masyarakat faham tentang tata cara merawat dan mengembangkan rumah kedepan, hasil bangunan lebih baik yang dilakukan langsung oleh masyarakat daripada yang dibangun oleh pemborong dan volume yang dibangun lebih dari volume perencanaan.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan berbasis masyarakat antara 1 s/d 2 bulan.

2) Biaya

Biaya yang dibutuhkan dalam proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan berbasis masyarakat menggunakan biaya swadaya masyarakat dan dana KP/Kelompok Pemukiman khusus pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat.

3) Mutu

Mutu dari penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan berbasis masyarakat adalah sama yaitu sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah.

4) Mekanisme Penyerahan hasil

Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan untuk proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat dinilai sederhana oleh responden, adapun mekanismenya sebagai berikut : penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES dan penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian).

Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah dilaksanakan PHO dengan tujuan mengecek kesesuaian bangunan dan kelayakan operasional bangunan, pelaksanaan comisioning Test bangunan ipal dan pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat (dinilai sederhana oleh responden).

Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan pembangunan rumah tinggal dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah pelaksanaan PHO, penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat dan pemeliharaan bangunan dilakukan oleh masyarakat (dinilai mudah oleh responden).

5) Pihak terlibat

Pihak yang terlibat dalam Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan berbasis masyarakat antara lain : masyarakat (TPK, BKM/KSM, PP/KP, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat penerima program) dan Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator).

6) Uraian kegiatan

Untuk proses penyerahan hasil pekerjaan pembangunan jalan berbasis masyarakat : Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES, Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) dan Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Untuk proses penyerahan hasil pekerjaan pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat : menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan (comissioning uji kebocoran IPAL), Rembug Warga, Serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan hasil proyek kepada KSM untuk difungsikan., Pengumpulan dan penyusunan dokumen pelaksanaan, Penyerahan operasi dan pemeliharaan kepada masyarakat, Pengoperasian organisasi pengelolaan dan jaringan SR dan IPAL, Penyerahan laporan akhir kegiatan (Laporan teknik, laporan keuangan dan laporan logistik).

Untuk proses penyerahan hasil pekerjaan pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat : bersifat berupa peresmian dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan dari KP ke Desa dilanjutkan Desa menyerahkan kembali hasil, pembangunan untuk difungsikan oleh K, Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan dari proses penyerahan hasil pekerjaan proyek berbasis masyarakat adalah bangunan yang siap digunakan.

8) Partisipasi masyarakat

Masyarakat berpartisipasi penuh dalam tahap penyerahan hasil proyek konstruksi pembangunan berbasis masyarakat dan menerima hasil dari pembangunan serta siap mengelola hasil proyek.

9) Administrasi

Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh TPK/KSM/BKM/KP dengan bantuan fasilitator (dinilai mudah hingga sederhana).

10) Tempat

Tempat penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan berbasis masyarakat berada di Lokasi proyek konstruks, kantor Dinas, Kantor Desa dan kantor operasional TPK.

11) Keselamatan

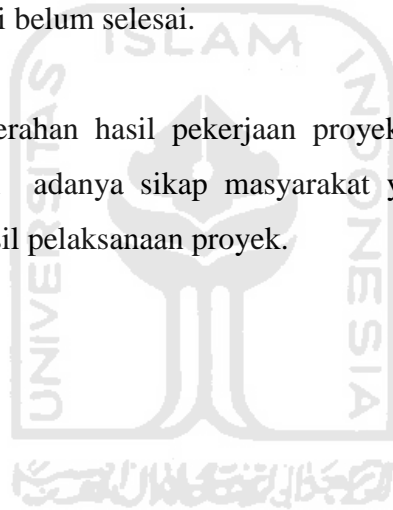
Pada tahap penyerahan hasil pekerjaan untuk proyek pembangunan berbasis masyarakat tidak menggunakan jaminan keselamatan.

12) Kendala

Kendala yang ada dalam tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan berbasis masyarakat yaitu pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai.

13) Kelebihan

Pada proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan berbasis masyarakat adalah adanya sikap masyarakat yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil pelaksanaan proyek.



5.16 Analisis Data Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi terstandar untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan

5.16.1 Tabel Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi terstandar untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan dengan manajemen terstandar

Tabel 5.57 Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi terstandar untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan pada tahap Perencanaan/Persiapan

No	Tahap Proyek Konstruksi	Jalan Aspal	Saluran air limbah	Rumah tinggal	Pengambilan Kesimpulan Proyek dengan manajemen konstruksi terstandar
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan sebelum proyek dimulai dilakukan oleh Tim Perencana interen Bidang Bina Marga	2 s/d 3 bulan	2 s/d 3 bulan (pada tahun anggaran sebelum tahun pelaksanaan proyek)	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perencanaan	Ada Anggaran Khusus dari Pemerintah/sesuai DPA	Menggunakan biaya umum perencanaan	Ada anggaran khusus perencanaan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perencanaan	1. Survei awal lokasi 2. Rancangan Kasar dari proyek yang direncanakan (dinilai sederhana)	1. Penentuan skema dasar 2. Survei lokasi 3. Prediksi jumlah penduduk, perkembangan kota dan timbulnya air limbah domestik. 4. Perencanaan fasilitas 5. Evaluasi 6. Penentuan rancangan induk Master plan 7. Studi kelayakan 8. Perencanaan Sistem perpipaan (dinilai rumit)	1. Survei awal lokasi proyek 2. Rancangan kasar dari proyek yang direncanakan (dinilai sederhana)	1. Proyek jalan dan rumah tinggal : Survei awal lokasi dan Rancangan Kasar dari proyek yang direncanakan (dinilai sederhana) 2. Proyek saluran air limbah : Penentuan skema dasar, Survei lokasi , Prediksi jumlah penduduk, perkembangan kota dan timbulnya air limbah domestik, Perencanaan fasilitas, Evaluasi, Penentuan rancangan induk Master plan , Studi kelayakan dan Perencanaan Sistem perpipaan (dinilai rumit)
e.	Dasar usulan proyek	Investasi	Investasi	Investasi	Investasi
f.	Pihak terlibat	Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL) 2. Warga Masyarakat 3. Konsultan perencana	Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas) 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat	Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas untuk proyek jalan dan rumah tinggal ditambah Pemerintah Kecamatan, warga masyarakat dan konsultan perencana untuk proyek saluran air limbah

		Komitment)		Komitment) 7. Konsultan perencana	
g.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gagasan proyek 2. Pengembangan gagasan 3. Evaluasi kelayakan konsep 4. Penentuan konsep alternatif 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menyusun perkiraan biaya Menyusun organisasi pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gagasan proyek dan analisis pendahuluan Pengembangan gagasan 2. Pengembangan gagasan menjadi konsep-konsep alternatif 3. Evaluasi kelayakan konsep alternatif dari semua konsep 4. Penentuan konsep alternatif yang baik 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menyusun perkiraan biaya 7. Menyusun organisasi pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gagasan proyek dan analisis pendahuluan 2. Pengembangan gagasan menjadi konsep-konsep alternatif 3. Evaluasi kelayakan konsep alternatif dari semua konsep 4. Penentuan konsep alternatif yang baik 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menyusun perkiraan biaya 7. Menyusun organisasi pelaksanaan 	Identifikasi gagasan proyek, Pengembangan gagasan, Evaluasi kelayakan konsep, Penentuan konsep alternatif, Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan, Menyusun perkiraan biaya, Menyusun organisasi pelaksanaan
h.	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organizing 4. Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana 5. Tahapan pekerjaan 6. Master, coordinating scedule 7. Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana Cash flow (Proyeksi Arus Dana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sasaran proyek (biaya & waktu) 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organizing 4. Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana 5. Tahapan pekerjaan 6. Master, coordinating scedule 7. Perkiraan biaya 8. Cash flow (Proyeksi Arus Dana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sasaran proyek baik dilihat dari aspek biaya dan waktu 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organizing 4. Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana 5. Tahapan pekerjaan 6. Master, coordinating scedule 7. Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana 8. Cash flow (Proyeksi Arus Dana) 	Pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu, Identifikasi batasan utama, TOR dan organizing, Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana, Tahapan pekerjaan, Master, coordinating scedule, Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana, Cash flow (Proyeksi Arus Dana)
i.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Membantu menentukan pengguna (berpartisipasi sedang)	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase sedang
j.	Administrasi	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai mudah)	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai rumit)	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh tim perencana (dinilai mudah)	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai mudah hingga rumit)
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan dan SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
m.	Kelebihan	Perencanaan dilaksanakan oleh tim yang sudah ahli di bidang perencanaan jalan aspal	Proses perencanaan dilakukan oleh tenaga yang ahli dalam bidang perencanaan saluran air limbah	Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh tim yang sudah berkompeten di bidangnya	Perencanaan dilaksanakan oleh tim/tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya

b. Perancangan Proyek Proyek Pembangunan dengan manajemen terstandar

Tabel 5.58 Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi terstandar untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan pada tahap Perancangan

No	Tahap Proyek Konstruksi	Jalan Aspal	Saluran air limbah	Rumah tinggal	Pengambilan Kesimpulan Proyek dengan manajemen konstruksi terstandar
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan	3 s/d 4 bulan di tahun sebelumnya	2 s/d 3 bulan	2 s/d 4 bulan
b.	Biaya	Ada anggaran khusus perancangan	Ada anggaran khusus perencanaan/jasa konsultasi	Ada anggaran khusus perancangan	Ada anggaran khusus perancangan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perancangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diadakan survei harga 2. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) (dinilai mudah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program perencanaan kepada warga masyarakat penerima program 2. Diadakan survei harga 3. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) (dinilai sederhana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei harga oleh konsultan perencana 2. Perencanaan oleh tim Konsultan perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) 3. Review hasil perancangan konsultan oleh tim perencana dari SKPD terkait 4. Diadakan evaluasi harga untuk produk konsultan Perencanaan oleh tim perencana dari SKPD terkait (dinilai mudah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diadakan survei harga 2. Sosialisasi program perencanaan kepada warga masyarakat penerima program 3. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) 4. Diadakan evaluasi harga untuk produk konsultan Perencanaan oleh tim perencana dari SKPD terkait (dinilai mudah hingga sederhana)
e.	Pihak terlibat	<p>Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) <p>Tim Perencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator perencana 2. Perencana 3. Tenaga survei 4. Penggambar 5. Penghitung RAB (Pemerintah satu Dinas) 	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (pemerintah satu Dinas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staf) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staf) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) <p>Tim Perencana (Konsultan Perencana)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator perencana 2. Perencana 3. Tenaga survei 4. Penggambar 5. Penghitung RAB 	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) <p>Tim Perencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan perencana 	<p>Tim Pelaksana Kegiatan dan konsultan perencana</p>
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 	<p>Membuat kriteria desain, Membuat skematik desain, Membuat estimasi biaya secara rinci, Membuat desain detail, Membuat</p>

		3. Membuat estimasi biaya secara rinci 4. Membuat desain detail 5. Membuat spesifikasi teknis 6. Membuat daftar volume 7. Membuat Rencana Anggaran Biaya 8. Membuat syarat-syarat administrasi 9. Membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku	3. Review estimasi biaya secara rinci 4. Review desain akhir berupa hasil gambar detail 5. Review desain akhir berupa hasil spesifikasi teknis 6. Review desain akhir berupa daftar volume 7. Review desain akhir berupa RAB 8. Review desain akhir berupa syarat-syarat administrasi 9. Review desain akhir berupa peraturan-peraturan umum yang berlaku	3. Membuat estimasi biaya secara rinci 4. Membuat desain detail 5. Membuat spesifikasi teknis 6. Membuat daftar volume 7. Membuat Rencana Anggaran Biaya 8. Membuat syarat-syarat administrasi 9. Membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku	spesifikasi teknis, Membuat daftar volume, Membuat Rencana Anggaran Biaya, Membuat syarat-syarat administrasi, Membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku
g.	Hasil	1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, masukan proses dan keluaran 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar bestek dan shop drawing 5. Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya 6. Pedoman administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar	1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, masukan proses dan keluaran 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar bestek dan shop drawing 5. Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya 6. Pedoman administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar	1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, masukan proses dan keluaran 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar bestek dan shop drawing 5. Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya 6. Pedoman administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar	Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor, Spesifikasi, masukan proses dan keluaran, Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas, Gambar bestek dan shop drawing, Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya, Pedoman administrasi dan keuangan, roses operasional dan standar
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Memberikan data penduduk untuk proyek yang akan dilaksanakan (berpartisipasi sedang)	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi dengan prosentase rendah hingga sedang
i.	Administrasi	Pelaporan pada proses perancangan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai rumit)	Pelaporan hasil pekerjaan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai rumit)	Pelaporan hasil perancangan dilakukan oleh Konsultan Perencana (dinilai mudah)	Pelaporan pada proses perancangan dilakukan oleh Tim Perencana/ Konsultan Perencana (dinilai rumit hingga mudah)
J.	Tempat	Kantor Pemerintah	Kantor konsultan perencana	Kantor Konsultan	Kantor Pemerintah dan kantor konsultan
k.	Sumber Pendanaan	APBD	Ada Anggaran Khusus dari Pemerintah/sesuai DPA	APBD	APBD
l.	Cara Pencairan	Biaya perancangan dicairkan bila proses perancangan telah selesai	Setelah proses perancangan diselesaikan	Setelah dokumen perancangan selesai	Setelah dokumen perancangan selesai
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan dan SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Perancangan dilakukan oleh tim teknis yang sudah berpengalaman dalam perancangan jalan aspal	Desain dari konsultan perencana sudah siap dilaksanakan	Desain dari konsultan perencana sudah siap dilaksanakan	Perancangan dilakukan oleh tim teknis yang sudah berpengalaman dalam perancangan

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan dengan manajemen terstandar

Tabel 5.59 Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi terstandar untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan pada tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement

No	Tahap Proyek Konstruksi	Jalan Aspal	Saluran air limbah	Rumah tinggal	Pengambilan Kesimpulan Proyek dengan manajemen konstruksi terstandar
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan	1 s/d 2 bulan	1 s/d 2 bulan	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Melekat pada biaya umum DPA/ada anggaran khusus pengadaan	Ada anggaran khusus pengadaan yang melekat pada DPA di ULP/Unit Layanan Pengadaan	Ada anggaran khusus pengadaan	Ada anggaran khusus pengadaan
c.	Mutu	Memperoleh penyedia jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai standar pemerintah	Memperoleh penyedia jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan (Mutu sesuai dengan standar pemerintah)	Mutu sesuai standar pemerintah
d.	Mekanisme pengadaan	Pengadaan Langsung (dinilai mudah)	Lelang pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai sederhana oleh responden)	Pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai mudah)	Pengadaan Langsung dan Lelang pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai mudah hingga sederhana)
e.	Pihak terlibat	Dinas PUP/Pemerintah satu Dinas : 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa	1. Unit Layanan Pengadaan 2. Tim Pelaksana Kegiatan - Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) - Ketua (Kepala Bidang) - Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) - Pelaksana Teknis (Staff) - Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Penyedia jasa	Unit Layanan Pengadaan (Pemerintah satu Dinas) Tim Pelaksana Kegiatan 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Penyedia jasa	Unit Layanan Pengadaan (Pemerintah satu Dinas), Tim Pelaksana Kegiatan dari dinas terkait dan Penyedia jasa
f.	Uraian kegiatan	1. Mengadakan prakualifikasi kontrak 2. Free tender meeting 3. Menyusun daftar calon rekanan 4. Bill of quality (Jenis pekerjaan + volume) 5. Aanwijzing (penjelasan) 6. Menyiapkan dokumen lelang 7. Menyusun RAB pasti untuk evaluasi penawaran 8. Mengevaluasi setiap paket penawaran untuk direkomendasikan kepada Pimpro (PPK)	1. Mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE) 2. Pengumuman Pascakualifikasi 3. Download dokumen Pengadaan 4. Pemberian penjelasan 5. Upload dokumen Penawaran 6. Evaluasi penawaran 7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 8. Pembuktian kualifikasi 9. Upload berita acara Hasil Pelelangan 10. Penetapan pemenang 11. Pengumuman pemenang	Mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE) 1. Pengumuman Pascakualifikasi 2. Download dokumen Pengadaan 3. Pemberian penjelasan 4. Upload dokumen Penawaran 5. Evaluasi penawaran 6. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 7. Pembuktian kualifikasi 8. Upload berita acara Hasil Pelelangan 9. Penetapan pemenang 10. Pengumuman pemenang	1. Proyek jalan aspal : Mengadakan prakualifikasi kontrak, Free tender meeting, Menyusun daftar calon rekanan, Bill of quality (Jenis pekerjaan + volume), Aanwijzing (penjelasan), Menyiapkan dokumen lelang, Menyusun RAB pasti untuk evaluasi penawaran, Mengevaluasi setiap paket penawaran untuk direkomendasikan kepada Pimpro (PPK), Menyiapkan dokumen kontrak antara Pimpro (PPK) dengan Kontraktor 2. Proyek saluran air limbah dan rumah tinggal : Mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE), Pengumuman Pascakualifikasi, Download dokumen Pengadaan, Pemberian penjelasan, Upload dokumen Penawaran, Evaluasi penawaran, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Pembuktian kualifikasi, Upload berita acara Hasil Pelelangan, Penetapan pemenang, Pengumuman

		9. Menyiapkan dokumen kontrak antara Pimpro (PPK) dengan Kontraktor	12. Masa Sanggah hasil lelang 13. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa 14. Penandatanganan Kontrak	11. Masa Sanggah hasil lelang 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa 13. Penandatanganan Kontrak	pemenang, Masa Sanggah hasil lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Penandatanganan Kontrak
g.	Hasil	Terpilihnya Penyedia Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan Konstruksi	Terpilihnya Penyedia Jasa sesuai dengan kriteria SBU yang dibutuhkan	Terpilihnya Penyedia Jasa sesuai dengan kriteria SBU yang dibutuhkan	Terpilihnya Penyedia Jasa sesuai dengan kriteria SBU yang dibutuhkan
h.	Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi	Tidak berpartisipasi	Tidak berpartisipasi	Tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Pelaporan hasil pengadaan dilakukan oleh Tim Pengadaan (dinilai mudah)	Pelaporan tahap pelelangan disampaikan oleh ULP kepada SKPD terkait (dinilai rumit oleh responden)	Kontrak perjanjian antara penyedia jasa dan PPK dilakukan oleh panitia pengadaan di ULP (dinilai sederhana)	Pelaporan hasil pengadaan dilakukan oleh Tim Pengadaan//ULP (dinilai mudah, sederhana hingga rumit)
J.	Tempat	Dinas PUP Kabupaten Sleman	Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Dinas terkait dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)
k.	Sumber Pendanaan	APBD			APBD
l.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
m.	Kendala	Gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana/ Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	Gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana/ mengalami kemunduran	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan	Gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana/ mengalami kemunduran Terjadi konflik antar pemangku kepentingan Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan
n.	Kelebihan	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan	Mendapatkan penyedia jasa yang berkompeten dalam pekerjaan konstruksi sejenis	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan.	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan serta berkompeten dalam pekerjaan konstruksi sejenis

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan dengan manajemen terstandar

Tabel 5.60 Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi terstandar untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan pada tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

No	Tahap Proyek Konstruksi	Jalan Aspal	Saluran air limbah	Rumah tinggal	Pengambilan Kesimpulan Proyek dengan manajemen konstruksi terstandar
a.	Waktu	45 hari kalender, 2s/d 3 bulan	3 s/d 4 bulan	3 s/d 4 bulan	2s/d 4 bulan
b.	Biaya	Rp. 148.002.000,- Luas : (650mX3m) = 1.950m ² (ada anggaran khusus konstruksi)	Pemda = Rp.608.443.000 Pipa servis 1470m dengan rincian 147 SR, Realisasi penyambungan 140 bh (menggunakan biaya khusus konstruksi)	Ada anggaran khusus konstruksi Pemda = Rp.214.091.000 Tipe 70m ²	1. Proyek jalan aspal Rp. 148.002.000,-, Luas : (650mX3m) = 1.950m, (ada anggaran khusus konstruksi) 2. Proyek saluran air limbah Pemda = Rp.608.443.000, Pipa servis 1470m dengan rincian 147 SR, Realisasi penyambungan 140 bh, (menggunakan biaya khusus konstruksi) 3. Proyek rumah tinggal ada anggaran khusus konstruksi, Pemda = Rp.214.091.000, Tipe 70m ²
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis, Mutu sesuai dengan standar	Sesuai dengan standar Pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar Pemerintah

		pemerintah			
d.	Mekanisme pelaksanaan konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan tenaga kerja 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material / pengadaan bahan 4. Menyiapkan peralatan / machine / pengadaan alat 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pembersihan lahan b. Perataan tanah c. Penghamparan material bawah pondasi d. Penghamparan lapis aspal e. Pematatan jalan f. Finishing pematatan dan perataan jalan raya (dinilai sederhana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan tenaga kerja 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material 4. Menyiapkan peralatan / machine 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan 6. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi (dinilai rumit) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan tenaga kerja 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material 4. Menyiapkan peralatan / machine 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (dinilai sederhana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan tenaga kerja 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material 4. Menyiapkan peralatan / machine 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan 6. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi (dinilai sederhana hingga rumit)
e.	Pihak terlibat	<p>Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa 8. Koordinator Pengawas 9. Pengawas Lapangan 	<p>Tim Pelaksana Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa 8. Koordinator Pengawas 9. Pengawas Lapangan 10. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa) 11. Masyarakat penerima program 	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas)</p> <p>Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua (Kepala Bidang) 2. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 3. Pelaksana Teknis (Staff) 4. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 5. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 6. Penyedia jasa 7. Koordinator Pengawas Pengawas Lapangan 	<p>Tim Pelaksana Kegiatan (Penanggung Jawab Kegiatan/Kepala Dinas, Ketua Kepala Bidang, Koordinator Pelaksana /Kepala Seksi, Pelaksana Teknis/Staff, Pembantu Pelaksana Teknis/Staff, PPK /Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia jasa, Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan)</p> <p>Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa)</p> <p>Masyarakat penerima program</p>
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan start up

		peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan start up	5. Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan startup	peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan start up	
g.	Hasil	Konstruksi bangunan jalan	Konstruksi bangunan SR	Konstruksi bangunan Rumah	Konstruksi bangunan
h.	Partisipasi masyarakat	Dinilai tidak berpartisipasi 1. Merelakan tanaman milik pribadi yang harus ditebang tanpa kompensasi 2. Merelakan tanah pribadi untuk pelebaran jalan tanpa kompensasi	Merelakan pembongkaran dibagian rumah untuk pembangunan SR (berpartisipasi dengan prosentase rendah)	Tidak berpartisipasi	Tidak berpartisipasi hingga berpartisipasi dengan prosentase sedang
i.	Administrasi	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : 1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak 2. Pembayaran termyn I = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) 3. Pembayaran termyn II = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) (dinilai mudah)	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : 1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak 2. Pembayaran termyn I = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) 3. Pembayaran termyn II = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) (dinilai rumit)	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : 1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak 2. Pembayaran termyn I = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) 3. Pembayaran termyn II = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) (dinilai sederhana)	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : 1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak 2. Pembayaran termyn I = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) 3. Pembayaran termyn II = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) (dinilai mudah, sederhana hingga rumit)
J.	Tempat	Lokasi proyek	Lokasi proyek	Lokasi proyek	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis
l.	Pengadaan jasa	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	Sedikit	1. Ada beberapa rencana jaringan yang tidak bisa dikerjakan sehingga butuh titik baru (pekerjaan tambah kurang prosentasenya sedang)	Sedikit	Sedikit hingga sedang
n.	Keselamatan	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang/harus menggunakan	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang/ Harus menggunakan	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang/harus menggunakan
o.	Kendala	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis
p.	Kelebihan	Karena pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, maka pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis.	Pelaksanaan konstruksi cepat terselesaikan karena terikat oleh waktu penyelesaian proyek	Karena pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, maka pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis.	Karena pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, maka pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu, cepat dan sesuai dengan spesifikasi teknis.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan dengan manajemen terstandar

Tabel 5.61 Perbandingan pelaksanaan manajemen konstruksi terstandar untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) dan pengambilan kesimpulan pada tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan

No	Tahap Proyek Konstruksi	Jalan Aspal	Saluran air limbah	Rumah tinggal	Pengambilan Kesimpulan Proyek dengan manajemen konstruksi terstandar
a.	Waktu	Kurang dari 1 bulan	Kurang dari 1 bulan	Kurang dari 1 bulan	Kurang dari 1 bulan
b.	Biaya	Biaya sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Biaya sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan 2. PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan 3. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP. 4. Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 6. penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan 7. PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 8. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List). 9. Penyedia menyerahkan final report (dinilai mudah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan 2. PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan 3. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP. 4. Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 6. penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan 7. PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 8. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List). 9. Penyedia menyerahkan final report (dinilai sederhana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan 2. PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan 3. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP. 4. Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan 6. penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan 7. PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. 8. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List). 9. Penyedia menyerahkan final report (dinilai mudah hingga sederhana) 	
e.	Pihak terlibat	Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah 1 Dinas	Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas)	Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas	Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas Penyedia jasa

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 8. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 7. Penyedia jasa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 	
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan 3. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol 4. Mengkoordinir pelaksanaan operasional 5. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing 6. Mengarahkan dan memeriksa secara manual Memproses : garasi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan 2. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol 3. Mengkoordinir pelaksanaan operasional 4. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing 5. Mengarahkan dan memeriksa secara manual 6. Memproses : garansi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan 2. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol 3. Mengkoordinir pelaksanaan operasional 4. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing 5. Mengarahkan dan memeriksa secara manual 6. Memproses : garansi dan jaminan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan 2. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol 3. Mengkoordinir pelaksanaan operasional 4. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing 5. Mengarahkan dan memeriksa secara manual 6. Memproses : garansi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator
g.	Hasil	Bangunan jalan yang siap digunakan	Bangunan SR yang siap dioperasikan	Bangunan Rumah tinggal yang siap digunakan	Bangunan yang siap digunakan/ dioperasikan
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Tidak berpartisipasi	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi dengan prosentase rendah hingga tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai sederhana)	Pelaporan akhir pelaksanaan kegiatan oleh Penyedia Jasa (dinilai sederhana)	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai mudah)	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai mudah dan sederhana)
J.	Tempat	Kantor Dinas Terkait & lokasi proyek	Kantor Dinas Terkait dan lokasi proyek	Kantor Dinas Terkait	Kantor Dinas Terkait & lokasi proyek
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu rekanan dan SKPD terkait/Dinas PU	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU

2.16.2 Analisis Data Perbandingan dan pengambilan kesimpulan pada pelaksanaan proyek dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan pada tahap persiapan/perencanaan untuk proyek konstruksi terstandar sekitar 2 s/d 3 bulan.

2) Biaya

Ada biaya khusus perencanaan pada proyek konstruksi terstandar.

3) Mutu

Mutu perencanaan tahap persiapan/perencanaan untuk proyek konstruksi terstandar sesuai dengan standar Pemerintah.

4) Mekanisme Perencanaan

Mekanisme perencanaan untuk proyek rumah tinggal : survei awal lokasi dan Rancangan Kasar dari proyek yang direncanakan (dinilai sederhana). Untuk Proyek saluran air limbah : Penentuan skema dasar, Survei lokasi , Prediksi jumlah penduduk, perkembangan kota dan timbulnya air limbah domestik, Perencanaan fasilitas, Evaluasi, Penentuan rancangan induk Master plan , Studi kelayakan dan Perencanaan Sistem perpipaan (dinilai rumit).

5) Dasar usulan proyek

Dasar usulan proyek terstandar adalah investasi.

6) Pihak terlibat

Pihak yang terlibat dalam perencanaan proyek terstandar adalah Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas untuk proyek jalan dan rumah tinggal ditambah Pemerintah Kecamatan, warga masyarakat dan konsultan perencana untuk proyek saluran air limbah.

7) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses perencanaan pembangunan terstandar antara lain : Identifikasi gagasan proyek, Pengembangan gagasan, Evaluasi

kelayakan konsep, Penentuan konsep alternatif, Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan, menyusun perkiraan biaya dan menyusun organisasi pelaksanaan.

8) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek pembangunan terstandar adalah Pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu, Identifikasi batasan utama, TOR dan organizing, saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana, tahapan pekerjaan, Master coordinating scedule, Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana dan Cash flow (proyeksi arus dana).

9) Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan terstandar dinilai sedang oleh responden.

10) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perencanaan pembangunan terstandar dilakukan oleh tim perencana (dinilai mudah hingga rumit).

11) Keselamatan

Pada tahap perencanaan proyek yang menggunakan manajemen terstandar tidak menggunakan jaminan keselamatan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang terjadi pada pelaksanaan proyek terstandar terjadi konflik antar pemangku kepentingan dan SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek.

13) Kelebihan

Kelebihan yang ada pada proyek perencanaan terstandar adalah proses Perencanaan dilaksanakan oleh tim/tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

b. Perancangan Proyek Pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan pada tahap perancangan proyek pembangunan terstandar antara 2 s/d 4 bulan.

2) Biaya

Ada anggaran khusus perencanaan untuk proyek pembangunan terstandar.

3) Mutu

Mutu perancangan untuk proyek pembangunan terstandar sesuai dengan standar pemerintah.

4) Mekanisme Perancangan

Mekanisme perancangan untuk proyek pembangunan terstandar sebagai berikut : diadakan survei harga, sosialisasi program perencanaan kepada warga masyarakat penerima program, perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) serta diadakan evaluasi harga untuk produk konsultan Perencanaan oleh tim perencana dari SKPD terkait (dinilai mudah hingga sederhana).

5) Pihak terlibat

Pihak yang terlibat dalam perancangan proyek pembangunan adalah tim pelaksana kegiatan dan konsultan perencana.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses perancangan pembangunan proyek terstandar antara lain : membuat kriteria desain, membuat skematik desain, membuat estimasi biaya secara rinci, membuat desain detail, membuat spesifikasi teknis, Membuat daftar volume, membuat Rencana Anggaran Biaya, membuat syarat-syarat administrasi, membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan terstandar adalah kontrak untuk staf proyek dan kontraktor, Spesifikasi, masukan proses dan keluaran, Desain perhitungan bangunan, struktur,

utilitas dan fasilitas, Gambar bestek dan shop drawing, Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya, Pedoman administrasi dan keuangan, roses operasional dan standar.

8) Partisipasi masyarakat

Pada tahap perancangan proyek jalan terstandar, masyarakat berpartisipasi dengan prosentase rendah hingga sedang.

9) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap perancangan pembangunan terstandar dilakukan oleh tim perencana (dinilai rumit hingga mudah oleh responden).

10) Tempat

Tempat perancangan proyek pembangunan terstandar berada kantor Pemerintah dan kantor konsultan.

11) Sumber pendanaan

Sumber pendanaan pada tahap perancangan proyek pembangunan terstandar berasal dari APBD/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

12) Cara pencairan dana

Biaya perancangan untuk semua jenis proyek baik yang menggunakan sistem manajemen konstruksi tersetandar dicairkan setelah proses perancangan selesai.

13) Keselamatan

Jaminan keselamatan pada tahap perancangan untuk semua jenis proyek tersetandar tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana.

14) Kendala

Terjadinya konflik antar pemangku kepentingan dan SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek merupakan kendala pada tahap perancangan proyek terstandar.

15) Kelebihan

Kelebihan yang ada pada tahap perancangan proyek terstandar adalah proses perancangan dilakukan oleh tim teknis yang sudah berpengalaman dalam perancangan.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk tahap pelelangan proyek terstandar antara 1 s/d 2 bulan.

2) Biaya

Biaya yang digunakan untuk proses pengadaan pada proyek pembangunan terstandar melekat pada biaya umum Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA).

3) Mutu

Mutu pengadaan pada proyek pembangunan dengan metode konstruksi terstandar sesuai standar pemerintah, dengan rencana yaitu memperoleh penyedia jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

4) Mekanisme Pengadaan

Mekanisme pengadaan untuk proyek pembangunan jalan aspal terstandar menggunakan cara Pengadaan langsung oleh tim pengadaan dari dinas terkait (Dinas PU Kabupaten Sleman), dinilai mudah oleh responden.

Mekanisme pengadaan untuk proyek pembangunan (saluran air limbah dan rumah tinggal) terstandar menggunakan cara Lelang pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai sederhana pada proyek saluran air limbah dan dinilai mudah pada proyek pembangunan rumah tinggal oleh responden).

5) Pihak terlibat

Pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek pembangunan terstandar adalah Unit Layanan Pengadaan (Pemerintah satu Dinas), Tim Pelaksana Kegiatan dari dinas terkait dan Penyedia jasa.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan dalam proyek pembangunan jalan aspal, terstandar antara lain : mengadakan prakualifikasi kontrak, free tender meeting, menyusun daftar calon rekanan, bill of quality (Jenis pekerjaan + volume), aanwijzing (penjelasan), menyiapkan dokumen lelang, menyusun RAB pasti untuk evaluasi penawaran, mengevaluasi setiap paket

penawaran untuk direkomendasikan kepada Pimpro (PPK) dan menyiapkan dokumen kontrak antara Pimpro (PPK) dengan Kontraktor.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengadaan proyek pembangunan (saluran air limbah dan rumah tinggal) terstandar antara lain : mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE), pengumuman Pascakualifikasi, download dokumen Pengadaan, pemberian penjelasan, upload dokumen Penawaran, evaluasi penawaran, evaluasi Dokumen Kualifikasi, pembuktian kualifikasi, upload berita acara Hasil Pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa Sanggah hasil lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan Kontrak.

7) Hasil

Hasil dari proses pengadaan proyek pembangunan terstandar adalah terpilihnya Penyedia Jasa sesuai dengan kriteria SBU yang dibutuhkan.

8) Partisipasi masyarakat

Pada proses pengadaan proyek pembangunan terstandar masyarakat tidak berpartisipasi.

9) Administrasi

Pelaporan hasil kegiatan pada tahap pengadaan konstruksi bangunan jalan terstandar dilakukan oleh tim pengadaan (dinilai mudah oleh responden). Pelaporan hasil kegiatan pada tahap pengadaan konstruksi bangunan saluran air limbah dan rumah tinggal terstandar dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) kepada SKPD terkait (dinilai rumit untuk saluran air limbah dan sederhana untuk rumah tinggal, oleh responden).

10) Tempat

Tempat pengadaan proyek pembangunan terstandar berada di Dinas terkait dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP).

11) Jaminan Keselamatan

Pada tahap pengadaan proyek konstruksi terstandar tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang ada dalam tahap pengadaan proyek konstruksi pembangunan terstandar adalah Gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana/mengalami kemunduran, terjadi konflik antar pemangku kepentingan dan penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan.

13) Kelebihan

Kelebihan yang ada dalam tahap pengadaan proyek konstruksi pembangunan terstandar adalah diperolehnya Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan serta berkompeten dalam pekerjaan konstruksi sejenis.

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk tahap konstruksi proyek pembangunan antara 2s/d 4 bulan.

2) Biaya

Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan aspal dengan manajemen konstruksi terstandar adalah Rp. 148.002.000,-, Luas : (650mX3m) = 1.950m, (ada anggaran khusus konstruksi).

Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan saluran air limbah dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat adalah = Rp.608.443.000, Pipa servis 1470m dengan rincian 147 SR, Realisasi penyambungan 140 bh, (menggunakan biaya khusus konstruksi).

Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah tinggal dengan manajemen konstruksi terstandar adalah Pemda = Rp.214.091.000 dengan Tipe bangunan 70m².

3) Mutu

Mutu pekerjaan untuk pembangunan konstruksi terstandar dilaksanakan sesuai dengan standar Pemerintah yang dituangkan dalam spesifikasi teknis.

4) Mekanisme Pelaksanaan Konstruksi

Mekanisme pelaksanaan konstruksi untuk proyek pembangunan terstandar dengan mekanisme sebagai berikut : penyiapan tenaga kerja, menyiapkan dana financial, menyiapkan material, menyiapkan peralatan/machine, menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (dinilai sederhana hingga rumit).

5) Pihak terlibat

Pihak yang terlibat dalam tahap konstruksi proyek terstandar adalah Tim Pelaksana Kegiatan (Penanggung Jawab Kegiatan/Kepala Dinas, Ketua Kepala Bidang, Koordinator Pelaksana /Kepala Seksi, Pelaksana Teknis/Staff, Pembantu Pelaksana Teknis/Staff, PPK /Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia jasa, Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan) Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa) dan masyarakat penerima program.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi pembangunan pada proyek terstandar antara lain : menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi, menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek, pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja, pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi, penyelesaian konstruksi, pra operasional dan start up.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan dari tahap konstruksi pembangunan yang menggunakan manajemen konstruksi terstandar adalah konstruksi bangunan sesuai dengan spesifikasi teknis dan siap digunakan.

8) Partisipasi masyarakat

Tidak ada partisipasi masyarakat pada proses konstruksi proyek pembangunan jalan dan rumah tinggal terstandar. Masyarakat

berpartisipasi rendah pada proses pelaksanaan konstruksi pembangunan saluran air limbah.

9) Administrasi

Proses pencairan dana untuk semua sistem manajemen menggunakan termyn. Pencairan dana untuk proyek terstandar sebagai berikut : pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak, pembayaran termyn I = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) dan pembayaran termyn II = (50% x kontrak)-(50% x uang muka), dinilai mudah, sederhana hingga rumit oleh responden.

10) Tempat

Tempat pelaksanaan konstruksi untuk seluruh pekerjaan dengan sistem manajemen konstruksi terstandar adalah di lokasi proyek.

11) Pengadaan material

Dalam proses pengadaan material untuk manajemen proyek pembangunan terstandar sesuai dengan spesifikasi teknis/standar pemerintah.

12) Pengadaan jasa

Pengadaan jasa untuk proyek konstruksi pembangunan terstandar sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik.

13) Pekerjaan tambah kurang

Sedikit pekerjaan tambah kurang pada tahap konstruksi proyek pembangunan terstandar mempunyai prosentase sedikit hingga sedang.

14) Keselamatan

Jaminan keselamatan kerja harus menggunakan dan diwajibkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang sebagai syarat penawaran pekerjaan konstruksi terstandar.

15) Kendala

Kendala yang sering terjadi dalam proses konstruksi pembangunan yang menggunakan sistem manajemen konstruksi terstandar adalah material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis .

16) Kelebihan

Kelebihan pada proses konstruksi pembangunan terstandar adalah pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, maka pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu, cepat dan sesuai dengan spesifikasi teknis.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan dengan sistem manajemen konstruksi berbasis masyarakat

1) Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan terstandar kurang dari satu bulan.

2) Biaya

Biaya yang dibutuhkan dalam proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan terstandar adalah sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan.

3) Mutu

Mutu dari penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan terstandar sesuai dengan spesifikasi teknis/ mutu sesuai dengan spesifikasi teknis/standar Pemerintah.

4) Mekanisme Penyerahan hasil

Mekanisme penyerahan hasil pekerjaan untuk proyek pembangunan terstandar sebagai berikut : penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan, PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan, PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP, pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak, Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan, penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan, Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan

dalam Daftar Hitam (Black List), Penyedia menyerahkan final report (dinilai mudah hingga sederhana).

5) Pihak terlibat

Pihak yang terlibat dalam Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan terstandar adalah Tim pelaksana kegiatan dari Dinas PUP yang terdiri dari : penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), ketua (Kepala Bidang), koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), pelaksana Teknis (Staff), pembantu Pelaksana Teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), penyedia jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta penyedia jasa.

6) Uraian kegiatan

Kegiatan yang dilakukan pada proses penyerahan hasil pekerjaan proyek konstruksi pembangunan terstandar adalah : menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan, mengkoordinir, mengarahkan mengontrol, mengkoordinir pelaksanaan operasional, mengarahkan dan memeriksa as built drawing, mengarahkan dan memeriksa secara manual, memproses : garasi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator.

7) Hasil

Produk yang dihasilkan dari proses penyerahan hasil pekerjaan proyek dengan manajemen konstruksi terstandar adalah bangunan yang siap digunakan/ dioperasikan.

8) Partisipasi masyarakat

Masyarakat berpartisipasi rendah hingga tidak berpartisipasi pada tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek terstandar.

9) Administrasi

Administrasi pada proyek pembangunan dengan metoda konstruksi terstandar dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai mudah hingga sederhana oleh responden).

10) Tempat

Tempat penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan dengan metoda konstruksi terstandar berada di Kantor Dinas Terkait & lokasi proyek.

11) Keselamatan

Pada tahap penyerahan hasil pekerjaan untuk proyek pembangunan yang menggunakan manajemen konstruksi terstandar tidak menggunakan jaminan keselamatan karena tidak ada alokasi dana.

12) Kendala

Kendala yang ada dalam tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan terstandar yaitu pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai.

13) Kelebihan

Kelebihan dari penyerahan hasil pekerjaan proyek terstandar adalah penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU.



5.17 Tabel perbandingan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal)

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat

Tabel 5.62 perbandingan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) pada tahap Perencanaan/Persiapan

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat	Manajemen Konstruksi Terstandar
a.	Waktu	2 s/d 3 bulan	2 s/d 3 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Ada anggaran khusus perencanaan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perencanaan	Sosialisasi program, penyiapan TFL, pemilihan dan penetapan lokasi, pembentukan dan penetapan KSM (dinilai sederhana)	1. Proyek jalan dan rumah tinggal : Survei awal lokasi dan Rancangan Kasar dari proyek yang direncanakan (dinilai sederhana) 2. Proyek saluran air limbah : Penentuan skema dasar, Survei lokasi , Prediksi jumlah penduduk, perkembangan kota dan timbulnya air limbah domestik, Perencanaan fasilitas, Evaluasi, Penentuan rancangan induk Master plan , Studi kelayakan dan Perencanaan Sistem perpipaan (dinilai rumit)
e.	Dasar usulan proyek	Upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi (jalan & rumah tinggal)	Investasi

		Surat minat/Permohonan bantuan penanganan air limbah dari masyarakat (saluran air limbah)	
f.	Pihak terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah (Pemprov, Pemkab, Camat, Lurah, Fasilitator, Tenaga Sanitari/Puskesmas /Satker PLPP) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMC) 3. Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak) 4. Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM 	Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas untuk proyek jalan dan rumah tinggal ditambah Pemerintah Kecamatan, warga masyarakat dan konsultan perencana untuk proyek saluran air limbah
g.	Uraian kegiatan	<p>Jalan & rumah tinggal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten 2. Lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten 3. Penetapan lokasi 4. Pengadaan dan pelatihan pratugas Konsultan Kabupaten/kota 5. Pengadaan dan Pelatihan Pratugas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF <p>Saluran air limbah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi 2. Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL (penyiapan, seleksi dan pelatihan) 3. Pemilihan Lokasi dengan dua tahap seleksi (daftar panjang/longlist dan daftar pendek/shortlist) 	Identifikasi gagasan proyek, Pengembangan gagasan, Evaluasi kelayakan konsep, Penentuan konsep alternatif, Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan, Menyusun perkiraan biaya, Menyusun organisasi pelaksanaan

		<p>4. Pemicuan Masyarakat sosialisasi tentang perubahan perilaku pola hidup bersih dan sehat</p> <p>5. Penetapan Lokasi</p> <p>6. Pembentukan dan Penetapan KSM</p>	
h.	Hasil	<p>Jalan dan rumah tinggal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek. Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut. 2. Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut. 3. Daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan. 4. Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi. <p>Saluran air limbah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Fasilitator telah siap 2. Lokasi proyek telah ditetapkan 3. Masyarakat telah siap dengan rencana program yang akan dilakukan 4. Terbentuknya KSM 	<p>Pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu, Identifikasi batasan utama, TOR dan organizing, Saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana, Tahapan pekerjaan, Master, coordinating scedule, Perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana, Cash flow (Proyeksi Arus Dana)</p>
i.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang
j.	Administrasi	Pelaporan tahap persiapan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk proyek jalan dan rumah tinggal,	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Tim Perencana (dinilai mudah hingga rumit)

		Pelaporan kegiatan dilakukan oleh TFL untuk proyek saluran air limbah(dinilai sederhana)	
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	SDM yang kurang memahami pentingnya pelaksanaan proyek dan Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan dan SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
m.	Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan publik yang diambil lebih efektif, memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat. Proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan. Warga masyarakat lebih tahu tentang keadaan lapangan yang akan dibangun 	Perencanaan dilaksanakan oleh tim/tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya

b. Perancangan Proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat

Tabel 5.63 perbandingan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) pada tahap Perancangan

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat	Manajemen Konstruksi Terstandar
a.	Waktu	1 s/d 3 bulan	2 s/d 4 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Ada anggaran khusus perancangan
c.	Mutu	Sesuai dengan standar Pemerintah	Sesuai dengan standar Pemerintah
d.	Mekanisme perancangan	<ol style="list-style-type: none"> Untuk proyek jalan dan rumah tinggal : Penyusunan RPP, Sinkronisasi RPP(dinilai sederhana) Untuk proyek saluran air limbah : Persiapan 	<ol style="list-style-type: none"> Diadakan survei harga Sosialisasi program perencanaan kepada warga masyarakat penerima program

		<p>Pelaksanaan Penyusunan RKM, Pendanaan dan tahap pencairan dana, Verifikasi RKM, Perjanjian kerja KSM dengan SKPD (dinilai rumit)</p>	<p>3. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak) 4. Diadakan evaluasi harga untuk produk konsultan Perencanaan oleh tim perencana dari SKPD terkait (dinilai mudah hingga sederhana)</p>
e.	Pihak terlibat	<p>1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) 2. Konsultan (NMC, DMC) 3. Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan/KSM, PP/Panitia Pembangunan, Tokoh masyarakat dan masyarakat penerima program/pengguna).</p>	<p>Tim Pelaksana Kegiatan dan konsultan perencana</p>
f.	Uraian kegiatan	<p>1. Pada proyek jalan dan rumah tinggal berupa Penyusunan RPP dengan kegiatan: Orientasi Sosial dan Wilayah, Sosialisasi tingkat desa, Sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW), Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Pembentukan Tim Inti Perencana (TIP), Pelatihan BKM-TPK-TIP, Pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus, Penyiapan Peta Dasar, Tinjauan/Review Dokumen Pembangunan, Pemetaan Swadaya, Rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya, Rembug Perumusan Visi dan Misi Desa, Rembug pemecahan masalah, Rembug penyusunan rencana tata ruang desa, Rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana,</p>	<p>Membuat kriteria desain, Membuat skematik desain, Membuat estimasi biaya secara rinci, Membuat desain detail, Membuat spesifikasi teknis, Membuat daftar volume, Membuat Rencana Anggaran Biaya, Membuat syarat-syarat administrasi, Membuat peraturan-peraturan umum yang berlaku</p>

		<p>Sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah), Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1, Konsultasi publik, Verifikasi program dan Rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman</p> <p>2. Pada proyek pembangunan saluran air limbah terdiri atas kegiatan : Pendampingan TFL Teknis (Pemilihan teknologi, Pengukuran , Gambar/DED, RAB dan Spesifikasi Teknis), Pendampingan TFL Sosial (Klasifikasi kesejahteraan, Persiapan tenaga kerja, Pembukaan rekening bersama dan Verifikasi RKM)</p>	
g.	Hasil	<p>1. Tersusunya Dokumen RPP untuk proyek jalan dan rumah tinggal</p> <p>2. Tersusunya Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk proyek saluran air limbah</p>	Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor, Spesifikasi, masukan proses dan keluaran, Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas, Gambar bestek dan shop drawing, Jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya, Pedoman administrasi dan keuangan, roses operasional dan standar
h.	Partisipasi masyarakat	<p>1. Berpartisipasi dengan prosentase sedang pada proyek jalan aspal</p> <p>2. Berpartisipasi penuh dalam proyek saluran air limbah dan rumah tinggal</p>	Berpartisipasi dengan prosentase rendah hingga sedang
i.	Administrasi	Untuk proyek jalan dan rumah tinggal Pelaporan Dokumen RPP dilakukan oleh TIP dan BKM (dinilai sederhana)	Pelaporan pada proses perancangan dilakukan oleh Tim Perencana/ Konsultan Perencana (dinilai rumit hingga mudah)

		Untuk proyek saluran air limbah Pelaporan hasil pekerjaan dilakukan oleh TFL dan KSM (dinilai sederhana)	
J.	Tempat	Kantor Pemerintah Desa(untuk proyek jalan dan saluran air limbah) Kantor PEMDA/DPUP dan Kantor KSM (untuk proyek rumah tinggal)	Kantor Pemerintah dan kantor konsultan
k.	Sumber Pendanaan	World Bank (jalan dan rumah tinggal) Menggunakan biaya Pemerintah dan Masyarakat (saluran air limbah)	APBD
l.	Cara Pencairan	Setelah dokumen perancangan selesai	Setelah dokumen perancangan selesai
m.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
n.	Kendala	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan dan SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
o.	Kelebihan	Masyarakat berperan aktif dalam proses perancangan. Perancangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFL memberikan kepuasan tersendiri bagi KP/Kelompok Pemukiman dan menghasilkan desain yang benar-benar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.	Perancangan dilakukan oleh tim teknis yang sudah berpengalaman dalam perancangan

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat

Tabel 5.64 perbandingan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) pada tahap Pengadaan/Pelelangan/ Procurement

No	Tahap Proyek Konstruksi	Proyek Konstruksi Berbasis Masyarakat	Proyek Konstruksi terstandar
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan	1 s/d 2 bulan
b.	Biaya	Menggunakan dana BOP pada proyek BDL/ada anggaran khusus pengadaan (proyek jalan) Tidak ada biaya pengadaan (proyek saluran air limbah dan rumah tinggal)	Ada anggaran khusus pengadaan
c.	Mutu	Memperoleh penyedia/suplier barang dan jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Mutu sesuai dengan standar pemerintah untuk proyek jalan dan rumah tinggal, mutu lebih buruk dari standar pemerintah untuk proyek saluran air limbah	Mutu sesuai standar pemerintah
d.	Mekanisme pengadaan	Pengadaan Barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung oleh masyarakat, Pengadaan material/bahan dan alat dengan cara pelelangan umum (dinilai mudah hingga sederhana)	Pengadaan Langsung dan Lelang pemilihan Langsung melalui ULP (dinilai mudah hingga sederhana)
e.	Pihak terlibat	1. Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, Fasilitator) 2. Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM/KSM, Masyarakat penerima program) 3. Penyedia Barang/Suplier	Unit Layanan Pengadaan (Pemerintah satu Dinas), Tim Pelaksana Kegiatan dari dinas terkait dan Penyedia jasa
f.	Uraian	Untuk proyek jalan dan rumah tinggal :	1. Proyek jalan aspal : Mengadakan prakualifikasi

kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Pengadaan 2. Persiapan Tim Pengadaan 3. Pelelangan Umum <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dokumen lelang/pengadaan - Melaksanakan pengumuman secara terbuka - Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang - Menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta - Penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan - Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang - Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang. 4. Lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung <ul style="list-style-type: none"> - Survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan. - Menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rebug warga. - Membuat surat undangan untuk memasukkan penawaran. - Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya. - Penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborongan. 	<p>kontrak, Free tender meeting, Menyusun daftar calon rekanan, Bill of quality (Jenis pekerjaan + volume), Aanwijzing (penjelasan), Menyiapkan dokumen lelang, Menyusun RAB pasti untuk evaluasi penawaran, Mengevaluasi setiap paket penawaran untuk direkomendasikan kepada Pimpro (PPK), Menyiapkan dokumen kontrak antara Pimpro (PPK) dengan Kontraktor</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Proyek saluran air limbah dan rumah tinggal : <ul style="list-style-type: none"> Mengadakan seleksi Penyedia barang dan jasa (Urutan sesuai dengan ULP/LPSE), Pengumuman Pascakualifikasi, Download dokumen Pengadaan, Pemberian penjelasan, Upload dokumen Penawaran, Evaluasi penawaran, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Pembuktian kualifikasi, Upload berita acara Hasil Pelelangan, Penetapan pemenang, Pengumuman pemenang, Masa Sanggah hasil lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa, Penandatanganan Kontrak
----------	--	--

		Untuk proyek saluran air limbah : 1. Perjanjian kerja KSM dengan SKPD 2. Kontrak perjanjian antara KSM dengan Penyedia bahan bangunan /suplier bahan bangunan dan tenaga ahli	
g.	Hasil	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.	Terpilihnya Penyedia Jasa sesuai dengan kriteria SBU yang dibutuhkan
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase sedang hingga penuh	Tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh TPK/PP/KSM (dinilai sederhana)	Pelaporan hasil pengadaan dilakukan oleh Tim Pengadaan//ULP (dinilai mudah, sederhana hingga rumit)
J.	Tempat	Kantor Pemda/DPUP dan Kantor KSM/TPK/PP	Dinas terkait dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP)
k.	Sumber Pendanaan	World Bank/APBD	APBD
l.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
m.	Kendala	1. Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan 2. Bahan yang disediakan suplier tidak sesuai dengan sampel yang diberikan 3. Kurang tersedianya tenaga ahli pelaksana pekerjaan karena waktu proyek hampir bersamaan. 4. Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek	Gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana/mengalami kemunduran Terjadi konflik antar pemangku kepentingan Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan

n.	Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena jalan dibangun untuk kepentingan bersama warga kampung. 2. Suplier yang ditunjuk oleh masyarakat memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar karena berada tidak jauh dari lokasi proyek 	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan serta berkompeten dalam pekerjaan konstruksi sejenis
----	-----------	---	--

d. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat

Tabel 5.65 perbandingan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) pada tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

No	Tahap Proyek Konstruksi	Proyek Konstruksi Berbasis Masyarakat	Proyek Konstruksi terstandar
a.	Waktu	2s/d 4 bulan	2s/d 4 bulan
b.	Biaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek jalan : Rekompak BDL : Rp. 112.987.000,-, Swadaya : Rp. 500.000,-, Panjang jalan 280,5m1, lebar 4m, Luas = 1122m², Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat) 2. Proyek saluran air limbah : Pemda = Rp. 446.026.670, Luas lahan 200m², kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 6' = 414m1, Pipa PVC D 4' = 1071m1, pipa PVC D 2' = 58m1 Swadaya masyarakat = Rp. 14.281.000, (menggunakan biaya konstruksi dari pemerintah dan biaya swadaya masyarakat) 3. Proyek rumah tinggal : ada anggaran khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek jalan aspal Rp. 148.002.000,-, Luas : (650mX3m) = 1.950m, (ada anggaran khusus konstruksi) 2. Proyek saluran air limbah Pemda = Rp.608.443.000, Pipa servis 1470m dengan rincian 147 SR, Realisasi penyambungan 140 bh, (menggunakan biaya khusus konstruksi) 3. Proyek rumah tinggal ada anggaran khusus konstruksi, Pemda = Rp.214.091.000, Tipe 70m2

		konstruksi, Rekompak = Rp. 30.000.000 + swadaya masyarakat sesuai kemampuan, Type 36	
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar Pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan konstruksi	<p>Proyek jalan :</p> <p>Pembentukan Panitia Pembangunan, Pelatihan penyusunan DPTL & DED, manajemen konstruksi, administrasi keuangan, Pencairan dana, Kontrak masyarakat, Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR</p> <p>Proyek saluran air limbah :</p> <p>Pengadaan material, Pengadaan tukang/tenaga ahli, Pelaksanaan konstruksi</p> <p>Proyek rumah tinggal :</p> <p>Penyiapan SDM, Pengadaan barang dan Jasa, Metode pelaksanaan konstruksi, Pengendalian waktu, biaya & kualitas/mutu, Perubahan kontrak (CCO), Supervisi, monitoring & evaluasi, Penyiapan tenaga kerja, Menyiapkan dana financial, Menyiapkan material, Menyiapkan peralatan / machine, Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan tenaga kerja 2. Menyiapkan dana financial 3. Menyiapkan material 4. Menyiapkan peralatan / machine 5. Menyiapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan 6. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi (dinilai sederhana hingga rumit)
e.	Pihak terlibat	Pemerintah ((Dinas, Kecamatan , Desa, Fasilitator), Konsultan NMC, DMC, Masyarakat (BKM/TPK, TIP, PP/KP dan Masyarakat penerima program) dan Suplier dan Jasa Pemborong/tenaga	Tim Pelaksana Kegiatan (Penanggung Jawab Kegiatan/Kepala Dinas, Ketua Kepala Bidang, Koordinator Pelaksana /Kepala Seksi, Pelaksana Teknis/Staff, Pembantu Pelaksana Teknis/Staff, PPK /Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia jasa,

			Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan) Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa) Masyarakat penerima program
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan aspal : Pembentukan Panitia Pembangunan, Survei Teknis dan Harga Satuan, Pelatihan/coaching penyusunan DTPL dan DED, Penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL), termasuk di dalamnya penyiapan dokumen kajian dampak Sosial dan Lingkungan, Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi, Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan, Proses Pencairan BDL, Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing titik kegiatan, Pelaksanaan kegiatan fisik, Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR 2. Saluran air limbah : Penjelasan teknis konstruksi, Pelaksanaan konstruksi dengan tahap (Rembug warga, Survei pemetaan ulang, Pembersihan dan penyiapan lahan IPAL, Penyiapan peralatan K3, sign board, turap pengaman galian, Penyiapan direksi keet, gudang, area kerja, Pengadaan dan pembelian barang oleh panitia pengadaan, Pembagian grup dan area kerja, Pelaksanaan pekerjaan) , Monitoring dan evaluasi 3. Rumah tinggal : Pembentukan KP/Kelompok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rincian rekayasa desain untuk kegiatan pengadaan material dan konstruksi 2. Menyusun anggaran definitif dan jadwal induk proyek 3. Pengadaan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi <p>Penyelesaian konstruksi, pra operasional dan start up</p>

		Pemukiman, Penyusunan Rencana Tapak, Menentukan Desain Bangunan Huntap, Survei Teknis dan Harga, Pelatihan/coaching penyusunan DTPP dan DED, Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP), Pengajuan, pencairan dan penyaluran BDR, Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi, Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan, Proses Pencairan BDR, Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing KP, Pelaksanaan kegiatan fisik	
g.	Hasil	Konstruksi bangunan jalan, Konstruksi bangunan IPAL dan SR dan Konstruksi bangunan rumah	Konstruksi bangunan
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi sedang hingga penuh	Tidak berpartisipasi hingga berpartisipasi dengan prosentase sedang
i.	Administrasi	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn dan dinilai sederhana	Pencairan dana proyek dengan sistem termyn : 1. Pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak 2. Pembayaran termyn I = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) 3. Pembayaran termyn II = (50% x kontrak)-(50% x uang muka) (dinilai mudah, sederhana hingga rumit)
J.	Tempat	Lokasi proyek	Lokasi proyek
k.	Pengadaan material	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis
l.	Pengadaan	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan

	jasa	konstruksi dengan baik	konstruksi dengan baik
m.	Pekerjaan tambah kurang	Prosentasenya sedikit hingga Sedang	Sedikit hingga sedang
n.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Penyedia jasa harus menerapkan K3 konstruksi sebagai syarat lelang/harus menggunakan
o.	Kendala	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis
p.	Kelebihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerukunan warga masyarakat terlihat jelas pada proses konstruksi, dalam bentuk gotong royong 2. Dana yang tersedia biasanya tersisa dan bisa digunakan untuk pembangunan jaringan SR tambahan 3. Masyarakat faham kerjasama dalam kegiatan berkelompok 4. Masyarakat faham membangun rumah dengan struktur tahan gempa 5. Masyarakat sedikit banyak mengerti tata cara pengadaan barang dan membukukan belanja kelompok 6. Masyarakat faham akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat pembangunan rumah dari segi lingkungan maupun sosial 7. Masyarakat faham tentang tata cara merawat dan mengembangkan rumah kedepan 	Karena pembangunan dilaksanakan oleh penyedia jasa yang profesional di bidangnya, maka pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu, cepat dan sesuai dengan spesifikasi teknis.

	8. Hasil bangunan lebih baik yang dilakukan langsung oleh masyarakat daripada yang dibangun oleh pemborong Volume yang dibangun lebih dari volume perencanaan.	
--	---	--

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan dengan manajemen berbasis masyarakat

Tabel 5.66 perbandingan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) pada tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan

No	Tahap Proyek Konstruksi	Proyek Konstruksi Berbasis Masyarakat	Proyek Konstruksi terstandar
a.	Waktu	1 s/d 2 bulan	Kurang dari 1 bulan
b.	Biaya	Menggunakan biaya dari masyarakat	Ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan
c.	Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis/ Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d.	Mekanisme pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. proyek jalan : Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES, Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) dinilai sederhana 2. Proyek saluran air limbah : Dilaksanakan PHO dengan tujuan mengecek kesesuaian bangunan dan kelayakan operasional bangunan, Pelaksanaan comisioning Test bangunan ipal, Pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat dinilai sederhana 3. Proyek rumah tinggal : Pelaksanaan PHO, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan 2. PPK menugaskan PPHP (Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) untuk menilai hasil pekerjaan 3. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah pekerjaan diterima oleh PPHP. 4. Pembayaran sebesar 95% (dari nilai kontrak/SPK, dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak. 5. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama

		Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat dan Pemeliharaan bangunan dilakukan oleh masyarakat (dinilai mudah)	<p>masa pemeliharaan</p> <p>6. penyerahan akhir pekerjaan setelah habis masa pemeliharaan</p> <p>7. PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.</p> <p>8. Penyedia yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List).</p> <p>9. Penyedia menyerahkan final report (dinilai mudah hingga sederhana)</p>
e.	Pihak terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat (TPK, BKM/KSM, PP/KP, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat penerima program) 2. Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator) 	<p>Tim Pelaksana Kegiatan/Pemerintah satu Dinas</p> <p>Penyedia jasa</p>
f.	Uraian kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek jalan : Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES, Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian) dan Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan 2. Proyek saluran air limbah : Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan (comissioning uji kebocoran IPAL), Rembug Warga, Serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan hasil proyek kepada KSM untuk difungsikan., Pengumpulan dan penyusunan dokumen pelaksanaan, Penyerahan operasi dan pemeliharaan kepada masyarakat, Pengoperasian organisasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan 2. Mengkoordinir, mengarahkan mengontrol 3. Mengkoordinir pelaksanaan operasional 4. Mengarahkan dan memeriksa as built drawing 5. Mengarahkan dan memeriksa secara manual 6. Memproses : garansi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator

		<p>pengelolaan dan jaringan SR dan IPAL, Penyerahan laporan akhir kegiatan (Laporan teknik, laporan keuangan dan laporan logistik)</p> <p>3. Proyek Rumah Tinggal : Bersifat berupa peresmian dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan dari KP ke Desa dilanjutkan Desa menyerahkan kembali hasil, pembangunan untuk difungsikan oleh K, Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan</p>	
g.	Hasil	Bangunan siap digunakan	Bangunan yang siap digunakan/ dioperasikan
h.	Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase rendah hingga tidak berpartisipasi
i.	Administrasi	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh TPK/KSM/BKM/KP dengan bantuan fasilitator (dinilai mudah hingga sederhana)	Pelaporan hasil akhir pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa (dinilai mudah dan sederhana)
J.	Tempat	Lokasi proyek konstruks, kantor Dinas, Kantor Desa dan kantor operasional TPK	Kantor Dinas Terkait & lokasi proyek
k.	Keselamatan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
l.	Kendala	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai
m.	Kelebihan	Masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan	Penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU

5.18 Hasil perbandingan antara manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat untuk semua jenis proyek (Pembangunan jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal)

Perbandingan dari pelaksanaan proyek dengan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat

- 1) Waktu yang dibutuhkan mulai dari tahap perencanaan hingga penyerahan hasil pekerjaan hampir sama.
- 2) Biaya dan sumber pendanaan yang digunakan pada proyek terstandar murni dari anggaran Pemerintah sedangkan proyek berbasis masyarakat berasal dari Pemerintah dan dana swadaya masyarakat.
- 3) Mekanisme perencanaan, perancangan, pengadaan, pelaksanaan konstruksi dan penyerahan hasil pekerjaan dinilai mudah, sederhana dan rumit tergantung pada jenis proyek.
- 4) Dasar usulan proyek terstandar adalah investasi Pemerintah sedangkan proyek berbasis masyarakat adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak erupsi merapi serta Surat minat/Permohonan bantuan penanganan air limbah dari masyarakat.
- 5) Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek berbasis masyarakat memiliki kegiatan yang lebih banyak dan kompleks.
- 6) Hasil kegiatan untuk kedua jenis manajemen sesuai dengan standar Pemerintah dan memenuhi target yang diharapkan.
- 7) Masyarakat tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek terstandar dan berpartisipasi penuh dalam proyek berbasis masyarakat.
- 8) Administrasi pada pelaksanaan proyek untuk kedua sistem manajemen mulai dari mudah, sederhana hingga rumit sesuai dengan tahapan masing-masing proyek.

- 9) Tempat pelaksanaan proyek berada pada kantor Pemerintah (Dinas terkait, Kecamatan, Desa), lokasi proyek, kantor konsultan dan kantor kelompok masyarakat.
- 10) Jaminan keselamatan untuk proyek terstandar harus menggunakan dan dijadikan jaminan pada saat penawaran pekerjaan, sedangkan pada pelaksanaan proyek berbasis masyarakat tidak menggunakan jaminan keselamatan karena tidak ada alokasi dana.
- 11) Pencairan dana untuk kedua sistem manajemen menggunakan termin.
- 12) Pengadaan material dan pengadaan jasa untuk kedua jenis manajemen proyek sesuai dengan standar pemerintah.
- 13) Terdapat beberapa pekerjaan tambah kurang untuk kedua jenis pekerjaan, pada proyek konstruksi terstandar prosentase pekerjaan tambah kurang kecil sedangkan pada proyek berbasis masyarakat cenderung berupa penambahan item pekerjaan karena adanya dana sisa yang dikelola dari anggaran proyek.
- 14) Kendala yang sering muncul pada proyek terstandar dan proyek berbasis masyarakat antara lain : terjadi konflik antar pemangku kepentingan, SDM yang kurang memahami pentingnya pelaksanaan proyek, gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana, penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan, spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek, material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai, kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis, pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi, pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi belum selesai, pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai, tidak menggunakan jaminan keselamatan kerja khususnya pada proyek konstruksi berbasis masyarakat.

15) Kelebihan yang terjadi bila pelaksanaan proyek menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat antara lain : keputusan publik yang diambil lebih efektif, memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat, proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan, masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan proyek, masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil proyek, masyarakat mengetahui keadaan lingkungan proyek sehingga desain bangunan sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat puas, dana konstruksi bersisa dan digunakan untuk membangun item pekerjaan lain.



5.19 Pembahasan pelaksanaan manajemen konstruksi terstandar dengan landasan teori (Proyek Pembangunan Jalan)

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap perencanaan proyek dilakukan studi kelayakan untuk meyakinkan bahwa proyek tersebut layak dilakukan atau tidak. Dalam proyek pembangunan jalan terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman telah dilaksanakan studi kelayakan proyek dengan melakukan survei awal lokasi dan membuat rancangan kasar dari proyek yang akan dilaksanakan. Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perencanaan proyek adalah konsultan Manajemen Konstruksi/MK dibantu oleh Konsultan Perencana. Dalam proyek pembangunan jalan terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat dalam proses perencanaan adalah Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas PU yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staff), Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Produk/hasil perencanaan yang dihasilkan pada proyek konstruksi bangunan jalan terstandar sesuai dengan teori, dengan rincian hasil sebagai berikut : pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu, identifikasi batasan utama, TOR dan organizing, saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana, tahapan pekerjaan, master, coordinating scedule, perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana dan Cash flow (Proyeksi Arus Dana).

b. Perancangan Proyek Pembangunan jalan terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap perancangan bertujuan penjelasan proyek konstruksi dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi dan taksiran biaya agar mendapat persetujuan pemilik proyek dan pihak – pihak yang terkait dalam proyek tersebut. Rancangan estimasi biaya secara rinci, adanya desain akhir yang merupakan hasil gambar detail, spesifikasi, daftar volume, RAB, syarat – syarat administrasi, bahkan peraturan -peraturan umum yang berlaku. Dalam proyek pembangunan jalan terstandar yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan perancangan proyek yang lebih detail, mulai dari survei harga, pembuatan (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak).

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perancangan adalah konsultan perencana, konsultan MK, konsultan rekayasa nilai dan atau konsultan quantity surveyor. Dalam proyek pembangunan jalan terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat dalam proses perancangan adalah tim pelaksana dan tim perencana. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek konstruksi bangunan jalan terstandar sesuai dengan teori, dengan rincian hasil sebagai berikut : kontrak untuk staf proyek dan kontraktor, spesifikasi, masukan proses dan keluaran, Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas, gambar bestek dan shopdrawing, jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya, pedoman administrasi dan keuangan serta proses operasional dan standar.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap pengadaan bertujuan menunjuk kontraktor atau sejumlah kontraktor sebagai pelaksana yang akan melaksanakan proyek konstruksi, pengadaan material dan peralatan. Dalam proyek pembangunan jalan terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan proses pengadaan yang untuk menetapkan penyedia jasa yang akan melaksanakan kegiatan konstruksi.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perancangan adalah pemilik, pelaksana jasa konstruksi (kontraktor) dan konsultan MK. Dalam proyek pembangunan jalan terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak Panitia Pengadaan pada Dinas PU, Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staf), Pembantu Pelaksana Teknis (Staf), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) serta Penyedia Jasa. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap pengadaan proyek

konstruksi bangunan jalan terstandar sesuai dengan teori yaitu terpilihnya penyedia jasa sesuai dengan kebutuhan.

d. Pelaksanaan kegiatan konstruksi Proyek Pembangunan Jalan terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap konstruksi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang telah direncanakan sesuai dengan perancangan, SPK dan kontrak. Dalam proyek pembangunan jalan terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan proses konstruksi bertujuan untuk merealisasikan bangunan proyek sesuai dengan dokumen perancangan.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam tahap konstruksi konsultan pengawas, konsultasi MK, kontraktor, sub kontraktor, supplier, dan instansi terkait. Dalam proyek pembangunan jalan terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staf), Pembantu Pelaksana Teknis (Staf), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penyedia Jasa, Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap konstruksi proyek bangunan jalan terstandar sesuai dengan teori yaitu terbangunnya bangunan konstruksi jalan sesuai dengan dokumen perancangan.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan bertujuan untuk menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan. Dalam proyek pembangunan jalan terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan proses pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan bertujuan untuk Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan, mengkoordinir, mengarahkan mengontrol, mengkoordinir pelaksanaan operasional, mengarahkan dan memeriksa as built drawing,

mengarahkan dan memeriksa secara manual dan Memproses : garasi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator .

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan konsultan pengawas, konsultasi MK, kontraktor, sub kontraktor, supplier, dan instansi terkait. Dalam proyek pembangunan jalan terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staf), Pembantu Pelaksana Teknis (Staf), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penyedia Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek bangunan jalan bangunan konstruksi yang telah selesai dibangun dan siap digunakan.

5.20 Pembahasan pelaksanaan manajemen konstruksi terstandar dengan landasan teori (Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah)

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap perencanaan proyek dilakukan studi kelayakan untuk meyakinkan bahwa proyek tersebut layak dilakukan atau tidak. Dalam proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman dibantu oleh Konsultan Perencana telah dilaksanakan studi kelayakan proyek dan kegiatan lain diantaranya : Penentuan skema dasar, Survei lokasi, Prediksi jumlah penduduk, perkembangan kota dan timbulnya air limbah domestik, Perencanaan fasilitas, Evaluasi, Penentuan rancangan induk Master plan, Studi kelayakan dan Perencanaan Sistem perpipaan.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perencanaan proyek adalah konsultan Manajemen Konstruksi/MK dibantu oleh Konsultan Perencana. Dalam proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat dalam proses

perencanaan adalah pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL), warga masyarakat dan konsultan perencana.

Produk/hasil perencanaan yang dihasilkan pada proyek konstruksi bangunan saluran air limbah terstandar sesuai dengan teori, dengan rincian hasil sebagai berikut : pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu, identifikasi batasan utama, TOR dan organizing, saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana, tahapan pekerjaan, master, coordinating scedule, perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana dan Cash flow (Proyeksi Arus Dana).

b. Perancangan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap perancangan bertujuan penjelasan proyek konstruksi dan menentukan tata letak, rancangan, metode konstruksi dan taksiran biaya agar mendapat persetujuan pemilik proyek dan pihak – pihak yang terkait dalam proyek tersebut. Rancangan estimasi biaya secara rinci, adanya desain akhir yang merupakan hasil gambar detail, spesifikasi, daftar volume, RAB, syarat – syarat administrasi, bahkan peraturan -peraturan umum yang berlaku. Dalam proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan perancangan proyek yang lebih detail, mulai dari survei harga, pembuatan (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak).

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perancangan adalah konsultan perencana, konsultan MK, konsultan rekayasa nilai dan atau konsultan quantity surveyor. Dalam proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat dalam proses perancangan adalah tim pelaksana dan tim perencana. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek konstruksi bangunan saluran air limbah terstandar sesuai dengan teori, dengan rincian hasil sebagai berikut : kontrak untuk staf proyek dan kontraktor, spesifikasi, masukan proses dan keluaran, Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas, gambar bestek dan shopdrawing, jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya, pedoman administrasi dan keuangan serta proses operasional dan standar.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap pengadaan bertujuan menunjuk kontraktor atau sejumlah kontraktor sebagai pelaksana yang akan melaksanakan proyek konstruksi, pengadaan material dan peralatan. Dalam proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan proses pengadaan yang untuk menetapkan penyedia jasa yang akan melaksanakan kegiatan konstruksi.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perancangan adalah pemilik, pelaksana jasa konstruksi (kontraktor) dan konsultan MK. Dalam proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan, Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staf), Pembantu Pelaksana Teknis (Staf), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) serta Penyedia Jasa. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap pengadaan proyek konstruksi bangunan saluran air limbah terstandar sesuai dengan teori yaitu terpilihnya penyedia jasa sesuai dengan kebutuhan.

d. Pelaksanaan kegiatan konstruksi Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap konstruksi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang telah direncanakan sesuai dengan perancangan, SPK dan kontrak. Dalam proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan proses konstruksi bertujuan untuk merealisasikan bangunan proyek sesuai dengan dokumen perancangan.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam tahap konstruksi konsultan pengawas, konsultan MK, kontraktor, sub kontraktor, supplier, dan instansi terkait. Dalam proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat

adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staf), Pembantu Pelaksana Teknis (Staf), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penyedia Jasa, Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan, Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa) dan masyarakat penerima program. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap konstruksi proyek bangunan jalan terstandar sesuai dengan teori yaitu terbangunya bangunan konstruksi saluran air limbah sesuai dengan dokumen perancangan.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan bertujuan untuk menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasionalkan. Dalam proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan proses pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan bertujuan untuk Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasionalkan, mengkoordinir, mengarahkan mengontrol, mengkoordinir pelaksanaan operasional, mengarahkan dan memeriksa as built drawing, mengarahkan dan memeriksa secara manual dan Memproses : garasi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator .

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan konsultan pengawas, konsultasi MK, kontraktor, sub kontraktor, supplier, dan instansi terkait. Dalam proyek pembangunan saluran air limbah terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Tim pelaksana kegiatan yang terdiri dari : Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staf), Pembantu Pelaksana Teknis (Staf), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penyedia Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek bangunan saluran air

limbah adalah konstruksi bangunan yang telah selesai dibangun dan siap digunakan.

5.21 Pembahasan pelaksanaan manajemen konstruksi terstandar dengan landasan teori (Proyek Pembangunan Rumah tinggal)

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Rumah tinggal terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap perencanaan proyek dilakukan studi kelayakan untuk meyakinkan bahwa proyek tersebut layak dilakukan atau tidak. Dalam proyek pembangunan saluran rumah tinggal terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman dibantu oleh Konsultan Perencana telah dilaksanakan studi kelayakan proyek dan kegiatan lain diantaranya : survei awal lokasi proyek dan rancangan kasar dari proyek yang direncanakan.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perencanaan proyek adalah konsultan Manajemen Konstruksi/MK dibantu oleh Konsultan Perencana. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat dalam proses perencanaan adalah Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas PU yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staff), Pembantu Pelaksana Teknis (Staff), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Konsultan Perencana.

Produk/hasil perencanaan yang dihasilkan pada proyek konstruksi bangunan rumah tinggal terstandar sesuai dengan teori, dengan rincian hasil sebagai berikut : pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu, identifikasi batasan utama, TOR dan organizing, saran-saran prinsip konsep desain kepada konsultan perencana, tahapan pekerjaan, master, coordinating scedule, perkiraan biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencana dan Cash flow (Proyeksi Arus Dana).

b. Perancangan Proyek Pembangunan Rumah tinggal terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap perancangan bertujuan penjelasan proyek konstruksi dan menentukan tata letak, rancangan, metode

konstruksi dan taksiran biaya agar mendapat persetujuan pemilik proyek dan pihak – pihak yang terkait dalam proyek tersebut. Rancangan estimasi biaya secara rinci, adanya desain akhir yang merupakan hasil gambar detail, spesifikasi, daftar volume, RAB, syarat – syarat administrasi, bahkan peraturan -peraturan umum yang berlaku. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan perancangan proyek yang lebih detail, mulai dari survei harga, pembuatan (gambar, RAB, Spek Teknis dan syarat-syarat kontrak).

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perancangan adalah konsultan perencana, konsultan MK, konsultan rekayasa nilai dan atau konsultan quantity surveyor. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat dalam proses perancangan adalah tim pelaksana dan tim perencana. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal terstandar sesuai dengan teori, dengan rincian hasil sebagai berikut : kontrak untuk staf proyek dan kontraktor, spesifikasi, masukan proses dan keluaran, Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas, gambar bestek dan shopdrawing, jadwal pencapaian sasaran dan penyediaan sumber daya, pedoman administrasi dan keuangan serta proses operasional dan standar.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Rumah tinggal terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap pengadaan bertujuan menunjuk kontraktor atau sejumlah kontraktor sebagai pelaksana yang akan melaksanakan proyek konstruksi, pengadaan material dan peralatan. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan proses pengadaan yang untuk menetapkan penyedia jasa yang akan melaksanakan kegiatan konstruksi.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perancangan adalah pemilik, pelaksana jasa konstruksi (kontraktor) dan konsultan MK. Dalam proyek pembangunan saluran rumah tinggal terstandar yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak Panitia Pengadaan pada Dinas PU, Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staf), Pembantu Pelaksana Teknis (Staf), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) serta Penyedia Jasa. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap pengadaan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal terstandar sesuai dengan teori yaitu terpilihnya penyedia jasa sesuai dengan kebutuhan.

d. Pelaksanaan kegiatan konstruksi Proyek Pembangunan Rumah tinggal terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap konstruksi bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang telah direncanakan sesuai dengan perancangan, SPK dan kontrak. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan proses konstruksi bertujuan untuk merealisasikan bangunan proyek sesuai dengan dokumen perancangan.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam tahap konstruksi konsultan pengawas, konsultasi MK, kontraktor, sub kontraktor, supplier, dan instansi terkait. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staf), Pembantu Pelaksana Teknis (Staf), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penyedia Jasa, Koordinator Pengawas dan Pengawas Lapangan. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap konstruksi proyek bangunan jalan terstandar sesuai dengan teori yaitu terbangunya bangunan konstruksi bangunan rumah tinggal sesuai dengan dokumen perancangan.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah tinggal terstandar

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan bertujuan untuk menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal

terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman juga dilaksanakan proses pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan bertujuan untuk Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan, mengkoordinir, mengarahkan mengontrol, mengkoordinir pelaksanaan operasional, mengarahkan dan memeriksa as built drawing, mengarahkan dan memeriksa secara manual dan Memproses : garasi, jaminan, sertifikat, peralatan dan training operator.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan konsultan pengawas, konsultasi MK, kontraktor, sub kontraktor, supplier, dan instansi terkait. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal terstandar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas PU Kabupaten Sleman pihak yang terlibat adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas), Ketua (Kepala Bidang), Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi), Pelaksana Teknis (Staf), Pembantu Pelaksana Teknis (Staf), PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penyedia Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan proyek bangunan rumah tinggal terstandar adalah konstruksi bangunan yang telah selesai dibangun dan siap digunakan.

5.22 Pembahasan pelaksanaan manajemen konstruksi berbasis masyarakat dengan landasan teori (Proyek Pembangunan Jalan Aspal)

Landasan teori pada proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat mengindikasikan pada Tahap pelaksanaan pembangunan permukiman dan lingkungan pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Masyarakat/REKOMPAK.

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan Aspal berbasis masyarakat

Proyek pembangunan jalan aspal merupakan salah satu bagian dari Bantuan Dana Lingkungan (BDL). Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap perencanaan proyek pembangunan jalan aspal dilakukan rapat koordinasi di tingkat kelurahan/desa untuk sosialisasi pelaksanaan proyek REKOMPAK serta

penjaringan relawan permukiman, pelatihan relawan permukiman untuk pemetaan swadaya (PS) dan pembentukan panitia PS serta FGD dan Focus Group Discussion (FGD) refleksi dampak dan rencana pembangunan kota/kabupaten (termasuk REKOMPAK). Dalam tahap perencanaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat kegiatan yang dilaksanakan adalah loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten, lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten, penetapan lokasi, pengadaan dan pelatihan praturgus Konsultan Kabupaten/kota, pengadaan dan Pelatihan Praturgus Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perencanaan proyek adalah Pemerintah dan Konsultan. Dalam proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat pihak yang terlibat dalam proses perencanaan adalah Pemerintah (Pemprov, Pemkab) dan Konsultan (PMU, NMC, DMC).

Produk/hasil perencanaan yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek konstruksi bangunan jalan berbasis masyarakat sesuai dengan teori, dengan rincian hasil sebagai berikut : pemetaan swadaya terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan penetapan calon penerima bantuan. Produk yang dihasilkan dalam tahap perencanaan jalan berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek. Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut. Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut. Daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan. Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.

b. Perancangan Proyek Pembangunan Jalan Aspal berbasis masyarakat

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap perancangan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat dilakukan rangkaian kegiatan penyusunan RPP.

Kegiatan nyata yang dilakukan pada tahap perancangan proyek jalan berbasis masyarakat adalah penyusunan RPP yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut : orientasi sosial dan wilayah, sosialisasi tingkat desa, sosialisasi tingkat basis (Dusun /Kampung /RW), Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), pembentukan Tim Inti Perencana (TIP), pelatihan BKM-TPK-TIP, pelaksanaan coaching fasilitator dan TIP pada kegiatan tahapan siklus, penyiapan Peta Dasar, tinjauan/Review Dokumen Pembangunan, pemetaan swadaya, rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya, rembug perumusan visi dan misi desa, rembug pemecahan masalah, rembug penyusunan rencana tata ruang desa, rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana, sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah), Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1, konsultasi publik, verifikasi program dan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perancangan proyek adalah Pemerintah, Konsultan dan masyarakat. Dalam proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat pihak yang terlibat dalam proses perencanaan adalah Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator), Konsultan (NMC, DMC) dan Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek konstruksi bangunan jalan berbasis masyarakat sesuai dengan teori, hasil dari produk perancangan adalah tersusunya dokumen RPP.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan Aspal berbasis masyarakat

Pada landasan teori dari proyek jalan aspal berbasis masyarakat tidak dijelaskan secara rinci mengenai teknis pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan proyek dilapangan, kegiatan yang dilakukan pada tahap pengadaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat adalah sebagai berikut : pembentukan Tim Pengadaan, persiapan Tim Pengadaan dan pelelangan (pelelangan umum dan lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung).

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses pelelangan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Desa, Fasilitator), masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM, masyarakat penerima program) dan penyedia barang/Supplier.

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap pengadaan proyek konstruksi bangunan jalan berbasis masyarakat sesuai dengan teori, hasil dari produk pengadaan adalah kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.

d. Pelaksanaan kegiatan konstruksi Proyek Pembangunan Jalan Aspal berbasis masyarakat

Kegiatan yang dilakukan pada tahap konstruksi pembangunan jalan berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori Penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan. Kegiatan yang dilakukan antara lain : pembentukan panitia pembangunan, survei teknis dan harga satuan, pelatihan/coaching penyusunan DTPL dan DED, penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL), termasuk di dalamnya menyiapkan dokumen kajian dampak sosial dan lingkungan, pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi, pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan, proses pencairan BDL, sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing titik kegiatan, pelaksanaan kegiatan fisik, pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR.

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses konstruksi proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Desa, Fasilitator), Konsultan NMC, DMC, Masyarakat (BKM/TPK, PP/KP dan Masyarakat penerima program), Supplier dan Jasa Pemborong/tenaga.

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap konstruksi proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat sesuai dengan teori, produk yang dihasilkan adalah konstruksi bangunan jalan aspal.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Aspal berbasis masyarakat

Kegiatan yang dilakukan pada tahap penyerahan hasil pekerjaan pembangunan jalan berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori Penyusunan Dokumen

Teknik Pembangunan Lingkungan. Kegiatan yang dilakukan antara lain : penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES, penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian), pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat antara lain : Masyarakat (TPK, BKM, PP/KP) dan Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator).

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat sesuai dengan teori, produk yang dihasilkan adalah bangunan jalan yang siap digunakan.

5.23 Pembahasan pelaksanaan manajemen konstruksi berbasis masyarakat dengan landasan teori (Proyek Pembangunan Saluran air limbah)

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat

Realisasi tahapan perencanaan yang dilakukan dalam proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori, kegiatan yang dilakukan antara lain : adalah sosialisasi, penyiapan, pelatihan dan pembagian tugas serta tanggung jawab TFL, pemilihan lokasi, pemicuan masyarakat, penetapan lokasi dan pembentukan dan penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses perencanaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Kabupaten /SKPD terkait, Camat, Lurah, Fasilitator, Tenaga Sanitari/Puskesmas /Satker PLPP), Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak) dan Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM.

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat sesuai dengan teori, produk yang dihasilkan adalah tenaga fasilitator telah siap, lokasi proyek telah ditetapkan,

masyarakat telah siap dengan rencana program yang akan dilakukan dan terbentuknya KSM.

b. Perancangan Proyek Pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat

Realisasi tahapan perancangan yang dilakukan dalam proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perancangan antara lain : adalah pendampingan TFL Teknis (pemilihan teknologi, pengukuran, gambar/DED, RAB dan Spesifikasi teknis) dan pendampingan TFL Sosial (klasifikasi kesejahteraan, persiapan tenaga kerja dan pembukaan rekening bersama).

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Pemda/DPUP, Kecamatan, Desa dan Fasilitator) dan Masyarakat (KSM, Tokoh masyarakat dan Masyarakat pengguna).

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat sesuai dengan teori, produk yang dihasilkan adalah Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang berisi : profil lokasi, organisasi dan struktur KSM, Anggaran Dasar & Rumah Tangga (AD/ART) KSM, surat ketersediaan Lahan dan atau persetujuan warga, dokumen dan berita acara seleksi kampung, penentuan calon pengguna, pemilihan teknologi sanitasi, DED dan RAB lengkap disertai dengan kurva S, rekening bank bersama, sumber pendanaan serta mekanisme pencairan dana dari pemerintah, pengelolaan keuangan DAK SLBM, rencana Kerja, Surat Perjanjian Kerja Sama Antara SATKER/PPK Sanitasi kabupaten/Kota dengan KSM, tentang pemanfaatan DAK SLBM, Jaminan dari masyarakat pengguna terhadap kesediaan dalam mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana DAK SLBM.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat

Realisasi tahapan pengadaan yang dilakukan dalam proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori. Kegiatan yang dilakukan antara lain : perjanjian kerja KSM dengan SKPD dan kontrak perjanjian

antara KSM dengan Penyedia bahan bangunan /suplier bahan bangunan dan tenaga ahli.

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL), masyarakat (KSM, Masyarakat) dan suplier bahan bangunan.

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat sesuai dengan teori, produk yang dihasilkan adalah Terpilihnya penyedia bahan bangunan/suplier bahan bangunan.

d. Pelaksanaan kegiatan konstruksi Proyek Pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat

Realisasi tahapan konstruksi yang dilakukan dalam proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori. Kegiatan yang dilakukan antara lain : penjelasan teknis konstruksi dan pelaksanaan konstruksi dengan tahap : rebug warga, survei pemetaan ulang, pembersihan dan penyiapan lahan IPAL, penyiapan peralatan K3, sign board, turap pengaman galian, penyiapan direksi keet, gudang, area kerja, pengadaan dan pembelian barang oleh panitia pengadaan, pembagian grup dan area kerja, pelaksanaan pekerjaan, monitoring dan evaluasi.

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa, TFL), KSM, masyarakat penerima proyek, suplier bahan bangunan dan tukang/tenaga ahli.

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat sesuai dengan teori, produk yang dihasilkan adalah Konstruksi bangunan IPAL dan SR.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Saluran air limbah berbasis masyarakat

Realisasi tahapan penyerahan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori. Kegiatan yang dilakukan antara lain : menguji bagian-bagian bangunan

sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan (comissioning uji kebocoran IPAL), rebug warga, serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan hasil proyek kepada KSM untuk difungsikan, pengumpulan dan penyusunan dokumen pelaksanaan, penyerahan operasi dan pemeliharaan kepada masyarakat, pengoperasian organisasi pengelolaan dan jaringan SR dan IPAL, penyerahan laporan akhir kegiatan (Laporan teknik, laporan keuangan dan laporan logistik).

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Dinas/DPUP, Kecamatan, Desa dan TFL) dan Masyarakat (KSM, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat penerima program).

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat sesuai dengan teori, produk yang dihasilkan adalah bangunan IPAL dan SR yang siap dioperasikan.

5.24 Pembahasan pelaksanaan manajemen konstruksi berbasis masyarakat dengan landasan teori (Proyek Pembangunan Rumah Tinggal)

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Proyek pembangunan jalan aspal merupakan salah satu bagian dari Bantuan Dana Rumah/Lingkungan (BDR/BDL). Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap perencanaan proyek pembangunan rumah tinggal dilakukan rapat koordinasi di tingkat kelurahan/desa untuk sosialisasi pelaksanaan proyek REKOMPAK serta penjaringan relawan permukiman, pelatihan relawan permukiman untuk pemetaan swadaya (PS) dan pembentukan panitia PS serta FGD dan Focus Group Discussion (FGD) refleksi dampak dan rencana pembangunan kota/kabupaten (termasuk REKOMPAK). Dalam tahap perencanaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat kegiatan yang dilaksanakan adalah loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten, lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten, penetapan lokasi, pengadaan dan pelatihan praturgas

Konsultan Kabupaten/kota, pengadaan dan Pelatihan Praturgas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perencanaan proyek adalah Pemerintah dan Konsultan. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat pihak yang terlibat dalam proses perencanaan adalah Pemerintah (Pemprov, Pemkab) dan Konsultan (PMU, NMC, DMC).

Produk/hasil perencanaan yang dihasilkan pada tahap perencanaan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal berbasis masyarakat sesuai dengan teori, dengan rincian hasil sebagai berikut : pemetaan swadaya terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan penetapan calon penerima bantuan. Produk yang dihasilkan dalam tahap perencanaan rumah tinggal berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek. Pemkab siap mengalokasikan dana pendampingan dan disepakati rencana tindak lanjut. Camat, Kades dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesamaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tindak lanjut. Daftar lokasi sasaran relokasi telah ditetapkan. Tim Fasilitator telah mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi.

b. Perancangan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Pada landasan teori telah dijelaskan bahwa pada tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat dilakukan rangkaian kegiatan penyusunan RPP.

Kegiatan nyata yang dilakukan pada tahap perancangan proyek rumah tinggal berbasis masyarakat adalah penyusunan RPP yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut : orientasi sosial dan wilayah, sosialisasi tingkat desa, sosialisasi tingkat basis (Dusun /Kampung /RW), Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), pembentukan Tim Inti Perencana (TIP), pelatihan BKM-TPK-TIP, pelaksanaan coaching fasilitator dan TIP pada kegiatan tahapan siklus, penyiapan Peta Dasar, tinjauan/Review Dokumen Pembangunan, pemetaan swadaya, rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya, rembug perumusan visi dan misi desa, rembug pemecahan masalah, rembug penyusunan

rencana tata ruang desa, rebug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana, sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah), Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1, konsultasi publik, verifikasi program dan rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman.

Dalam landasan teori, pihak yang terlibat dalam proses perancangan proyek adalah Pemerintah, Konsultan dan masyarakat. Dalam proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat pihak yang terlibat dalam proses perencanaan adalah Pemerintah (Dinas, Kecamatan, Desa dan Fasilitator), Konsultan (NMC, DMC) dan Masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap perancangan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal berbasis masyarakat sesuai dengan teori, hasil dari produk perancangan adalah tersusunya dokumen RPP.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Pada landasan teori dari proyek rumah tinggal berbasis masyarakat tidak dijelaskan secara rinci mengenai teknis pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan proyek dilapangan, kegiatan yang dilakukan pada tahap pengadaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat adalah sebagai berikut : pembentukan Tim Pengadaan, persiapan Tim Pengadaan dan pelelangan (pelelangan umum dan lelang dengan metode khusus/penunjukan langsung).

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses pelelangan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Desa, Fasilitator), Masyarakat (Kelompok Pemukim/KP, TPK/BKM) dan Penyedia Barang/Supplier.

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap pengadaan proyek konstruksi bangunan rumah tinggal berbasis masyarakat sesuai dengan teori, hasil dari produk pengadaan adalah kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan, peralatan dan tenaga terampil.

d. Pelaksanaan kegiatan konstruksi Proyek Pembangunan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Kegiatan yang dilakukan pada tahap konstruksi pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori Penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan dan Bantuan Dana Rumah/BDR. Kegiatan yang dilakukan antara lain : pembentukan KP/Kelompok Pemukiman, penyusunan rencana tapak, menentukan desain bangunan huntap, survei teknis dan harga, pelatihan/coaching penyusunan DTPP dan DED, penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP), pengajuan, pencairan dan penyaluran BDR, pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi, pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan, proses pencairan BDR, sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing KP, pelaksanaan kegiatan fisik.

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat antara lain : Pemerintah (Desa, Fasilitator), Konsultan NMC, DMC, Masyarakat (BKM, TIP, PP dan Masyarakat), Suplier dan Jasa Pemborong/tenaga.

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat sesuai dengan teori, produk yang dihasilkan adalah konstruksi bangunan rumah.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Kegiatan yang dilakukan pada tahap penyerahan hasil pekerjaan pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori Penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan/Bantuan Dana Rumah/BDR. Kegiatan yang dilakukan antara lain : bersifat berupa peresmian dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan dari KP ke Desa dilanjutkan Desa menyerahkan kembali hasil pembangunan untuk difungsikan oleh KP dan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Sesuai dengan landasan teori, pihak yang terlibat pada proses penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat antara lain :

Masyarakat (KP/Kelompok Pemukiman, BKM) dan Pemerintah (Pemkab, Kecamatan, Desa, Fasilitator).

Produk/hasil yang dihasilkan pada tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat sesuai dengan teori, produk yang dihasilkan adalah bangunan rumah tinggal yang siap digunakan.

5.25 Pembahasan pelaksanaan seluruh proyek manajemen konstruksi terstandar (Proyek pembangunan jalan, proyek pembangunan Saluran air limbah dan proyek pembangunan rumah tinggal) dengan landasan teori

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah dan Rumah Tinggal terstandar

Proses yang dilaksanakan pada tahap perencanaan proyek pembangunan (jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal) terstandar sesuai dengan landasan teori. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Perancangan Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah dan Rumah Tinggal terstandar

Proses yang dilaksanakan pada tahap perancangan proyek pembangunan (jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal) terstandar sesuai dengan landasan teori. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah dan Rumah Tinggal terstandar

Proses yang dilaksanakan pada tahap pelelangan proyek pembangunan (jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal) terstandar sesuai dengan landasan teori. Macam dan jenis pengadaan disesuaikan dengan anggaran biaya pelaksanaan konstruksi.

d. Pelaksanaan kegiatan konstruksi Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah dan Rumah Tinggal terstandar

Proses yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan (jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal) terstandar sesuai dengan landasan teori. Cara pelaksanaan konstruksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis proyek.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah dan Rumah Tinggal terstandar

Proses yang dilaksanakan pada tahap pengoperasian / Penyerahan Hasil Pekerjaan proyek pembangunan (jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal) terstandar sesuai dengan landasan teori.

5.26 Pembahasan pelaksanaan seluruh proyek manajemen konstruksi berbasis masyarakat (Proyek pembangunan jalan, proyek pembangunan air limbah dan proyek pembangunan rumah tinggal) dengan landasan teori

a. Perencanaan/Persiapan Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah dan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Proses yang dilaksanakan pada tahap perencanaan proyek pembangunan (jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal) berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

b. Perancangan Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah dan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Proses yang dilaksanakan pada tahap perancangan proyek pembangunan (jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal) berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori. Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Pengadaan/Pelelangan/Procurement Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah dan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Proses yang dilaksanakan pada tahap pelelangan proyek pembangunan (jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal) berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori. Macam dan jenis pengadaan disesuaikan dengan anggaran biaya pelaksanaan konstruksi.

d. Pelaksanaan kegiatan konstruksi Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah dan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Proses yang dilaksanakan pada tahap pelaksanaan konstruksi proyek pembangunan (jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal) berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori. Cara pelaksanaan konstruksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis proyek.

e. Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan, Saluran air limbah dan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Proses yang dilaksanakan pada tahap pengoperasian / Penyerahan Hasil Pekerjaan proyek pembangunan (jalan, saluran air limbah dan rumah tinggal) berbasis masyarakat sesuai dengan landasan teori.

5.27 Pembahasan pelaksanaan seluruh proyek manajemen konstruksi berbasis masyarakat (Proyek pembangunan jalan, proyek pembangunan air limbah dan proyek pembangunan rumah tinggal) dengan Tinjauan Pustaka

5.27.1 Hasil Penelitian yang dijadikan Tinjauan Pustaka

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam daftar pustaka oleh (Ummi Chassanah, Gusni Fitri, Lukman Karyadi dan Riani Musrifah) diperoleh kesimpulan yang sebagai berikut :

- a. analisis responden dengan menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), menyebutkan bahwa hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan pelaksanaan proyek konstruksi dengan urutan ke-1 adalah biaya dengan bobot 0,262 kemudian urutan ke-2 adalah mutu dengan bobot 0,253 selanjutnya urutan ke-3 adalah waktu dengan bobot 0,231 dan urutan ke-4

adalah partisipasi masyarakat dengan bobot 0,142 serta urutan ke-5 adalah administrasi dengan bobot 0,112.

- b. proyek konstruksi secara kontraktual lebih optimal bila dibandingkan dengan pelaksanaan konstruksi secara pemberdayaan masyarakat.
- c. program pemerintah yang bersifat *multi years*, di harapkan organisasi pengelola pun di bentuk untuk *multi years*.
- d. program pemerintah yang berasal dari pusat, di harapkan dapat bersinergi dengan kebijakan-kebijakan daerah
- e. Siklus pelaksanaan program/proyek dapat di mulai pada awal tahun dan selesai pada akhir tahun anggaran, sehingga bisa meminimalisir permasalahan.
- f. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rendah, pada proses pelaksanaan tergolong sedang dan pada proses pemanfaatan dan pemeliharaan tergolong tinggi.
- g. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan rendah, pada proses pelaksanaan tergolong sedang dan pada proses pemanfaatan dan pemeliharaan tergolong tinggi
- h. secara garis besar bahwa Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan di Desa Dopleng, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dapat dinyatakan berhasil dan berjalan sesuai rencana
- i. Persepsi dan partisipasi masyarakat dalam proyek P2KP tersebut dapat dinyatakan cukup baik.

Ada persamaan dan perbedaan yang dihasilkan dari proses penelitian penggunaan dan penerapan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, dengan tinjauan pustaka yang digunakan. Dalam penelitian yang telah dilakukan pada tiga jenis proyek pemberdayaan masyarakat (pembangunan jalan aspal, pembangunan saluran air limbah dan pembangunan rumah tinggal), terdapat perbedaan peran dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses manajemen konstruksi. Pihak yang terlibat berbeda dalam setiap tahap manajemen konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, perancangan, pengadaan, konstruksi dan penyerahan hasil proyek. Terdapat pula perbedaan penerapan

fungsi manajemen (mekanisme/urutan) dalam aspek mutu, biaya dan waktu pada manajemen konstruksi berbasis masyarakat.

5.28 Pembahasan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Manajemen Konstruksi Terstandar dan Berbasis Masyarakat

a. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Manajemen Konstruksi Terstandar

Dari data dan analisis yang telah disajikan dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi terstandar mulai dari tahap perencanaan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam Proyek konstruksi pembangunan jalan aspal terstandar yang terdiri atas : Pemerintah (Dinas/SKPD terkait proyek), Konsultan Perencana, Penyedia Jasa. Ada 4 (empat) pihak yang terlibat dalam Proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah terstandar yang terdiri atas : Pemerintah (Dinas/SKPD terkait proyek, ULP/Unit Layanan Pengadaan, Kecamatan, Desa, TFL), Warga Masyarakat, Konsultan Perencana, Penyedia Jasa. Ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam Proyek konstruksi pembangunan rumah tinggal terstandar yang terdiri atas : Pemerintah (Dinas/SKPD terkait proyek, ULP/Unit Layanan Pengadaan), Konsultan Perencana, Penyedia Jasa.

b. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat

Dari data dan analisis yang telah disajikan dapat diketahui pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Ada 4 (empat) pihak yang terlibat dalam Proyek konstruksi pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat yang terdiri atas : Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, TFL), Konsultan (PMU, NMC dan DMC), Masyarakat (TPK/BKM, PP/KP, TIP dan Masyarakat penerima program), Suplier (material dan tenaga kerja). Ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam Proyek konstruksi pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat yang terdiri atas : Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, Satker PLPP

/Tenaga Sanitari, Kecamatan, Desa, TFL), Warga Masyarakat (KSM, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak), Suplier (material dan tenaga kerja). Ada 4 (empat) pihak yang terlibat dalam Proyek konstruksi pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat yang terdiri atas : Pemerintah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, TFL), Konsultan (PMU, NMC dan DMC), Masyarakat (TPK/BKM, PP/KP, TIP dan Masyarakat penerima program), Suplier (material dan tenaga kerja).

c. Penilaian dari Pihak-Pihak Terlibat dalam ke dua Sistem Manajemen

Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi baik yang menggunakan manajemen terstandar maupun berbasis masyarakat berkisar antara 3(tiga) sampai dengan 4 (empat) pihak, akan tetapi pihak-pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi berbasis masyarakat lebih kompleks dan banyak.

5.29 Pembahasan Penerapan Fungsi Manajemen Konstruksi Terstandar dan Berbasis Masyarakat dalam Aspek Mutu, Biaya dan Waktu

a. Aspek Mutu dalam Proyek Pembangunan Jalan Aspal

1) Pada Tahap Persiapan

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap persiapan proyek pembangunan jalan aspal terstandar sesuai dengan standar Pemerintah, mutu dari tahap persiapan proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat sedikit lebih baik dari Standar Pemerintah. Indikasi kecermatan dan ketelitian dari pihak-pihak terlibat dalam proyek berbasis masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan.

2) Pada Tahap Perancangan

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap perancangan proyek pembangunan jalan aspal terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah. Indikasi proses perancangan sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada Standar Pemerintah.

3) Pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap pengadaan proyek pembangunan jalan aspal terstandar dan berbasis masyarakat sesuai

dengan Standar Pemerintah. Indikasi proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pada Standar Pemerintah.

4) Pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan jalan aspal terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah. Bahan material yang digunakan dalam proses konstruksi pada proyek berbasis masyarakat mempunyai mutu yang lebih baik dari proyek terstandar, proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga bangunan yang dihasilkan memenuhi spesifikasi teknis.

5) Pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan aspal terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah.

b. Aspek Mutu dalam Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

1) Pada Tahap Persiapan

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap persiapan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah. Indikasi proses perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada Standar Pemerintah.

2) Pada Tahap Perancangan

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah. Indikasi proses perancangan sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada Standar Pemerintah.

3) Pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar sesuai dengan standar Pemerintah, dan mutu dari tahap pengadaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat lebih buruk Standar Pemerintah. Indikasi

pada proses pengadaan barang mempunyai kualitas lebih buruk dikarenakan kurangnya pengalaman masyarakat dalam proses pengadaan.

4) Pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah. Bahan material yang digunakan dalam proses konstruksi pada proyek berbasis masyarakat mempunyai mutu yang lebih baik dari proyek terstandar karena kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahan material yang baik untuk proyek yang mereka laksanakan, proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga bangunan yang dihasilkan memenuhi spesifikasi teknis.

5) Pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah.

c. Aspek Mutu dalam Proyek Pembangunan Rumah Tinggal

1) Pada Tahap Persiapan

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap persiapan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah. Indikasi proses perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada Standar Pemerintah.

2) Pada Tahap Perancangan

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap perancangan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah. Indikasi proses perancangan sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada Standar Pemerintah.

3) Pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap pengadaan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan standar Pemerintah.

4) Pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah. Bahan material yang digunakan dalam proses konstruksi pada proyek berbasis masyarakat mempunyai mutu yang lebih baik dari proyek terstandar karena kesadaran masyarakat dalam menggunakan bahan material yang baik untuk proyek yang mereka laksanakan, proses pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cermat dan teliti sehingga bangunan yang dihasilkan memenuhi spesifikasi teknis.

5) Pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan

Dari data dan analisis diketahui bahwa mutu dari tahap penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal terstandar dan berbasis masyarakat sesuai dengan Standar Pemerintah.

d. Aspek Biaya dalam Proyek Pembangunan Jalan Aspal

1) Biaya konstruksi dalam Proyek Jalan Aspal terstandar

Anggaran dana pelaksanaan konstruksi Rp. 148.002.000,-

Luas lahan = (panjang x lebar) = (650mX3m) = 1.950m²

Biaya per m² (Anggaran dana konstruksi)

$$= \frac{\text{(Anggaran dana konstruksi)}}{\text{(panjang jalan x lebar jalan)}}$$

(Rp. 148.002.000,-)

$$= \frac{\text{(Rp. 148.002.000,-)}}{\text{(650mX3m)}}$$

Rp. 148.002.000,-

$$= \frac{\text{Rp. 148.002.000,-}}{\text{1.950m}^2}$$

= Rp. 75.898,46

2) Biaya konstruksi dalam Proyek Jalan Aspal berbasis masyarakat

Biaya konstruksi dari Rekompak BDL = Rp. 112.987.000,-

Biaya konstruksi dari Swadaya Masyarakat = Rp. 500.000,-

Panjang jalan 280,5m1, lebar 4m

Luas jalan = 1122m²

$$\begin{aligned}
\text{Biaya per m}^2 &= \frac{(\text{Biaya BDL} + \text{Biaya Swadaya})}{(\text{panjang jalan} \times \text{lebar jalan})} \\
&= \frac{(\text{Rp. } 112.987.000,- + \text{Rp. } 500.000,-)}{(280,5\text{m} \times 4\text{m})} \\
&= \frac{\text{Rp.}113.487.000,-}{1122\text{m}^2} \\
&= \text{Rp. } 101.147,10
\end{aligned}$$

- 3) Perbandingan Biaya Proyek pembangunan jalan aspal terstandar dan jalan aspal berbasis masyarakat

Prosentase selisih dari proyek terstandar dan proyek berbasis masyarakat adalah :

$$\begin{aligned}
\text{Prosentase selisih} &= \frac{(\text{biaya berbasis masyarakat} - \text{biaya terstandar})}{(\text{biaya berbasis masyarakat})} \times 100\% \\
&= \frac{(\text{Rp. } 101.147,10 - \text{Rp. } 75.898,46)}{(\text{Rp. } 101.147,10)} \times 100\% \\
&= \frac{(\text{Rp}25.248,60)}{(\text{Rp. } 101.147,10)} \times 100\% \\
&= 25\%
\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa proyek jalan aspal berbasis masyarakat 25% lebih mahal dari proyek jalan terstandar.

e. Aspek Biaya dalam Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

- 1) Biaya konstruksi dalam Proyek Saluran Air Limbah terstandar

Pemda = Rp.608.443.000

Pipa servis 1470m dengan rincian 147 SR, Realisasi penyambungan 140 bh

$$\begin{aligned}
\text{Biaya pemipaan per ml} &= \frac{\text{biaya pemipaan}}{\text{panjang pipa pemipaan}} \\
&= \frac{\text{Rp.}608.443.000,-}{1470\text{m}} \\
&= \text{Rp } 413.906,80
\end{aligned}$$

2) Biaya konstruksi dalam Proyek Saluran Air Limbah berbasis masyarakat

Total anggaran yang tersedia :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Pemerintah (IPAL+Pemipaan+pajak material 10%)+swadaya masyarakat} \\
 &= (\text{Rp}217.862.600,- + \text{Rp}213.464.700,- + \text{Rp}28.980.320,-) + \text{Rp}.14.281.000,- \\
 &= \text{Rp}.446.026.670,- + \text{Rp}.14.281.000,- \\
 &= \text{Rp}.460.307.670,-
 \end{aligned}$$

Dengan rincian volume pekerjaan luas lahan 200m², kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 6' = 414m¹, Pipa PVC D 4' = 1071m¹, pipa PVC D 2' = 58m' + bangunan IPAL. Panjang jaringan IPAL = 414m¹ + 1071m¹ + 58m' = 1543m¹

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya pemipaan per m1} &= \frac{\text{(biaya pemipaan)}}{\text{(panjang pipa pemipaan)}} \\
 &= \frac{\text{(Rp. 213.464.700,-)}}{\text{(414m + 1.071m + 58m)}} \\
 &= \frac{\text{Rp. 213.464.700,-}}{1543\text{m1}} \\
 &= \text{Rp}138.343,94
 \end{aligned}$$

3) Perbandingan Biaya Proyek Pembangunan saluran air limbah terstandar dan saluran air limbah berbasis masyarakat

Prosentase selisih dari proyek terstandar dan proyek berbasis masyarakat adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase selisih} &= \frac{\text{(biaya terstandar - biaya berbasis masyarakat)}}{\text{(biaya berbasis masyarakat)}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{(Rp 413.906,80 - Rp}138.343,94)}{\text{(Rp 413.906,80)}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{(Rp}275.562,86)}{\text{(Rp 413.906,80)}} \times 100\% \\
 &= 66,58\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa proyek saluran air limbah berbasis masyarakat 66,58% lebih murah dari proyek saluran air limbah

terstandar, ditambah pada proyek saluran air limbah berbasis masyarakat terdapat tambahan bangunan berupa IPAL komunal.

f. Aspek Biaya dalam Proyek Pembangunan Rumah Tinggal

- 1) Biaya konstruksi dalam Proyek Pembangunan Rumah Tinggal terstandar

Biaya Pemerintah = Rp.214.091.000,-, tipe rumah 70m².

$$\begin{aligned} \text{Biaya per m}^2 \text{ bangunan} &= \frac{\text{biaya pemerintah}}{\text{luas bangunan}} \\ &= \frac{\text{Rp.214.091.000,-}}{70\text{m}^2} \end{aligned}$$

$$= \text{Rp3.058.442,86}$$

- 2) Biaya konstruksi dalam Proyek Pembangunan Rumah Tinggal berbasis masyarakat

Biaya stimulan dari Pemerintah = Rp. 30.000.000,-, biaya swadaya sesuai kemampuan masyarakat, tipe rumah 36m².

$$\begin{aligned} \text{Biaya per m}^2 \text{ bangunan} &= \frac{\text{biaya pemerintah} + \text{biaya swadaya}}{\text{luas bangunan}} \\ &= \frac{\text{Rp. 30.000.000,-} + \text{biaya swadaya}}{36\text{m}^2} \end{aligned}$$

$$= \text{Rp833.333,33} + \text{biaya swadaya}$$

- 3) Perbandingan Biaya Proyek Pembangunan rumah tinggal terstandar dan rumah tinggal berbasis masyarakat

Prosentase selisih dari proyek terstandar dan proyek berbasis masyarakat adalah :

$$\begin{aligned} \text{Prosentase selisih} &= \frac{(\text{biaya terstandar} - \text{biaya berbasis masyarakat})}{(\text{biaya berbasis masyarakat})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{Rp3.058.442,86} - \text{Rp833.333,33})}{(\text{Rp3.058.442,86})} \times 100\% \\ &= \frac{(\text{Rp2.225.109,52})}{(\text{Rp3.058.442,86})} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 72,75\%$$

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat 72,75% lebih murah dari proyek pembangunan rumah tinggal terstandar.

g. Aspek waktu dalam Proyek Pembangunan Jalan Aspal

1) Waktu dalam Proyek Pembangunan Jalan Aspal terstandar

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek jalan aspal terstandar : tahap persiapan 2 s/d 3 bulan, tahap perancangan 2 s/d 3 bulan, tahap pengadaan/pelelangan/procurement 1 s/d 2 bulan, tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi 2s/d 3 bulan dan tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan kurang dari 1 bulan. Jadi total waktu yang dibutuhkan antara 8 bulan s/d 12 bulan.

2) Waktu dalam Proyek Pembangunan Jalan Aspal berbasis Masyarakat

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek jalan aspal berbasis masyarakat : tahap persiapan 2 s/d 3 bulan, tahap perancangan 2 s/d 3 bulan, tahap pengadaan/pelelangan/procurement 1 s/d 2 bulan, tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi 2s/d 3 bulan dan tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan 1 s/d 2 bulan. Jadi total waktu yang dibutuhkan antara 8 bulan s/d 13 bulan.

3) Perbandingan Waktu Proyek Pembangunan Jalan Aspal terstandar dan Jalan Aspal berbasis Masyarakat

Jumlah waktu terendah sama yaitu 8 (delapan) bulan, sedangkan jumlah waktu tertinggi adalah 13 (tiga belas) bulan untuk proyek berbasis masyarakat dan 12 (dua belas) bulan untuk proyek terstandar. Selisih waktu yang dibutuhkan antara kedua sistem manajemen adalah 1 (satu) bulan lebih lama pada proyek konstruksi jalan aspal berbasis masyarakat, jumlah bulan terbanyak adalah 13 (tiga belas) bulan. Jadi prosentase selisih waktu adalah :

$$\text{Prosentase selisih} = \frac{(\text{waktu berbasis masyarakat} - \text{waktu terstandar})}{(\text{jumlah waktu terbanyak})} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(13 - 12)}{(13)} \times 100\% \\
&= \frac{(1)}{(13)} \times 100\% \\
&= 7,96\%
\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa proyek pembangunan jalan aspal berbasis masyarakat 7,96% lebih lama dari proyek pembangunan jalan aspal terstandar.

h. Aspek waktu dalam Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

1) Waktu dalam Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah terstandar

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek saluran air limbah terstandar : tahap persiapan 2 s/d 3 bulan, tahap perancangan 3 s/d 4 bulan, tahap pengadaan/pelelangan/procurement 1 s/d 2 bulan, tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi 3 s/d 4 bulan dan tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan kurang dari 1 bulan. Jadi total waktu yang dibutuhkan antara 10 bulan s/d 14 bulan.

2) Waktu dalam Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah berbasis Masyarakat

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek saluran air limbah berbasis masyarakat : tahap persiapan 2 s/d 3 bulan, tahap perancangan 1 s/d 2 bulan, tahap pengadaan/pelelangan/procurement kurang dari 1 bulan, tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi 3 s/d 4 bulan dan tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan kurang dari 1 bulan. Jadi total waktu yang dibutuhkan antara 8 bulan s/d 11 bulan.

3) Perbandingan Waktu Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah terstandar dan Saluran Air Limbah berbasis Masyarakat

Jumlah waktu terendah sama yaitu 10 (sepuluh) bulan untuk proyek terstandar dan 8 (delapan) bulan untuk proyek berbasis masyarakat, sedangkan jumlah waktu tertinggi adalah 14 (empat belas) bulan untuk proyek terstandar dan 11 (sebelas) bulan untuk proyek berbasis masyarakat. Selisih waktu yang dibutuhkan antara kedua sistem

manajemen adalah diambil dari jumlah waktu terendah yaitu 2 (dua) bulan lebih lama pada proyek konstruksi saluran air limbah terstandar, jumlah bulan terbanyak pada angka bulan terendah adalah 10 (sepuluh) bulan. Jadi prosentase selisih waktu adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase selisih} &= \frac{(\text{waktu terstandar} - \text{waktu berbasis masyarakat})}{(\text{jumlah waktu terbanyak})} \times 100\% \\
 &= \frac{(10 - 8)}{(10)} \times 100\% \\
 &= \frac{(2)}{(10)} \times 100\% \\
 &= 20\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa proyek pembangunan saluran air limbah terstandar 20% lebih lama dari proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.

i. Aspek waktu dalam Proyek Pembangunan Rumah Tinggal

1) Waktu dalam Proyek Pembangunan Rumah Tinggal terstandar

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek rumah tinggal terstandar : tahap persiapan 2 s/d 3 bulan, tahap perancangan 2 s/d 3 bulan, tahap pengadaan/pelelangan/procurement 1 s/d 2 bulan, tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi 3 s/d 4 bulan dan tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan kurang dari 1 bulan. Jadi total waktu yang dibutuhkan antara 9 bulan s/d 13 bulan.

2) Waktu dalam Proyek Pembangunan Rumah Tinggal berbasis Masyarakat

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek rumah tinggal berbasis masyarakat : tahap persiapan 2 s/d 3 bulan, tahap perancangan 2 s/d 3 bulan, tahap pengadaan/pelelangan/procurement 1 s/d 2 bulan, tahap pelaksanaan kegiatan konstruksi 3 s/d 4 bulan dan tahap pengoperasian/penyerahan hasil pekerjaan antara 1 s/d 2 bulan. Jadi total waktu yang dibutuhkan antara 9 bulan s/d 14 bulan.

3) Perbandingan Waktu Proyek Pembangunan Rumah Tinggal terstandar dan Rumah Tinggal berbasis Masyarakat

Jumlah waktu terendah sama yaitu 9 (sembilan) bulan, sedangkan jumlah waktu tertinggi adalah 14 (empat belas) bulan untuk proyek berbasis masyarakat dan 13 (tiga belas) bulan untuk proyek terstandar. Selisih waktu yang dibutuhkan antara kedua sistem manajemen adalah 1 (satu) bulan lebih lama pada proyek konstruksi jalan aspal berbasis masyarakat, jumlah bulan terbanyak adalah 14 (empat belas) bulan. Jadi prosentase selisih waktu adalah :

$$\begin{aligned} \text{Prosentase selisih} &= \frac{(\text{waktu berbasis masyarakat} - \text{waktu terstandar})}{(\text{jumlah waktu terbanyak})} \times 100\% \\ &= \frac{(14 - 13)}{(14)} \times 100\% \\ &= \frac{(1)}{(14)} \times 100\% \\ &= 7,14\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat 7,14% lebih lama dari proyek pembangunan rumah tinggal terstandar.

5.30 Pembahasan Perbandingan antara Penerapan Manajemen Konstruksi Terstandar dan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat

a. Pada Tahap Persiapan

1) Proyek Pembangunan Jalan Aspal

Sama-sama dilakukan kegiatan persiapan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terlibat dalam persiapan proyek. Pada proyek jalan aspal terstandar dilakukan survei awal lokasi dan rancangan kasar proyek yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pada SKPD terkait. Pada proyek jalan aspal berbasis masyarakat dilaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh

Pemerintah (Pemprov dan Pemkab) dan Konsultan (PMU, NMC dan DMC).

2) Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

Sama-sama dilakukan kegiatan persiapan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terlibat dalam persiapan proyek. Pada proyek saluran air limbah terstandar dilakukan identifikasi dan pengembangan gagasan, studi kelayakan, rancangan kasar dan organisasi pelaksana yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pada SKPD terkait, warga masyarakat dan konsultan perencana. Pada proyek saluran air limbah berbasis masyarakat dilaksanakan kegiatan sosialisasi, penyiapan TFL, pemilihan dan penetapan lokasi, pemicuan masyarakat dan pembentukan KSM yang dilakukan oleh Pemerintah (Kabupaten/SKPD terkait, Camat, Lurah, Fasilitator, Tenaga Sanitari/Puskesmas /Satker PLPP), Masyarakat (Tokoh Masyarakat, Masyarakat Pengguna dan Masyarakat terkena dampak).

3) Proyek Pembangunan Rumah Tinggal

Sama-sama dilakukan kegiatan persiapan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terlibat dalam persiapan proyek. Pada proyek rumah tinggal terstandar dilaksanakan identifikasi, pengembangan dan evaluasi gagasan, penentuan konsep, penyusunan jadwal, biaya dan organisasi pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pada SKPD terkait dan Konsultan Perencana. Pada proyek rumah tinggal berbasis masyarakat dilaksanakan kegiatan loby, lokakarya, penetapan lokasi, pengadaan konsultan dan fasilitator yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemprov dan Pemkab) dan Konsultan (PMU, NMC dan DMC).

b. Pada Tahap Perancangan

1) Proyek Pembangunan Jalan Aspal

Sama-sama dilakukan kegiatan perancangan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terlibat dalam perancangan proyek. Pada proyek jalan aspal terstandar dilaksanakan

survei harga serta perencanaan detail proyek yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dan tim perencana pada SKPD terkait. Pada proyek jalan aspal berbasis masyarakat dilaksanakan kegiatan penyusunan dan sinkronisasi RPP yang dilakukan oleh Pemerintah (Pembkab, Kecamatan, Desa dan Fasilitator), Konsultan (PMU, NMC dan DMC) dan masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).

2) Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

Sama-sama dilakukan kegiatan perancangan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terlibat dalam perancangan proyek. Pada proyek saluran air limbah terstandar dilaksanakan perencanaan detail proyek dan review desain perancangan yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dan tim perencana pada SKPD terkait dan Konsultan Perencana. Pada proyek saluran air limbah berbasis masyarakat dilaksanakan kegiatan penyusunan RKM yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemda/DPUP, Kecamatan, Desa dan Fasilitator dan masyarakat (KSM, Tokoh masyarakat dan Masyarakat pengguna).

3) Proyek Pembangunan Rumah Tinggal

Sama-sama dilakukan kegiatan perancangan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terlibat dalam perancangan proyek. Pada proyek rumah tinggal terstandar dilaksanakan survei harga serta perencanaan detail proyek yang dilakukan oleh SKPD terkait dan konsultan perencana. Pada proyek rumah tinggal berbasis masyarakat dilaksanakan kegiatan penyusunan dan sinkronisasi RPP yang dilakukan oleh Pemerintah (Pembkab, Kecamatan, Desa dan Fasilitator), Konsultan (PMU, NMC dan DMC) dan masyarakat (TPK/Tim Pelaksana Kegiatan, PP/Panitia Pembangunan dan masyarakat penerima program).

c. Pada Tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement

1) Proyek Pembangunan Jalan Aspal

Sama-sama dilakukan kegiatan pengadaan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek. Pada proyek jalan aspal terstandar dilakukan proses pengadaan barang dan jasa/kontrak penyedia jasa dengan cara pengadaan langsung. Pada proyek jalan aspal berbasis masyarakat hanya dilaksanakan pengadaan barang/material bahan bangunan oleh suplier dengan cara penunjukan langsung.

2) Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

Sama-sama dilakukan kegiatan pengadaan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek. Pada proyek saluran air limbah terstandar dilakukan proses pengadaan barang dan jasa/kontrak penyedia jasa dengan cara pemilihan langsung melalui Unit Layanan Pengadaan. Pada proyek saluran air limbah berbasis masyarakat hanya dilaksanakan pengadaan barang/material bahan bangunan oleh suplier dengan cara/metode penunjukan langsung oleh masyarakat.

3) Proyek Pembangunan Rumah Tinggal

Sama-sama dilakukan kegiatan pengadaan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek. Pada proyek rumah tinggal terstandar dilakukan proses pengadaan barang dan jasa/kontrak penyedia jasa cara pemilihan langsung melalui Unit Layanan Pengadaan. Pada proyek rumah tinggal berbasis masyarakat hanya dilaksanakan pengadaan barang/material bahan bangunan oleh suplier dengan cara penunjukan langsung.

d. Pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

1) Proyek Pembangunan Jalan Aspal

Sama-sama dilakukan kegiatan konstruksi untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi proyek. Pada proyek jalan aspal terstandar pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh

penyedia jasa. Pada proyek jalan aspal berbasis masyarakat pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat.

2) Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

Sama-sama dilakukan kegiatan konstruksi untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi proyek. Pada proyek saluran air limbah terstandar pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh penyedia jasa. Pada proyek saluran air limbah berbasis masyarakat pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat.

3) Proyek Pembangunan Rumah Tinggal

Sama-sama dilakukan kegiatan konstruksi untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi proyek. Pada proyek rumah tinggal terstandar pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh penyedia jasa. Pada proyek rumah tinggal berbasis masyarakat pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh masyarakat.

e. Pada Tahap Pengoperasian/Penyerahan Hasil Pekerjaan

1) Proyek Pembangunan Jalan Aspal

Sama-sama dilakukan kegiatan penyerahan hasil pekerjaan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan pihak dan kegiatan yang terlibat dalam penyerahan hasil pekerjaan proyek. Pada proyek jalan aspal terstandar dilaksanakan proses penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia jasa kepada SKPD terkait. Pada proyek jalan aspal berbasis masyarakat dilaksanakan proses penyerahan hasil pekerjaan dari masyarakat kepada Pemerintah dilanjutkan penyerahan kembali dari Pemerintah kepada masyarakat untuk difungsikan.

2) Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

Sama-sama dilakukan kegiatan penyerahan hasil pekerjaan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan pihak dan kegiatan yang terlibat dalam penyerahan hasil pekerjaan proyek. Pada proyek saluran air limbah terstandar dilaksanakan proses penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia jasa kepada SKPD terkait. Pada proyek saluran air limbah berbasis masyarakat dilaksanakan proses penyerahan hasil pekerjaan dari

masyarakat kepada Pemerintah dilanjutkan penyerahan kembali dari Pemerintah kepada masyarakat untuk difungsikan.

3) **Proyek Pembangunan Rumah Tinggal**

Sama-sama dilakukan kegiatan penyerahan hasil pekerjaan untuk kedua jenis manajemen, terdapat perbedaan pihak dan kegiatan yang terlibat dalam penyerahan hasil pekerjaan proyek. Pada proyek rumah tinggal terstandar dilaksanakan proses penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia jasa kepada SKPD terkait. Pada proyek rumah tinggal berbasis masyarakat dilaksanakan proses penyerahan hasil pekerjaan dari masyarakat kepada Pemerintah dilanjutkan penyerahan kembali dari Pemerintah kepada masyarakat untuk difungsikan.

f. Kendala

- 1) Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan proyek terstandar mulai dari tahap perencanaan hingga penyerahan hasil pekerjaan antara lain : terjadi konflik antar pemangku kepentingan, gagal lelang yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana, material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai,
- 2) Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan proyek berbasis masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga penyerahan hasil pekerjaan antara lain : SDM yang kurang memahami pentingnya pelaksanaan proyek, material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai, terjadi konflik antar pemangku kepentingan, Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek, pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi,

g. Kelebihan

- 1) Kelebihan dalam pelaksanaan proyek terstandar mulai dari tahap perencanaan hingga penyerahan hasil pekerjaan antara lain : perencanaan dilaksanakan oleh tim yang sudah ahli di bidang perencanaan, diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang disyaratkan,

pelaksanaan konstruksi bisa diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis, penyerahan hasil pekerjaan tidak rumit karena hanya melibatkan dua pihak yaitu penyedia jasa dan SKPD terkait/Dinas PU,

- 2) Kelebihan dalam pelaksanaan proyek berbasis masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga penyerahan hasil pekerjaan antara lain : keputusan publik yang diambil lebih efektif, memberikan rasa kepuasan dan dukungan publik yang kuat, proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan, masyarakat berperan aktif dalam proses perancangan, kerukunan warga masyarakat terlihat jelas pada proses konstruksi, dalam bentuk gotong royong, masyarakat bertanggung jawab penuh terhadap hasil pembangunan, warga masyarakat lebih tahu tentang keadaan lapangan yang akan dibangun sehingga menghasilkan desain yang benar-benar sesuai dengan keadaan, dan kebutuhan masyarakat, suplier yang ditunjuk oleh masyarakat memiliki hubungan baik dengan masyarakat sekitar karena berada tidak jauh dari lokasi proyek, dana yang tersedia biasanya tersisa dan bisa digunakan untuk penambahan item pekerjaan lain, masyarakat lebih mengutamakan kualitas bahan bangunan, karena rumah tinggal dibangun untuk kebutuhan dan kepentingan diri sendiri, Masyarakat faham kerjasama dalam kegiatan berkelompok, masyarakat faham membangun rumah dengan struktur tahan gempa, masyarakat sedikit banyak mengerti tata cara pengadaan barang dan membukukan belanja kelompok, masyarakat faham akibat yang ditimbulkan baik positif maupun negatif akibat pembangunan rumah dari segi lingkungan maupun sosial, masyarakat faham tentang tata cara merawat dan mengembangkan rumah kedepan.

5.31 Pembahasan Rangkaian Kegiatan pada Pelaksanaan Proyek dengan Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat

Rangkaian kegiatan proyek pembangunan berbasis masyarakat mempunyai urutan yang khas yang disajikan dalam matrik kegiatan dan pihak terlibat sbb :

5.31.1 Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Konstruksi Berbasis Masyarakat Pada Proyek Pembangunan Jalan Aspal

a. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap persiapan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat

Tabel 5.67 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap persiapan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat													
		Pemerintah					Konsultan			Masyarakat				Suplier	
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Fasilitator	PMU	NMC	DMC	TPK/BKM	PP/KP	TIP	Masyarakat penerima program	material	Tenaga kerja
1	Loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten							PK	PU						
2	Lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten		PU			PM		PK PBI							
3	Penetapan lokasi														
a	Identifikasi Indikasi lokasi/desa replikasi yang rawan bencana		PU					PM PBI							
b	Pengajuan surat minat resmi dari Pemkab ke Pemkot	PM	PU					PM	PK						
c	Pemprov meneruskan usulan Pemkab ke Dirjen Cipta Karya PU untuk diteruskan ke Bank Dunia/donor lain	PU						PM	PK						
d	Verifikasi usulan lokasi/Desa Replikasi							PM	PU						
e	Dirjen Cipta Karya PU meneruskan usulan ke Bank Dunia/donor lain						PU								
4	Pengadaan dan pelatihan praturgas Konsultan Kabupaten/kota						PM	PU PBI							
5	Pengadaan dan Pelatihan Praturgas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF						PM	PU PBI	PK						

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

b. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap perancangan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat

Tabel 5.68 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap perancangan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat													
		Pemerintah					Konsultan			Masyarakat				Suplier	
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Fasilitator	PMU	NMC	DMC	TPK/BKM	PP/KP	TIP	Masyarakat penerima program	Material	Tenaga kerja
1	Orientasi Sosial dan Wilayah				PK	PU		PBI	PM PBD	PK					
2	Sosialisasi tingkat desa				PU	PE		PBI	PM PBD	PK					
3	Sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW)				PK	PE PM		PBI	PM PBD	PU		PU			
4	Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)				PK	PE		PBI	PM PBD	PU		PK			
5	Pembentukan Tim Inti Perencana (TIP)				PK	PE		PBI	PM PBD	PU		PK			
6	Pelatihan BKM-TPK-TIP				PK	PE			PM PBD	PU					
7	Pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus				PK	PE			PM PBD	PU					
8	Penyiapan Peta Dasar		PK					PM	PU						
9	Tinjauan/Review Dokumen Pembangunan		PK		PU	PE		PBI	PM PBD	PU	PU	PU	PK		
10	Pemetaan Swadaya				PK	PE		PBI	PM PBD	PK		PU	PU		
11	Rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya				PK	PE		PBI	PM PBD	PK		PU	PU		
12	Rembug Perumusan Visi dan Misi Desa				PU	PE		PBI	PM PBD	PU		PU	PU		
13	Rembug pemecahan masalah				PK	PE		PBI	PM PBD	PK		PU	PU		
14	Rembug penyusunan rencana tata ruang desa				PK	PE		PBI	PM PBD	PK		PU	PU		
15	Rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana				PK	PE		PBI	PM PBD	PK		PU	PU		
16	Sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah)		PK	PK	PU	PE		PBI	PM PBD	PU		PU	PU		
17	Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1				PU	PE		PBI	PM PBD	PU		PU	PU		
18	Konsultasi publik				PU	PE		PBI	PM PBD	PU		PU	PU		
19	Verifikasi program							PBI	PU						
20	Rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman				PU	PE		PBI	PM	PU		PU	PU		
21	Penyusunan dokumen RPP				PK	PE		PBI	PM	PU		PU			

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

*) alternatif

**) kegiatan yang dilakukan bersamaan

c. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat

Tabel 5.69 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat													
		Pemerintah					Konsultan			Masyarakat				Suplier	
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Fasilitator	PMU	NMC	DMC	TPK/BKM	PP/KP	TIP	Masyarakat penerima program	Material	Tenaga kerja
1	Pembentukan Tim Pengadaan					PE					PU				
2	Persiapan Tim Pengadaan (HPS, RKS, Persyaratan Administrasi dan kualifikasi teknis, dokumen lelang & form evaluasi)					PE					PU				
3	Pengadaan *)														
3.a	Pelelangan Umum														
a	Menyusun dokumen lelang/pengadaan					PE					PU				
b	Melaksanakan pengumuman secara terbuka					PE					PU				
c	Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang					PE					PU				
d	Menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta					PE					PU				
e	Penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan					PE					PU				
f	Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang				PK	PE			PK		PU	PK			
3.b	penunjukan langsung														
a	Survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan					PE					PU				
b	Menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rebug warga					PE					PU		PK	PK	
c	Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya				PK	PE			PK		PU	PK			
4	Penandatanganan Kontrak **)														
4.a	Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang.					PE					PU				
4.b	Penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborongan					PE					PU			PU	

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

d. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat

Tabel 5.70 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat													
		Pemerintah					Konsultan			Masyarakat				Suplier	
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Fasilitator	PMU	NMC	DMC	TPK/BKM	PP/KP	TIP	Masyarakat penerima program	Material	Tenaga kerja
1	Pembentukan Panitia Pembangunan				PU	PE				PU					
2	Survei Teknis dan Harga Satuan									PU					
3	Pelatihan/coaching penyusunan DTPL dan DED				PU	PE		PBI	PM	PBD	PU		PU		
4	Penyusunan Dokumen Teknik Pembangunan Lingkungan (DTPL), termasuk di dalamnya penyiapan dokumen kajian dampak Sosial dan Lingkungan				PK	PE		PBI	PM	PBD	PK		PU	PK	
5	Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi					PE		PBI	PM	PBD	PU		PU	PK	
6	Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan					PE		PBI	PM	PBD	PU		PU	PK	
7	Proses Pencairan BDL					PE		PBI	PM	PBD	PU		PU	PK	
8	Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing titik kegiatan					PE			PM	PBD	PK		PU	PK	
9	Pelaksanaan kegiatan fisik				PK	PE		PBI	PM	PBD	PU		PU	PK	
10	Pelaksanaan kegiatan non fisik- Pelatihan dan Simulasi DRR				PK	PE			PM	PBD	PU		PU	PK	

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

*) alternatif

**) kegiatan yang dilakukan bersamaan

e. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Pengoperasian/Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat

Tabel 5.71 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Pengoperasian/Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan jalan berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat													
		Pemerintah					Konsultan			Masyarakat				Suplier	
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Fasilitator	PMU	NMC	DMC	TPK/BKM	PP/KP	TIP	Masyarakat penerima program	Material	Tenaga kerja
1	Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES				PU	PE							PU		
2	Penyerahan konstruksi bangunan kepada masyarakat (bersifat peresmian)				PU	PE							PU		
3	Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan		PK	PK	PK	PE			PM	PBD	PU	PU			

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

5.31.2 Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Konstruksi Berbasis Masyarakat Pada Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

a. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap persiapan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

Tabel 5.72 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap persiapan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat												
		Pemerintah						Masyarakat				Suplier		
		Provinsi	Kabupaten	Satker PLPP /Tenaga Sanitari	Kecamatan	Desa	Fasilitator	KSM	Tokoh Masyarakat	Masyarakat Pengguna	Masyarakat terkena dampak	Material	Tenaga kerja	
1	Sosialisasi DAK SLBM kepada pemerintah kabupaten oleh pemerintah pusat/Kementerian PU	PU	PK											
2	Sosialisasi DAK SLBM kepada Camat/Lurah dandaerah rawan sanitasi oleh pemerintah kabupaten		PU		PK	PK								
3	Penyiapan Tenaga Fasilitator Lapangan/TFL (penyiapan, seleksi dan pelatihan)		PU											
4	Pemilihan Lokasi dengan dua tahap seleksi (daftar panjang/longlist dan daftar pendek/shortlist)		PU				PU		PK					
5	Pemicuan Masyarakat sosialisasi tentang perubahan perilaku pola hidup bersih dan sehat		PU	PU					PK	PK	PK			
6	Penetapan Lokasi		PU				PU		PK	PK	PK			
7	Pembentukan dan Penetapan KSM					PU			PK	PK				

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

b. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

Tabel 5.73 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap perancangan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat												
		Pemerintah						Masyarakat				Suplier		
		Provinsi	Kabupaten	Satker PLPP /Tenaga Sanitari	Kecamatan	Desa	Fasilitator	KSM	Tokoh Masyarakat	Masyarakat Pengguna	Masyarakat terkena dampak	Material	Tenaga kerja	
1	Pendampingan TFL Teknis (penyusunan RKM)													
	Pemilihan teknologi yang akan digunakan dalam pengolahan limbah		PK				PE	PU	PU	PU				
	Pengukuran lahan dan Saluran Rumah						PE	PU	PK	PK	PK			
	Pembuatan gambar/DED						PE	PU	PK	PK				
	Penyusunan Rencana Anggaran Biaya/RAB						PE	PU	PK	PK				
	Penyusunan Spesifikasi Teknis						PE	PU	PK	PK				
2	Pendampingan TFL Sosial													
	Pembuatan Klasifikasi kesejahteraan masyarakat						PE	PU	PK	PK				
	Persiapan tenaga kerja						PE	PU	PK	PK				
	Pembukaan rekening bersama		PU				PU	PU						
3	Verifikasi RKM		PU				PE	PU						

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

*) alternatif

**) kegiatan yang dilakukan bersamaan

c. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Pengadaan / Pelelangan / Procurement proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

Tabel 5.74 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Pengadaan / Pelelangan / Procurement proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat											
		Pemerintah						Masyarakat				Suplier	
		Provinsi	Kabupaten	Satker PLPP /Tenaga Sanitari	Kecamatan	Desa	Fasilitator	KSM	Tokoh Masyarakat	Masyarakat Pengguna	Masyarakat terkena dampak	Material	Tenaga kerja
1	Perjanjian kerja KSM dengan SKPD (Dinas PU)		PU				PE	PU					
2	Kontrak perjanjian antara KSM dengan Penyedia bahan bangunan /suplier bahan bangunan dan tenaga kerja						PE	PU				PU	PU

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

d. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Kegiatan Konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

Tabel 5.75 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Kegiatan Konstruksi proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat											
		Pemerintah						Masyarakat				Suplier	
		Provinsi	Kabupaten	Satker PLPP /Tenaga Sanitari	Kecamatan	Desa	Fasilitator	KSM	Tokoh Masyarakat	Masyarakat Pengguna	Masyarakat terkena dampak	Material	Tenaga kerja
1	Penjelasan teknis konstruksi		PU				PE	PK		PK			PK
2	Pelaksanaan konstruksi dengan tahap									PK			
a	Rembug warga					PK	PE	PU	PK	PK	PK		
b	Survei pemetaan ulang						PE	PU	PK	PK	PK		
c	Pembersihan dan penyiapan lahan IPAL						PE	PU	PK	PK	PK		
d	Penyiapan peralatan K3, sign board, turap pengaman galian						PE	PU					
e	Penyiapan direksi keet, gudang, area kerja						PE	PU					
f	Pengadaan dan pembelian barang oleh panitia pengadaan						PE	PU				PK	
g	Pembagian grup dan area kerja						PE	PU					
h	Pelaksanaan pekerjaan		PK	PK	PK	PK	PE	PU	PK	PK	PK	PK	PK
i	Monitoring dan evaluasi		PU				PE	PU					

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

e. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Pengoperasian / Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

Tabel 5.76 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Pengoperasian / Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat											
		Pemerintah						Masyarakat				Suplier	
		Provinsi	Pemerintah Kabupaten	Satker PLPP /Tenaga Sanitari	Kecamatan	Desa	Fasilitator	KSM	Tokoh Masyarakat	Masyarakat Pengguna	Masyarakat terkena dampak	Material	Tenaga kerja
1	Menguji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap dioperasikan (comissioning uji kebocoran IPAL)		PK				PE	PU					
2	Rembug warga		PK		PK	PU	PE	PK	PK	PK	PK		
3	Serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan hasil proyek kepada KSM untuk difungsikan		PU			PK	PE	PU	PK	PK			
4	Pengumpulan dan penyusunan dokumen pelaksanaan						PE	PU					
5	Penyerahan operasi dan pemeliharaan kepada masyarakat		PU			PK							
6	Pengoperasian organisasi pengelolaan dan jaringan SR dan IPAL							PU		PK			
7	Penyerahan laporan akhir kegiatan (Laporan teknik, laporan keuangan dan laporan logistik)		PK					PU					

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

*) alternatif

**) kegiatan yang dilakukan bersamaan

5.31.3 Matrik kegiatan dan pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan Konstruksi Berbasis Masyarakat Pada Proyek Pembangunan Rumah Tinggal

a. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Persiapan proyek pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.77 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Persiapan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat													
		Pemerintah					Konsultan			Masyarakat				Suplier	
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Fasilitator	PMU	NMC	DMC	TPK/BKM	PP/KP	TIP	Masyarakat penerima program	material	Tenaga kerja
1	Loby strategis dalam rangka sosialisasi Replikasi proyek REKOMPAK-JRF di Tingkat Provinsi dan Kabupaten						PK	PU							
2	Lokakarya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-JRF di tingkat kabupaten		PU			PM	PK PBI								
3	Penetapan lokasi														
a	Identifikasi Indikasi lokasi/desa replikasi yang rawan bencana		PU				PM PBI								
b	Pengajuan surat minat resmi dari Pemkab ke Pemkot	PM	PU				PM	PK							
c	Pemprov meneruskan usulan Pemkab ke Dirjen Cipta Karya PU untuk diteruskan ke Bank Dunia/donor lain	PU					PM	PK							
d	Verifikasi usulan lokasi/Desa Replikasi						PM	PU							
e	Dirjen Cipta Karya PU meneruskan usulan ke Bank Dunia/donor lain					PU									
4	Pengadaan dan pelatihan praturgas Konsultan Kabupaten/kota					PM	PU PBI								
5	Pengadaan dan Pelatihan Praturgas Fasilitator proyek REKOMPAK-JRF					PM	PU PBI	PK							

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pemandu dengan SOP Induk, PBD = Pemandu dengan SOP Detail

b. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Perancangan proyek pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.78 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Perancangan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat													
		Pemerintah					Konsultan			Masyarakat				Suplier	
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Fasilitator	PMU	NMC	DMC	TPK/BKM	PP/KP	TIP	Masyarakat penerima program	Material	Tenaga kerja
1	Orientasi Sosial dan Wilayah				PK	PU		PBI	PM PBD	PK					
2	Sosialisasi tingkat desa				PU	PE		PBI	PM PBD	PK					
3	Sosialisasi Tingkat Basis (Dusun /Kampung /RW)				PK	PE PM		PBI	PM PBD	PU		PU			
4	Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)				PK	PE		PBI	PM PBD	PU		PK			
5	Pembentukan Tim Inti Perencana (TIP)				PK	PE		PBI	PM PBD	PU		PK			
6	Pelatihan BKM-TPK-TIP				PK	PE			PM PBD	PU					
7	Pelaksanaan Coaching Fasilitator dan TIP pada Kegiatan Tahapan Siklus				PK	PE			PM PBD	PU					
8	Penyiapan Peta Dasar		PK					PM	PU						
9	Tinjauan/Review Dokumen Pembangunan		PK		PU	PE		PBI	PM PBD	PU	PU	PK			
10	Pemetaan Swadaya				PK	PE		PBI	PM PBD	PK		PU			
11	Rembug analisis hasil identifikasi potensi dan masalah melalui Pemetaan Swadaya				PK	PE		PBI	PM PBD	PK		PU	PU		
12	Rembug Perumusan Visi dan Misi Desa				PU	PE		PBI	PM PBD	PU		PU	PU		
13	Rembug pemecahan masalah				PK	PE		PBI	PM PBD	PK		PU	PU		
14	Rembug penyusunan rencana tata ruang desa				PK	PE		PBI	PM PBD	PK		PU	PU		
15	Rembug penyusunan rencana skenario pengurangan risiko bencana				PK	PE		PBI	PM PBD	PK		PU	PU		
16	Sinkronisasi RPP (Musyawarah Antar Desa/MAD dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah)		PK	PK	PU	PE		PBI	PM PBD	PU		PU	PK		
17	Musyawarah Desa (Musdes) penetapan PJM program tahun-1				PU	PE		PBI	PM PBD	PU		PU	PU		
18	Konsultasi publik				PU	PE		PBI	PM PBD	PU		PU	PU		
19	Verifikasi program							PBI	PU						
20	Rencana tindak rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman				PU	PE		PBI	PM	PU		PU	PU		
21	Penyusunan dokumen RPP				PK	PE		PBI	PM	PU		PU			

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pemandu dengan SOP Induk, PBD = Pemandu dengan SOP Detail

*) alternatif

**) kegiatan yang dilakukan bersamaan

c. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement proyek pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.79 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Pengadaan/Pelelangan/Procurement proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat																
		Pemerintah					Konsultan			Masyarakat				Suplier				
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Fasilitator	PMU	NMC	DMC	TPK/BKM	PP/KP	TIP	Masyarakat penerima program	Material	Tenaga kerja			
1	Pembentukan Tim Pengadaan					PE												
2	Persiapan Tim Pengadaan (HPS, RKS, Persyaratan Administrasi dan kualifikasi teknis, dokumen lelang & form evaluasi)					PE												
3	Pengadaan *)																	
3.a	Pelelangan Umum																	
a	Menyusun dokumen lelang/pengadaan					PE												
b	Melaksanakan pengumuman secara terbuka					PE												
c	Pendaftaran peserta dan pengambilan dokumen lelang					PE												
d	Menyiapkan undangan penjelasan lelang untuk peserta					PE												
e	Penjelasan lelang diikuti penjelasan lapangan					PE												
f	Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan penetapan pemenang lelang				PK	PE							PK				PK	
3.b	penunjukan langsung																	
a	Survei harga dan penyusunan dokumen pengadaan					PE												
b	Menetapkan calon tunggal jasa pemborong tunggal melalui rebug warga					PE												PK
c	Pemasukan, pembukaan, evaluasi penawaran dan negosiasi teknis serta biaya				PK	PE								PK				
4	Penandatanganan Kontrak **)																	
4.a	Penandatanganan perjanjian kerjasama antara KP dan Penyedia barang.					PE												PU
4.b	Penandatanganan kerjasama antara KP dan penyedia jasa pemborong					PE												PU

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

d. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.80 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat																
		Pemerintah					Konsultan			Masyarakat				Penyedia Jasa				
		Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Fasilitator	PMU	NMC	DMC	TPK/BKM	PP/KP	TIP	Masyarakat penerima program	Suplier	Tenaga Ahli			
1	Pembentukan KP/Kelompok Pemukiman				PU	PE												
2	Penyusunan Rencana Tapak					PE												
3	Menentukan Desain Bangunan Huntap																	
4	Survei Teknis dan Harga					PE												
5	Pelatihan/coaching penyusunan DTPP dan DED																	
6	Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Permukiman (DTPP)				PU	PE												PK
7	Pengajuan, pencairan dan penyaluran BDR					PE												
8	Pelatihan dan bimbingan manajemen konstruksi					PE												
9	Pelatihan dan bimbingan pengelolaan administrasi dan keuangan					PE												
10	Proses Pencairan BDR					PE												PK
11	Sosialisasi dan kontrak sosial di masing-masing KP					PE												PK
12	Pelaksanaan kegiatan fisik					PE												PK

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

e. Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat pada tahap Pengoperasian/Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal

Tabel 5.81 Matrik Kegiatan dan Pihak yang terlibat tahap Pengoperasian/Penyerahan hasil pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal berbasis masyarakat

Urutan ke	Kegiatan	Pihak Yang Terlibat																
		Pemerintah					Konsultan			Masyarakat				Penyedia Jasa				
		Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten	Kecamatan	Desa	Fasilitator	PMU	NMC	DMC	TPK/BKM	PP/KP	TIP	Masyarakat penerima program	Suplier	Tenaga Ahli			
1	Penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan dari KP ke Desa				PU	PE												
2	Penyerahan kembali hasil pembangunan oleh Desa untuk difungsikan oleh KP				PU	PE												
3	Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan		PK	PK	PK	PE												

Keterangan : PU = Pelaku Utama, PK = Pelaku Pendukung, PE = Pemandu, PM = Pemonitoring, PBI = Pembanding dengan SOP Induk, PBD = Pembanding SOP Detail

*) alternatif

***) kegiatan yang dilakukan bersamaan

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ada 4 (empat) pihak (Pemerintah, Konsultan, Masyarakat dan Suplier) yang terlibat dalam proyek pembangunan jalan aspal dan rumah tinggal berbasis masyarakat dan 3 (tiga) pihak (Pemerintah, Masyarakat dan Suplier) dalam proyek pembangunan saluran air limbah berbasis masyarakat.
- b. Penerapan fungsi manajemen konstruksi pada proyek konstruksi berbasis masyarakat dalam aspek mutu, mutu pelaksanaan proyek berbasis masyarakat lebih baik dari proyek terstandar, indikatornya : penggunaan bahan material yang lebih baik, proses konstruksi dilaksanakan dengan cermat dan teliti serta bangunan yang dihasilkan memenuhi spesifikasi teknis. Dalam aspek biaya, biaya yang dibutuhkan untuk proyek jalan aspal lebih mahal 25%, proyek saluran air limbah lebih murah 66,58% dan proyek rumah tinggal lebih murah 72,75%. Dalam aspek waktu, waktu yang dibutuhkan untuk proyek jalan aspal lebih lama 7,96%, proyek saluran air limbah lebih cepat 20% dan proyek rumah tinggal lebih lama 7,14%.
- c. Perbandingan dari pelaksanaan proyek dengan manajemen konstruksi terstandar dan manajemen konstruksi berbasis masyarakat
 - 1) Tahap perencanaan : sama-sama dilakukan proses perencanaan, perbedaanya pada urutan perencanaan dan pihak yang terlibat dalam proses perencanaan.
 - 2) Tahap perancangan : untuk proyek konstruksi terstandar perancangan dilakukan oleh konsultan perencana, sedangkan pada proyek konstruksi berbasis masyarakat perancangan dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan fasilitator.

- 3) Tahap pengadaan : untuk proyek konstruksi terstandar terdapat proses pengadaan barang dan jasa, sedangkan pada proyek konstruksi berbasis masyarakat hanya dilakukan proses pengadaan barang.
- 4) Tahap Konstruksi : untuk proyek konstruksi terstandar konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa, sedangkan pada proyek konstruksi berbasis masyarakat konstruksi dilakukan oleh masyarakat.
- 5) Tahap penyerahan hasil pekerjaan : untuk proyek konstruksi terstandar dilakukan penyerahan hasil dari penyedia jasa kepada Pemerintah, sedangkan pada proyek konstruksi berbasis masyarakat dilakukan penyerahan hasil pekerjaan dari masyarakat kepada Pemerintah dan penyerahan kembali dari Pemerintah kepada masyarakat untuk difungsikan.
- 6) Kendala yang sering muncul pada proyek terstandar dan proyek berbasis masyarakat antara lain : terjadi konflik antar pemangku kepentingan, SDM yang kurang memahami pentingnya pelaksanaan proyek, gagal lelang, penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan, Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan proyek, material dan kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang sesuai dengan spesifikasi teknis, pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi, progres pekerjaan dan laporan administrasi yang tidak sesuai, tidak adanya jaminan keselamatan kerja khususnya pada proyek konstruksi berbasis masyarakat.
- 7) Kelebihan yang terjadi bila pelaksanaan proyek menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat antara lain : keputusan publik yang diambil lebih efektif, memberikan rasa kepuasan, dukungan publik yang kuat, proses perencanaan transparan dan aksesibel sehingga mempermudah proses pembangunan, masyarakat mengetahui keadaan lingkungan proyek , berperan aktif, mengutamakan kualitas bahan bangunan dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil proyek, sisa dana digunakan untuk membangun item pekerjaan lain.

- d. Rangkaian kegiatan pada pengelolaan pelaksanaan proyek dengan manajemen konstruksi berbasis masyarakat mempunyai kekhasan seperti disajikan dalam matrik kegiatan dan pihak yang terlibat pada halaman 322 s/d 327.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam tesis ini adalah :

- a. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan dalam aspek mutu, biaya dan waktu maka disarankan agar pelaksanaan proyek pembangunan saluran air limbah dan rumah tinggal menggunakan manajemen konstruksi berbasis masyarakat, sedangkan pelaksanaan proyek pembangunan jalan aspal menggunakan manajemen konstruksi terstandar.
- b. Untuk mengatasi kendala-kendala utama yang sering terjadi pada pelaksanaan proyek pembangunan (jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal) baik yang berbasis masyarakat maupun yang terstandar perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : pemahaman dan penjelasan tentang arti penting pelaksanaan proyek, pelatihan tukang bagi masyarakat penerima program guna menambah pemahaman tentang spesifikasi konstruksi bangunan dan mencegah kesalahan pada waktu pelaksanaan konstruksi bangunan, penggunaan bahan material sesuai spesifikasi teknis, pembuatan laporan administrasi secara bertahap dianggarkan biaya untuk K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan) Konstruksi pada proyek dengan sistem pemberdayaan masyarakat.
- c. Karena analisa penerapan manajemen konstruksi dengan sistem pemberdayaan masyarakat yang diteliti baru pada tiga jenis proyek pembangunan (jalan aspal, saluran air limbah dan rumah tinggal), maka perlu dilakukan penelitian untuk jenis pekerjaan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Vitri, Gusni ST, *Studi Evaluasi Implementasi Proyek Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Kontrak Masyarakat (studi kasus program paket p2kp kabupaten lima puluh kota).*
- Chasanah, Umami, 2013, *komparasi proyek konstruksi kontraktual dengan proyek konstruksi berbasis pemberdayaan masyarakat*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Karyadi, Lukman, 2010, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di RT 30 RW 07 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, kota Yogyakarta*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Musrifah, Riani, 2009, *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Dopleng Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Fadli, Muhamma, 2010, *Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Wilayah Perbatasan Indonesia–Malaysia*, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Ir, Lestari, Sutji, M.Sc, 2012, *Aspek Hukum dan Administrasi Proyek*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Perpres RI nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 2012, Materi Mata Kuliah Manajemen Konstruksi.
- 2010, *Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan*, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- 2011, *Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan*, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.

- 2014, *Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat*, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Riska Wulandari, Putu, 2013, *Analisis Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Gerokgak, Buleleng*, Universitas Udayana, Denpasar.
- National Management Consultant, Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas (Re-Kompak) DIY, Jateng, Jawa Barat, *Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Pemukiman (Community Settlement Plant) Berbasis Mitigasi Bencana*, Jl. Melati 173 A Sambilegi Baru – Maguwoharjo – Depok – Sleman- DI Yogyakarta.
- Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2010, *Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas, Pedoman Operasional Umum Replikasi Rekompak JRF*, Jl. Melati 173 A Sambilegi Baru – Maguwoharjo – Depok – Sleman- DI Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Sleman, 2010, *Buku Putih Sanitasi, Kawasan Perkotaan Kabupaten Sleman*, Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Sleman, Bappeda Kabupaten Sleman Jl. Parasamnya No. 1 Sleman.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Wilayah Provinsi D.I.Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Kabupaten Sleman, 2013, *Penanganan Korban Bencana Erupsi Merapi di Kabupaten Sleman, Fasilitasi Pendampingan Pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan TA.2013*, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Kabupaten Sleman, Jl. Parasamnya Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

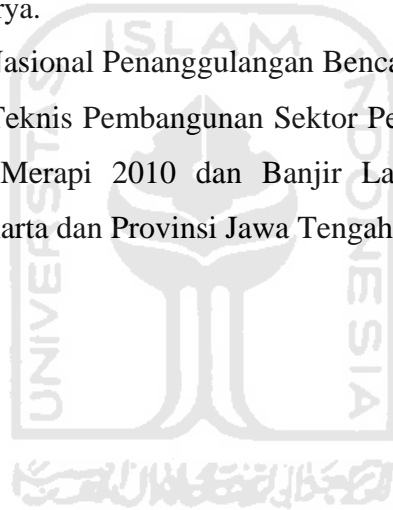
2012, *Keberhasilan itu milik masyarakat, Best Practice Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat*, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2011, *Huntara Merapi, Upaya Permukiman Transisi Pasca Bencana*, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY.

Keputusan Bupati Sleman Nomor 256/Kep.KDH/A/2011 tentang Kepala Keluarga Korban Bencana Alam Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi Tahun 2010.

2011, *REKOMPAK-CIPTA KARYA*, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Sektor Permukiman Pascabencana Erupsi Gunung Merapi 2010 dan Banjir Lahar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.



Lampiran I :

QUESTIONER WAWANCARA

Proyek Pengaspalan Jalan, Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah & Proyek Pembangunan Rumah Tinggal :

- a) Tahap Persiapan
 - a) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam tahap persiapan?
 - b) Berapa biaya yang dibutuhkan untuk persiapan proyek?
 - c) Bagaimanakah mutu hasil persiapan yang dilakukan?
 - d) Bagaimanakah mekanisme perencanaan?
 - e) Apa sajakah yang menjadi usulan proyek?
 - f) Siapa sajakah yang terlibat dalam proses perencanaan dan bagaimana peran dari masing-masing pihak terlibat?
 - g) Bagaimanakah uraian kegiatan yang dilakukan pada proses perencanaan?
 - h) Apa sajakah yang dihasilkan dari proses perencanaan?
 - i) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan?
 - j) Bagaimanakah administrasi dari proses perencanaan?
 - k) Bagaimanakah jaminan keselamatan yang digunakan?
 - l) Kendala apa saja yang muncul dalam proses perencanaan?
- b) Tahap Perancangan
 - a) Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
 - b) Berapa biaya yang dibutuhkan untuk perancangan proyek?
 - c) Bagaimanakah mutu hasil perancangan yang dilakukan?
 - d) Bagaimanakah mekanisme perancangan?
 - e) Siapa sajakah yang terlibat dalam proses perancangan dan bagaimana peran dari masing-masing pihak terlibat?
 - f) Bagaimanakah uraian kegiatan yang dilakukan pada proses perancangan?
 - g) Apa sajakah yang dihasilkan dari proses perancangan?
 - h) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses perancangan?
 - i) Bagaimanakah administrasi dari proses perancangan?
 - j) Dimanakah proses perancangan dilaksanakan?
 - k) Darimanakah sumber dana dari proyek yang akan dilaksanakan?

Lampiran I :

- l) Bagaimanakah proses pencairan dana?
- m) Bagaimanakah jaminan keselamatan yang digunakan?
- n) Kendala apa saja yang muncul dalam proses perancangan?
- c) Tahap Pengadaan / Pelelangan
 - a) Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
 - b) Berapa biaya yang dibutuhkan untuk Pengadaan proyek?
 - c) Bagaimanakah mutu hasil Pengadaan yang dilakukan?
 - d) Bagaimanakah mekanisme Pengadaan?
 - e) Siapa sajakah yang terlibat dalam proses Pengadaan dan bagaimana peran dari masing-masing pihak terlibat?
 - f) Bagaimanakah uraian kegiatan yang dilakukan pada proses Pengadaan?
 - g) Apa sajakah yang dihasilkan dari proses Pengadaan?
 - h) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses Pengadaan?
 - i) Bagaimanakah administrasi dari proses Pengadaan?
 - j) Dimanakah proses Pengadaan dilaksanakan?
 - k) Bagaimanakah jaminan keselamatan yang digunakan?
 - l) Kendala apa saja yang muncul dalam proses perancangan?
- d) Tahap Pelaksanaan kegiatan konstruksi
 - a) Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
 - b) Berapa biaya yang dibutuhkan?
 - c) Bagaimanakah mutu hasil?
 - d) Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan konstruksi?
 - e) Siapa sajakah yang terlibat dalam proses pelaksanaan konstruksi dan bagaimana peran dari masing-masing pihak terlibat?
 - f) Bagaimanakah uraian kegiatan yang dilakukan pada proses pelaksanaan konstruksi?
 - g) Apa sajakah yang dihasilkan dari proses pelaksanaan konstruksi?
 - h) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan konstruksi?
 - i) Bagaimanakah administrasi dari proses pelaksanaan konstruksi?
 - j) Dimanakah proses pelaksanaan konstruksi dilaksanakan?

Lampiran I :

- k) Bagaimana proses pelaksanaan konstruksi?
- l) Bagaimana proses pelaksanaan konstruksi?
- m) Adakah pekerjaan tambah kurang?
- n) Bagaimanakah jaminan keselamatan yang digunakan?
- o) Kendala apa saja yang muncul dalam proses pelaksanaan konstruksi?
- e) Tahap Pengoperasian / Penyerahan hasil pekerjaan
 - a) Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
 - b) Berapa biaya yang dibutuhkan?
 - c) Bagaimanakah mutu hasil?
 - d) Bagaimanakah mekanisme Penyerahan hasil pekerjaan?
 - e) Siapa sajakah yang terlibat dalam proses Penyerahan hasil pekerjaan dan bagaimana peran dari masing-masing pihak terlibat?
 - f) Bagaimanakah uraian kegiatan yang dilakukan pada proses Penyerahan hasil pekerjaan?
 - g) Apa sajakah yang dihasilkan dari proses Penyerahan hasil pekerjaan?
 - h) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses Penyerahan hasil pekerjaan?
 - i) Bagaimanakah administrasi dari proses Penyerahan hasil pekerjaan?
 - j) Dimanakah proses Penyerahan hasil pekerjaan dilaksanakan?
 - k) Bagaimanakah jaminan keselamatan yang digunakan?
 - l) Kendala apa saja yang muncul dalam proses Penyerahan hasil pekerjaan

MATRIKS PENELITIAN

No	Tahap Proyek Konstruksi	Manajemen Konstruksi Terstandar				Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat				Keterangan	
		A Jaban	B Provinsi	C Kabupaten	D Kecamatan	A Jaban	B Provinsi	C Kabupaten	D Kecamatan		
		<p>Proyek pengembangan jalan umum di kawasan akses busway kepurbakala (masduf)</p> <p>Sat. Air Limbah di Sholahuloka CV. DIA P.UTRAMANDIRI Tahun 2014.</p>	<p>Rumah Tinggal (Rumah Dinas Camat)</p> <p>Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Nzagih C.V. Arsyah Bulak Tahun 2014</p>	<p>Rumah Tinggal (Rumah Dinas Camat)</p> <p>Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan Nzagih C.V. Arsyah Bulak Tahun 2014</p>	<p>Sat. Air Limbah</p> <p>Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM-SEDM "DuaBerta"</p> <p>Wanurea RT.01.KW.07 (DuaBerta), Saribuha, Nzagih Tahun 2014</p>	<p>Rumah Tinggal</p> <p>Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM-SEDM "DuaBerta"</p> <p>Wanurea RT.01.KW.07 (DuaBerta), Saribuha, Nzagih Tahun 2014</p>	<p>Rumah Tinggal</p> <p>Kelompok Swadaya Masyarakat/KSM-SEDM "DuaBerta"</p> <p>Wanurea RT.01.KW.07 (DuaBerta), Saribuha, Nzagih Tahun 2014</p>				
	1. Perencanaan / Perisipan										
	a. Waktu	2 x 3 bulan sebelum proyek dimulai dilakukan oleh Tim Perencana akses Busway Hina Marga	2 x 3 bulan	2 x 3 bulan (pada tahun anggaran sebelum tahun pelaksanaan proyek)	2 x 3 bulan	2 x 3 bulan	2 x 3 bulan	2 x 3 bulan		A - Perak Pengawasan Jalan B - Perak Pembangunan Saluran Air Limbah C - Perak Pembangunan Rumah Tinggal	
	b. Biaya	Ada anggaran khusus perencanaan	Ada anggaran khusus perencanaan	Menggunakan biaya umum perencanaan	Menggunakan biaya (Perencana dan Masyarakat)	Menggunakan biaya (Perencana dan Masyarakat)	Menggunakan biaya (Perencana dan Masyarakat)	Menggunakan biaya (Perencana dan Masyarakat)			
	c. Matri	Sesuai dengan standar Perencana	Sesuai dengan standar Perencana	Matri sedikit lebih baik dari standar perencana	Matri sedikit lebih baik dari standar perencana	Matri sedikit lebih baik dari standar perencana	Matri sedikit lebih baik dari standar perencana	Matri sedikit lebih baik dari standar perencana			
	d. Mekanisme perencanaan	1. Survei awal lahan 2. Rancangan kasar dari proyek yang direncanakan (ditulis sederhana)	1. Survei awal lahan 2. Survei lokasi 3. Produk jumbuh pendah, perencanaan kota dan timbalaya air limbah domestik 4. Perencanaan fasilitas 5. Evaluasi 6. Perencanaan rancangan teknik Master plan 7. Studi kelangkaan 8. Perencanaan Sistem perisipan (ditulis rinci)	1. Survei awal lahan proyek 2. Rancangan kasar dari proyek yang direncanakan (ditulis sederhana)	1. Perisipan TFI 2. Sosialisasi program 3. Selekta lokasi oleh TFI 4. Perencanaan KSM 5. Pengisian data teknis oleh masyarakat (ditulis sederhana)	1. Perisipan TFI 2. Sosialisasi program 3. Selekta lokasi oleh TFI 4. Perencanaan KSM 5. Pengisian data teknis oleh masyarakat (ditulis sederhana)	1. Sosialisasi REKOMPAK (ditulis sederhana)	1. Sosialisasi REKOMPAK (ditulis sederhana)			
	e. Dasar usulan proyek	Inventasi	Inventasi	Inventasi	Inventasi	Inventasi	Inventasi	Inventasi			
	f. Pihak terlibat & ketergantungannya	Tim Pelaksana Kegiatan Perencana satu Dues 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dues) 2. Ketua (Kerata Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Pemedia jasa	1. Perencana (Desa, Kecamatan, Desa, TFI) 2. Warga Masyarakat 3. Konsultan perencanaan 4. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 5. Pelaksana Teknis (Staff) 6. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 7. Pemedia Jasa (Pegawai Pemerintah Komisioner) 8. Konsultan perencanaan	Tim Pelaksana Kegiatan (Perencana satu Dues) 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dues) 2. Ketua (Kerata Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Pemedia jasa	1. Perencana (Pengurus, Perakab) 2. Konsultan (PMU, NMC, DMK) 3. Konsultan perencanaan 4. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 5. Pelaksana Teknis (Staff) 6. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 7. Pemedia Jasa (Pegawai Pemerintah Komisioner) 8. Konsultan perencanaan	1. Perencana (Kabupaten, SKPD terkait, Camat, Lurah, Fasilitas, Timag Sanitari/Pukiman/Sektor PLP/P) 2. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 3. Kelompok Swadaya Masyarakat KSM	1. Perencana (Desa, Kecamatan, Desa dan Fasilitas) 2. Masyarakat (KSM, TFI) dan Masyarakat (pengantar) 3. Konsultan (NMC, DMK) 4. Perencana (Desa, Kecamatan, Desa dan Fasilitas) 5. Masyarakat (KSM, TFI) dan Masyarakat (pengantar) 6. Perencana (Desa, Kecamatan, Desa dan Fasilitas) 7. Masyarakat (KSM, TFI) dan Masyarakat (pengantar)	1. Perencana (Pengurus, Perakab) 2. Konsultan (PMM, NMC, DMK) 3. Konsultan perencanaan 4. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 5. Pelaksana Teknis (Staff) 6. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 7. Pemedia Jasa (Pegawai Pemerintah Komisioner) 8. Konsultan perencanaan			
	g. Usulan kegiatan	1. Identifikasi gagasan proyek 2. Penetapan gagasan 3. Evaluasi kelangkaan konsep 4. Perencanaan konsep alternatif 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menetapkan perkiraan biaya 7. Menyesuaikan organisasi pelaksanaan	1. Identifikasi gagasan proyek dan analisis pendahuluan 2. Penetapan gagasan 3. Evaluasi kelangkaan konsep 4. Perencanaan konsep alternatif yang baik 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menetapkan perkiraan biaya 7. Menyesuaikan organisasi pelaksanaan	1. Identifikasi gagasan proyek dan analisis pendahuluan 2. Penetapan gagasan 3. Evaluasi kelangkaan konsep 4. Perencanaan konsep alternatif yang baik 5. Identifikasi sumber yang diperlukan dan jadwal pelaksanaan 6. Menetapkan perkiraan biaya 7. Menyesuaikan organisasi pelaksanaan	1. Lebih strategis dalam rangka sosialisasi Rekrutasi proyek REKOMPAK-RT di Tingkat Provinsi dan Kabupaten 2. Labukaya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-RT di tingkat kabupaten 3. Perencanaan lokasi 4. Penetapan dan pelaksanaan rencana Komisioner Kabupaten 5. Penetapan dan pelaksanaan Program/Fasilitas proyek REKOMPAK-RT 6. Perencanaan Lokasi	1. Sosialisasi 2. Perisipan Timag Fasilitas Layangan/TFI 3. Perencanaan lokasi 4. Penetapan dan pelaksanaan rencana Komisioner Kabupaten 5. Penetapan dan pelaksanaan Program/Fasilitas proyek REKOMPAK-RT 6. Perencanaan Lokasi	1. Lebih strategis dalam rangka sosialisasi Rekrutasi proyek REKOMPAK-RT di Tingkat Provinsi dan Kabupaten 2. Labukaya orientasi/sosialisasi replikasi proyek REKOMPAK-RT di tingkat kabupaten 3. Perencanaan lokasi 4. Penetapan dan pelaksanaan rencana Komisioner Kabupaten 5. Penetapan dan pelaksanaan Program/Fasilitas proyek REKOMPAK-RT 6. Perencanaan Lokasi	1. Sosialisasi REKOMPAK (ditulis sederhana)			
	h. Hasil	1. Pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organisasi 4. Saran-saran prima konsep desain kepada konsultan perencanaan 5. Tahapan pekerjaan 6. Master coordination schedule 7. Dokumen biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencanaan 8. Cash flow (Proyeksi Area Dues)	1. Pengembangan sasaran proyek (biaya & waktu) 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organisasi 4. Saran-saran prima konsep desain kepada konsultan perencanaan 5. Tahapan pekerjaan 6. Master coordination schedule 7. Dokumen biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencanaan 8. Cash flow (Proyeksi Area Dues)	1. Pengembangan sasaran proyek dilihat dari aspek biaya dan waktu 2. Identifikasi batasan utama 3. TOR dan organisasi 4. Saran-saran prima konsep desain kepada konsultan perencanaan 5. Tahapan pekerjaan 6. Master coordination schedule 7. Dokumen biaya awal berdasarkan konsep awal konsultan perencanaan 8. Cash flow (Proyeksi Area Dues)	1. Perencana Provinsi, Perencana Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesediaan persepsi tentang proyek. Perakab siap melaksanakan dan pendampingan dan disepakati rencana tidak layak. 2. Camat, Kadus dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesediaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tidak layak 3. Dataran Lurah dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesediaan persepsi tentang proyek dan disepakati dengan rencana tidak layak 4. Tim Fasilitas tidak mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi	1. Timag Fasilitas tidak siap 2. Lokasi proyek tidak ditetapkan 3. Masyarakat tidak siap dengan rencana program yang akan dilakukan 4. Timag Fasilitas tidak mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi	1. Perencana Provinsi, Perencana Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesediaan persepsi tentang proyek. Perakab siap melaksanakan dan pendampingan dan disepakati rencana tidak layak. 2. Camat, Kadus dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesediaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tidak layak 3. Dataran Lurah dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesediaan persepsi tentang proyek dan disepakati dengan rencana tidak layak 4. Tim Fasilitas tidak mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi	1. Perencana Provinsi, Perencana Kabupaten, Tokoh masyarakat dan kelompok strategis mengetahui serta mempunyai kesediaan persepsi tentang proyek. Perakab siap melaksanakan dan pendampingan dan disepakati rencana tidak layak. 2. Camat, Kadus dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesediaan persepsi tentang proyek dan sepakat dengan rencana tidak layak 3. Dataran Lurah dan Tokoh masyarakat mengetahui serta mempunyai kesediaan persepsi tentang proyek dan disepakati dengan rencana tidak layak 4. Tim Fasilitas tidak mengetahui ruang lingkup proyek dan siap dimobilisasi			
	i. Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase rendah			
	j. Administrasi	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Tim Perencana (ditulis mudah)	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Tim Perencana (ditulis mudah)	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Perencana Kabupaten (ditulis sederhana)	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh TFI (ditulis sederhana)	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Perencana Kabupaten (ditulis mudah)	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh TFI (ditulis sederhana)	Pelaporan kegiatan dilakukan oleh Perencana Kabupaten (ditulis mudah)			
	k. Kelembutan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana			
	l. Kendali	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang memadai menghambat pelaksanaan proyek	SDM yang kurang memadai menghambat pelaksanaan proyek	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang memadai menghambat pelaksanaan proyek	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan			
	m. Kelengkapan	Perencanaan dilaksanakan oleh tim yang sudah ahli di bidang perencanaan saluran air limbah	Proses perencanaan dilakukan oleh tim yang sudah ahli di bidang perencanaan saluran air limbah	Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh tim yang sudah berpengalaman di bidangnya	Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh tim yang sudah berpengalaman di bidangnya 1. Kemitraan publik yang diarahkan lebih efektif, memberikan nilai kemanfaatan dan dukungan publik yang kuat. 2. Proses perencanaan transparan dan akseptabel sehingga mempermudah proses pembangunan.	Warga masyarakat lebih tahu tentang keadaan lapangan yang akan dibangun	Proses perencanaan transparan dan akseptabel sehingga mempermudah proses pembangunan	Warga masyarakat lebih tahu tentang keadaan lapangan yang akan dibangun			
	2. Perencanaan										
	a. Waktu	2 x 3 bulan	2 x 3 bulan	2 x 3 bulan	2 x 3 bulan	2 x 3 bulan	2 x 3 bulan	2 x 3 bulan			
	b. Biaya	Ada anggaran khusus perencanaan	Ada anggaran khusus perencanaan	Ada anggaran khusus perencanaan	Ada anggaran khusus perencanaan	Ada anggaran khusus perencanaan	Ada anggaran khusus perencanaan	Ada anggaran khusus perencanaan			
	c. Matri	Sesuai dengan standar Perencana	Sesuai dengan standar Perencana	Matri sesuai dengan standar perencana	Matri sesuai dengan standar perencana	Matri sesuai dengan standar perencana	Matri sesuai dengan standar perencana	Matri sesuai dengan standar perencana			
	d. Mekanisme perencanaan	1. Diadakan survei harga 2. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spes. Teknis dan syarat-syarat kontrak) (ditulis mudah)	1. Sosialisasi program perencanaan kepada masyarakat penerima program 2. Diadakan survei harga 3. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spes. Teknis dan syarat-syarat kontrak) (ditulis sederhana)	1. Penyusunan RPP 2. Perencanaan oleh tim perencana (gambar, RAB, Spes. Teknis dan syarat-syarat kontrak) 3. Review hasil perancangan konsultan oleh tim perencana dari SKPD terkait 4. Diadakan evaluasi biaya untuk produk konsultan perencanaan oleh tim perencana dari SKPD terkait (ditulis rinci)	1. Penyusunan RPP 2. Sosialisasi RPP (ditulis sederhana)	1. Penyusunan RPP 2. Sosialisasi RPP 3. Verifikasi RSM 4. Penetapan harga KSM dengan SKPD (ditulis rinci)	1. Penyusunan RPP 2. Sosialisasi RPP 3. Verifikasi RSM 4. Penetapan harga KSM dengan SKPD (ditulis rinci)	1. Penyusunan RPP 2. Sosialisasi RPP (ditulis sederhana)			
	e. Pihak terlibat & ketergantungannya	Tim Pelaksana Kegiatan 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dues) 2. Ketua (Kerata Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Pemedia jasa	Tim Pelaksana Kegiatan (perencana satu Dues) 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dues) 2. Ketua (Kerata Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Pemedia jasa	Tim Pelaksana Kegiatan (Perencana satu Dues) 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dues) 2. Ketua (Kerata Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Pemedia jasa	1. Perencana (Desa, Kecamatan, Desa dan Fasilitas) 2. Masyarakat (KSM, TFI) dan Masyarakat (pengantar) 3. Konsultan (NMC, DMK) 4. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 5. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 6. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 7. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 8. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 9. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 10. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 11. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 12. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 13. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 14. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 15. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 16. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 17. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 18. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 19. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 20. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 21. Masyarakat (PMM, NMC, DMK)	1. Perencana (Desa, Kecamatan, Desa dan Fasilitas) 2. Masyarakat (KSM, TFI) dan Masyarakat (pengantar) 3. Konsultan (NMC, DMK) 4. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 5. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 6. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 7. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 8. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 9. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 10. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 11. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 12. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 13. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 14. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 15. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 16. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 17. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 18. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 19. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 20. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 21. Masyarakat (PMM, NMC, DMK)	1. Perencana (Desa, Kecamatan, Desa dan Fasilitas) 2. Masyarakat (KSM, TFI) dan Masyarakat (pengantar) 3. Konsultan (NMC, DMK) 4. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 5. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 6. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 7. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 8. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 9. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 10. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 11. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 12. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 13. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 14. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 15. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 16. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 17. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 18. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 19. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 20. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 21. Masyarakat (PMM, NMC, DMK)	1. Perencana (Desa, Kecamatan, Desa dan Fasilitas) 2. Masyarakat (KSM, TFI) dan Masyarakat (pengantar) 3. Konsultan (NMC, DMK) 4. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 5. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 6. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 7. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 8. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 9. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 10. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 11. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 12. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 13. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 14. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 15. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 16. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 17. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 18. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 19. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 20. Masyarakat (PMM, NMC, DMK) 21. Masyarakat (PMM, NMC, DMK)			
	f. Usulan kegiatan	1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 3. Membuat estimasi biaya secara rinci 4. Membuat desain akhir 5. Membuat spesifikasi teknis 6. Review desain akhir terhadap hasil volume 7. Membuat Rencana Anggaran Biaya 8. Membuat surat-surat administrasi 9. Membuat perincian perizinan sesuai yang berlaku	1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 3. Membuat estimasi biaya secara rinci 4. Membuat desain akhir 5. Membuat spesifikasi teknis 6. Review desain akhir terhadap hasil volume 7. Membuat Rencana Anggaran Biaya 8. Membuat surat-surat administrasi 9. Membuat perincian perizinan sesuai yang berlaku	1. Membuat kriteria desain 2. Membuat skematik desain 3. Membuat estimasi biaya secara rinci 4. Membuat desain akhir 5. Membuat spesifikasi teknis 6. Review desain akhir terhadap hasil volume 7. Membuat Rencana Anggaran Biaya 8. Membuat surat-surat administrasi 9. Membuat perincian perizinan sesuai yang berlaku	1. Perencanaan RPP 2. Sosialisasi RPP 3. Sosialisasi Timag Fasilitas 4. Sosialisasi Timag Fasilitas 5. Sosialisasi Timag Fasilitas 6. Sosialisasi Timag Fasilitas 7. Sosialisasi Timag Fasilitas 8. Sosialisasi Timag Fasilitas 9. Sosialisasi Timag Fasilitas 10. Sosialisasi Timag Fasilitas 11. Sosialisasi Timag Fasilitas 12. Sosialisasi Timag Fasilitas 13. Sosialisasi Timag Fasilitas 14. Sosialisasi Timag Fasilitas 15. Sosialisasi Timag Fasilitas 16. Sosialisasi Timag Fasilitas 17. Sosialisasi Timag Fasilitas 18. Sosialisasi Timag Fasilitas 19. Sosialisasi Timag Fasilitas 20. Sosialisasi Timag Fasilitas 21. Sosialisasi Timag Fasilitas	1. Perencanaan RPP 2. Sosialisasi RPP 3. Sosialisasi Timag Fasilitas 4. Sosialisasi Timag Fasilitas 5. Sosialisasi Timag Fasilitas 6. Sosialisasi Timag Fasilitas 7. Sosialisasi Timag Fasilitas 8. Sosialisasi Timag Fasilitas 9. Sosialisasi Timag Fasilitas 10. Sosialisasi Timag Fasilitas 11. Sosialisasi Timag Fasilitas 12. Sosialisasi Timag Fasilitas 13. Sosialisasi Timag Fasilitas 14. Sosialisasi Timag Fasilitas 15. Sosialisasi Timag Fasilitas 16. Sosialisasi Timag Fasilitas 17. Sosialisasi Timag Fasilitas 18. Sosialisasi Timag Fasilitas 19. Sosialisasi Timag Fasilitas 20. Sosialisasi Timag Fasilitas 21. Sosialisasi Timag Fasilitas	1. Perencanaan RPP 2. Sosialisasi RPP 3. Sosialisasi Timag Fasilitas 4. Sosialisasi Timag Fasilitas 5. Sosialisasi Timag Fasilitas 6. Sosialisasi Timag Fasilitas 7. Sosialisasi Timag Fasilitas 8. Sosialisasi Timag Fasilitas 9. Sosialisasi Timag Fasilitas 10. Sosialisasi Timag Fasilitas 11. Sosialisasi Timag Fasilitas 12. Sosialisasi Timag Fasilitas 13. Sosialisasi Timag Fasilitas 14. Sosialisasi Timag Fasilitas 15. Sosialisasi Timag Fasilitas 16. Sosialisasi Timag Fasilitas 17. Sosialisasi Timag Fasilitas 18. Sosialisasi Timag Fasilitas 19. Sosialisasi Timag Fasilitas 20. Sosialisasi Timag Fasilitas 21. Sosialisasi Timag Fasilitas	1. Perencanaan RPP 2. Sosialisasi RPP 3. Sosialisasi Timag Fasilitas 4. Sosialisasi Timag Fasilitas 5. Sosialisasi Timag Fasilitas 6. Sosialisasi Timag Fasilitas 7. Sosialisasi Timag Fasilitas 8. Sosialisasi Timag Fasilitas 9. Sosialisasi Timag Fasilitas 10. Sosialisasi Timag Fasilitas 11. Sosialisasi Timag Fasilitas 12. Sosialisasi Timag Fasilitas 13. Sosialisasi Timag Fasilitas 14. Sosialisasi Timag Fasilitas 15. Sosialisasi Timag Fasilitas 16. Sosialisasi Timag Fasilitas 17. Sosialisasi Timag Fasilitas 18. Sosialisasi Timag Fasilitas 19. Sosialisasi Timag Fasilitas 20. Sosialisasi Timag Fasilitas 21. Sosialisasi Timag Fasilitas			
	g. Hasil	1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, prosedur proses dan kelengkapan 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar beskap dan shop drawing 5. Jadwal pelaksanaan sesuai dan berdasarkan sumber daya 6. Dokumen administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar	1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, prosedur proses dan kelengkapan 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar beskap dan shop drawing 5. Jadwal pelaksanaan sesuai dan berdasarkan sumber daya 6. Dokumen administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar	1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, prosedur proses dan kelengkapan 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar beskap dan shop drawing 5. Jadwal pelaksanaan sesuai dan berdasarkan sumber daya 6. Dokumen administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar	1. Kontrak untuk staf proyek dan kontraktor 2. Spesifikasi, prosedur proses dan kelengkapan 3. Desain perhitungan bangunan, struktur, utilitas dan fasilitas 4. Gambar beskap dan shop drawing 5. Jadwal pelaksanaan sesuai dan berdasarkan sumber daya 6. Dokumen administrasi dan keuangan 7. Proses operasional dan standar	1. Penyusunan Dokumen RPP 2. Penyusunan Dokumen RPP 3. Penyusunan Dokumen RPP 4. Penyusunan Dokumen RPP 5. Penyusunan Dokumen RPP 6. Penyusunan Dokumen RPP 7. Penyusunan Dokumen RPP 8. Penyusunan Dokumen RPP 9. Penyusunan Dokumen RPP 10. Penyusunan Dokumen RPP 11. Penyusunan Dokumen RPP 12. Penyusunan Dokumen RPP 13. Penyusunan Dokumen RPP 14. Penyusunan Dokumen RPP 15. Penyusunan Dokumen RPP 16. Penyusunan Dokumen RPP 17. Penyusunan Dokumen RPP 18. Penyusunan Dokumen RPP 19. Penyusunan Dokumen RPP 20. Penyusunan Dokumen RPP 21. Penyusunan Dokumen RPP	1. Penyusunan Dokumen RPP 2. Penyusunan Dokumen RPP 3. Penyusunan Dokumen RPP 4. Penyusunan Dokumen RPP 5. Penyusunan Dokumen RPP 6. Penyusunan Dokumen RPP 7. Penyusunan Dokumen RPP 8. Penyusunan Dokumen RPP 9. Penyusunan Dokumen RPP 10. Penyusunan Dokumen RPP 11. Penyusunan Dokumen RPP 12. Penyusunan Dokumen RPP 13. Penyusunan Dokumen RPP 14. Penyusunan Dokumen RPP 15. Penyusunan Dokumen RPP 16. Penyusunan Dokumen RPP 17. Penyusunan Dokumen RPP 18. Penyusunan Dokumen RPP 19. Penyusunan Dokumen RPP 20. Penyusunan Dokumen RPP 21. Penyusunan Dokumen RPP	1. Penyusunan Dokumen RPP 2. Penyusunan Dokumen RPP 3. Penyusunan Dokumen RPP 4. Penyusunan Dokumen RPP 5. Penyusunan Dokumen RPP 6. Penyusunan Dokumen RPP 7. Penyusunan Dokumen RPP 8. Penyusunan Dokumen RPP 9. Penyusunan Dokumen RPP 10. Penyusunan Dokumen RPP 11. Penyusunan Dokumen RPP 12. Penyusunan Dokumen RPP 13. Penyusunan Dokumen RPP 14. Penyusunan Dokumen RPP 15. Penyusunan Dokumen RPP 16. Penyusunan Dokumen RPP 17. Penyusunan Dokumen RPP 18. Penyusunan Dokumen RPP 19. Penyusunan Dokumen RPP 20. Penyusunan Dokumen RPP 21. Penyusunan Dokumen RPP	1. Penyusunan Dokumen RPP 2. Penyusunan Dokumen RPP 3. Penyusunan Dokumen RPP 4. Penyusunan Dokumen RPP 5. Penyusunan Dokumen RPP 6. Penyusunan Dokumen RPP 7. Penyusunan Dokumen RPP 8. Penyusunan Dokumen RPP 9. Penyusunan Dokumen RPP 10. Penyusunan Dokumen RPP 11. Penyusunan Dokumen RPP 12. Penyusunan Dokumen RPP 13. Penyusunan Dokumen RPP 14. Penyusunan Dokumen RPP 15. Penyusunan Dokumen RPP 16. Penyusunan Dokumen RPP 17. Penyusunan Dokumen RPP 18. Penyusunan Dokumen RPP 19. Penyusunan Dokumen RPP 20. Penyusunan Dokumen RPP 21. Penyusunan Dokumen RPP		
	h. Partisipasi masyarakat	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase rendah			
	i. Administrasi	Pelaporan pada proses perancangan dilakukan oleh Tim Perencana (ditulis mudah)	Pelaporan hasil perancangan dilakukan oleh Tim Perencana (ditulis mudah)	Pelaporan hasil perancangan dilakukan oleh Konsultan Perencana (ditulis mudah)	Pelaporan hasil perancangan dilakukan oleh TFI dan BKM (ditulis sederhana)	Pelaporan pada proses perancangan dilakukan oleh Tim Perencana (ditulis mudah)	Pelaporan hasil perancangan dilakukan oleh Tim Perencana (ditulis mudah)	Pelaporan pada proses perancangan dilakukan oleh Tim Perencana (ditulis mudah)			
	j. Tempok	Kantor Perencana	Kantor konsultan perencanaan	Kantor Perencana RPP	Kantor Perencana RPP dan Kantor KSM	Kantor Perencana	Kantor Perencana	Kantor Perencana			
	k. Sumber Pendanaan	APBD	Ada Anggaran Khusus dari Pemerintah/Instansi DPA	World Bank	World Bank	World Bank	World Bank	World Bank			
	l. Cara perencanan	Biaya perencanan dicairkan bila proses perancangan telah selesai	Setelah dokumen perancangan diselesaikan	Biaya perencanan dicairkan bila proses perancangan telah selesai	Setelah RKM baik baru proses perencanan dana	Biaya perencanan dicairkan bila proses perancangan telah selesai	Setelah RKM baik baru proses perencanan dana	Biaya perencanan dicairkan bila proses perancangan telah selesai			
	m. Kelembutan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana			
	n. Kendali	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang memadai menghambat pelaksanaan proyek	SDM yang kurang memadai menghambat pelaksanaan proyek	SDM yang kurang memadai menghambat pelaksanaan proyek	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang memadai menghambat pelaksanaan proyek	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan			
	o. Kelengkapan	Perencanaan dilaksanakan oleh tim teknis yang sudah berpengalaman dalam perancangan jalan aspal	Desain dari konsultan perencana sudah siap dilaksanakan	Desain dari konsultan perencana sudah siap dilaksanakan	Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan	Perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFI menghasilkan desain yang benar benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	Perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFI menghasilkan desain yang benar benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat	Perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan TFI menghasilkan desain yang benar benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat			
	3. Pelaksanaan / Pelaksanaan / Persemenan										
	a. Waktu	1 x 2 bulan	1 x 2 bulan	1 x 2 bulan	1 x 2 bulan	1 x 2 bulan	1 x 2 bulan	1 x 2 bulan			
	b. Biaya	Melihat pada biaya umum DPA/ada anggaran khusus pengadaan	Ada anggaran khusus pengadaan yang melihat pada DPA di ULP/Unit Layanan Pengadaan	Ada anggaran khusus pengadaan	Menggunakan dana BOP pada proyek BEM, ada anggaran khusus pengadaan	Melihat pada biaya umum DPA/ada anggaran khusus pengadaan	Ada anggaran khusus pengadaan	Melihat pada biaya umum DPA/ada anggaran khusus pengadaan			
	c. Matri	Mengetahui prosedur jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Matri sesuai dengan standar perencana	Matri sesuai standar perencana	Mengetahui prosedur jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Matri sesuai dengan standar perencana	Mengetahui prosedur jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Matri sesuai dengan standar perencana	Mengetahui prosedur jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Matri sesuai dengan standar perencana	Mengetahui prosedur jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Matri sesuai dengan standar perencana	Mengetahui prosedur jasa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan/Matri sesuai dengan standar perencana			
	d. Mekanisme pelaksanaan	Pengadaan Langsung (ditulis mudah)	Pemilihan Langsung melalui ULP (ditulis mudah)	Pemilihan Langsung melalui ULP (ditulis mudah)	Pengadaan Barang dan jasa dengan metode pemilihan langsung oleh masyarakat (ditulis sederhana)	Pemilihan Langsung (ditulis mudah)	Pemilihan Langsung melalui ULP (ditulis mudah)	Pemilihan Langsung melalui ULP (ditulis mudah)			
	e. Pihak terlibat & ketergantungannya	Dues PUP Perencana satu Dues 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dues) 2. Ketua (Kerata Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Pemedia jasa	1. Unit Layanan Pengadaan 2. Tim Pelaksana Kegiatan 3. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dues) 4. Ketua (Kerata Bidang) 5. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 6. Pelaksana Teknis (Staff) 7. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 8. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 9. Pemedia jasa	Dasi Layanan Pengadaan (Perencana satu Dues) 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dues) 2. Ketua (Kerata Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Pemedia jasa	1. Perencana (Desa, Fasilitas) 2. Masyarakat (KSM, Masyrakat KP, TK, BKM, Masyarakat penerima program) 3. Pemedia Barang/Jasa	1. Perencana (Desa, Fasilitas) 2. Masyarakat (KSM, Masyarakat) 3. Pemedia Barang/Jasa	1. Perencana (Desa, Kecamatan, Desa, TFI) 2. Masyarakat (KSM, Masyarakat) 3. Pemedia Barang/Jasa	1. Perencana (Desa, Kecamatan, Desa dan Fasilitas) 2. Masyarakat (KSM, Masyarakat) 3. Pemedia Barang/Jasa			
	f. Usulan kegiatan	1. Mengadakan pra-kualifikasi kontrak 2. Free tender meeting 3. Menetapkan daftar calon pilihan 4. Bill of quality (lembi pekerjaan - volume) 5. Anggaran/pengalaman 6. Menetapkan dokumen kelengkapan 7. Menetapkan RAB yang telah selesai perancangan 8. Menetapkan syarat-syarat perjanjian untuk dikevaluasi/konfirmasi dengan PPK (PPK) 9. Menetapkan dokumen kontrak antara PPK dengan Kontraktor	1. Mengadakan seleksi Pemedia barang dan jasa (Uraian sesuai dengan ULP/LPSE) 2. Pengumuman Pra-kualifikasi 3. Download dokumen Penunjukan 4. Pembuatan perincian 5. Upload dokumen Perincian 6. Evaluasi perincian 7. Evaluasi dokumen Kualifikasi 8. Penunjukan kualifikasi 9. Upload berita acara Hasil Pemilihan	1. Mengadakan pra-kualifikasi kontrak 2. Free tender meeting 3. Menetapkan daftar calon pilihan 4. Bill of quality (lembi pekerjaan - volume) 5. Anggaran/pengalaman 6. Menetapkan dokumen kelengkapan 7. Menetapkan RAB yang telah selesai perancangan 8. Menetapkan syarat-syarat perjanjian untuk dikevaluasi/konfirmasi dengan PPK (PPK) 9. Menetapkan dokumen kontrak antara PPK dengan Kontraktor	1. Pengumuman PPK 2. Pengumuman PPK 3. Pengumuman PPK 4. Pengumuman PPK 5. Pengumuman PPK 6. Pengumuman PPK 7. Pengumuman PPK 8. Pengumuman PPK 9. Pengumuman PPK 10. Pengumuman PPK 11. Pengumuman PPK 12. Pengumuman PPK 13. Pengumuman PPK 14. Pengumuman PPK 15. Pengumuman PPK 16. Pengumuman PPK 17. Pengumuman PPK 18. Pengumuman PPK 19. Pengumuman PPK 20. Pengumuman PPK 21. Pengumuman PPK	1. Perizinan kerja KSM dengan SKPD 2. Kontor perjanjian antara KSM dengan Pemoda/bahan bangunan/supplier bahan bangunan dan tenaga ahli 3. Perizinan umum 4. Menetapkan dokumen lelang/pengadaan 5. Melakukan penawaran sesuai terlemba 6. Melakukan penawaran dan penunjukan Akomodasi lelang 7. Melakukan undangan penunjukan lelang untuk peserta 8. Melakukan kualifikasi 9. Memastikan, perbaikan, evaluasi penawaran dan penunjukan pemenang lelang	1. Perizinan kerja KSM dengan SKPD 2. Kontor perjanjian antara KSM dengan Pemoda/bahan bangunan/supplier bahan bangunan dan tenaga ahli 3. Perizinan umum 4. Menetapkan dokumen lelang/pengadaan 5. Melakukan penawaran sesuai terlemba 6. Melakukan penawaran dan penunjukan Akomodasi lelang 7. Melakukan undangan penunjukan lelang untuk peserta 8. Melakukan kualifikasi 9. Memastikan, perbaikan, evaluasi penawaran dan penunjukan pemenang lelang	1. Perizinan kerja KSM dengan SKPD 2. Kontor perjanjian antara KSM dengan Pemoda/bahan bangunan/supplier bahan bangunan dan tenaga ahli 3. Perizinan umum 4. Menetapkan dokumen lelang/pengadaan 5. Melakukan penawaran sesuai terlemba 6. Melakukan penawaran dan penunjukan Akomodasi lelang 7. Melakukan undangan penunjukan lelang untuk peserta 8. Melakukan kualifikasi 9. Memastikan, perbaikan, evaluasi penawaran dan penunjukan pemenang lelang	1. Perizinan kerja KSM dengan SKPD 2. Kontor perjanjian antara KSM dengan Pemoda/bahan bangunan/supplier bahan bangunan dan tenaga ahli 3. Perizinan umum 4. Menetapkan dokumen lelang/pengadaan 5. Melakukan penawaran sesuai terlemba 6. Melakukan penawaran dan penunjukan Akomodasi lelang 7. Melakukan undangan penunjukan lelang untuk peserta 8. Melakukan kualifikasi 9. Memastikan, perbaikan, evaluasi penawaran dan penunjukan pemenang lelang		

	Manajemen Konstruksi Terstandar			Manajemen Konstruksi Berbasis Masyarakat		
	A	B	C	A	B	C
a. Hasil	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
b. Partisipasi masyarakat	Tidak berpartisipasi	Tidak berpartisipasi	Tidak berpartisipasi	Partisipasi penuh	Partisipasi penuh	Partisipasi penuh
i. Administrasi	Poloperan hasil pekerjaan dilakukan oleh Tim Pengabdian (ditulis mudah)	Poloperan tahap pelengkapan disimpulkan oleh ULP kepada SKPD terkait (ditulis rapi oleh responden)	Poloperan antara penyedia jasa dan PPK dilakukan oleh panitia pengabdian di ULP (ditulis sederhana)	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh PPK (ditulis sederhana)	Poloperan tahap pelengkapan dilakukan oleh KSM ditinjau TPL (ditulis sederhana oleh responden)	Kontrak perjanjian antara masyarakat dengan penyedia bahan bangunan dan tenaga ahli dilakukan langsung oleh PP (ditulis sederhana)
j. Temporal	Dinas PUP Kabupaten Sleman	Kantor Unit Layanan Pengabdian (ULP)	Kantor Unit Layanan Pengabdian (ULP)	Kantor PPK	Kantor PPK dan Kantor KSM	Kantor Operasional PP
k. Kelestarian	Tidak mengkonservasi karena tidak ada alokasi dana	Tidak mengkonservasi karena tidak ada alokasi dana	Tidak mengkonservasi karena tidak ada alokasi dana	Tidak mengkonservasi karena tidak ada alokasi dana	Tidak mengkonservasi karena tidak ada alokasi dana	Tidak mengkonservasi karena tidak ada alokasi dana
l. Keadilan	Gap yang lebar yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana	Gap yang lebar yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana	Gap yang lebar yang mengakibatkan target pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai rencana	Spesifikasi Bahan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek.	Spesifikasi Bahan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek.	Spesifikasi Bahan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek.
m. Kebahagiaan	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang diharapkan.	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang diharapkan.	Diperoleh Penyedia Jasa yang mempunyai kualifikasi seperti yang diharapkan.	Masyarakat lebih mendapatkan kualitas bahan bangunan, karena jalan dibangun untuk kepentingan bersama warga kampung.	Suplier yang dipilih oleh masyarakat memiliki hubungan baik dengan masyarakat terkait karena berada tidak jauh dari lokasi proyek.	Masyarakat lebih mendapatkan kualitas bahan bangunan, karena rumah tinggal dibangun untuk kebutuhan dan kepentingan diri sendiri.
n. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi						
a. Waktu	45 hari kalender, 2x3 x bulan	3 x 4 bulan	3 x 4 bulan	90 hari kalender, 2x3 x bulan	3 x 4 bulan	3 x 4 bulan
b. Biaya	Rp. 145.002.000 Luas = 6500x20m = 13000m²	Dana = Rp.600.411.000 Pipa servis 1470m dengan rincian 147 SR, Realisasi penyembangan 140 mb	Ada anggaran khusus konstruksi Dana = Rp.214.091.000	Rekomendasi, Rp. 112.987.000. Swadaya, Rp. 500.000.	Dana = Rp. 446.026.670 Luas lahan 20x20m, kapasitas 400 jiwa, Pipa PVC D 4" = 414m, Pipa PVC D 4" = 1071m, Pipa PVC D 2" = 58m	Ada anggaran khusus konstruksi Rekomendasi = Rp. 20.000.000 + swadaya masyarakat sesuai kemampuan
c. Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis, Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis, Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis, Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d. Mekanisme pelaksanaan konstruksi	1. Penentuan temuan kerja 2. Menetapkan dan memuat 3. Menetapkan material 4. Menetapkan peralatan 5. Menetapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan 6. Pembentukan tim 7. Pengaturan material 8. Pengaturan tenaga kerja 9. Pengaturan jalan 10. Pengaturan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (ditulis sederhana)	1. Penentuan temuan kerja 2. Menetapkan dan memuat 3. Menetapkan material 4. Menetapkan peralatan 5. Menetapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (ditulis rapi)	1. Penentuan temuan kerja 2. Menetapkan dan memuat 3. Menetapkan material 4. Menetapkan peralatan 5. Menetapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (ditulis sederhana)	1. Pembentukan Panitia Pembangunan 2. Pelibatan pemangku DPH, & DED, manajemen konstruksi, administrasi keuangan 3. Penetapan dana 4. Kontrak masyarakat 5. Pelaksanaan kegiatan sosial, pelatihan dan Sosialisasi BHR (ditulis sederhana)	1. Penentuan SDM 2. Pengaturan barang dan jasa 3. Menetapkan standar konstruksi (ditulis sederhana) 4. Penetapan waktu, biaya & kualitas mutu 5. Menetapkan metode kerja 6. Supervisi, monitoring & evaluasi 7. Pengaturan tenaga kerja 8. Menetapkan dan memuat 9. Menetapkan material 10. Menetapkan peralatan 11. Menetapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (ditulis sederhana)	1. Penentuan SDM 2. Pengaturan barang dan jasa 3. Menetapkan standar konstruksi (ditulis sederhana) 4. Penetapan waktu, biaya & kualitas mutu 5. Menetapkan metode kerja 6. Supervisi, monitoring & evaluasi 7. Pengaturan tenaga kerja 8. Menetapkan dan memuat 9. Menetapkan material 10. Menetapkan peralatan 11. Menetapkan metode kerja, ruang kerja dan perencanaan waktu pelaksanaan (ditulis sederhana)
e. Pihak terlibat & tugasnya	Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintah satu Dinas 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Penyedia jasa 8. Koordinator Pengaman 9. Panitia Pelaksana	Tim Pelaksana Kegiatan 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Penyedia jasa 8. Koordinator Pengaman 9. Panitia Pelaksana	Tim Pelaksana Kegiatan (Pemerintah satu Dinas) 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Penyedia jasa 8. Koordinator Pengaman 9. Panitia Pelaksana	1. Pemerintah (Desa, Fasilitas) 2. Komunitas NMC, DMK 3. Masyarakat (BKM, TPK, PP, KP, dan Masyarakat penerima program) 4. Suster dan Jasa Perawatan/tenaga	1. Pemerintah (Desa, Kecamatan, Desa, TPL) 2. Masyarakat (Desa, Fasilitas) 3. Masyarakat (BKM, TPK, PP, dan Masyarakat) 4. Suster dan Jasa Perawatan/tenaga	1. Pemerintah (Desa, Fasilitas) 2. Masyarakat (Desa, Fasilitas) 3. Masyarakat (BKM, TPK, PP, dan Masyarakat) 4. Suster dan Jasa Perawatan/tenaga
f. Uraian kegiatan	1. Melakukan rancang rekayasa desain untuk kegiatan pengabdian material dan konstruksi 2. Menentukan anggaran definitif dan jadwal pelaksanaan proyek 3. Penetapan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra-operasional dan start up	1. Melakukan rancang rekayasa desain untuk kegiatan pengabdian material dan konstruksi 2. Menentukan anggaran definitif dan jadwal pelaksanaan proyek 3. Penetapan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra-operasional dan start up	1. Melakukan rancang rekayasa desain untuk kegiatan pengabdian material dan konstruksi 2. Menentukan anggaran definitif dan jadwal pelaksanaan proyek 3. Penetapan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra-operasional dan start up	1. Pembentukan Panitia Pembangunan 2. Survey Teknik dan Harga Satuan 3. Pelaksanaan koordinasi perencanaan (DPP, dan DED) 4. Penetapan Dokumen Teknik Pembangunan Lapangan (DTP), termasuk di dalamnya persiapan dokumen kaji ukur Sosial dan Lingkungan 5. Pelatihan dan pembinaan manajemen konstruksi 6. Pelatihan dan pembinaan pengelolaan administrasi dan keuangan 7. Proses Pengabdian BHR 8. Sosialisasi dan kontrak sosial & manajemen terkait kegiatan 9. Pelaksanaan kegiatan fisik 10. Pelaksanaan kegiatan non fisik, Pelatihan dan Sosialisasi BHR	1. Pembentukan panitia konstruksi 2. Pelaksanaan konstruksi dengan tahap: - Rambu warna - Survei pemetaan ulang - Pembentukan dan pengisian lahan IPAL - Penyempurnaan K3 sign board, tetap pengamanan jalan - Pemasangan listrik kerja, media, area kerja - Penetapan dan pembelian bahan oleh panitia pengadaan - Pengisian gap dan area kerja - Pelaksanaan pekerjaan - Monitoring dan evaluasi	1. Pembentukan KP Kelompok Pemukiman 2. Pembentukan Panitia 3. Menetapkan Desain Bangunan Hunian 4. Survey Teknik dan Harga 5. Pelatihan coaching perencanaan DTPP dan DED 6. Penetapan Dokumen Teknik Pembangunan Pemukiman (DTPP) 7. Pengisian barang dan peralatan BHR 8. Pelatihan dan pembinaan manajemen konstruksi 9. Pelatihan dan pembinaan pengelolaan administrasi dan keuangan 10. Pelaksanaan pekerjaan 11. Sosialisasi dan kontrak sosial & manajemen rumah KP 12. Pelaksanaan kegiatan fisik
g. Hasil	Konstruksi bangunan jalan	Konstruksi bangunan SR	Konstruksi bangunan rumah	Konstruksi bangunan jalan	Konstruksi bangunan IPAL dan SR	Konstruksi bangunan rumah
h. Partisipasi masyarakat	Ditulis tidak berpartisipasi	Ditulis tidak berpartisipasi	Ditulis tidak berpartisipasi	Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan konstruksi jalan dengan cara gotong royong	Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan konstruksi jalan dengan cara gotong royong	Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan konstruksi jalan dengan cara gotong royong
i. Administrasi	Pencatatan data proyek dengan sistem terapan	Pencatatan data proyek dengan sistem terapan	Pencatatan data proyek dengan sistem terapan	Pencatatan data proyek dengan sistem terapan	Pencatatan data proyek dengan sistem terapan	Pencatatan data proyek dengan sistem terapan
j. Temporal	Lokasi proyek	Lokasi proyek	Lokasi proyek	Lokasi proyek	Lokasi proyek	Lokasi proyek
k. Kelestarian	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis (lebih memperhatikan kerifan lokal)	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis (lebih memperhatikan kerifan lokal)
l. Keadilan	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengayak konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengayak konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengayak konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengayak konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengayak konstruksi dengan baik	Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengayak konstruksi dengan baik
m. Kebahagiaan	Masyarakat lebih bahagia karena mendapatkan K3 konstruks sebagai syarat belajar	Masyarakat lebih bahagia karena mendapatkan K3 konstruks sebagai syarat belajar	Masyarakat lebih bahagia karena mendapatkan K3 konstruks sebagai syarat belajar	Masyarakat lebih bahagia karena mendapatkan K3 konstruks sebagai syarat belajar	Masyarakat lebih bahagia karena mendapatkan K3 konstruks sebagai syarat belajar	Masyarakat lebih bahagia karena mendapatkan K3 konstruks sebagai syarat belajar
n. Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi						
a. Waktu	Karang dari 1 bulan	Karang dari 1 bulan	Karang dari 1 bulan	Karang dari 1 bulan	Karang dari 1 bulan	Karang dari 1 bulan
b. Biaya	Biaya sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus perubahan hasil pekerjaan	Biaya sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus perubahan hasil pekerjaan	Biaya sesuai dengan DPA/ada anggaran khusus perubahan hasil pekerjaan	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya dan biaya menggunakan dana swadaya masyarakat	Menggunakan dana Kelompok Pemukiman (KP), ada anggaran khusus perubahan hasil pekerjaan
c. Mutu	Sesuai dengan spesifikasi teknis; Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis; Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis; Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis; Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis; Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Sesuai dengan spesifikasi teknis; Mutu sesuai dengan standar pemerintah
d. Mekanisme pelaksanaan konstruksi	1. penyedia menetapkan permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 2. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 3. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 4. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 5. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 6. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 7. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 8. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 9. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 10. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 11. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 12. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 13. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 14. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 15. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 16. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 17. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 18. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 19. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 20. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 21. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 22. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 23. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 24. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 25. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 26. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 27. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 28. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 29. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 30. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 31. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 32. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 33. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 34. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 35. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 36. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 37. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 38. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 39. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 40. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 41. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 42. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 43. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 44. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 45. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 46. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 47. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 48. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 49. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 50. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 51. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 52. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 53. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 54. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 55. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 56. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 57. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 58. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 59. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 60. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 61. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 62. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 63. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 64. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 65. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 66. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 67. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 68. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 69. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 70. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 71. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 72. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 73. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 74. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 75. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 76. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 77. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 78. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 79. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 80. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 81. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 82. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 83. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 84. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 85. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 86. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 87. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 88. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 89. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 90. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 91. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 92. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 93. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 94. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 95. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 96. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 97. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 98. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 99. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan 100. PPK menerima permintaan tertulis kepada PPK untuk perubahan pekerjaan					
e. Pihak terlibat & tugasnya	Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintah 1 Dinas 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Penyedia jasa 8. Panitia Pelaksana	Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintah satu Dinas 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Penyedia jasa 8. Panitia Pelaksana	Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintah satu Dinas 1. Penanggung Jawab Kegiatan (Kepala Dinas) 2. Ketua (Kepala Bidang) 3. Koordinator Pelaksana (Kepala Seksi) 4. Pelaksana Teknis (Staff) 5. Pembantu Pelaksana Teknis (Staff) 6. PPK (Pegawai Pemerintah Komisioner) 7. Penyedia jasa 8. Panitia Pelaksana	1. Masyarakat (TPK, BKM, PPK, PP) 2. Pemerintah (Pihak Kecamatan, Desa, Fasilitas)	1. Masyarakat (Desa, TPL, Kecamatan, Desa, TPL) 2. Pemerintah (Pihak Kecamatan, Desa, Fasilitas)	1. Masyarakat (KP, Kelompok Pemukiman, BKM) 2. Pemerintah (Pihak Kecamatan, Desa, Fasilitas)
f. Uraian kegiatan	1. Mengaji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap diproses 2. Menentukan anggaran definitif dan jadwal pelaksanaan proyek 3. Menetapkan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra-operasional dan start up	1. Mengaji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap diproses 2. Menentukan anggaran definitif dan jadwal pelaksanaan proyek 3. Menetapkan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra-operasional dan start up	1. Mengaji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap diproses 2. Menentukan anggaran definitif dan jadwal pelaksanaan proyek 3. Menetapkan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra-operasional dan start up	1. Penyerahan hasil pekerjaan dari TPK kepada PEMDES 2. Penyerahan konstruksi bangunan rumah masyarakat (bersifat permanen) 3. Pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan	1. Mengaji bagian-bagian bangunan sesuai dengan fungsi yang siap diproses 2. Menentukan anggaran definitif dan jadwal pelaksanaan proyek 3. Menetapkan dan mobilisasi tenaga kerja 4. Pembelian material dan peralatan termasuk fabrikasi 5. Penyelesaian konstruksi, pra-operasional dan start up	1. Bersifat berupa perencana dan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan dari KP ke Desa ditinjau Desa 2. Penyerahan hasil pekerjaan kepada PPK, selanjutnya PPK menyerahkan hasil proyek kepada KSM untuk diwujudkan 3. Pengisian dan pemenuhan dokumen pelaksanaan 4. Penyerahan laporan kegiatan (laporan teknis, laporan keuangan dan laporan logistik)

PANDUAN PENGISIAN KUESIONER

1. Tahap Perencanaan

- a. Waktu
 - 1) Kurang dari 1 bulan
 - 2) antara 1 s/d 2 bulan
 - 3) antara 2 s/d 3 bulan
 - 4) antara 3 s/d 4 bulan
 - 5) lebih dari 4 bulan
- b. Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan
 - 1) Selesai sebelum batas waktu
 - 2) Selesai sesuai jadwal
 - 3) Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)
 - 4) Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)
 - 5) Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
- c. Biaya
 - 1) ada anggaran khusus perencanaan
Anggaran khusus perencanaan berarti perencanaan dilakukan oleh konsultan perencana.
 - 2) Menggunakan biaya umum perencanaan
Biaya perencanaan diperhitungkan dalam DPA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam item pekerjaan tersebut dan perencanaan dilakukan oleh tim perencana dari SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
 - 3) Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
Biaya perencanaan berasal dari Pemerintah dan Swadaya Masyarakat.
 - 4) Menggunakan biaya dari masyarakat
Biaya perencanaan berasal dari Swadaya Masyarakat.
 - 5) Tidak ada biaya perencanaan
Perencanaan dilaksanakan tanpa biaya perencanaan.
- d. Mutu
 - 1) Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Perencanaan Proyek yang diterbitkan sebagai acuan perencanaan proyek, memperbaiki serta adanya perbaruan hal-hal yang sudah tidak sesuai dalam pelaksanaan perencanaan yang dilakukan.
 - 2) Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Perencanaan Proyek yang diterbitkan sebagai acuan perencanaan proyek dan memperbaiki

hal-hal yang sudah tidak sesuai dalam pelaksanaan perencanaan yang dilakukan.

- 3) Mutu sesuai dengan standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Perencanaan Proyek yang diterbitkan sebagai acuan perencanaan proyek.
 - 4) Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah
Mutu perencanaan kurang sesuai dengan Standar Pemerintah, ada hal-hal yang tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan perencanaan.
 - 5) tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
Mutu perencanaan tidak sesuai dengan Standar Pemerintah, banyak hal yang melenceng dari petunjuk pelaksanaan perencanaan.
- e. Mekanisme Perencanaan
- 1) Sangat Mudah
Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan sedikit pihak/satu pihak dari SKPD terkait.
 - 2) Mudah
Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.
 - 3) Sederhana
Membutuhkan birokrasi sesuai dengan waktu yang disediakan, membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.
 - 4) Rumit
Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari lingkup satu Dinas dan masyarakat.
 - 5) Sangat rumit
Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari beberapa Dinas dan masyarakat.
- f. Pihak Terlibat
- 1) Pemerintah (satu Dinas)
Pihak yang terlibat berada pada lingkup satu Dinas/SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lain dibawah Dinas tersebut.
 - 2) Pemerintah (lebih dari satu Dinas)
Membutuhkan keterlibatan beberapa Dinas dalam pelaksanaan tahapan proyek.
 - 3) Pemerintah (Dinas + Kecamatan)

Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan terkait proyek.

4) Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)

Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan dan kantor Desa terkait proyek.

5) Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program

Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan, kantor Desa dan masyarakat terkait proyek.

g. Partisipasi masyarakat

1) Berpartisipasi penuh

Semua warga masyarakat berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

2) Berpartisipasi dengan prosentase sedang

Sebagian besar/lebih dari 50% warga berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

3) Berpartisipasi dengan prosentase rendah

Sebagian kecil/kurang dari 50% warga berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

4) Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah

Hanya ada beberapa masyarakat yang berpartisipasi dikarenakan lahan/bangunan miliknya terkena dampak dari tahapan-tahapan proyek.

5) Tidak berpartisipasi

Masyarakat sama sekali tidak berpartisipasi dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan.

h. Administrasi

1) Sangat mudah

Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan sedikit pihak/satu pihak dari SKPD terkait.

2) Mudah

Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

3) Sederhana

Membutuhkan birokrasi sesuai dengan waktu yang disediakan, membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

- 4) Rumit
Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari lingkup satu Dinas dan masyarakat.
- 5) Sangat rumit
Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari beberapa Dinas dan masyarakat.

i. Keselamatan Kerja

- 1) Harus menggunakan
Ada atau tidak adanya alokasi dana keselamatan kerja tetap harus menggunakan jaminan keselamatan kerja.
- 2) Ada alokasi dana dan menggunakan
Ada alokasi dana jaminan keselamatan kerja dan dana tersebut digunakan sesuai dengan alokasinya.
- 3) Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan
Tidak ada alokasi dana, tetapi pelaksana dan pengelola proyek harus mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang terlibat dalam proyek.
- 4) Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan
Ada alokasi dana jaminan keselamatan kerja tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan alokasinya.
- 5) Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
Tidak ada alokasi dana untuk jaminan keselamatan kerja dan tidak mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang terlibat dalam proyek.

j. Kendala

- 1) Terjadi konflik antar pemangku kepentingan
- 2) SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek
- 3) Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan
- 4) Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan
- 5) Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan

2. Tahap Perancangan

a. Waktu

- 1) Kurang dari 1 bulan
- 2) antara 1 s/d 2 bulan
- 3) antara 2 s/d 3 bulan
- 4) antara 3 s/d 4 bulan
- 5) lebih dari 4 bulan

- b. Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan
 - 1) Selesai sebelum batas waktu
 - 2) Selesai sesuai jadwal
 - 3) Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)
 - 4) Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)
 - 5) Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
- c. Biaya
 - 1) ada anggaran khusus perancangan
Anggaran khusus perancangan berarti perancangan dilakukan oleh konsultan perencana.
 - 2) Menggunakan biaya umum perancangan
Biaya perancangan diperhitungkan dalam DPA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam item pekerjaan tersebut dan perancangan dilakukan oleh tim perancangan dari SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
 - 3) Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
Biaya perancangan berasal dari Pemerintah dan Swadaya Masyarakat.
 - 4) Menggunakan biaya dari masyarakat
Biaya perancangan berasal dari Swadaya Masyarakat.
 - 5) Tidak ada biaya perancangan
Perancangan dilaksanakan tanpa biaya perancangan.
- d. Mutu
 - 1) Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Perancangan Proyek yang diterbitkan sebagai acuan Perancangan proyek, memperbaiki serta adanya perbaruan hal-hal yang sudah tidak sesuai dalam pelaksanaan Perancangan yang dilakukan.
 - 2) Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Perancangan Proyek yang diterbitkan sebagai acuan Perancangan proyek dan memperbaiki hal-hal yang sudah tidak sesuai dalam pelaksanaan Perancangan yang dilakukan.
 - 3) Mutu sesuai dengan standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Perancangan Proyek yang diterbitkan sebagai acuan Perancangan proyek.
 - 4) sedikit lebih buruk dari standar pemerintah
Mutu Perancangan kurang sesuai dengan Standar Pemerintah, ada hal-hal yang tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Perancangan.

- 5) tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
Mutu Perancangan tidak sesuai dengan Standar Pemerintah, banyak hal yang melenceng dari petunjuk pelaksanaan Perancangan.
- e. Mekanisme Perancangan
- 1) Sangat Mudah
Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan sedikit pihak/satu pihak dari SKPD terkait.
 - 2) Mudah
Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.
 - 3) Sederhana
Membutuhkan birokrasi sesuai dengan waktu yang disediakan, membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.
 - 4) Rumit
Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari lingkup satu Dinas dan masyarakat.
 - 5) Sangat rumit
Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari beberapa Dinas dan masyarakat.
- f. Pihak Terlibat
- 1) Pemerintah (satu Dinas)
Pihak yang terlibat berada pada lingkup satu Dinas/SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lain dibawah Dinas tersebut.
 - 2) Pemerintah (lebih dari satu Dinas)
Membutuhkan keterlibatan beberapa Dinas dalam pelaksanaan tahapan proyek.
 - 3) Pemerintah (Dinas + Kecamatan)
Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan terkait proyek.
 - 4) Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)
Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan dan kantor Desa terkait proyek.
 - 5) Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program
Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan, kantor Desa dan masyarakat terkait proyek.

g. Partisipasi masyarakat

1) Berpartisipasi penuh

Semua warga masyarakat berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

2) Berpartisipasi dengan prosentase sedang

Sebagian besar/lebih dari 50% warga berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

3) Berpartisipasi dengan prosentase rendah

Sebagian kecil/kurang dari 50% warga berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

4) Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah

Hanya ada beberapa masyarakat yang berpartisipasi dikarenakan lahan/bangunan miliknya terkena dampak dari tahapan-tahapan proyek.

5) Tidak berpartisipasi

Masyarakat sama sekali tidak berpartisipasi dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan.

h. Administrasi

1) Sangat mudah

Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan sedikit pihak/satu pihak dari SKPD terkait.

2) Mudah

Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

3) Sederhana

Membutuhkan birokrasi sesuai dengan waktu yang disediakan, membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas

4) Rumit

Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari lingkup satu Dinas dan masyarakat.

5) Sangat rumit

Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari beberapa Dinas dan masyarakat.

i. Keselamatan Kerja

1) Harus menggunakan

Ada atau tidak adanya alokasi dana keselamatan kerja tetap harus menggunakan jaminan keselamatan kerja.

2) Ada alokasi dana dan menggunakan

Ada alokasi dana jaminan keselamatan kerja dan dana tersebut digunakan sesuai dengan alokasinya.

3) Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan

Tidak ada alokasi dana, tetapi pelaksana dan pengelola proyek harus mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang terlibat dalam proyek.

4) Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan

Ada alokasi dana jaminan keselamatan kerja tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan alokasinya.

5) Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana

Tidak ada alokasi dana untuk jaminan keselamatan kerja dan tidak mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang terlibat dalam proyek.

j. Kendala

1) Terjadi konflik antar pemangku kepentingan

2) SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek

3) Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan

4) Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan

5) Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan

3. Tahap Pengadaan / Pelelangan / Procurement

a. Waktu

1) Kurang dari 1 bulan

2) antara 1 s/d 2 bulan

3) antara 2 s/d 3 bulan

4) 3 s/d 4 bulan

5) lebih dari 4 bulan

b. Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan

1) Selesai sebelum batas waktu

2) Selesai sesuai jadwal

3) Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)

4) Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)

5) Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)

- c. Biaya
- 1) ada anggaran khusus pengadaan
Anggaran Pengadaan menggunakan biaya khusus pengadaan pada SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait .
 - 2) Menggunakan biaya umum pengadaan
Anggaran biaya pengadaan tertuang dalam biaya umum yang ada dalam DPA.
 - 3) Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
Biaya pengadaan berasal dari Pemerintah dan Swadaya Masyarakat.
 - 4) Menggunakan biaya dari masyarakat
Biaya pengadaan berasal dari Swadaya Masyarakat.
 - 5) Tidak ada biaya pengadaan
Pengadaan dilaksanakan tanpa biaya pengadaan.
- d. Mutu
- 1) Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengadaan Proyek yang diterbitkan sebagai acuan Pengadaan proyek, memperbaiki serta adanya perbaruan hal-hal yang sudah tidak sesuai dalam pelaksanaan Pengadaan yang dilakukan.
 - 2) Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengadaan Proyek yang diterbitkan sebagai acuan Pengadaan proyek dan memperbaiki hal-hal yang sudah tidak sesuai dalam pelaksanaan Pengadaan yang dilakukan.
 - 3) Mutu sesuai dengan standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengadaan Proyek yang diterbitkan sebagai acuan Pengadaan proyek.
 - 4) sedikit lebih buruk dari standar pemerintah
Mutu Pengadaan kurang sesuai dengan Standar Pemerintah, ada hal-hal yang tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Pengadaan.
 - 5) tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
Mutu Pengadaan tidak sesuai dengan Standar Pemerintah, banyak hal yang melenceng dari petunjuk pelaksanaan Pengadaan.
- e. Mekanisme Pengadaan
- 1) Sangat Mudah
Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan sedikit pihak/satu pihak dari SKPD terkait.

- 2) Mudah
Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.
 - 3) Sederhana
Membutuhkan birokrasi sesuai dengan waktu yang disediakan, membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.
 - 4) Rumit
Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari lingkup satu Dinas dan masyarakat.
 - 5) Sangat rumit
Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari beberapa Dinas dan masyarakat.
- f. Pihak Terlibat
- 1) Pemerintah (satu Dinas)
Pihak yang terlibat berada pada lingkup satu Dinas/SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lain dibawah Dinas tersebut.
 - 2) Pemerintah (lebih dari satu Dinas)
Membutuhkan keterlibatan beberapa Dinas dalam pelaksanaan tahapan proyek.
 - 3) Pemerintah (Dinas + Kecamatan)
Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan terkait proyek.
 - 4) Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)
Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan dan kantor Desa terkait proyek.
 - 5) Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program
Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan, kantor Desa dan masyarakat terkait proyek.
- g. Partisipasi masyarakat
- 1) Berpartisipasi penuh
Semua warga masyarakat berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

- 2) Berpartisipasi dengan prosentase sedang
Sebagian besar/lebih dari 50% warga berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.
 - 3) Berpartisipasi dengan prosentase rendah
Sebagian kecil/kurang dari 50% warga berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.
 - 4) Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah
Hanya ada beberapa masyarakat yang berpartisipasi dikarenakan lahan/bangunan miliknya terkena dampak dari tahapan-tahapan proyek.
 - 5) Tidak berpartisipasi
Masyarakat sama sekali tidak berpartisipasi dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan.
- h. Administrasi
- 1) Sangat mudah
Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan sedikit pihak/satu pihak dari SKPD terkait.
 - 2) Mudah
Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.
 - 3) Sederhana
Membutuhkan birokrasi sesuai dengan waktu yang disediakan, membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas
 - 4) Rumit
Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari lingkup satu Dinas dan masyarakat.
 - 5) Sangat rumit
Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari beberapa Dinas dan masyarakat.
- i. Keselamatan Kerja
- 1) Harus menggunakan
Ada atau tidak adanya alokasi dana keselamatan kerja tetap harus menggunakan jaminan keselamatan kerja.

- 2) Ada alokasi dana dan menggunakan
Ada alokasi dana jaminan keselamatan kerja dan dana tersebut digunakan sesuai dengan alokasi dananya.
- 3) Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan
Tidak ada alokasi dana, tetapi pelaksana dan pengelola proyek harus mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang terlibat dalam proyek.
- 4) Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan
Ada alokasi dana jaminan keselamatan kerja tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan alokasinya.
- 5) Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
Tidak ada alokasi dana untuk jaminan keselamatan kerja dan tidak mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang terlibat dalam proyek.

j. Kendala

- 1) Kurang tersedia penyedia jasa/supplier/tenaga ahli
- 2) Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan
- 3) Gagal lelang
- 4) Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek
- 5) Terjadinya mark up volume pekerjaan pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS

4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi

a. Waktu

- 1) Kurang dari 1 bulan
- 2) antara 1 s/d 2 bulan
- 3) antara 2 s/d 3 bulan
- 4) 3 s/d 4 bulan
- 5) lebih dari 4 bulan

b. Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan

- 1) Selesai sebelum batas waktu
- 2) Selesai sesuai jadwal
- 3) Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)
- 4) Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)
- 5) Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)

c. Biaya

- 1) ada anggaran khusus konstruksi
Biaya konstruksi dianggarkan khusus.
- 2) Menggunakan biaya umum konstruksi
Biaya umum konstruksi digunakan untuk keberlangsungan proyek.
- 3) Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
Menggunakan anggaran biaya konstruksi dari pemerintah dan swadaya masyarakat.
- 4) Menggunakan biaya dari masyarakat
Sepenuhnya biaya konstruksi berasal dari swadaya masyarakat.
- 5) Tidak ada biaya konstruksi
Tidak ada alokasi biaya konstruksi.

d. Mutu

- 1) Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek yang diterbitkan sebagai acuan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi proyek, memperbaiki serta adanya perbaruan hal-hal yang sudah tidak sesuai dalam pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi yang dilakukan.
- 2) Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek yang diterbitkan sebagai acuan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi proyek dan memperbaiki hal-hal yang sudah tidak sesuai dalam pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi yang dilakukan.
- 3) Mutu sesuai dengan standar pemerintah
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek yang diterbitkan sebagai acuan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi proyek.
- 4) sedikit lebih buruk dari standar pemerintah
Mutu Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi kurang sesuai dengan Standar Pemerintah, ada hal-hal yang tidak dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.
- 5) tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
Mutu Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi tidak sesuai dengan Standar Pemerintah, banyak hal yang melenceng dari petunjuk pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.

e. Mekanisme Konstruksi

1) Sangat Mudah

Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan sedikit pihak/satu pihak dari SKPD terkait.

2) Mudah

Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

3) Sederhana

Membutuhkan birokrasi sesuai dengan waktu yang disediakan, membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

4) Rumit

Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari lingkup satu Dinas dan masyarakat.

5) Sangat rumit

Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari beberapa Dinas dan masyarakat.

f. Pihak Terlibat

1) Pemerintah (satu Dinas)

Pihak yang terlibat berada pada lingkup satu Dinas/SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lain dibawah Dinas tersebut.

2) Pemerintah (lebih dari satu Dinas)

Membutuhkan keterlibatan beberapa Dinas dalam pelaksanaan tahapan proyek.

3) Pemerintah (Dinas + Kecamatan)

Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan terkait proyek.

4) Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)

Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan dan kantor Desa terkait proyek.

5) Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program

Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan, kantor Desa dan masyarakat terkait proyek.

g. Partisipasi masyarakat

1) Berpartisipasi penuh

Semua warga masyarakat berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

2) Berpartisipasi dengan prosentase sedang

Sebagian besar/lebih dari 50% warga berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

3) Berpartisipasi dengan prosentase rendah

Sebagian kecil/kurang dari 50% warga berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

4) Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah

Hanya ada beberapa masyarakat yang berpartisipasi dikarenakan lahan/bangunan miliknya terkena dampak dari tahapan-tahapan proyek.

5) Tidak berpartisipasi

Masyarakat sama sekali tidak berpartisipasi dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan.

h. Administrasi

1) Sangat mudah

Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan sedikit pihak/satu pihak dari SKPD terkait.

2) Mudah

Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

3) Sederhana

Membutuhkan birokrasi sesuai dengan waktu yang disediakan, membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

4) Rumit

Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari lingkup satu Dinas dan masyarakat.

5) Sangat rumit

Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari beberapa Dinas dan masyarakat.

i. Pengadaan material

1) Lebih baik dari spesifikasi teknis

Pengadaan material diatas standar yang disyaratkan dalam dokumen Spesifikasi Teknis Bahan dan Material.

2) Sesuai dengan spesifikasi teknis

Pengadaan material sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen Spesifikasi Teknis Bahan dan Material.

3) Tidak sesuai spesifikasi teknis/hampir sama

Pengadaan material sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen Spesifikasi Teknis Bahan dan Material tetapi menggunakan bahan-bahan alternatif yang memiliki mutu sama dengan dimensi/ukuran dibawah standar yang disyaratkan.

4) Tidak sesuai spesifikasi teknis/agak buruk

Pengadaan material tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen Spesifikasi Teknis Bahan dan Material serta menggunakan bahan-bahan dengan dimensi/ukuran dibawah standar yang disyaratkan.

5) Tidak sesuai spesifikasi teknis/buruk

Pengadaan bahan dan material dilakukan dengan mengabaikan syarat-syarat teknis dan menurut kebiasaan.

j. Pengadaan jasa

1) Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi sangat baik

2) Sesuai dengan spesifikasi teknis dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik

3) Sesuai dengan spesifikasi penyedia jasa yang dibutuhkan tapi tidak biasa mengerjakan konstruksi dengan baik

4) Hampir sesuai dengan penyedia jasa yang dibutuhkan/agak buruk tetapi bisa mengerjakan konstruksi dengan baik

5) Tidak sesuai dengan penyedia jasa yang dibutuhkan dan bisa mengerjakan konstruksi dengan baik

k. Pekerjaan tambah kurang

1) Tidak ada

Sama sekali tidak ada pekerjaan tambah kurang dan pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dari dokumen perencanaan.

2) Sedikit

Ada beberapa perubahan pekerjaan (kurang dari 10%) berkenaan dengan lokasi proyek dan teknologi pelaksanaan pekerjaan.

- 3) Sedang
Antara 10% s/d 30% pekerjaan berubah tidak sesuai dengan hasil perencanaan.
- 4) Banyak
Antara 30% s/d 50% pekerjaan berubah tidak sesuai dengan hasil perencanaan.
- 5) Banyak sekali
Lebih dari 50% item pekerjaan atau bahkan mengalami perubahan total dari perencanaan.

i. Keselamatan Kerja

- 1) Harus menggunakan
Ada atau tidak adanya alokasi dana keselamatan kerja tetap harus menggunakan jaminan keselamatan kerja.
- 2) Ada alokasi dana dan menggunakan
Ada alokasi dana jaminan keselamatan kerja dan dana tersebut digunakan sesuai dengan alokasinya.
- 3) Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan
Tidak ada alokasi dana, tetapi pelaksana dan pengelola proyek harus mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang terlibat dalam proyek.
- 4) Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan
Ada alokasi dana jaminan keselamatan kerja tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan alokasinya.
- 5) Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
Tidak ada alokasi dana untuk jaminan keselamatan kerja dan tidak mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang terlibat dalam proyek.

k. Kendala

- 1) Terjadi kesalahan dan kegagalan konstruksi
- 2) Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
- 3) Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis
- 4) Tanggung jawab yang kurang terhadap hasil konstruksi
- 5) Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi

5. Pengoperasian / Penyerahan Hasil Pekerjaan

a. Waktu

- 1) Kurang dari 1 bulan
- 2) antara 1 s/d 2 bulan
- 3) antara 2 s/d 3 bulan

- 4) 3 s/d 4 bulan
 - 5) lebih dari 4 bulan
- b. Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan
- 1) Penyerahan hasil pekerjaan selesai sebelum batas waktu perencanaan selesai
 - 2) Penyerahan hasil pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan
 - 3) Penyerahan hasil pekerjaan melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)
 - 4) Penyerahan hasil pekerjaan melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)
 - 5) Penyerahan hasil pekerjaan melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
- c. Biaya
- 1) ada anggaran khusus penyerahan
Ada anggaran khusus penyerahan yang dilakukan untuk pelaksanaan penyerahan pekerjaan.
 - 2) Menggunakan biaya umum penyerahan
Biaya penyerahan diperhitungkan dalam DPA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tertuang dalam item pekerjaan tersebut dan penyerahan dilakukan oleh tim penyerahan dari SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
 - 3) Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)
Biaya penyerahan berasal dari Pemerintah dan Swadaya Masyarakat.
 - 4) Menggunakan biaya dari masyarakat
Tidak ada biaya penyerahan
Biaya penyerahan berasal dari Swadaya Masyarakat.
 - 5) Tidak ada biaya
Penyerahan dilaksanakan tanpa biaya penyerahan.
- d. Mutu
- 1) Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah
Mutu Pelaksanaan dari hasil pelaksanaan pembangunan yang diserahkan sesuai dengan Standar Pemerintah, semua item pekerjaan telah diselesaikan dan hasil pembangunan sesuai dengan spek teknis, adanya penambahan pekerjaan yang masih berhubungan dengan proyek tetapi tidak ada dalam Rencana Anggaran Pekerjaan dan pelaksana pembangunan proyek mampu dan mau menyisipkan penggunaan teknologi baru dalam penyelesaian proyek.
 - 2) Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah
Mutu Pelaksanaan dari hasil pelaksanaan pembangunan yang diserahkan sesuai dengan Standar Pemerintah, semua item

pekerjaan telah diselesaikan dan hasil pembangunan sesuai dengan spek teknis, adanya penambahan pekerjaan yang masih berhubungan dengan proyek tetapi tidak ada dalam Rencana Anggaran Pekerjaan.

3) Mutu sesuai dengan standar pemerintah

Mutu Pelaksanaan dari hasil pelaksanaan pembangunan yang diserahkan sesuai dengan Standar Pemerintah, semua item pekerjaan telah diselesaikan dan hasil pembangunan sesuai dengan spek teknis.

4) sedikit lebih buruk dari standar pemerintah

Mutu Pelaksanaan dari hasil pelaksanaan pembangunan yang diserahkan kurang sesuai dengan Standar Pemerintah, ada sedikit kekurangan/item pekerjaan yang belum dilaksanakan (bersifat pekerjaan finishing).

5) tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah

Mutu Pelaksanaan dari hasil pelaksanaan pembangunan yang diserahkan tidak sesuai dengan Standar Pemerintah, banyak pekerjaan yang belum diselesaikan (bersifat konstruksi bangunan utama).

e. Mekanisme Penyerahan hasil pekerjaan

1) Sangat Mudah

Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan sedikit pihak/satu pihak dari SKPD terkait.

2) Mudah

Membutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

3) Sederhana

Membutuhkan birokrasi sesuai dengan waktu yang disediakan, membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

4) Rumit

Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari lingkup satu Dinas dan masyarakat.

5) Sangat rumit

Membutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari beberapa Dinas dan masyarakat.

f. Pihak Terlibat

1) Pemerintah (satu Dinas)

Pihak yang terlibat berada pada lingkup satu Dinas/SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pihak-pihak lain dibawah Dinas tersebut.

2) Pemerintah (lebih dari satu Dinas)

Mebutuhkan keterlibatan beberapa Dinas dalam pelaksanaan tahapan proyek.

3) Pemerintah (Dinas + Kecamatan)

Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan terkait proyek.

4) Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)

Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan dan kantor Desa terkait proyek.

5) Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program

Pihak terlibat Dinas terkait (baik satu maupun lebih) beserta pihak-pihak dari kantor kecamatan, kantor Desa dan masyarakat terkait proyek.

g. Partisipasi masyarakat

1) Berpartisipasi penuh

Semua warga masyarakat berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

2) Berpartisipasi dengan prosentase sedang

Sebagian besar/lebih dari 50% warga berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

3) Berpartisipasi dengan prosentase rendah

Sebagian kecil/kurang dari 50% warga berkontribusi penuh dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan baik berupa moril maupun material.

4) Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah

Hanya ada beberapa masyarakat yang berpartisipasi dikarenakan lahan/bangunan miliknya terkena dampak dari tahapan-tahapan proyek.

5) Tidak berpartisipasi

Masyarakat sama sekali tidak berpartisipasi dalam tahapan proyek yang sedang dilakukan.

h. Administrasi

1) Sangat mudah

Mebutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan sedikit pihak/satu pihak dari SKPD terkait.

2) Mudah

Mebutuhkan birokrasi yang pendek, membutuhkan waktu pendek dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

3) Sederhana

Mebutuhkan birokrasi sesuai dengan waktu yang disediakan, membutuhkan waktu sesuai dengan waktu yang disediakan dan melibatkan Beberapa pihak/lebih dari satu dinas.

4) Rumit

Mebutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari lingkup satu Dinas dan masyarakat.

5) Sangat rumit

Mebutuhkan birokrasi yang panjang, membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak dari beberapa Dinas dan masyarakat.

i. Keselamatan Kerja

1) Harus menggunakan

Ada atau tidak adanya alokasi dana keselamatan kerja tetap harus menggunakan jaminan keselamatan kerja.

2) Ada alokasi dana dan menggunakan

Ada alokasi dana jaminan keselamatan kerja dan dana tersebut digunakan sesuai dengan alokasi dananya.

3) Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan

Tidak ada alokasi dana, tetapi pelaksana dan pengelola proyek harus mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang terlibat dalam proyek.

4) Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan

Ada alokasi dana jaminan keselamatan kerja tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan alokasinya.

5) Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana

j. Tidak ada alokasi dana untuk jaminan keselamatan kerja dan tidak mengupayakan jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang terlibat dalam proyek. Kendala = jelas diterjemahkan

1) Terjadi kesalahan dan kegagalan konstruksi

Lampiran 3

- 2) Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis
- 3) Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis
- 4) Tanggung jawab yang kurang terhadap hasil konstruksi
- 5) Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi



No	Aspek	Saluran Air Limbah Terstandar					Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				1	1				1		
				1					1	1	
				1					1		
				1					1		
				1					1		1
				1					1		1
	Jumlah	0	1	3	9	0	0	1	7	3	2
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program
6	Pihak Terlibat				1	1				1	1
		1									1
			1								1
			1								1
						1					1
					1						1
			1								1
						1					1
						1					1
						1					1
	Jumlah	1	4	0	3	5	0	0	0	1	12
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi
7	Partisipasi masyarakat		1			1		1	1		
				1				1			
			1					1			
			1					1			
					1						
					1						
					1						
			1					1			
			1					1			
					1						
					1						
					1						
					1						
	Jumlah	2	6	2	2	1	7	5	1	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
8	Administrasi			1					1		
					1				1		1
					1				1		
					1				1		
					1				1		
				1					1		
				1					1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
	Jumlah	0	0	4	9	0	0	0	8	4	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
9	Keselamatan Kerja		1					1			1
			1					1			1
								1			1
								1			1
								1			1
								1			1
								1			1
								1			1
								1			1
								1			1
								1			1
	Jumlah	2	2	4	0	5	0	4	3	0	6

No	Aspek	Saluran Air Limbah Terstandar					Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				1		1					1
				1		1					1
	Jumlah	0	2	2	0	9	10	2	0	0	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
8	Administrasi			1		1			1		1
				1		1			1		1
				1		1			1		1
				1		1			1		1
				1		1			1		1
				1		1			1		1
				1		1			1		1
				1		1			1		1
				1		1			1		1
				1		1			1		1
	Jumlah	0	1	5	7	0	0	1	10	2	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
9	Keselamatan Kerja	1				1					1
						1					1
						1					1
						1					1
						1					1
						1					1
						1					1
						1					1
						1					1
						1					1
						1					1
						1					1
	Jumlah	1	0	2	0	10	1	0	0	0	12
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang tersedia penyedia jasa/supplier/tenaga ahli	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan	Gagal lelang	Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek	Terjadinya mark up volume pekerjaan pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS	Kurang tersedia penyedia jasa/supplier/tenaga ahli	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan	Gagal lelang	Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek	Terjadinya mark up volume pekerjaan pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS
10	Kendala				1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
	Jumlah	1	2	6	4	0	5	0	0	8	0

4. Rekap Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

No	Aspek	Saluran Air Limbah Terstandar					Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan	Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan
1	Waktu		1		1				1		
			1		1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
	Jumlah	0	1	0	11	1	0	0	5	6	2
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

No	Aspek	Saluran Air Limbah Terstandar					Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat				
		Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)	Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
2	Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan		1			1			1		1
				1				1			
				1				1			
				1				1			
		1						1			
			1					1			
				1			1				
				1				1			
					1					1	
					1					1	
	Jumlah	1	2	6	3	1	0	1	7	2	3
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		ada anggaran khusus konstruksi	Menggunakan biaya umum konstruksi	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya konstruksi	ada anggaran khusus konstruksi	Menggunakan biaya umum konstruksi	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya konstruksi
3	Biaya			1					1		1
		1							1		
		1							1		
			1						1		
			1						1		
		1							1		
		1							1		
		1							1		
		1					1				1
		1							1		
	Jumlah	9	3	1	0	0	1	0	10	2	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah	Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
4	Mutu			1					1		
				1					1		
				1					1		
						1			1		
						1			1		
						1			1		
						1			1		
						1			1		
						1			1		
						1			1		
						1			1		
	Jumlah	0	0	9	1	3	0	1	12	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
5	Mekanisme Konstruksi			1					1		1
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
	Jumlah	0	0	3	10	0	0	0	9	4	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program
6	Pihak Terlibat				1	1				1	1
					1					1	
						1			1		
						1			1		
						1			1		
	Jumlah					1			1		1

No	Aspek	Saluran Air Limbah Terstandar					Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Jumlah	1	6	5	1	0	1	5	6	2	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Tidak ada	Sedikit	Sedang	Banyak	Banyak sekali	Tidak ada	Sedikit	Sedang	Banyak	Banyak sekali
11	Pekerjaan Tambah Kurang			1	1			1	1		
			1				1				
					1			1			
					1			1			
			1					1			
				1				1			
				1				1	1		
		1					1				
		1						1			
				1				1			
				1				1			
	Jumlah	0	4	5	4	0	2	9	2	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
12	Keselamatan Kerja				1					1	
		1					1				
		1					1				1
						1					1
			1						1		
		1					1				
		1					1				1
		1					1				1
				1							1
				1							1
	Jumlah	6	1	2	1	3	5	0	1	1	6
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Terjadi kesalahan dan kegagalan konstruksi	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis	Tanggung jawab yang kurang terhadap hasil konstruksi	Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi	Terjadi kesalahan dan kegagalan konstruksi	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis	Tanggung jawab yang kurang terhadap hasil konstruksi	Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi
13	Kendala				1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
			1						1		
				1							1
				1							1
				1							1
				1				1			
				1							1
				1							1
	Jumlah	0	1	11	1	0	0	2	5	1	6

5. Pengoperasian / Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Pembangunan Saluran Air Limbah

No	Aspek	Saluran Air Limbah Terstandar					Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan	Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan
1	Waktu	1					1				
		1	1				1	1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	7	5	1	0	0	7	4	2	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

No	Aspek	Saluran Air Limbah Terstandar					Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat				
		Penyerahan hasil pekerjaan selesai sebelum batas waktu perencanaan selesai	Penyerahan hasil pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan	Penyerahan hasil pekerjaan melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Penyerahan hasil pekerjaan melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Penyerahan hasil pekerjaan melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)	Penyerahan hasil pekerjaan selesai sebelum batas waktu perencanaan selesai	Penyerahan hasil pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan	Penyerahan hasil pekerjaan melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Penyerahan hasil pekerjaan melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Penyerahan hasil pekerjaan melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
2	Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan	1	1				1	1			
		1		1			1		1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
			1						1		
			1						1		
						1				1	
						1				1	
	Jumlah	1	4	6	2	0	1	4	6	0	2
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Menggunakan biaya umum	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya	ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Menggunakan biaya umum	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya
3	Biaya	1					1				
		1				1	1			1	
			1							1	
			1							1	
			1						1		
						1				1	
		1					1				
		1					1				
						1				1	
						1				1	
	Jumlah	5	4	0	0	4	4	0	0	4	5
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah	Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
4	Mutu			1					1		
			1					1			
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
					1				1		
	Jumlah	0	1	8	4	0	0	1	12	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
5	Mekanisme Penyerahan Hasil Pekerjaan		1					1			
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
					1					1	
	Jumlah	0	1	7	5	0	0	1	11	1	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program

No	Aspek	Saluran Air Limbah Terstandar					Saluran Air Limbah Berbasis Masyarakat				
		1	1				1	1			
			1					1			
		1						1			
		1						1			
	Jumlah	6	4	1	2	0	1	11	0	0	1



No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			1	1					1		1
			1	1				1		1	
			1	1				1		1	
			1					1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	0	4	6	1	0	1	3	6	2	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program
6	Pihak Terlibat	1			1				1		1
		1								1	1
		1									1
		1									1
				1							1
		1								1	1
						1					1
						1					1
											1
	Jumlah	6	0	1	2	2	0	0	1	2	10
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi
7	Partisipasi masyarakat		1					1			
			1				1				
			1				1				
			1				1				
			1		1		1				
			1				1	1			
			1				1				
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
	Jumlah	0	7	2	1	1	7	6	0	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
8	Administrasi			1				1			
				1						1	
				1							
			1								
			1								
			1								
				1							
				1							
				1							
				1							
	Jumlah	0	5	2	4	0	2	7	3	1	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
9	Keselamatan Kerja	1				1	1				1
			1						1		1
						1					1
						1					1
					1						1
			1							1	1
				1							1
				1							1
				1							1
				1							1
	Jumlah	1	2	2	1	5	1	2	2	2	6

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan	Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan	Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan	Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan	Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan
10	Kendala	1	1				1	1			
		1		1				1			
				1							1
		1					1				
		1					1				
		1	1				1				
		1					1				
		1					1				
		1					1				
		1					1				
		1					1				
	Jumlah	7	2	2	0	0	2	10	0	0	1

2. Rekap Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Perancangan Proyek Pengaspalan Jalan

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan	Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan
1	Waktu		1	1				1	1		
				1				1	1		
			1	1				1	1		
				1				1	1		
			1	1				1	1		
			1	1				1	1		
			1	1				1	1		
			1	1				1	1		
			1	1				1	1		
			1	1				1	1		
			1	1				1	1		
	Jumlah	0	4	9	0	0	2	2	7	2	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)	Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
2	Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan	1	1				1	1			
		1	1				1	1			
		1	1				1	1			
		1	1				1	1			
		1	1				1	1			
		1	1				1	1			
		1	1				1	1			
		1	1				1	1			
		1	1				1	1			
		1	1				1	1			
	Jumlah	3	9	1	0	0	3	5	4	1	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		ada anggaran khusus perancangan	Menggunakan biaya umum perancangan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya perancangan	ada anggaran khusus perancangan	Menggunakan biaya umum perancangan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya perancangan
3	Biaya	1					1				
		1	1							1	
		1	1					1	1		
		1	1					1	1		
		1	1					1	1		
		1	1					1	1		
		1	1					1	1		
		1	1					1	1		
		1	1					1	1		
	Jumlah	9	3	1	0	0	4	3	3	1	2
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah	Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
4	Mutu			1					1		

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
		0	2	4	7	0	1	2	8	2	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
9	Keselamatan Kerja	1				1	1				1
						1					1
						1					1
						1		1			
			1					1			
						1		1			
						1					1
						1					1
						1	1				
	Jumlah	1	1	0	0	11	4	1	2	0	6
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan	Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan	Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan	Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan	Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan
10	Kendala	1					1				1
		1				1		1			
				1						1	
				1			1		1		
		1					1		1		
		1					1		1		
		1					1		1		
		1					1		1		
	Jumlah	9	0	2	1	1	3	8	0	1	1

3. Rekap Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Pengadaan / Pelelangan / Procurement Proyek Proyek Pengaspalan Jalan

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan	Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan
1	Waktu	1	1				1	1			
		1					1				
		1					1				
		1					1				
		1					1				
		1					1				
		1					1				
		1					1				
		1					1				
	Jumlah	1	10	2	0	0	4	5	3	1	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)	Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
2	Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan			1					1		1
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	1	8	3	0	1	1	6	3	2	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		ada anggaran khusus pengadaan	Menggunakan biaya umum pengadaan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya pengadaan	ada anggaran khusus pengadaan	Menggunakan biaya umum pengadaan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya pengadaan

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		1	1				1				
		1					1				
		1					1				
	Jumlah	1	3	2	1	4	3	5	2	1	2
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
8	Administrasi			1					1		
			1		1			1		1	
			1		1		1		1		
			1		1			1	1		
			1	1				1	1		
			1	1				1	1		
			1					1	1		
			1					1	1		
	Jumlah	0	5	3	3	0	1	2	9	1	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
9	Keselamatan Kerja					1	1				1
		1	1								1
		1				1		1			1
			1				1			1	
			1	1						1	
			1			1					1
			1			1					1
			1			1		1			1
	Jumlah	2	2	2	0	5	2	1	2	2	6
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang tersedia penyedia jasa/supplier/ enaga ahli	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan	Gagal lelang	Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek	Terjadinya mark up volume pekerjaan pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS	Kurang tersedia penyedia jasa/supplier/ enaga ahli	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan	Gagal lelang	Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek	Terjadinya mark up volume pekerjaan pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS
10	Kendala				1					1	
		1			1					1	
			1				1				
			1	1				1			
			1					1			
			1					1			
		1						1			
		1						1			
			1				1				
	Jumlah	3	2	4	2	0	2	6	3	2	0

4. Rekap Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek Pengaspalan Jalan

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan	Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan
1	Waktu			1	1				1		
				1					1		
				1	1			1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1	1				1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	0	4	5	2	0	1	1	11	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			1					1			
								1			
								1			
	Jumlah	4	7	0	0	0	3	8	2	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Tidak ada	Sedikit	Sedang	Banyak	Banyak sekali	Tidak ada	Sedikit	Sedang	Banyak	Banyak sekali
11	Pekerjaan Tambah Kurang			1					1		
			1					1			
				1						1	
							1				
			1					1			
			1						1		
				1						1	
			1							1	
									1		
			1								1
			1								1
	Jumlah	1	6	4	0	0	1	2	7	3	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
12	Keselamatan Kerja	1					1				
		1	1				1	1			
		1									1
		1							1		
		1	1						1		
		1						1			
		1									1
		1									1
		1						1			
	Jumlah	8	3	0	0	0	3	3	2	0	5
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Terjadi kesalahan dan kegagalan konstruksi	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis	Tanggung jawab yang kurang terhadap hasil konstruksi	Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi	Terjadi kesalahan dan kegagalan konstruksi	Material yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Kualitas pelaksanaan pekerjaan kurang bagus/kurang sesuai dengan spesifikasi teknis	Tanggung jawab yang kurang terhadap hasil konstruksi	Pengalaman yang kurang dalam pelaksanaan konstruksi
13	Kendala		1					1			
				1					1		
				1					1		
			1					1			
				1					1		
				1					1		
			1					1			
				1					1		
			1						1		
				1					1		
			1						1		
				1					1		
	Jumlah	0	6	5	0	0	0	6	5	0	2

5. Pengoperasian / Penyerahan Hasil Pekerjaan Proyek Proyek Pengaspalan Jalan

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan	Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan
1	Waktu	1					1				
		1	1				1	1			
		1					1				
		1					1				
			1					1			
				1					1		
					1					1	
						1					1
											1
											1
	Jumlah	5	4	2	0	0	4	5	4	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
		pengadaan/p elelangan selesai sebelum batas waktu perencanaan selesai	pengadaan/p elelangan selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan	pengadaan/p elelangan melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	pengadaan/p elelangan melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	pengadaan/p elelangan melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)	pengadaan/p elelangan selesai sebelum batas waktu perencanaan selesai	pengadaan/p elelangan selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan	pengadaan/p elelangan melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	pengadaan/p elelangan melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	pengadaan/p elelangan melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
2	Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan	1		1				1			
			1				1				
			1				1				
			1				1				
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	1	7	3	0	0	2	6	5	0	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	
		ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Menggunak an biaya umum perencanaan	Menggunak an biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunak an biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya perencanaan	ada anggaran khusus penyerahan hasil pekerjaan	Menggunak an biaya umum perencanaan	Menggunak an biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunak an biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya perencanaan
3	Biaya		1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	6	3	2	0	0	3	3	2	5	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	
		Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah	Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
4	Mutu			1					1		
				1					1		
				1	1				1		
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
	Jumlah	0	1	9	1	0	1	3	5	4	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
5	Mekanisme Penyerahan Hasil Pekerjaan			1					1		
				1	1				1		
				1				1		1	
				1				1			
				1	1			1		1	
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
	Jumlah	0	7	1	3	0	1	3	8	1	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
6	Pihak Terlibat				1						1	
					1						1	
			1									1
			1									1
			1									1
				1								1
				1								1
					1							1
						1						1
							1					1
Jumlah		5	4	0	2	0	0	0	0	3	10	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Berpartisipasi pendh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi pendh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi	
7	Partisipasi masyarakat	1					1					
			1					1				
						1						
						1						
						1						
			1					1				
				1					1			
				1						1		
						1		1				
						1		1				
Jumlah		2	3	0	2	4	7	3	1	2	0	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	
8	Administrasi			1						1		
				1		1					1	
				1		1						
				1		1						
				1		1						
			1					1				
				1					1			
			1			1						
			1							1		
										1		
Jumlah		0	3	5	3	0	0	4	7	2	0	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	
12	Keselamatan Kerja	1					1	1				
							1	1				
			1								1	
							1				1	
					1						1	
							1		1			
							1				1	
							1				1	
							1				1	
							1				1	
Jumlah		1	1	1	0	8	5	1	0	1	6	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi sudah selesai	Pekerjaan fisik selesai dan laporan administrasi sudah selesai	Pekerjaan fisik selesai dan laporan administrasi sudah selesai dan hasilnya memuaskan	Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi sudah selesai	Pekerjaan fisik selesai dan laporan administrasi sudah selesai dan hasilnya memuaskan		
13	Kendala		1						1			
			1						1			
			1							1		
			1							1		
			1							1		
					1						1	
									1			
										1		
			1								1	
				1								

No	Aspek	Jalan Aspal Terstandar					Jalan Aspal Berbasis Masyarakat				
			1							1	
			1							1	
			1							1	
								1			
								1			
	Jumlah	1	9	1	0	0	0	6	3	4	0



Proyek Rumah Tinggal

1. Rekap Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Perencanaan Proyek pembangunan Rumah Tinggal

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan	Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan
1	Waktu		1						1		
			1						1		
			1							1	
			1						1		
										1	
								1			1
				1				1			
				1			1				
				1					1		
				1							1
	Jumlah	0	5	5	0	0	2	1	6	2	2
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)	Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
2	Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan		1						1		
			1						1		
			1								1
		1		1			1			1	
								1			
		1						1			
			1		1			1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	2	6	1	1	0	2	4	5	1	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		ada anggaran khusus perencanaan	Menggunakan biaya umum perencanaan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya perencanaan	ada anggaran khusus perencanaan	Menggunakan biaya umum perencanaan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya perencanaan
3	Biaya	1					1			1	
		1					1			1	
		1					1				1
		1					1				1
							1				
				1				1			
					1					1	
		1								1	
	Jumlah	7	0	1	1	0	5	1	0	3	4
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah	Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
4	Mutu			1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
			1						1		
		1					1				
				1				1			
	Jumlah	1	1	7	1	0	1	3	9	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
5	Mekanisme Perencanaan		1					1			
			1					1			
				1							1
				1							1

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
								1				
									1			
						1				1		
						1				1		
						1				1		
						1				1		
						1				1		
	Jumlah	0	3	6	1	0	0	4	7	1	1	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	
6	Pihak Terlibat	1										
		1	1									1
					1							1
						1						1
							1					1
												1
												1
												1
		1	1									1
		1										1
		1						1				
		1										1
	Jumlah	7	2	0	1	2	0	2	0	2	9	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi	
7	Partisipasi masyarakat											
	Jumlah	3	5	1	0	1	9	3	1	0	0	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	
8	Administrasi											
	Jumlah	0	7	3	0	0	0	6	5	1	1	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	
9	Keselamatan Kerja											
	Jumlah	1		1		1	1	1	1		1	

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Jumlah	4	0	1	0	5	4	1	3	0	5
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan	Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan	Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan	Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan	Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan
10	Kendala		1		1					1	
						1					1
					1					1	
								1			
								1			
				1				1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	0	5	1	3	1	2	6	0	4	1

2. Rekap Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Perancangan Proyek Pembangunan Rumah Tinggal

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan	Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan
1	Waktu			1				1			
			1						1		
			1					1			
									1		1
								1			
			1								
				1				1			
				1					1		
				1					1		
				1					1		
	Jumlah	0	4	6	0	0	2	4	6	0	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)	Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
2	Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan		1			1			1		
			1						1		
				1						1	
								1			
								1			
								1			
					1				1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
	Jumlah	0	2	5	2	0	0	6	5	1	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		ada anggaran khusus perancangan	Menggunakan biaya umum perancangan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya perancangan	ada anggaran khusus perancangan	Menggunakan biaya umum perancangan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya perancangan
3	Biaya		1						1		
		1							1		
			1						1		
			1						1		
									1		1
									1		
									1		
					1					1	
					1					1	
					1					1	
	Jumlah	6	5	0	2	0	3	3	4	2	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah	Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
4	Mutu			1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
				1				1			
		1		1			1	1			
				1			1	1			
				1			1	1			
				1			1	1			
				1			1	1			
				1			1	1			
				1			1	1			
	Jumlah	1	0	12	0	0	2	3	8	0	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
5	Mekanisme Perancangan			1					1		
			1					1			
				1	1					1	
				1				1			
			1					1			
			1					1			
			1					1		1	
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	0	8	4	1	0	0	4	7	2	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program
6	Pihak Terlibat	1					1				
		1								1	
					1						
						1					
						1					
						1					
						1					
						1					
						1					
						1					
			1						1		
			1						1		
			1						1		
			1						1		
	Jumlah	8	2	0	1	2	1	0	0	4	8
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi
7	Partisipasi masyarakat			1					1		
			1						1		
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
							1				
	Jumlah	4	1	1	0	7	8	5	0	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
8	Administrasi	1							1		
				1					1		
			1		1				1		
			1						1		
			1						1		

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		1							1		
		1							1	1	
				1					1		
				1					1		
		1							1		
		1							1		
	Jumlah	1	8	3	1	0	0	6	5	2	0

No	Aspek	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
9	Keselamatan Kerja					1		1			
		1				1	1				
						1					1
						1					1
						1					1
						1		1			1
		1				1	1				
		1				1		1			
						1			1		
						1			1		
	Jumlah	3	0	0	0	10	2	2	4	0	5

No	Aspek	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan	Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan	Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan	Terjadi konflik antar pemangku kepentingan	SDM yang kurang mengetahui pentingnya pelaksanaan proyek	Tim perencana tidak ahli dalam perencanaan	Tim perencana tidak berpengalaman dalam perencanaan	Tim perencana kurang ahli dalam perencanaan
10	Kendala		1	1				1			
						1				1	1
					1					1	
						1					
						1					
						1					
						1					
						1					
						1					
	Jumlah	0	9	1	2	1	1	8	1	2	1

3. Rekap Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Pengadaan / Pelelangan / Procurement Proyek pembangunan Rumah Tinggal

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan	Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan
1	Waktu				1					1	
		1								1	
			1						1		
			1						1		
			1						1		
			1						1		
			1						1		
			1						1		
			1						1		
			1						1		
	Jumlah	4	7	0	1	0	2	5	4	2	0

No	Aspek	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)	Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	1	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
2	Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan			1					1		
			1						1		
			1						1		1
			1						1		
		1					1				
			1						1		
			1						1		
			1						1		
			1						1		
			1						1		
	Jumlah		1				1		1		

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	10	1	1	0	3	7	2	0	1
	Jumlah	1	10	1	1	0	3	7	2	0	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		ada anggaran khusus pengadaan	Menggunakan biaya umum pengadaan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya pengadaan	ada anggaran khusus pengadaan	Menggunakan biaya umum pengadaan	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya pengadaan
3	Biaya		1						1	1	
		1							1		1
		1									1
		1									1
		1						1			1
		1							1		1
		1									1
		1									1
		1	1				1	1			
		1									1
		1									1
	Jumlah	10	3	0	0	0	1	1	2	1	8
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah	Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
4	Mutu			1				1			
				1					1		
				1		1			1		1
				1			1		1		
				1					1		
		1		1			1		1		
			1	1			1	1			
			1	1				1			
		1		1			1		1		
			1	1			1	1			
	Jumlah	1	1	10	0	1	3	2	7	0	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
5	Mekanisme Pengadaan	1		1				1	1		
			1		1			1		1	
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1	1				1			
			1	1				1			
			1	1				1			
			1	1				1			
	Jumlah	1	8	3	1	0	0	5	7	1	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program
6	Pihak Terlibat				1					1	
		1			1					1	1
					1	1				1	1
						1					1
		1								1	1
		1								1	1
		1								1	1
			1							1	
		1			1					1	1
		1								1	1
	Jumlah	7	1	0	3	2	0	0	0	5	8
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
7	Partisipasi masyarakat		1				1				
			1				1		1		
		1					1				
		1					1				
						1	1				
						1		1			
						1	1				
		1							1		
			1						1		
						1		1			
						1		1			
						1	1				
	Jumlah	3	3	0	0	7	6	4	3	0	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
8	Administrasi			1					1		
				1				1			
			1		1					1	
			1					1			
								1			
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
	Jumlah	0	2	9	1	0	0	5	7	1	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
9	Keselamatan Kerja			1					1		
						1			1		
		1					1				1
			1					1			
						1					1
						1					1
		1									1
			1					1			
						1		1			
	Jumlah	2	2	1	0	7	1	4	3	0	5
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang tersedia jasa/supplier/tenaga ahli	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang ditelangan	Gagal lelang	Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek	Terjadinya mark up volume pekerjaan pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS	Kurang tersedia jasa/supplier/tenaga ahli	Penyedia jasa kurang berminat terhadap pekerjaan yang ditelangan	Gagal lelang	Spesifikasi Badan Usaha dan tenaga ahli tidak sesuai dengan kebutuhan pada proyek	Terjadinya mark up volume pekerjaan pada Harga Perkiraan Sendiri/HPS
10	Kendala			1					1		
			1						1		
				1	1					1	
				1					1		
			1						1		
							1				
								1			
			1						1		
								1			
			1						1		
								1			
	Jumlah	1	8	3	1	0	2	7	3	1	0

4. Rekap Hasil Penilaian Responden Pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Proyek pembangunan Rumah Tinggal

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan	Kurang dari 1 bulan	antara 1 s/d 2 bulan	antara 2 s/d 3 bulan	antara 3 s/d 4 bulan	lebih dari 4 bulan
1	Waktu			1					1		
			1	1					1		
			1						1		
			1						1		
					1					1	

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				1					1		1
				1					1		
		1			1		1				
				1					1		
				1						1	
	Jumlah	1	3	8	1	0	2	0	8	2	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)	Selesai sebelum batas waktu	Selesai sesuai jadwal	Melebihi batas waktu (1 s/d 2 minggu)	Melebihi batas waktu (3 s/d 4 minggu)	Melebihi batas waktu (lebih dari 1 bulan)
2	Ketepatan Penyelesaian Pekerjaan		1		1			1			
			1					1			1
		1					1				
		1					1				
			1					1			1
			1					1			
			1		1			1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	2	9	0	2	0	2	4	5	0	2
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		ada anggaran khusus konstruksi	Menggunakan biaya umum konstruksi	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya konstruksi	ada anggaran khusus konstruksi	Menggunakan biaya umum konstruksi	Menggunakan biaya (Pemerintah dan Masyarakat)	Menggunakan biaya dari masyarakat	Tidak ada biaya konstruksi
3	Biaya			1				1			
		1						1			
		1	1					1			
			1					1			
		1					1				
		1					1				
		1					1		1		
		1					1				1
		1					1		1		
	Jumlah	10	2	1	0	0	5	4	3	0	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah	Mutu jauh lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sedikit lebih baik dari standar pemerintah	Mutu sesuai dengan standar pemerintah	Mutu sedikit lebih buruk dari standar pemerintah	tidak sesuai dengan mutu yang distandarkan pemerintah
4	Mutu			1						1	
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
	Jumlah	1	1	11	0	0	1	2	9	1	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat Mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
5	Mekanisme Konstruksi			1	1			1			
				1	1			1		1	
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	0	2	9	2	0	0	5	7	1	0

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program
6	Pihak Terlibat	1	1						1		
					1				1		
						1				1	
		1								1	
		1								1	
		1								1	
			1						1		
		1		1					1		
		1								1	
	Jumlah	7	2	1	1	2	0	0	1	3	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	
		Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi
7	Partisipasi masyarakat			1			1	1			
			1			1	1	1			
						1	1	1			
						1	1	1			
						1	1	1			
			1			1	1	1			
						1	1	1			
						1	1	1			
						1	1	1			
	Jumlah	0	2	1	0	10	8	3	1	0	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	
		Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
8	Administrasi				1					1	
				1				1			
			1		1			1		1	
			1					1			
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
	Jumlah	0	2	9	2	0	0	4	6	3	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	
		Lebih baik dari spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Tidak sesuai spesifikasi teknis/hampir sama	Tidak sesuai spesifikasi teknis/agak buruk	Tidak sesuai spesifikasi teknis/buruk	Lebih baik dari spesifikasi teknis	Sesuai dengan spesifikasi teknis	Tidak sesuai spesifikasi teknis/hampir sama	Tidak sesuai spesifikasi teknis/agak buruk	Tidak sesuai spesifikasi teknis/buruk
9	Pengadaan Material		1	1				1	1		
			1					1			
				1					1		
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1				1				
			1					1			
			1					1			
			1					1			
	Jumlah	0	11	2	0	0	1	9	3	0	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Mekanisme Penyerahan Hasil Pekerjaan			1					1		
			1					1			
					1					1	
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
			1					1			
					1					1	
					1					1	
					1					1	
	Jumlah	0	9	3	1	0	0	8	4	1	0
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program	Pemerintah (satu Dinas)	Pemerintah (lebih dari satu Dinas)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa)	Pemerintah (Dinas + Kecamatan + Desa) dan masyarakat penerima program
6	Pihak Terlibat			1					1		
			1							1	
			1					1			
			1								1
			1						1		
			1								1
			1								1
					1						1
					1						1
					1						1
			Jumlah	9	0	2	2	0	2	1	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi	Berpartisipasi penuh	Berpartisipasi dengan prosentase sedang	Berpartisipasi dengan prosentase rendah	Berpartisipasi dengan prosentase sangat rendah	Tidak berpartisipasi
7	Partisipasi masyarakat				1				1		
				1			1		1		
						1					1
						1				1	
						1				1	
						1				1	
						1				1	
				1							1
						1					1
						1					1
			Jumlah	0	2	1	4	6	8	1	1
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit	Sangat mudah	Mudah	Sederhana	Rumit	Sangat rumit
8	Administrasi			1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
				1					1		
			Jumlah	0	9	3	1	0	1	7	4
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana	Harus menggunakan	Ada alokasi dana dan menggunakan	Tidak ada alokasi dana tapi menggunakan	Ada alokasi dana tapi tidak menggunakan	Tidak menggunakan karena tidak ada alokasi dana
9	Keselamatan Kerja				1				1		
			1								1
						1				1	
						1				1	
						1				1	
						1				1	

No	Aspek	Rumah Tinggal Terstandar					Rumah Tinggal Berbasis Masyarakat				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
						1					1
		1									1
						1					1
						1		1			
						1					1
	Jumlah	2	0	0	1	10	2	1	3	0	7
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi sudah selesai	Pekerjaan fisik selesai dan laporan administrasi sudah selesai	Pekerjaan fisik selesai dan laporan administrasi sudah selesai dan hasilnya memuaskan	Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik sudah selesai dan laporan administrasi belum selesai	Pekerjaan fisik belum selesai dan laporan administrasi sudah selesai	Pekerjaan fisik selesai dan laporan administrasi sudah selesai	Pekerjaan fisik selesai dan laporan administrasi sudah selesai dan hasilnya memuaskan
10	Kendala		1							1	
			1								
			1								
			1								
			1								
			1							1	
			1								
			1								
			1								
			1				1				
			1								
			1								
			1								
	Jumlah	0	13	0	0	0	1	10	0	2	0

